

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh
Sukirno
18931005

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

Disertasi
Program Doktor Ilmu Ekonomi



Oleh
Sukirno
18931005

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

Disertasi untuk memperoleh derajat Doktor
dalam Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Oleh
Sukirno
18931005

**PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026**

BERITA ACARA UJIAN DISERTASI

Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan Ujian Tertutup Disertasi dan Review Artikel, yang disusun oleh:

Nama Mahasiswa : **Sukirno**

Nomor Mahasiswa: 18931005

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Dengan Judul:

**PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAHAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka disertasi tersebut dinyatakan **LULUS**

Promotor,



(Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.)

Ko Promotor I,



(Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.)

Penguji I,



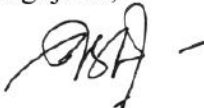
(Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS)., Ph.D.)

Penguji II,



(Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.)

Penguji III,



(Dr. Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E., M.Si.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor



(Prof. Jaka Siyana, SE., M.Si., Ph.D.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya :

Nama : Sukirno, S.E., M.Si.

NIM : 18931005

Program Studi : Doktor Ilmu Ekonomi

Menyatakan bahwa :

1. Draf disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik doktor, baik di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Draf disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali bimbingan dan arahan tim promotor;
3. Dalam draf disertasi ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disertasi ini dengan disebutkan nama – nama pengarang dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini sehingga dapat menimbulkan kerugian atau pelanggaran, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik yang mungkin berupa pencabutan gelar yang diperoleh ataupun sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Yogyakarta,2026

Yang membuat pernyataan


(Sukirno)

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 29 Juli 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Promotor

(Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.)

Ko Promotor

(Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.)



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Puradiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55383
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fevili@iui.ac.id
W. iui.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING REVISI UJIAN TERTUTUP

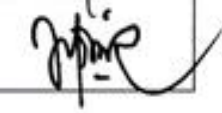
JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten
dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Disusun oleh: **SUKIRNO**

No. MHS.: **18931005**

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A.	Promotor	27/7 2026	
2.	Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.	Ko Promotor I	27/7 2026	

Catatan:

⇒ 5 (lima) lembar revisi harap ditunjukkan ke Tim Penguji

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI REVISI UJIAN TERTUTUP

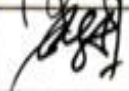
JUDUL DISERTASI

**Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah**

Disusun oleh: SUKIRNO

No. MHS.: 18931005

TELAH DISETUJUI SESUAI DENGAN LEMBAR REVISI

NO.	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.	Ketua Tim Penguji	25/7/2026	
2.	Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com(IS), Ph.D.	Penguji I	27/7/2026	
3.	Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D	Penguji II	27/7/2026	
4.	Dr. Dra. Tri Siwi Nugrahani, S.E., M.Si.	Penguji III	27/7/2026	

Catatan:

⇒ 5 (lima) lembar revisi harap ditunjukkan ke Tim Penguji

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilalamiin, dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena Rahman dan RahimNya disertasi yang berjudul “Pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah” dapat selesai. Disertasi ini dapat diselesaikan berkat dorongan dan bantuan banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan dengan segenap kerendahan hati kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, M.B.A., selaku Promotor dan Bapak Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ko-promotor atas kesabaran dan ketulusan membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan disertasi ini.
2. Pimpinan Program Magister dan Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan, dorongan moril maupun materiil.
3. Bapak dan Ibu segenap jajaran/staf Program Magister dan Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bantuan selama proses studi.
4. Istriku tersayang Menuk Rahmawati, S.Pd., M.Pd. yang telah sabar mendorong dan memotivasi untuk penyelesaian disertasi ini dan dengan sabar selalu mendo'akan setiap waktu serta anakku tersayang Reksadhana Hakinda Arkatama sebagai penyemangat dan inspirasi untuk penyelesaian disertasi ini.
5. Keluarga tercinta saya, Ibu Tarmini, Bapak Turoyo (alm), dan Ibu Hj. Siti Rahayu (alm), serta Kakak dan Adik saya yang selalu mencurahkan do'a agar selalu diberikan kelancaran dari awal masuk kuliah hingga lulus mendapatkan gelar doktor.
6. Segenap pimpinan dan teman-teman di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Adias Kabupaten Pemalang yang selalu memberikan dukungan untuk selesainya program doctoral ini.

7. Teman-teman satu angkatan program doktor, terutama Pak Ahmad Guspul sebagai *pathner sharing* dalam penulisan disertasi.
8. Mas Fahmi Affrizal mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Adias Kabupaten Pemalang dan mas Mukhammad Furqon mahasiswa Universitas Pekalongan yang telah membantu dalam pengumpulan data.

Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan berlipat atas semua bantuan dan dorongan Bapak dan Ibu semuanya. Harapan penulis semoga disertasi ini memberikan banyak manfaat. Akhir kata, penulisan disertasi ini masih perlu penyempurnaan – penyempurnaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta,2026

Sukirno

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Prasyarat Gelar Doktor	iii
Halaman Berita Acara Ujian Tertutup Disertasi	iv
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	v
Halaman Pengesahan	vi
Halaman Pengesahan Pembimbing Revisi Ujian Tertutup	vii
Halaman Pengesahan Penguji Revisi Ujian Tertutup	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi
Daftar Grafik	xvii
Abstrak	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	21
1.3. Tujuan Penelitian	22
1.4. Kontribusi Penelitian	25
1.4.1. Kontribusi Teoritis	25
1.4.2. Kontribusi Praktis	27
1.5. Sistematika Penulisan	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
2.1. Teori Institusional	30
2.2. Kinerja (<i>Performance</i>)	32
2.3. Kinerja Pemerintah Daerah	34
2.4. Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah	38
2.5. Penelitian Terdahulu	40
BAB III PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PENELITIAN	45
3.1. Pengembangan Hipotesis Penelitian	45
3.1.1. Pengaruh DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	45
3.1.2. Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	48
3.1.3. Pengaruh Daya Saing terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	53
3.1.4. Pengaruh Emulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	57

3.1.5. Pengaruh Kualitas Manajerial Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	61
3.1.6. Pengaruh Predikat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	64
3.1.7. Variabel Kontrol	68
3.2. Kerangka Model Penelitian	69
BAB IV METODE PENELITIAN	71
4.1. Jenis Penelitian	71
4.2. Populasi dan Penentuan Sampel	72
4.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	74
4.3.1. Variabel Dependen	77
4.3.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah	77
4.3.2. Variabel Independen	79
4.3.2.1. Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)	80
4.3.2.2. Audit Internal	81
4.3.2.3. Daya Saing	82
4.3.2.4. Emulasi	85
4.3.2.5. Kualitas Manajerial Kepala Daerah	86
4.3.2.6. Predikat	88
4.3.3. Variabel Kontrol	90
4.4. Metode Analisis	91
4.4.1. Model Regresi Data Panel	91
4.4.2. Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel	93
4.4.2.1. Uji <i>Chow</i>	93
4.4.2.2. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (Uji <i>LM</i> – Uji <i>Breusch–Pagan</i>)	94
4.4.2.3. Uji <i>Hausman</i>	95
4.4.3. Pengujian <i>Goodness of Fit</i> Suatu Model Regresi	97
4.4.3.1. Uji Signifikansi Individual atau Uji Statistik <i>t</i>	97
4.4.3.2. Koefisien Determinasi	99
4.4.4. Uji Asumsi	100
4.4.4.1. Uji Multikolinieritas	101
4.4.4.2. Uji Heteroskedastisitas	102
4.5. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis	102
4.5.1. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Pertama	102
4.5.2. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kedua	103
4.5.3. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ketiga	103
4.5.4. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ke-empat	104
4.5.5. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kelima	104

4.5.6. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ke-enam	105
4.6. Uji Tambahan	105
BAB V HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN	107
5.1. Gambaran Umum Data Penelitian	107
5.2. Statistik Deskriptif	109
5.2.1. Statistik Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah (IPM)	110
5.2.2. Statistik Deskriptif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	111
5.2.3. Statistik Deskriptif Audit Internal Pemerintah Daerah	113
5.2.4. Statistik Deskriptif Daya Saing Pemerintah Daerah	114
5.2.5. Statistik Deskriptif Emulasi Pemerintah Daerah	115
5.2.6. Statistik Deskriptif Kualitas Manajerial Kepala Daerah	116
5.2.7. Statistik Deskriptif Predikat Pemerintah Daerah	118
5.2.8. Statistik Deskriptif Variabel Kontrol	119
5.3. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis	120
5.3.1. Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel	121
5.3.1.1. Uji <i>Chow</i>	121
5.3.1.2. Uji <i>Lagrange multiplier</i> (Uji <i>LM</i> – Uji <i>Breusch–Pagan</i> ...	122
5.3.1.3. Uji <i>Hausman</i>	123
5.3.1.4. Pengujian Estimasi Model Regresi <i>Fixed Effects Model</i> (FEM)	124
5.3.2. Pengujian <i>Goodness of Fit</i> Estimasi Model Regresi	127
5.3.2.1. Uji Signifikansi Individual atau Uji Statistik <i>t</i>	127
5.3.2.2. Koefisien Determinasi	130
5.3.3. Uji Asumsi	131
5.3.3.1. Uji Multikolinieritas	131
5.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas	133
5.4. Uji Kekokohan Estimasi Model Regresi (<i>Robustness Check</i>)	134
5.5. Pengujian Hipotesis	137
5.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama	138
5.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua	139
5.5.3. Pengujian Hipotesis Ketiga	139
5.5.4. Pengujian Hipotesis Ke-empat	140
5.5.5. Pengujian Hipotesis Kelima	140
5.5.6. Pengujian Hipotesis Ke-enam	141
5.5.7. Pengujian Variabel Kontrol	141
5.6. Pembahasan Hasil Pengujian	142
5.6.1. Pengaruh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah	142

5.6.2. Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	145
5.6.3. Pengaruh Daya Saing terhadap Kinerja Pemerintah Daerah ...	147
5.6.4. Pengaruh Emulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	149
5.6.5. Pengaruh Kualitas Manajerial Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	151
5.6.6. Pengaruh Predikat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	153
5.6.7. Variabel Kontrol	155
5.7. Uji Tambahan	157
5.7.1. Uji Tambahan Pengaruh Tata Telola Terhadap Elemen IPM Harapan Hidup Sehat	158
5.7.2. Uji Tambahan Pengaruh Tata Kelola Terhadap Elemen IPM Pendidikan	160
5.7.3. Uji Tambahan Pengaruh Tata Kelola Terhadap Elemen IPM Pengeluaran perkapita	163
BAB VI PENUTUP	165
6.1. Simpulan	165
6.2. Kontribusi Penelitian	169
6.2.1. Kontribusi Teoritis	169
6.2.2. Kontribusi Praktis	172
6.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya	174
DAFTAR PUSTAKA	176
LAMPIRAN	225

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2023	6
Tabel II.1.	Komponen Tata Kelola Dapat Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	40
Tabel II.2.	Komponen Tata Kelola Dapat Menurunkan Kinerja Pemerintah Daerah	43
Tabel II.3.	Komponen Tata Kelola Tidak Dapat Memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah	44
Tabel IV.1.	Pengukuran Variabel	75
Tabel IV.2.	Asumsi Intersep dan Koefisien Persamaan Regresi Data Panel	92
Tabel V.1.	Populasi dan Sampel Penelitian	107
Tabel V.2.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif <i>Common sample</i>	110
Tabel V.3.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif <i>Individual Samples</i>	110
Tabel V.4.	Keputusan Pemilihan Model CEM dan FEM	121
Tabel V.5.	Hasil Uji <i>Chow</i>	122
Tabel V.6.	Keputusan Pemilihan Model CEM dan REM	122
Tabel V.7.	Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	123
Tabel V.8.	Keputusan Pemilihan Model REM dan FEM	123
Tabel V.9.	Hasil Uji <i>Hausman</i>	124
Tabel V.10.	Uji <i>Fixed Effects Model</i> (FEM)	124
Tabel V.11.	Hasil Uji <i>Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance</i>	132
Tabel V.12.	Hasil Uji Korelasi	133
Tabel V.13.	Hasil Uji <i>Breusch–Pagan–Godfrey</i>	133
Tabel V.14.	Hasil Uji <i>Glejser</i>	134
Tabel V.15.	Hasil Uji Kekokohan Estimasi Model Regresi	135
Tabel V.16.	Hasil Uji Estimasi Model Regresi (<i>Fixed Effects Model</i>)	138
Tabel V.17.	Hasil Uji Tambahan Estimasi Model Regresi	158

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kinerja Pemerintah Daerah	36
Gambar III.1.	Kerangka Penelitian	70

DAFTAR GRAFIK

Grafik V.1. Statistik Deskriptif Predikat Pemerintah Daerah	118
---	-----

Abstrak

Pemerintah daerah di Indonesia merupakan salah satu penyedia layanan bagi publik. Keberhasilan dalam penyediaan layanan publik merepresentasikan kinerja pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menyarankan untuk mengangkat isu kinerja dengan fokus kinerja outcome yang dimanifestasikan dengan proksi indeks pembangunan manusia (IPM). Isu kinerja outcome (IPM) menarik untuk diinvestigasi karena terkait dengan kehidupan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Isu kinerja ini terlihat belum setara pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa mekanisme tata kelola sebagai isu yang dapat mendorong capaian kinerja. Mekanisme tata kelola merupakan faktor eksternal sehingga lebih relevan menggunakan teori institusional sebagai landasan teori penelitian. Isu mekanisme tata kelola dieksplorasi dengan proksi DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat. Proksi DPRD dan audit internal didukung dengan regulasi sebagai kekuatan koersif. Proksi daya saing dan emulasi merupakan keinginan yang dipicu dari tuntutan lingkungan sebagai tekanan mimetik untuk setara dengan capaian kinerja pemerintah daerah lain yang dipandang berhasil. Sedangkan proksi kualitas manajerial kepala daerah dan predikat terkait profesionalisme sebagai dorongan normatif. Atas dasar isu tersebut, penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh tata kelola dalam mendorong capaian kinerja pemerintah daerah. Observasi penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan mengobservasi 29 kabupaten dan 6 kota dari tahun 2017 – 2023. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan pengumpulan data secara online dan offline sesuai kebutuhan penelitian ini. Data yang terkumpul berjumlah 176 data dari 245 data yang seharusnya tersedia. Pengujian data menggunakan estimasi model regresi data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola dengan proksi audit internal, emulasi, dan predikat berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara proksi daya saing berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan proksi DPRD dan kualitas manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah merupakan salah satu penyedia layanan yang penting di sektor publik (Maksimovska & Stojkov, 2019 dan Lohrey *et al.*, 2019). Pada sektor ini, pemerintah daerah menyediakan barang dan jasa publik dengan tujuan utamanya pelayanan kepada masyarakat (UU No. 25 Tahun 2009 dan Milán-García *et al.*, 2022). Layanan kepada masyarakat terdiri dari : layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan lingkungan, imigrasi, fasilitas pemasyarakatan, pertahanan, pajak, pemadam kebakaran, perpustakaan, pengelolaan limbah, pasokan air, olah raga, budaya, rekreasi, hak demokrasi, hak hukum, layanan sosial, dan layanan fasilitas umum lainnya (Tourinho *et al.*, 2022; Gomes *et al.*, 2021; Ozdogan *et al.*, 2020; dan Hyndman & McKillop, 2019). Keberhasilan dalam penyediaan layanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah (Avellaneda *et al.*, 2022; Campo *et al.*, 2021; Villamejor-Mendoza, 2020; dan Rivenbark *et al.*, 2019).

Kinerja secara umum diartikan sebagai tindakan, hasil, tujuan yang ingin dicapai, kualitas, aspek ekonomi, efisien dan efektif (Elena-Iuliana & Maria, 2016 dan Bourguignon, 1997). Para ahli sektor publik, seperti Hansen (2023); Fasiello *et al.* (2022); Vignieri (2018); Walker & Andrews (2015); Maurel *et al.* (2014); dan Summermatter & Siegel (2009) memberi pendapat bahwa kinerja pada sektor publik meliputi 3E (faktor ekonomi, efisiensi, efektivitas) dan IOO (*input, output, outcome*). Faktor ekonomi terkait *input*, faktor efisiensi berkenaan dengan *output*

terhadap *input*, dan faktor efektivitas berkaitan dengan *outcome*. Pendapat ini menyiratkan adanya kompleksitas kinerja pada pemerintah daerah. Fenomena ini timbul dari perbedaan persepsi di antara berbagai pemangku kepentingan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Akibatnya, topik kinerja pemerintah daerah masih *debatable* (Andrews *et al.*, 2021; Caldas *et al.*, 2020; Leiser & Mills, 2019; dan Vignieri, 2018).

Isu kinerja pemerintah daerah telah menjadi bahan diskusi ilmiah yang relevan sejak tahun 1980–an dan 1990–an hingga saat ini (Hansen, 2023; Benito *et al.*, 2021; Santolini, 2020; dan Piña & Avellaneda, 2019). Isu kinerja pemerintah daerah telah menjadi pembahasan luas di publik, karena berkaitan dengan kebijakan, akuntabilitas, transparansi, legitimasi, dan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan *New Public Management* (Azam, 2022; Hue & Sun, 2022; Lewis *et al.*, 2020; Kaye-Essien, 2020; dan Avellaneda & Gomes, 2017). Bahkan baru – baru ini, studi menjelaskan ada desakan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk menginvestigasi pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja layanan kepada masyarakat (Shinohara, 2023).

Penelitian dengan fokus kinerja pemerintah daerah dicirikan multi–layanan (Milán-García *et al.*, 2022; Avellaneda *et al.*, 2022; dan Blank & Niaounakis, 2021). Konsekuensinya, pengembangan indikator kinerja yang holistik masih menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi di lingkungan sektor publik (Campo *et al.*, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran kinerja di sektor publik belum memiliki konsensus, tergantung sudut pandang dan interpretasi masing – masing (Febriyanti *et al.*, 2024; Ozdogan *et al.*, 2020; Caldas *et al.*, 2020; dan

Coste & Tudor, 2013). Studi sebelumnya menggunakan proksi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Relevansi penggunaan proksi sesuai dengan konteks dan tujuan studi masing – masing.

Sejumlah kajian ilmiah telah menggunakan proksi untuk mengobservasi kinerja pemerintah daerah. Beberapa proksi kinerja pemerintah daerah yang digunakan tersebut yaitu : pendapatan daerah (Avellaneda *et al.*, 2022; Hue & Sun, 2022; Mallick, 2021; dan Paula & Silva, 2021) dikategorikan sebagai proksi kinerja *input*, kemudian pengungkapan informasi keuangan atau transparansi (Lee *et al.*, 2023; Benito *et al.*, 2021; Krah & Mertens, 2020; Spreen *et al.*, 2020; Piña & Avellaneda, 2019; Suzuki & Han, 2019; Moreno-Enguix *et al.*, 2019; dan Keerasuntonpong & Cordery, 2018), audit keuangan (Fonseca *et al.*, 2020 dan Sibanda *et al.*, 2020), dan layanan (Tourinho *et al.*, 2022; Benito *et al.*, 2021; dan Gomes *et al.*, 2021) dikategorikan sebagai proksi kinerja *output*. Sementara pertumbuhan ekonomi (Azam, 2022 dan Jiang, 2018), indeks pembangunan manusia (Kılıç *et al.*, 2023; Tripathi, 2021; Sarpong & Bein, 2021; dan Sarkodie & Adams, 2020), efisiensi (Tran *et al.*, 2019), kepuasan masyarakat (Moldogaziev & Liu, 2021) dikategorikan sebagai proksi kinerja *outcome*.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya terlihat bahwa penelitian terdahulu lebih banyak mengangkat isu kinerja *output*. Hal ini memicu kesenjangan penelitian (*gap*) terkait isu kinerja *outcome* yang relatif masih jarang dilakukan dalam konteks pemerintah daerah. Kesenjangan tersebut melatarbelakangi gagasan untuk mengeksplorasi isu kinerja *outcome* sebagai fokus kajian yang masih relevan dalam penelitian saat ini (Tourinho *et al.*, 2022; Amaral *et al.*,

2021; dan Walton, 2020). Di samping itu, literatur menyarankan bahwa penelitian terkini mengenai kinerja pemerintah daerah sebaiknya lebih berorientasi pada kinerja *outcome* (Azam & Bouckaert, 2025). Begitupun Fasiello *et al.* (2022); Korac *et al.* (2020); dan Mas *et al.* (2019) mendorong penelitian saat ini untuk mengeksplorasi isu kinerja *outcome*, karena dipandang lebih memiliki manfaat, yaitu sebagai pengambilan kebijakan dan legitimasi.

Studi sebelumnya yang mengangkat isu kinerja *outcome* menggunakan proksi sebagai instrumen pengukurannya (lihat : Fasiello *et al.*, 2022 dan Amaral *et al.*, 2021). Begitupun pada penelitian ini menggunakan proksi yaitu indeks pembangunan manusia sebagai manifestasi dari kinerja *outcome* (Kılıç *et al.*, 2023; Tripathi, 2021; Sarpong & Bein, 2021; dan Sarkodie & Adams, 2020). Indeks pembangunan manusia (IPM) dipandang sebagai proksi yang memiliki perspektif lebih komprehensif, karena terdiri dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (Anderson & Gerber, 2017) dan telah diadopsi secara luas (Shi & Tang, 2020). Menurut Miranda-Lescano *et al.* (2023); Achim *et al.*, (2023); dan Tourinho *et al.* (2022) IPM mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan pengeluaran publik, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan, dan isu – isu yang relevan dengan kehidupan sehari – hari masyarakat. Sementara Yumashev *et al.* (2020) memandang bahwa IPM sebagai salah satu parameter untuk mengukur kemampuan berkompetisi antar daerah maupun nasional atau global.

Penelitian ini mengeksplorasi dan menginvestigasi kinerja *outcome* dengan ukuran IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah ini menarik diinvestigasi karena memiliki potensi dan

keunggulan atas akses sumber daya yang dapat mendorong kinerja. Potensi yang pertama yaitu akses ekonomi yang secara geografis memiliki posisi sangat strategis sebagai jalur distribusi barang dan jasa diantara dua titik pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, antara Jakarta – Surabaya (Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023). Menurut Sarkodie & Adams (2020) dan Rodríguez-pose & Tselios (2019) aksesibilitas atas potensi sumber daya melalui distribusi barang dan jasa dipandang sebagai pendorong utama kinerja pemerintah daerah.

Potensi yang kedua yaitu akses atas infrastruktur yang memadai (Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 12 Tahun 2023), seperti jalan nasional ($\pm 1.518,09$ km), bandara (6 bandara), pelabuhan (14 pelabuhan), kereta api (1.680,26 km dengan 115 stasiun), dan jalan tol (330,71 km). Menurut Arimah (2017) kota – kota yang memiliki akses infrastruktur memadai dapat mendorong kinerja dan menciptakan daerah untuk kompetitif. Potensi yang ketiga adalah demografi yaitu jumlah penduduk yang besar, urutan nomor 3 se-Indonesia yaitu 37,892 juta pada tahun 2024 yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota (BPS Jawa Tengah). Ini sesuai dengan pendapat Dasic *et al.* (2020) yaitu penduduk sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Selain itu, penelitian ilmiah harus berlandaskan pada kerangka berpikir dengan asumsi objek penelitiannya homogen (González-Val & Pueyo, 2019). Studi Koh *et al.* (2021) menjadi pijakan bahwa homogenitas objek penelitian pada pemerintah daerah dapat dilihat dari kesamaan karakteristik fungsinya yaitu sebagai penyedia layanan publik. Menurut Maksimovska & Stojkov (2019 dan Lohrey *et al.* (2019) pemerintah daerah memiliki fungsi yang sama sebagai salah

satu penyedia layanan publik. Kesamaan karakteristik fungsi ini seharusnya dapat menggeneralisasi hasil kerja pemerintah daerah (Jabbour *et al.*, 2020). Menurut Anderson & Gerber (2023) pemerintah daerah yang tidak memiliki perbedaan identik dalam fungsinya seharusnya tidak menunjukkan perbedaan kinerjanya. Berdasarkan argumen ini, kinerja *outcome* IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah seharusnya setara. Kinerja *outcome* IPM kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel I.1.

Homogenitas objek penelitian pada pemerintah daerah juga dapat dilihat dari kesamaan bentuk organisasi dan jenis lingkungan organisasi (UU No. 9 Tahun 2015) dan PP No. 72 Tahun 2019) Berdasarkan proposisi teori institusional, kesamaan tersebut memungkinkan kinerjanya setara, karena saling memengaruhi satu sama lain (Nugrahani *et al.*, 2023; Tran & Villano, 2019; dan Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018). Pada konteks ini, lingkungan pemerintah daerah lebih ditekankan yang dimanifestasikan dengan mekanisme tata kelola pemerintah daerah. Secara logis, proposisi ini dapat digunakan sebagai landasan argumen dalam penelitian ini. Kesamaan lingkungan memungkinkan mekanisme tata kelola yang serupa, sehingga capaian kinerja *outcome* IPM seharusnya setara. Tabel I.1. menyajikan capaian kinerja *outcome* IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel I.1.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2023

No.	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia							Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kab. Cilacap	68,90	69,56	69,98	69,95	70,42	70,99	71,83	Tinggi
2	Kab. Banyumas	70,75	71,30	71,96	71,98	72,44	73,17	73,86	Tinggi
3	Kab. Purbalingga	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	70,24	Sedang

Lanjutan Tabel I.1.

No.	Kabupaten / Kota	Indeks Pembangunan Manusia							Kategori
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Kab. Purbalingga	67,72	68,41	68,99	68,97	69,15	69,54	70,24	Sedang
4	Kab. Banjarnegara	65,86	66,54	67,34	67,45	67,86	68,61	69,14	Sedang
5	Kab. Kebumen	68,29	68,80	69,60	69,81	70,05	70,79	71,37	Tinggi
6	Kab. Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98	73,60	74,28	Tinggi
7	Kab. Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43	68,89	69,37	Sedang
8	Kab. Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12	70,85	71,45	Tinggi
9	Kab. Boyolali	72,64	73,22	73,80	74,25	74,40	74,97	75,41	Tinggi
10	Kab. Klaten	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12	76,95	77,59	Tinggi
11	Kab. Sukoharjo	75,56	76,07	76,84	76,98	77,13	77,94	78,65	Tinggi
12	Kab. Wonogiri	68,66	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97	Tinggi
13	Kab. Karanganyar	75,22	75,54	75,89	75,86	75,99	76,58	77,31	Tinggi
14	Kab. Sragen	72,40	72,96	73,43	73,95	74,08	74,65	75,10	Tinggi
15	Kab. Grobogan	68,87	69,32	69,86	69,87	70,41	70,97	71,49	Tinggi
16	Kab. Blora	67,52	67,95	68,65	68,84	69,37	69,95	70,63	Sedang
17	Kab. Rembang	68,95	69,46	70,15	70,02	70,43	71,00	71,89	Tinggi
18	Kab. Pati	70,12	70,71	71,35	71,77	72,28	73,14	73,59	Tinggi
19	Kab. Kudus	73,84	74,58	74,94	75,00	75,16	75,89	76,71	Tinggi
20	Kab. Jepara	70,79	71,38	71,88	71,99	72,36	73,15	73,85	Tinggi
21	Kab. Demak	70,41	71,26	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07	Tinggi
22	Kab. Semarang	73,20	73,61	74,14	74,10	74,24	74,67	75,13	Tinggi
23	Kab. Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33	Tinggi
24	Kab. Kendal	70,62	71,28	71,97	72,29	72,50	73,19	73,86	Tinggi
25	Kab. Batang	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92	69,45	70,20	Sedang
26	Kab. Pekalongan	68,40	68,97	69,71	69,63	70,11	70,81	71,40	Tinggi
27	Kab. Pemalang	65,04	65,67	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03	Sedang
28	Kab. Tegal	66,44	67,33	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23	Sedang
29	Kab. Brebes	64,86	65,68	66,12	66,11	66,32	67,03	67,95	Sedang
30	Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43	80,39	81,17	Sangat Tinggi
31	Kota Surakarta	80,85	81,46	81,86	82,21	82,62	83,08	83,54	Sangat Tinggi
32	Kota Salatiga	81,68	82,41	83,12	83,14	83,60	84,35	84,99	Sangat Tinggi
33	Kota Semarang	82,01	82,72	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43	Sangat Tinggi
34	Kota Pekalongan	73,77	74,24	74,77	74,98	75,40	75,90	76,71	Tinggi
35	Kota Tegal	73,95	74,44	74,93	75,07	75,52	76,15	77,02	Tinggi

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel I.1 memberikan informasi bahwa capaian kinerja IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perbedaan berdasarkan *range* yang ditetapkan oleh PBB. *Range* IPM menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dikelompokkan menjadi empat *range* dengan skala satuan 0 – 1. Pengelompokan tersebut terdiri atas rentang yaitu $0,00 < IPM < 0,55$ = rendah; $0,55 < IPM < 0,70$ = menengah; $0,70 < IPM < 0,80$ = tinggi; dan $0,80 < IPM < 1,00$ = sangat tinggi (Dasic *et al.*, 2020). Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonversi *range* IPM ke dalam skala puluhan, yaitu 0 – 100, dengan kriteria seperti berikut : sangat tinggi : $IPM \geq 80$, tinggi : $70 \leq IPM < 80$, sedang : $60 \leq IPM < 70$, dan rendah : $IPM < 60$. Perbedaan berdasarkan *range* PBB ini tampak, yaitu : 1) sebesar 22,86% kabupaten dengan capaian kinerjanya dalam kategori menengah, 2) sebesar 60% kabupaten dan 5,71% kota dalam kategori tinggi, dan 3) sebesar 11,43% kota kategori sangat tinggi.

Fenomena – fenomena ini seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Menurut Azam & Bouckaert (2025); Avellaneda *et al.* (2022); Liu *et al.* (2021); Campo *et al.* (2021); Villamejor-Mendoza (2020); dan Rivenbark *et al.* (2019) kinerja pemerintah daerah yang buruk memicu tekanan dari berbagai pihak, seperti pemberi dana, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Hal yang sama dinyatakan oleh Shinohara (2023) bahwa publik akan memberi stigma yang negatif atas pencapaian kinerja pemerintah daerah yang buruk.

Masalah kesenjangan pencapaian kinerja bukan satu-satunya bagi pemerintah daerah. Literatur menjelaskan bahwa sudah menjadi fenomena umum bagi pemerintah daerah di negara-negara berkembang menghadapi berbagai

masalah (Khalid *et al.*, 2021 dan Pique, 2019). Pemerintah daerah menghadapi permasalahan, seperti pendapatan daerah yang terbatas (Avellaneda *et al.*, 2022), layanan yang kurang memadai (Tourinho *et al.*, 2022 dan Khalid *et al.*, 2021), audit yang kurang baik (Widt *et al.*, 2020), transparansi yang terabaikan (Krah & Mertens, 2020; Mishra & Attri, 2020; dan Ramírez *et al.*, 2020), dan perilaku klientelisme atau koruptif (Moldogaziev & Liu, 2021; Zarychta *et al.*, 2020; dan Tran *et al.*, 2019). Menurut Panji & Utomo (2023) pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami masalah ini, terutama kasus korupsi.

Fenomena tentang kinerja pemerintah daerah telah diuji dan dijelaskan dengan berbagai teori organisasi (Keerasuntonpong & Cordery, 2018 dan Walker & Andrews, 2015). Literatur sebelumnya yang dipandang relevan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan teori penelitian. Literatur yang fokus pada isu kinerja pemerintah daerah menekankan untuk menggunakan teori institusional sebagai landasan teori penelitian (Suzuki *et al.*, 2022; Belle *et al.*, 2019; dan Alvesson & Spicer, 2019). Proposisi teori institusional menyatakan bahwa organisasi cenderung menyesuaikan dengan lingkungannya sehingga serupa satu sama lainnya atau isomorfisme (Choi & Woo, 2022 dan DiMaggio & Powell, 1983). Teori ini termanifestasikan dalam praktik pemerintah daerah yang rentan terhadap berbagai tekanan, baik tekanan regulasi, standar, norma, dan publik atas pencapaian kinerja. Tekanan – tekanan tersebut merupakan faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi kinerja pemerintah daerah (Cordery & Hay, 2022).

Beberapa tahun terakhir minat untuk menginvestigasi kinerja pemerintah daerah dan determinannya semakin meningkat (Milán-García, dkk., 2022). Literatur menunjukkan bahwa terdapat variabel – variabel penentu yang cenderung meningkatkan kinerja organisasi publik (Nzama & Sebola, 2021). Sejumlah variabel tersebut diidentifikasi, antara lain : faktor geografi dan hukum (Tourinho *et al.*, 2022), demografi dan keuangan (Widt, 2021), kualitas kelembagaan (Suzuki *et al.*, 2022), ekonomi (Sun & Andrews, 2020), tata kelola (Appiah *et al.*, 2023; Nam & Ryu, 2023; Farrell *et al.*, 2022; Sarpong & Bein, 2021; dan Sarkodie & Adams, 2020), dan sumber daya (Sinha & Sengupta, 2019). Faktor – faktor ini menjadi referensi, namun pada penelitian ini fokus mengeksplorasi dan menginvestigasi tata kelola dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tata kelola merupakan faktor eksternal yang dianggap sangat penting dan bermanfaat sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah (Mudzusi *et al.*, 2024).

Tata kelola telah mendapat perhatian dan dikembangkan sebagai mekanisme penting selama beberapa dekade terakhir (Guluma, 2021). Tata kelola diartikan sebagai hubungan antar peserta (pemangku kepentingan) yang saling memengaruhi (OECD *Principles of Corporate Governance*, 1999; 2004; 2015). Sementara tata kelola sektor publik didefinisikan sebagai konsep multifaset (berbagai segi), mencakup semua aspek : keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembuatan, implementasi kebijakan atau pelaksanaan kewenangan, pengelolaan, dan distribusi sumber daya negara melalui lembaga formal dan informal (Mishra & Attri, 2020 dan Panday & Chowdhury, 2020). Para ahli sektor

publik berpendapat bahwa mekanisme tata kelola menjadi salah satu faktor sentral yang penekanannya pada peningkatan kinerja berbasis hasil (*outcome*) terutama penyediaan layanan publik (Mudzusi *et al.*, 2024; Guluma, 2021; Peiró-Palomino *et al.*, 2020; Omri & Mabrouk, 2020; dan Walton, 2020). Elmasry & Bakri, 2019).

Tata kelola pemerintah daerah meliputi beberapa elemen, antara lain akuntabilitas, responsibilitas, daya tanggap, efektivitas, transparansi, supremasi hukum, keterlibatan publik, dan kesetaraan yang tercermin dalam capaian kinerja (Mudzusi *et al.*, 2024; Androniceanu 2021; Campo *et al.*, 2021; dan Erkkilä, 2020). Elemen – elemen tersebut merupakan pilar dari tata kelola (Maksimovska & Stojkov, 2019). Menurut Munzhedzi (2021); Power (2015); Miller *et al.* (2008); Goddard (2005); dan Lowe & Doolin (1999) elemen – elemen tata kelola dapat tercipta melalui instrumen sistem akuntansi sebagai salah satu faktor pendukung organisasi publik. Duan *et al.* (2023); Gomes & Sargiacomo (2013); Rahaman *et al.* (2010); Jones & Mellett (2007); dan Kurunmaki *et al.* (2003) menyatakan bahwa akuntansi harus dapat diandalkan sebagai elemen penting dalam konsep akuntabilitas publik untuk mendukung mekanisme tata kelola dan kinerja karena mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari publik. Pernyataan dari para ahli ini menandakan bahwa akuntansi tidak bisa dipisahkan dari mekanisme tata kelola dan kinerja organisasi.

Pada sektor publik, mekanisme tata kelola masih terlihat ada keberagaman (UU No. 25 Tahun 2009; Hyndman & McKillop, 2019; dan Lohrey *et al.*, 2019). Meskipun minat terhadap topik tata kelola terus meningkat, penelitian terkait mekanisme tata kelola banyak menggunakan ilustrasi atau contoh dalam konteks

organisasi publik (Elmasry & Bakri, 2019). Hal ini memicu para ahli sektor publik dalam menginvestigasi mekanisme tata kelola menggunakan proksi sebagai indikator (Achim *et al.*, 2023 dan Thanh & Canh, 2020). Beberapa proksi mekanisme tata kelola yang telah digunakan, diantaranya : stabilitas politik dan efektifitas tata kelola (Achim *et al.*, 2023; Azam, 2022; dan Gomes *et al.*, 2021), sistem politik (Sarkodie & Adams, 2020), lembaga per-*ranking* tata kelola (Sarpong & Bein, 2021), kompetisi (Thanh & Canh, 2020), daya saing (Nam & Ryu, 2023 dan Rajnoha & Lesnikova, 2022), dan lingkungan institusi (Omri & Ben Mabrouk, 2020).

Qian *et al.* (2021); Beshi & Kaur (2020); dan Elmasry & Bakri (2019) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola masih menjadi isu kontekstual di dunia saat ini, terutama di negara berkembang. Menurut Lele (2019) mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah masih kurang diperhatikan, termasuk di Indonesia. Berdasarkan kondisi ini, peluang mengeksplorasi mekanisme tata kelola masih terbuka untuk melengkapi dan mengatasi kesenjangan penelitian yang sudah ada. Penelitian ini mengadaptasi dan mereplikasi indikator – indikator yang secara luas dianggap sebagai ukuran tata kelola paling akurat dan dapat diandalkan (Rodríguez-pose & Tselios, 2019). Eksplorasi yang dilakukan berupaya memberikan kontribusi dan memperluas penelitian sebelumnya terkait mekanisme tata kelola dan kinerja pemerintah daerah.

Salah satu mekanisme tata kelola pemerintah daerah yaitu dewan perwakilan rakyat daerah (Smith *et al.*, 2022). Penelitian sebelumnya mendokumentasikan bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dianggap sebagai faktor penting

dalam tata kelola karena memiliki kekuasaan besar yaitu berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi keputusan dan tindakan lembaga eksekutif (Gomes *et al.*, 2022). DPRD merupakan badan legislatif yang diatur undang – undang dengan peran memantau jalannya pemerintah daerah (Kmak, 2020 dan UU No. 9 tahun 2015). Menurut Avellaneda & Gomes (2017) DPRD menjadi mitra esensial pemerintah yang berperan untuk mengontrol jalannya organisasi. DPRD berperan sebagai pemangku kepentingan yang relevan dengan kewenangan pembuat kebijakan dan pemantauan atas kinerja pemerintah daerah (Smith *et al.*, 2022; Otjes *et al.*, 2022; dan Gomes *et al.*, 2021).

Menurut Farrell *et al.* (2022) dan Koh *et al.* (2021) DPRD melalui fungsi pengawasan dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Peningkatan kinerja pemerintah daerah didorong oleh DPRD dengan aturan regulasi sebagai refleksi tekanan koersif dalam teori institusional (Cordery & Hay, 2022; Altayar, 2018; dan DiMaggio & Powell, 1983). Hal ini telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Studi dari Farrell *et al.* (2022); Smith *et al.* (2022); Freeman (2020); dan Larhsoukanh & Wang (2019) membuktikan bahwa DPRD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini artinya, faktor DPRD sebagai bagian dari tata kelola pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun demikian, studi Lacalle *et al.* (2021) memberikan hasil temuan sebaliknya yaitu DPRD berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan kesenjangan hasil temuan, sehingga masih terbuka peluang untuk

menguji kembali variabel ini. Hasil temuan tersebut menjadi dasar pemikiran untuk menetapkan variabel DPRD sebagai prediktor dalam penelitian ini.

Faktor selanjutnya dari tata kelola pemerintah daerah adalah audit internal. Audit internal merupakan mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah (Vadasi *et al.*, 2020 dan Coetzee & Erasmus, 2017). Menurut Österberg & Licht (2023); dan Lenz *et al.* (2018) audit internal (IA) menjadi pilar utama tata kelola seperti akuntabilitas dan transparansi. Audit internal menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintah daerah karena perannya sebagai salah satu mekanisme pengendalian internal yang efektif atas layanan publik (Cordery & Hay, 2022; Kotb *et al.*, 2020; Burdon & Sorour, 2020). Di Indonesia, audit internal pemerintah daerah menjalankan fungsinya secara independen dan objektif karena dibawah arahan BPKP yang diatur dengan regulasi (UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; Perpres No. 192 tahun 2014; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020). Dukungan regulasi bagi audit internal merepresentasikan kekuatan koersif dalam teori institusional (Cordery & Hay, 2022 dan DiMaggio & Powell, 1983).

Peran audit dalam tata kelola kinerja sektor publik telah menjadi subyek penelitian dan diskusi yang luas selama beberapa dekade terakhir (Österberg & Licht, 2023). Literatur sebelumnya menjelaskan bahwa peran audit internal dirasakan penting sebagai alat untuk meningkatkan hasil (*outcome*) di pada sektor publik (Nerantzidis *et al.*, 2022 dan Funk & Owen, 2020). Beberapa penelitian telah membuktikannya, antara lain : Appiah *et al.* (2023); Edmonds *et al.* (2023); Österberg & Licht (2023); dan Rich *et al.* (2021). Hasil penelitian tersebut memberikan bukti bahwa audit internal memiliki pengaruh positif signifikan

terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara Dzomira (2020) memberikan hasil penelitian yang berbeda yaitu audit internal tidak efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil temuan dari penelitian terdahulu terlihat belum seragam. Hal tersebut menjadi acuan untuk mengeksplorasi kembali dan menetapkan audit internal sebagai variabel prediktor dalam penelitian ini.

Isu berikutnya yang menarik untuk diverifikasi dalam mekanisme tata kelola adalah daya saing (Thoan & Thuy, 2024 dan Rajnoha & Lesnikova, 2022). Daya saing telah menjadi isu krusial di tingkat global sebagai salah satu cara untuk bertahan di lingkungan kompetitif (Bencsik & Juhasz, 2023; Krstić & Gawel, 2023; Wanyonyi *et al.*, 2023; dan Rajnoha & Lesnikova, 2022). Daya saing merupakan kemampuan lembaga untuk menggabungkan sumber daya dan kompetensi dengan cara yang unik dalam lingkungan kompetitif (Hart & Rodgers, 2023). Menurut Yang *et al.* (2024); Awad (2024); Mudzusi *et al.* (2024); dan Liu *et al.* (2023) lingkungan kompetitif dipandang sebagai mekanisme eksternal yang dapat mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Lingkungan kompetitif juga dipandang dapat mendisiplinkan manajemen dengan tujuan mewujudkan kinerja yang terbaik atau minimal sama dengan organisasi lain (Chakraborty, 2023 dan Sheikh, 2019). Pandangan ini dapat diartikan bahwa daya saing yang dimiliki organisasi dalam lingkungan kompetitif mencerminkan bentuk manifestasi mekanisme tata kelola (Thoan & Thuy, 2024 dan Cifuentes-Faura *et al.*, 2024).

Namun, di sisi lain, lingkungan yang kompetitif menyimpan ketidakpastian lingkungan (Sharapov & Ross, 2023; Barnett *et al.*, 2021; dan DiMaggio & Powell, 1983). Kondisi ketidakpastian ini dapat dialami pemerintah daerah yaitu

bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan layanan yang disediakan belum tentu sesuai dengan preferansi publik ditengah keterbatasan informasi dan pengetahuan yang selalu berubah secara dinamis (Cordery & Hay, 2022; Trojanek *et al.*, 2021; Gutierrez *et al.*, 2021; Fourné & Zschoche, 2020; George *et al.*, 2019; dan Lyytikäinen, 2012). Tindakan meniru menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidakpastian dengan proses mengamati, mempelajari, dan mencoba mengimplementasikan praktik – praktik dari pemerintah daerah lain yang dianggap sukses (Li *et al.*, 2023; Sharapov & Ross, 2023; dan Ali, 2021). Tindakan meniru (mimetik) yang didorong ketidakpastian memcerminkan teori institusional (Cordery & Hay, 2022 dan DiMaggio & Powell, 1983).

Isu-isu mengenai daya saing telah terkonfirmasi pada studi pemerintah pusat, tetapi masih sangat diperlukan dalam studi pemerintah daerah (Nasi *et al.*, 2023). Pendapat ini didukung oleh Krstić & Gawel (2023) yang menyatakan bahwa daya saing nasional telah diteliti secara mendalam, namun daya saing regional kurang mendapat perhatian. Penelitian yang mengulas daya saing pada pemerintah daerah menunjukkan hasil penelitian yang masih memerlukan diskusi. Variasi hasil temuan penelitian sebelumnya masih terlihat, sehingga memberikan ruang dan minat untuk menginvestigasi tema ini. Penelitian tersebut dapat dilihat pada Nam & Ryu (2023); Rajnoha & Lesnikova (2022); Arrona *et al.* (2020); dan Vukovic *et al.* (2020) yang menunjukkan bukti bahwa daya saing memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara Li *et al.* (2023) memberikan bukti sebaliknya, yaitu daya saing pemerintah daerah memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Mekanisme tata kelola lainya yang menjadi topik menarik untuk dikaji pada pemerintah daerah adalah emulasi (Rangoni & Thatcher, 2023 dan Karo, 2010). Emulasi merupakan model atau cara alternatif dengan mengamati organisasi lain yang secara fungsionalitas sama (Cordery & Hay, 2022 dan Teece *et al.*, 1997). Emulasi dipandang sebagai proses penyebaran model atau praktik yang digunakan oleh organisasi dengan reputasi baik (Coroado, 2020). Emulasi dalam konteks tata kelola sering merujuk pada praktik meniru atau mengadaptasi model, struktur, standar, atau praktik terbaik dari organisasi lain yang dianggap sukses (Depoers & Jérôme, 2020 dan Anafinova, 2020). Proses adaptasi dengan tindakan emulasi (meniru) disebabkan oleh lingkungan sekitarnya sebagai cerminan teori institusional (Cordery & Hay, 2022 dan DiMaggio & Powell (1983).

Literatur menyatakan bahwa lingkungan menyimpan ketidakpastian (Fourné & Zschoche, 2020). Fenomena ketidakpastian tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah karena layanan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Gutierrez *et al.*, 2021; Fourné & Zschoche, 2020; Caldas *et al.*, 2020; dan Allegrini & Monteduro, 2018). Pada kondisi seperti ini institusi membutuhkan informasi dan pengetahuan yang lengkap, sementara anggaran dan waktu terbatas untuk memperolehnya (Cordery & Hay, 2022 dan Hassan & Basiruddin, 2023). Tindakan emulasi menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketidakpastian lingkungan pada pemerintah daerah (Cordery & Hay, 2022; Lesch & Millar, 2022; Piña & Avellaneda, 2018). Proses emulasi dilakukan dengan memilih pemerintah daerah lain yang dipandang sukses untuk diadaptasi,

kemudian mengamati, mempelajari, dan mencoba mengimplementasikan praktik – praktik tersebut (Li *et al.*, 2023; Sharapov & Ross, 2023; dan Ali, 2021).

Emulasi telah menjadi isu yang sangat penting di sektor publik, karena dipahami memiliki peran dalam memengaruhi kinerja suatu organisasi (Aghimien *et al.*, 2022). Menurut Baldwin *et al.* (2019) dan Andersen & Jakobsen, (2018) emulasi dapat mendorong konvergensi (isomorfisme) capaian kinerja suatu organisasi. Hasil penelitian sebelumnya, seperti Lesch & Millar (2022); Baldwin *et al.* (2019); dan Fusco & Allegrini (2020) memberikan bukti bahwa emulasi memiliki pengaruh yang positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara hasil studi Piña & Avellaneda (2018) menjelaskan hasil yang berlawanan, dimana emulasi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan untuk memasukkan variabel emulasi dalam penelitian ini. Variabel emulasi masih relevan untuk diuji kembali dalam konteks penelitian di Indonesia. Hasil penelitian terkait emulasi berpeluang memberikan kontribusi dalam memperkuat hasil temuan-temuan dari penelitian sebelumnya.

Kualitas manajerial kepala daerah merupakan isu penting lainnya dari mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah (Heinelt *et al.*, 2018). Studi mengenai kepala daerah telah menjadi isu dan bahan diskusi, sehubungan dengan pemisahan peran utama kepala daerah dalam sistem demokrasi, yaitu peran politik terkait dengan pengambilan kebijakan dan peran administrasi terkait dengan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan (Bastos & Sánchez, 2024; Lameck, 2023; Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021; dan Avellaneda dan Gomes, 2017).

Pemisahan ini memastikan responsibilitas, akuntabilitas, dan administrasi (Nyadera, 2020). Menurut Ugyel (2017) pemisahan yang jelas antara peran politik dan administrasi pada sektor publik sejalan dengan prinsip tata kelola.

Kualitas manajerial kepala daerah merupakan manifestasi penting dari profesionalisme (Avellaneda & Gomes, 2015 dan Meier & O'Toole, 2002). Kepala daerah yang memiliki kualitas manajerial dipandang mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang ditunjukkan dengan keterbukaan menerima saran – saran dari lembaga profesional (Lu *et al.*, 2020 dan Bolívar *et al.*, 2018). Peningkatan kinerja pemerintah daerah yang didorong oleh kualitas manajerial mencerminkan tekanan normatif dalam teori institusional (Rana *et al.*, 2022 dan DiMaggio & Powell, 1983). Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa kualitas manajerial kepala daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, antara lain : Ermini *et al.* (2023); Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva (2021); Kim (2021); Lu *et al.* (2020); dan Olvera & Avellaneda (2019). Namun, Bastos & Sánchez (2024) menjelaskan kualitas manajerial kepala daerah memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil temuan tersebut terlihat masih beragam, untuk itu variabel ini masih layak untuk diinvestigasi lebih lanjut.

Faktor penting lainnya berkaitan dengan tata kelola pemerintah daerah adalah predikat. Predikat merupakan hasil penilaian atau evaluasi dari lembaga profesional (Meirinhos *et al.*, 2022; Biljohn & Lues, 2020; Glass & Newig, 2019; dan Joseph *et al.*, 2014). Predikat dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan dari lembaga profesional atas capaian kinerjanya (Anh Vu *et al.*, 2022). Menurut

Anafinova (2020); Bastedo & Bowman (2010); dan Sagie & Elizur (1999) perolehan predikat menjadi bagian penting dari prestise sebagai indikasi organisasi berkinerja tinggi. Literatur menjelaskan bahwa organisasi berusaha untuk mendapatkan predikat dari lembaga profesional atas capaian kinerjanya (Liu *et al.*, 2021 dan Pittaway & Montazemi, 2020). Hal ini memicu organisasi lain untuk memperoleh predikat, sehingga organisasi cenderung mirip satu sama lainnya atau isomorfisme (Liu *et al.*, 2021 dan DiMaggio & Powell, 1983).

Isu predikat telah digunakan secara luas sejak tahun 1980-an sebagai evaluasi kinerja dari eksternal (Liu *et al.*, 2021 dan Çilingirtürk & Koçak, 2018). Evaluasi kinerja ini mengekspresikan mekanisme tata kelola melalui penilaian dan pemeringkatan oleh lembaga profesional yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja (Wandercil *et al.*, 2022; Meirinhos *et al.*, 2022; dan Kelley & Simmons, 2021). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa predikat memiliki pengaruh positif yang signifikan dalam memengaruhi kinerja, seperti Octavio & Urumsah (2024); Liu *et al.* (2021); dan Acuto & Leffel (2021). Sementara Shi *et al.* (2019) mengungkapkan hasil yang sebaliknya bahwa predikat berpengaruh negatif terhadap kinerja. Hasil penelitian terdahulu ini masih terdapat kesenjangan, oleh karena itu diperlukan analisis kontekstual dengan tujuan memverifikasi ulang dampak predikat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Elemen yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam desain penelitian empiris adalah variabel kontrol (Nielsen & Raswant, 2018 dan Becker, 2005). Menurut Frölich (2008) penggunaan variabel kontrol telah menjadi fenomena yang umum dalam penelitian empiris. Feng *et al.* (2020); Carlson & Wu (2012);

dan Kothari (2004) mengungkapkan istilah teknis “kontrol” digunakan ketika merancang studi untuk mengurangi efek dari luar yang tidak diteliti. Schjoedt & Bird (2014) berpendapat bahwa penelitian yang menggunakan regresi berganda harus mengontrol faktor pengganggu untuk mengurangi varian kesalahan. Pada penelitian ini memasukan variabel kontrol yang berpotensi meningkatkan kinerja pemerintah daerah, yaitu aset pemerintah daerah (Gao *et al.*, 2021 dan Oates, 2016) dan penduduk (Rahman, 2022 dan Muraoka & Avellaneda, 2021).

Telaah studi pada paragraf sebelumnya memperlihatkan ketidakkonsistenan hasil temuan. Menurut Fayissa & Nsiah (2013) dan Larcker *et al.* (2007) hasil temuan yang belum konsisten menandakan perlunya penelitian lebih lanjut di area (tema) ini. Inkonsistensi hasil temuan ini kemungkinan disebabkan perbedaan proksi yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian (Hermuningsih *et al.*, 2020). Hal ini menjadi motivasi utama untuk menginvestigasi tata kelola dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Motivasi lainnya adalah mengelaborasi potensi kelemahan dan kompleksitas hubungan yang belum dijelaskan secara komprehensif dalam penelitian sebelumnya. Motivasi penting lainnya yaitu mempromosikan prinsip – prinsip tata kelola di pemerintah daerah. Studi ini juga termotivasi membuktikan teori institusional yang dipandang lebih relevan dalam konteks pemerintah daerah (Chakraborty, 2023 dan DiMaggio & Powell, 1983).

1.2. Rumusan Masalah

Tinjauan dalam latar belakang menjadi dasar untuk menentukan rumusan masalah. Rumusan masalah diperlukan untuk membantu menjaga pembahasan

agar tetap terarah dan produktif. Secara umum rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah tata kelola dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Adapun secara khusus rumusan masalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Apakah DPRD berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Apakah daya saing berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Apakah emulasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Apakah kualitas manajerial kepala daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?
6. Apakah predikat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan masalah yang telah disusun, tahap selanjutnya merancang tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini secara umum yaitu membuktikan pengaruh tata kelola terhadap kinerja pemerintah daerah. Sementara penjelasan tujuan penelitian secara khusus adalah sebagai berikut :

1. Membuktikan pengaruh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Membuktikan pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Membuktikan pengaruh daya saing terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Membuktikan pengaruh emulasi terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Membuktikan pengaruh kualitas manajerial kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Membuktikan pengaruh predikat terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dari penelitian ini merupakan salah satu aspek yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan membuktikan beberapa faktor penjelas mekanisme tata kelola terhadap kinerja berbasis *outcome* yang terintegrasi dalam satu model analisis. Kinerja *outcome* diinvestigasi sebagai upaya untuk mengisi kesenjangan (*gap*) dalam konteks penelitian pemerintah daerah. Sementara penelitian terdahulu lebih banyak menganalisis kinerja *output* (lihat : (Lee *et al.*, 2023; Tourinho *et al.*, 2022; Benito *et al.*, 2021; Gomes *et al.*, 2021; Krah & Mertens, 2020; Spreen *et al.*, 2020; Fonseca *et al.*, 2020; Sibanda *et al.*, 2020, Piña & Avellaneda, 2019; Suzuki & Han, 2019; dan Moreno-Enguix *et al.*, 2019). Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya menitikberatkan

pada satu variabel mekanisme tata kelola sebagai faktor penjelas kinerja pemerintah daerah (lihat : Österberg & de Fine Licht, 2023; Farrell *et al.*, 2022; Rajnoha & Lesnikova, 2022; dan Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021).

Perbedaan mendasar penelitian ini (UU No. 17 Tahun 2014). terletak pada usulan penggunaan variabel emulasi. Usulan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengisi celah penelitian (*gap*) yang belum tersentuh dalam penelitian sebelumnya. Variabel emulasi merupakan kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yang dapat memberikan kontribusi, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Variabel emulasi diusulkan dengan pertimbangan sudah banyak terdokumentasikan dalam penelitian di Eropa dan Amerika. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Lesch & Millar (2022); Baldwin *et al.* (2019); dan Fusco & Allegrini (2020). Namun variabel emulasi masih dikategorikan langka dalam konteks penelitian pengaruh tata kelola terhadap kinerja *outcome* di Indonesia.

Perbedaan mendasar lainnya dapat dilihat pada usulan penggunaan jumlah rapat DPRD sebagai indikator dalam penelitian ini. Penggunaan indikator jumlah rapat DPRD menjadi kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini. Usulan ini disandarkan pada penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Smith *et al.* (2022); Lacalle *et al.* (2021); Freeman (2020); dan Larhsoukanh & Wang (2019). Di Indonesia, rapat DPRD diatur dengan undang – undang (UU No. 17 Tahun 2014). Namun penelitian terdahulu masih terbatas mengobservasi DPRD dengan indikator jumlah rapat DPRD sebagai proksi mekanisme tata kelola. Padahal secara logis, rapat DPRD merupakan fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi terhadap pemerintah daerah (Freeman, 2020 dan UU No. 17 Tahun 2014).

1.4. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, baik kontribusi teoritis maupun kontribusi praktis.

1.4.1. Kontribusi Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat temuan – temuan dari penelitian sebelumnya mengenai tema tata kelola dan kinerja pemerintah daerah. Meskipun tema penelitian ini sudah banyak dilakukan, namun kajian berkaitan dengan kinerja *outcome* pemerintah daerah yang diobservasi dengan indeks pembangunan manusia (IPM) relatif masih belum banyak diulas. IPM dipandang sebagai capaian kinerja yang objektif dan lebih komprehensif karena mencakup pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (Miranda-Lescano *et al.*, 2023 dan Peiró-Palomino *et al.*, 2020). IPM telah diadopsi dan dikenal lebih luas, baik ditingkat nasional maupun global (Shi & Tang, 2020 dan Kuznetsova & Ivashina, 2020). Penelitian ini juga berusaha untuk menjawab bagaimana ketimpangan kinerja berdasarkan capaian IPM pemerintah daerah dan mengaitkannya dengan tata kelola sebagai faktor yang dapat memengaruhinya.
2. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar yang kuat dalam pemilihan teori penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya berkenaan dengan tema yang sama. Hasil pengujian diharapkan menjadi rujukan yang relevan, baik secara teoritis maupun empiris dalam

menetapkan teori penelitian, perluasan mekanisme tata kelola, dan kinerja *outcome*. Gagasan dalam menetapkan teori penelitian bersumber dari penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu tersebut dilakukan oleh Suzuki *et al.* (2022); Keerasuntonpong & Cordery (2018); dan Arifin *et al.* (2015). Harapannya penentuan teori institusional dalam penelitian ini berkontribusi untuk mendukung dan memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh tata kelola terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi dalam membangun variabel tata kelola dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Telaah literatur memungkinkan komponen tata kelola yang dimasukkan dalam penelitian ini cocok dengan tema yang diusulkan. Adapun tata kelola dimanifestasikan dengan DPRD (Farrell *et al.*, 2022), audit internal (Appiah *et al.*, 2023), daya saing (Nam & Ryu, 2023), emulasi (Lesch & Millar, 2022), kualitas manajerial kepala daerah (Ermini *et al.*, 2023), dan predikat (Liu *et al.*, 2021). Kebaruan (*novelty*) yang diajukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada penggunaan indikator untuk variabel DPRD dan variabel emulasi. Keduanya menjadi kontribusi kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan untuk mengembangkan model sebelumnya.
4. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang kongkrit dengan berbagai faktor potensial yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah dari perspektif teori institusional isomorphisme.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Dewan perwakilan rakyat daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat praktik tata kelola pada pemerintah daerah melalui fungsi kontrol DPRD dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Temuan penelitian ini dapat membuka pandangan DPRD bahwa fungsi kontrol DPRD tercermin dari intensitas rapat DPRD. DPRD dapat menggunakan penelitian ini dengan memperkuat mekanisme rapat DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara substantif, bukan sekedar rutinitas.

2. Kepala daerah

Penelitian ini dapat memberi penjelasan bahwa kualitas manajerial merupakan aspek esensial. Kualitas manajerial kepala daerah tercermin dari pengalaman yang dimilikinya melalui kemampuan beradaptasi atau terbuka dalam menerima dan memahami masukan dari profesional, baik secara lembaga maupun individu dalam meningkatkan kinerja.

3. Pemerintah daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini untuk memahami praktik tata kelola yang berimplikasi langsung pada peningkatan kinerja, baik melalui audit internal, daya saing, emulasi, dan perolehan predikat. Temuan penelitian dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah yang belum sukses untuk meniru pemerintah daerah lain yang lebih sukses,

baik melalui emulasi maupun imitasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memotivasi pemerintah daerah di negara berkembang lainnya untuk berupaya menerapkan tata kelola dalam meningkatkan kinerjanya.

4. Masyarakat

Hasil penelitian dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah menerapkan prinsip – prinsip tata kelola dalam meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar untuk memberi kritik atau masukan yang lebih objektif pada pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik.

1.5. Sistematika Penulisan

Disertasi ini disusun dalam enam bab dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 membahas latar belakang masalah mengenai kesenjangan kinerja *outcome* dan faktor yang dipandang memengaruhinya, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 mengulas penggunaan teori yang relevan berdasarkan literatur terdahulu. Bab 2 juga menelaah kinerja secara umum, kinerja pemerintah daerah sebagai bagian sektor publik, dan hubungan mekanisme tata kelola pemerintahan dengan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, bab 2 mengulas penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mengembangkan model penelitian.

Bab 3 menguraikan hubungan teori institusional yang dirumuskan kedalam enam variabel mekanisme tata kelola pemerintahan dan kinerja pemerintah daerah. Enam variabel tata kelola pemerintah daerah yaitu DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat pemerintah daerah. Hubungan tersebut menjadi dasar untuk membangun hipotesis penelitian dan kerangka model penelitian.

Bab 4 menjelaskan metodologi penelitian. Penjelasan terdiri dari jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data penelitian, definisi operasional variabel, bentuk estimasi model regresi data panel, uji pemilihan estimasi model regresi data panel, uji *goodness of fit*, uji koefisien determinasi, uji asumsi, kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis, dan uji tambahan.

Bab 5 menyajikan analisis dan pembahasan. Penjelasan dimulai dari proses pengumpulan data, pembahasan hasil statistik deskriptif, hasil uji pemilihan estimasi model regresi data panel, bentuk estimasi model regresi, hasil uji *goodness of fit*, hasil uji koefisien determinasi, hasil uji asumsi, pengujian hipotesis, uji *robustness*, pembahasan hasil pengujian, dan hasil uji tambahan.

Bab 6 merupakan ringkasan dari keseluruhan disertasi sebagai penutup. Ringkasan ini terdiri dari simpulan, kontribusi penelitian, dan keterbatasan penelitian dan saran penelitian selanjutnya. Pada akhir disertasi ini dilengkapi daftar pustaka dan lampiran – lampiran untuk mendukung hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Institusional

Literatur secara luas memusatkan perhatian pada perubahan organisasi di sektor publik. Hal ini berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penelitian organisasi pemerintah daerah (Suzuki *et al.*, 2022; Belle *et al.*, 2019; dan Piña & Avellaneda, 2019). Studi sebelumnya telah mencoba dan menguji berbagai teori yang paling berpengaruh untuk memprediksi dan menjelaskan dinamika organisasi (Walker & Andrews, 2015). Salah satunya adalah teori institusional (*Institutional Theory*) yang sudah terkenal sebagai penjelas yang populer dan kuat untuk tindakan individu dan organisasi (Dacin *et al.*, 2002). Menurut Frumkin & Galaskiewicz (2004) sejumlah penelitian menunjukkan relevansi teori institusional untuk organisasi nirlaba, organisasi sektor swasta, organisasi konsultan hukum, organisasi teknologi, dan organisasi sektor publik.

Pada konteks organisasi sektor publik, teori institusional menjadi acuan terbanyak untuk menjelaskan struktur dan perubahan suatu organisasi (Ahyaruddin & Akbar, 2018). Keerasuntonpong & Cordery (2018) menyatakan bahwa teori institusional sangat relevan dengan studi sektor publik. Adapun teori institusional didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang dilembagakan yang khas untuk menjelaskan keberadaan dan/atau elaborasi struktur organisasi (Scott, 1987). Menurut Deephouse (1996); Kondra & Hinings (1998); Purcell *et al.* (2014) dan Ashworth *et al.* (2009) teori institusional merupakan lingkungan organisasi yang dicirikan oleh elaborasi aturan dan persyaratan organisasi yang

secara individu harus sesuai, jika ingin menerima dukungan dan legitimasi. Belle *et al.* (2019); DiMaggio & Powell (1983); dan Meyer & Rowan (1977) menegaskan bahwa organisasi dapat menjadi isomorfisme karena tekanan institusional (*institutional isomorphism*). Isomorfisme dapat terjadi melalui : 1) isomorfisme koersif yang berasal dari pengaruh politik dan masalah legitimasi; 2) isomorfisme mimetik yang dihasilkan dari respons standar terhadap ketidakpastian; dan 3) isomorfisme normatif, terkait dengan profesionalisme

Beberapa literatur secara luas menggunakan teori institusional pada entitas sektor publik untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena yang terjadi (Keerasuntonpong & Cordery, 2018). Penelitian tersebut dilakukan, antara lain : pembangunan ekonomi pemerintah daerah (Suzuki *et al.*, 2022), penilaian kinerja keuangan dan kinerja layanan pemerintah daerah (George *et al.*, 2020), pengambilan keputusan entitas sektor publik (Belle *et al.*, 2019), praktik tata kelola pemerintah daerah (Lohrey *et al.*, 2019), kepatuhan pajak (Valenty & Kusuma, 2019), penggunaan teknologi informasi dan aplikasi pengajuan hibah pada pemerintah daerah (Piña & Avellaneda, 2018), pengungkapan kinerja layanan pemerintah daerah (Keerasuntonpong & Cordery, 2018), implementasi sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah (Sofyani *et al.*, 2018), proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah atau LAKIP (Ahyaruddin & Akbar, 2018 dan Akbar *et al.*, 2015), pengungkapan kinerja layanan pemerintah daerah (Keerasuntonpong *et al.*, 2017), pengungkapan wajib pemerintah daerah (Arifin *et al.*, 2015), dan pengelolaan layanan pemerintah daerah (Ashworth *et al.*, 2009).

Literatur terdahulu tersebut menjadi rujukan untuk menggunakan teori institusional sebagai landasan teori penelitian. Penelitian ini memandang bahwa teori institusional sangat relevan untuk menjelaskan kinerja pada pemerintah daerah. Penetapan menggunakan teori institusional dengan argumen bahwa teori institusional dicirikan dengan lingkungan eksternal yang berada diluar Kendali organisasi, tetapi dapat memengaruhi kinerja organisasi (Tran & Villano, 2019; Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018; Kondra & Hinings, 1998; Ashworth *et al.*, 2009; dan Sharfman & Dean, 1991). Menurut Nugrahani *et al.* (2023) organisasi saling memengaruhi untuk menyerupai satu sama lainnya dalam bentuk dan praktiknya di lingkungan yang sejenis. Teori ini sejalan dengan mekanisme tata kelola pada pemerintah daerah yang terkait erat dengan lingkungan eksternal dalam berbagai proses dan hubungan (Boas *et al.*, 2018). Tata kelola dipandang sebagai mekanisme pemantau dari pemangku kepentingan yang berada diluar organisasi (Halme & Huse, 1997). Pada penelitian ini lingkungan eksternal diobservasi dengan mekanisme eksternal, antara lain : DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat pemerintah daerah.

2.2. Kinerja (*Performance*)

Konsep kinerja telah mendapatkan sorotan yang semakin besar dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini menyebar di semua bidang aktivitas manusia (Iuliana & Maria, 2016). Namun, kesepakatan belum tercapai mengenai definisi, metodologi dan model kinerja (Pintea & Achim, 2010). Konsep kinerja bersifat pluralistik dan menunjukkan kemampuan untuk bermigrasi (polisemantik)

dari satu makna ke makna lainnya (Pintea & Achim 2010). Sifat polisemantik inilah yang menjadikan konsep kinerja sulit untuk dikarakterisasi dan didefinisikan, seringkali terlalu umum atau terlalu spesifik, ambigu atau bahkan abstrak (Iuliana & Maria, 2016). Pada akhirnya, kinerja masih menjadi konsep multidimensi yang belum memiliki definisi tunggal dan mencakup sifat yang dapat diubah tergantung pada konteksnya (Ghalem *et al.*, 2016).

Istilah kinerja muncul pada pertengahan abad kesembilan belas dan pertama kali digunakan dalam menentukan hasil pertandingan olahraga (Iuliana & Maria, 2016). Namun, lambat laun, konsep kinerja mulai banyak digunakan di bidang lain, termasuk di bidang ekonomi (Pintea & Achim, 2010), bidang manajemen, dan bidang akuntansi (Bessire, 1999). Pintea & Achim (2010) menambahkan ada beberapa upaya untuk mendefinisikan kinerja secara umum dan menerapkan konsep kinerja secara ekonomi pada berbagai jenis organisasi. Namun studi menjelaskan bahwa konsensus mengenai definisi kinerja sulit dicapai karena semua aktivitas yang terjadi dalam organisasi dan stakeholder yang terlibat berbeda kepentingan. Literatur ilmiah mengenai organisasi jarang mendefinisikan konsep kinerja organisasi, meskipun sering menggunakannya (Iuliana & Maria, 2016). Pada konteks ini, peninjauan kembali definisi kinerja organisasi merupakan hal yang penting dilakukan.

Menurut George (1996) kinerja adalah perilaku yang berorientasi pada penonton (pengguna). Brumback (1988) berpandangan bahwa kinerja berarti perilaku dan hasil. Sonnentag & Frese (2005) menjelaskan bahwa kinerja sebagai aspek tindakan (yaitu, perilaku) dan aspek hasil. Adapun Neely *et al.* (2002)

mengkaitkan kinerja dengan tindakan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien. Efektivitas merujuk pada sejauh mana persyaratan pemangku kepentingan terpenuhi, sedangkan efisiensi yaitu ukuran seberapa ekonomis sumber daya perusahaan yang digunakan ketika memberikan tingkat kepuasan pemangku kepentingan tertentu. Namun demikian, tidak setiap perilaku mencerminkan konsep kinerja, hanya tindakan yang dapat diskalakan atau diukur yang dianggap sebagai kinerja dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi (Campbell & Wiernik, 2015). Bourguignon (1997) berpendapat bahwa kinerja yaitu : a). Kinerja adalah tindakan, yaitu proses dan bukan hasil yang muncul pada suatu waktu. b). Kinerja diartikan hasil dari tindakan yang dipahami sebagai "*ex post assessment the results*". c). Kinerja berarti berhasil.

2.3. Kinerja Pemerintah Daerah

Tema kinerja publik semakin banyak diangkat di kalangan politik, administrasi, dan akademik selama beberapa tahun terakhir (Maurel *et al.*, 2014). Menurut Campo *et al.* (2021) kinerja pemerintah menjadi sorotan masyarakat dalam memberikan layanan yang lebih baik. Begitupun kinerja pemerintah daerah tidak lepas menjadi perhatian utama dari para ahli sektor publik (Hue & Sun, 2022 dan Lohrey *et al.*, 2019). Di Eropa, masyarakat mengevaluasi pemerintah daerah melalui kinerjanya (Bjørnå & Weigård, 2020). Kemudian Kessner (2022) menjelaskan bahwa kinerja sebagai salah satu bidang kebijakan yang sangat cocok untuk komunikasi strategis pada pemerintah daerah.

Di sisi lain, para ahli sektor publik belum memiliki kesamaan pandangan terkait definisi kinerja pemerintah. Literatur mendokumentasikan definisi kinerja pemerintah dari beberapa ahli sektor publik. Dubnick (2005) mengartikan kinerja sektor publik sebagai perilaku atau tindakan yang disengaja dari aktor organisasi publik yang memiliki kapasitas untuk melakukan dan mengubah berbagai faktor dalam fungsi produksi ke arah *results – outputs* dan *outcome*. Vignieri (2018); Maurel *et al.* (2014); Summermatter & Siegel (2009); dan Palmer (1993) memberikan definisi kinerja sektor publik yaitu berkaitan dengan faktor ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (3E) dan berkaitan dengan *input*, *output* dan *outcome* (IOO). Talbot (1999) merumuskan kinerja sektor publik sebagai : (1) hubungan efisiensi antara *input* dan *output*, (2) mengurangi *input* atau biaya *input*, (3) proses dan ekuitas yang tepat, dan (4) hubungan antara *input*, *output* dan *outcome*.

Walker & Andrews (2015) berpandangan bahwa kinerja sektor publik meliputi 3E : ekonomi, efisiensi dan efektivitas layanan publik dan model *input-output-outcome* (IOO). Ekonomi cerminan dari biaya pengadaan *input* layanan tertentu, efisiensi digambarkan dengan biaya per unit dan efektivitas dilihat dari pencapaian tujuan layanan. *input* dijelaskan dengan ekonomi, *output* diwujudkan dengan kuantitas dan kualitas, dan *outcome* dikaitkan dengan efisiensi. Menurut Worthington & Dollery (2000) efisiensi menggambarkan penggunaan sumber daya dalam memproduksi layanan dan efektivitas yang sesuai dengan tujuan program dan kebijakannya. Dooren *et al.* (2015) berpandangan bahwa kinerja pemerintah seperti konsep proses produksi. Pandangan ini menjadi rujukan untuk menjelaskan alur kinerja pemerintah daerah (lihat gambar II.1).

terhadap sumber daya lainnya, efisiensi (9) sebagai rasio sumber daya terhadap keluaran (*output*), dan efektivitas biaya (10) sebagai rasio sumber daya terhadap hasil (*outcome*) untuk menilai penggunaan sumber daya. Begitupun evaluasi manfaat dan keberlanjutan (11) harus dipertimbangkan dalam rangka untuk memastikan hasil (*outcome*) benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil yang dicapai juga harus dievaluasi melalui dimensi efektivitas (12) sebagai rasio keluaran (*output*) terhadap hasil (*outcome*).

Manfaat atau dampak kinerja termanifestasikan melalui hasil sementara (*intermediate outcome*) (13) yang bersifat jangka pendek maupun hasil akhir (*final outcome*) (14) yang bersifat jangka panjang. Hasil ini mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun demikian, pencapaian hasil akhir tidak dapat dilepaskan dari pengaruh konteks (15) lingkungan eksternal di mana organisasi atau program beroperasi (16). Faktor lingkungan eksternal tersebut dapat membatasi atau bahkan meniadakan dampak yang diharapkan.

Berdasarkan pemaparan dan definisi kinerja tersebut, maka penelitian ini menyoroti kinerja pemerintah daerah dari sudut pandang kinerja hasil (*outcome*). Sesuai dengan saran literatur sebelumnya, penelitian terkini bergeser ke arah kinerja *outcome* (Hansen, 2023). Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Fasiello *et al.* (2022); Korac *et al.* (2020); dan Mas *et al.* (2019) bahwa penelitian terkini yang membahas kinerja sektor publik berorientasi pada kinerja *outcome*. Begitupun Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menekankan untuk lebih fokus pada kinerja hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai.

2.4. Tata Kelola dan Kinerja Pemerintah Daerah

Konsep tata kelola telah dibahas secara luas di antara pembuat kebijakan dan para ahli (Ramasamy, 2020 dan Kaufmann *et al.*, 2011). Tata kelola menjadi kata yang banyak didengar di seluruh dunia dan menjadi istilah umum serta telah menjadi kajian sosial yang modern (Vyasulu, 2015 dan Almquist *et al.*, 2013). Namun, Istilah tata kelola sulit untuk didefinisikan karena bersifat kualitatif dari konsep tersebut (Stanica & Aristigueta, 2019 dan Meyer, 2018). Sampai saat ini belum ada konsensus yang kuat seputar definisi tunggal tata kelola yang dapat diterima secara universal (Ramasamy, 2020; Kaufmann *et al.*, 2011; dan Barrett, 2002), akan tetapi mencakup berbagai arti dan persepsi (Almquist *et al.*, 2013). Hal ini menimbulkan perdebatan ilmiah tentang masalah tata kelola yang menghasilkan sejumlah definisi yang berbeda (Stanica & Aristigueta, 2019 dan Yong & Wenhao, 2012). Perbedaan definisi ini menjadikan tata kelola kaya akan makna, tetapi semua pemahaman tentang tata kelola memiliki setidaknya kemiripan (Welch, 2012). Ini ditunjukkan dari berbagai literatur akademis yang telah mengulas berbagai definisi tentang tata kelola (Walton, 2020 dan Kaufmann *et al.*, 2011).

OECD *Principles of Corporate Governance* (1999; 2004; 2015) memberikan definisi bahwa tata kelola merupakan hubungan antar peserta (pemangku kepentingan) yang saling memengaruhi. Sementara pada sektor publik, Mishra & Attri (2020) dan Keping (2018) mendefinisikan tata kelola sektor publik sebagai konsep multifaset (berbagai segi), mencakup semua aspek

pelaksanaan kewenangan, melalui lembaga formal dan informal dalam pengelolaan dan distribusi sumber daya negara. Adapun Kaufmann *et al.* (2011) mendefinisikan tata kelola sektor publik sebagai tradisi dan institusi di mana otoritas di suatu negara dijalankan. Ini termasuk (a) proses dimana pemerintah dipilih, dipantau, dan diganti; (b) kapasitas pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif; dan (c) penghormatan warga negara terhadap institusi yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka.

Penerapan tata kelola pada sektor swasta digunakan untuk melindungi kepentingan stakeholder (Al-Najjar & Abed, 2014 dan Ji *et al.*, 2015). Meskipun konsep tata kelola bukan satu-satunya alat untuk melindungi stakeholder, tetapi setidaknya tata kelola dapat mengurangi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Madanoglu & Karadag, 2016). Sementara pada sektor publik, seperti pemerintah daerah bahwa tata kelola dipandang sebagai jawaban untuk mengatasi kompleksitas pemerintahan dan menyediakan berbagai praktik yang bermanfaat untuk memperluas kapasitas penyampaian layanan publik (Stanica & Aristigueta, 2019). Tata kelola dipuji oleh banyak akademisi dan praktisi sektor publik karena sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan membangun iklim kepercayaan antara institusi dan pemangku kepentingan (Cruz *et al.*, 2016).

Menurut Cárcaba *et al.* (2022) mekanisme tata kelola bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Vyasulu (2015) penerapan praktik tata kelola telah dilihat sebagai syarat yang diperlukan bagi suatu negara untuk pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan penting dan mengurangi kemiskinan. Trommel (2020) menjelaskan secara realitas penerapan

tata kelola sebagai cita-cita normatif untuk organisasi sektor publik dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Almquist *et al.* (2013) memberi catatan bahwa berbagai usaha pembenahan mekanisme tata kelola terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja di sektor publik menuju pemerintahan yang modern.

2.5. Penelitian Terdahulu

Telaah penelitian terdahulu telah dilakukan dengan menggali penelitian yang relevan dengan konteks penelitian. Penelitian terdahulu dengan tema tata kelola di sektor publik dan kinerja sektor publik ditelaah untuk mendukung penelitian ini. Hasil temuan dari penelitian tersebut menjadi acuan dalam pengembangan model penelitian. *Literature review* berikut ini membahas komponen tata kelola pemerintah daerah dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. *Review* penelitian sebelumnya dirangkum dalam Tabel II.1 :

Tabel II.1.
Komponen Tata Kelola Dapat Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	DPRD	Farrell <i>et al.</i> (2022)	Bentuk rapat (rapat tertutup, rapat terbuka, dan rapat menghadap ke depan) meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Smith <i>et al.</i> (2022)	Semakin sering menyelenggarakan rapat semakin meningkat kinerja pemerintah daerah
		Freeman (2020)	Rapat DPRD meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Larhsoukanh & Wang (2019)	Semakin meningkat frekuensi rapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Lanjutan Tabel II.1.

No.	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
2.	Audit Internal	Appiah <i>et al.</i> (2023)	Audit internal meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Edmonds <i>et al.</i> (2023)	Audit internal meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Österberg & Licht (2023)	Audit internal dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Rich <i>et al.</i> (2021)	Perubahan auditor meningkatkan kinerja pemerintah daerah
3.	Daya Saing	Nam & Ryu (2023)	Daya saing pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Rajnoha & Lesnikova (2022)	Daya saing pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Arrona <i>et al.</i> (2020)	Semakin tinggi tingkat daya saing pemerintah daerah semakin meningkat kinerja pemerintah daerah
		Vukovic <i>et al.</i> (2020)	Semakin meningkat daya saing pemerintah daerah semakin meningkat kinerja pemerintah daerah
4.	Emulasi	Lesch & Millar (2022)	Ketidakpastian (kondisi/krisis ekonomi dan keuangan) menjadi faktor pendorong yang kuat dalam mengambil keputusan untuk mengadaptasi kebijakan
		Fusco & Allegrini (2020)	Pemerintah daerah yang kinerjanya tinggi akan berpengaruh meningkatkan kinerja pemerintah daerah yang berdekatan
		Baldwin <i>et al.</i> (2019)	Semakin tinggi biaya sewa maka semakin kuat dalam pengambilan keputusan untuk mengadopsi kebijakan

Lanjutan Tabel II.1.

No.	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
5.	Kualitas Manajerial Kepala Daerah	Ermini <i>et al.</i> (2023)	Gender kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva (2021)	Gender kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Kim (2021)	Keahlian kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Lu <i>et al.</i> (2020)	Masa jabatan dan pendidikan kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Olvera & Avellaneda (2019)	Pengalaman kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintan daerah
6	Predikat	Octavio & Urumsah (2024)	Peringkat meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Liu <i>et al.</i> (2021)	Peringkat meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Acuto & Leffel (2021)	Peringkat meningkatkan kinerja pemerintah daerah
		Mehrpouya & Samiolo (2016)	Peringkat merangsang persaingan dan mendorong dalam meningkatkan kinerja

Tabel II.1 memperlihatkan bahwa berbagai faktor dari tata kelola tersebut dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, antara lain : DPRD (Farrell *et al.*, 2022; Smith *et al.*, 2022; Freeman, 2020; Larhsoukanh & Wang, 2019), audit internal (Appiah *et al.*, 2023; Edmonds *et al.*, 2023; Österberg & Licht, 2023; dan Rich *et al.*, 2021), daya saing (Nam & Ryu, 2023; Rajnoha & Lesnikova, 2022; Arrona *et al.*, 2020; dan Vukovic *et al.*, 2020), emulasi (Lesch & Millar, 2022; Fusco &

Allegrini, 2020; dan Baldwin *et al.*, 2019, kualitas manajerial kepala daerah (Ermini *et al.*, 2023; Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021; Kim, 2021; Lu *et al.*, 2020; dan Olvera & Avellaneda, 2019), dan predikat (Octavio & Urumsah, 2024; Liu *et al.*, 2021; Acuto & Leffel, 2021; dan Mehrpouya & Samiolo, 2016).

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berlawanan. Tabel II.2. menginformasikan hal tersebut, seperti hasil penelitian Lacalle *et al.* (2021) untuk faktor DPRD, kemudian Li *et al.* (2023) pada faktor daya saing, Piña & Avellaneda (2018) faktor emulasi, Bastos & Sánchez (2024) bagi faktor kualitas manajerial kepala daerah, dan Shi *et al.* (2019) faktor predikat.

Tabel II.2.
Komponen Tata Kelola Dapat Menurunkan Kinerja Pemerintah Daerah

No.	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
1	DPRD	Lacalle <i>et al.</i> (2021)	Semakin menurun jumlah rapat DPRD, maka semakin meningkat kinerja pemerintah daerah
2	Daya saing	Li <i>et al.</i> (2023)	Daya saing yang semakin meningkat menurunkan kinerja pemerintah daerah
3	Emulasi	Piña & Avellaneda (2018)	Semakin kuat kerjasama antar pemerintah daerah maka semakin menurun tingkat penggunaan teknologi
4	Kualitas Manajerial Kepala Daerah	Bastos & Sánchez (2024)	Pendidikan kepala daerah menurunkan kinerja pemerintah daerah
5	Predikat	Shi <i>et al.</i> (2019)	Semakin tinggi peringkat kota maka semakin menurun pengungkapan informasi lingkungan

Pada kenyataannya faktor-faktor tersebut tidak selalu dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan temuan yang berbeda, tidak memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tabel III.3. menyajikan

hasil penelitian yang tidak berpengaruh, antara lain : Gomes *et al.* (2022) dan Arifin *et al.* (2015) nampak pada faktor DPRD, Dzomira (2020) pada faktor audit internal, Brunjes (2020) terlihat pada faktor daya saing, Keerasuntonpong & Cordery (2018) dan Andersen & Jakobsen, 2018) atas faktor emulasi, Briano-Turrent (2023) untuk faktor kualitas manajerial kepala daerah, dan Plaček *et al.* (2021) atas faktor predikat.

Tabel II.3.

Komponen Tata Kelola Tidak Dapat Memengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah			
No.	Variabel Independen	Peneliti	Hasil Penelitian
1	DPRD	Gomes <i>et al.</i> (2022)	DPRD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
		Arifin <i>et al.</i> (2015)	DPRD tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
2	Audit Internal	Dzomira (2020)	Audit internal tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
3	Daya saing	Özdamar <i>et al.</i> (2022)	Daya saing pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah
4	Emulasi	Keerasuntonpong & Cordery (2018)	Praktik terbaik tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap kinerja layanan pemerintah daerah
		Andersen & Jakobsen (2018)	Pemerintah daerah tidak meniru organisasi lain dalam meningkatkan kinerjanya
5	Kualitas Manajerial Kepala Daerah	Briano-Turrent (2023)	Gender wAli kota tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah
6	Predikat	Plaček <i>et al.</i> (2021)	Penghargaan tidak berpengaruh terhadap kinerja

BAB III

PENGEMBANGAN HIPOTESIS DAN KERANGKA PENELITIAN

3.1. Pengembangan Hipotesis Penelitian

3.1.1. Pengaruh DPRD terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Literatur menjelaskan bahwa perubahan organisasi sebagai isu penting dalam penelitian (Klein *et al.*, 2022; Alvesson & Spicer, 2019; Ashworth *et al.*, 2009; dan Davis, 2006). Salah satu pemicu perubahan organisasi didorong oleh lingkungan eksternal, seperti pemangku kepentingan, implementasi praktik dan teknologi organisasi lain, dan ketergantungan sumber daya (Beycioglu & Kondakci, 2021 dan Piña & Avellaneda, 2018). Menurut Yang & Nowell (2021); Annesi *et al.* (2021; Latif *et al.* (2020); Ashworth *et al.* (2009); Dacin *et al.* (2002); Zucker (1987); dan Tolbert & Zucker (1983) perubahan organisasi dari waktu ke waktu mengikuti dinamika lingkungan eksternal, baik perilaku (tindakan) dan praktik untuk meningkatkan kinerja. Choi & Woo (2022) dan DiMaggio & Powell (1983) berpendapat bahwa secara rasional organisasi akan berubah menyesuaikan atau meniru karakteristik lingkungannya, sehingga perilaku dan praktik organisasi cenderung homogen atau isomorfisme.

Konsep isomorfisme organisasi merupakan kerangka pikir teori institusional (Piña & Avellaneda, 2018 dan DiMaggio & Powell, 1983). Proposisi teori institusional mendalilkan bahwa isomorfisme organisasi dapat terjadi melalui tekanan koersif (tekanan dari peraturan atau regulasi), tekanan mimetik (tekanan untuk meniru), dan tekanan normatif (tekanan dari profesional), baik bersifat formal maupun informal (DiMaggio & Powell, 1983). Menurut George *et al.*,

(2020); Keerasuntonpong & Cordery (2018); dan Alonso *et al.* (2016) isomorfisme lebih rentan dialami organisasi publik, termasuk kinerja pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tuntutan berbagai pemangku kepentingan terhadap pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik yang setara dengan pemerintah daerah lain (Cordery & Hay, 2022; Trojanek *et al.*, 2021; Fusco & Allegrini, 2020).

Pemangku kepentingan eksternal pada pemerintah daerah salah satunya adalah DPRD (Pilcher, 2011). DPRD merupakan badan legislatif dan pengendali di pemerintah daerah (Kmak, 2020 dan UU no. 17 Tahun 2014). Pada konteks pemerintah daerah di Indonesia, DPRD memiliki tiga fungsi yaitu : a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Berdasarkan regulasi, DPRD berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan, dan belanja daerah kabupaten/kota, dan meminta laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah (UU No. 9 Tahun 2015 dan UU. No. 17 tahun 2014). Menurut Avellaneda & Gomes (2017) dan Mir *et al.* (2015) fungsi DPRD tersebut menunjukkan mitra kerja dari pemerintah daerah, sehingga mencerminkan mekanisme tata kelola. Smith *et al.* (2022) dan Otjes *et al.* (2022) menyatakan bahwa mekanisme tata kelola di pemerintah daerah terlihat dari peran DPRD yaitu pembuatan kebijakan dan pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mekanisme tata kelola pemerintah daerah yang diatur dengan regulasi melalui fungsi DPRD merefleksikan kekuatan koersif dalam teori institusional (Beycioglu & Kondakci, 2021; Piña & Avellaneda, 2018; DiMaggio & Powell, 1983). Fungsi pengawasan DPRD sebagai kekuatan koersif direalisasikan dengan

kegiatan rapat. Rapat merupakan berkumpul untuk berbicara dan mengambil keputusan tentang masa depan bersama (Van Vree, 2011). Menurut Schwartzman (1989) rapat diartikan sebagai suatu peristiwa komunikatif atau interaksi spesifik yang melibatkan dua orang atau lebih yang sepakat berkumpul, bertukar pikiran atau pendapat, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Larhsoukanh & Wang (2019) menyatakan bahwa rapat yang optimal dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam meningkatkan kinerja. Eluyela *et al.* (2018) dan Brick & Chidambaran (2010) menyampaikan bahwa intensitas rapat DPRD yang lebih banyak memungkinkan lebih banyak informasi dan pengetahuan sehingga meningkatkan nilai kinerja organisasi.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa rapat DPRD dapat memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Farrell *et al.* (2022) melakukan studi dengan menyoroti desain tempat rapat DPRD terhadap kualitas tata kelola pada pemerintah daerah di Inggris. Hasil analisis menunjukan bahwa bentuk rapat DPRD signifikan positif terhadap kualitas tata kelola. Kemudian Smith *et al.* (2022) melakukan studi deskriptif kualitatif tentang perilaku DPRD terhadap tugasnya di Swedia. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa perilaku dewan yang diobservasi dengan rapat DPRD dapat meningkatkan fungsi pengawasan (*control*) atas kemajuan proyek dan anggaran, memperluas jaringan layanan, meningkatkan legitimasi perusahaan daerah, meningkatkan praktik akuntansi, dan menurunkan konflik antar pemangku kepentingan. Freeman (2020) melakukan investigasi tentang peran anggota DPRD. Investigasi dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan temuan bahwa rapat menjadi inti dari pekerjaan anggota DPRD.

Uraian pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan regulasi pada DPRD memiliki peranan yang kuat dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. DPRD menjalankan perannya melalui rapat sebagai bentuk aktivitas pengawasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi terlembagakan dari waktu ke waktu (Smith *et al.*, 2022; Lacalle *et al.*, 2021; dan Freeman, 2020). Secara empiris, peran DPRD yang diatur dengan regulasi lebih cocok menggunakan teori institusional (Cordery & Hay, 2022; George *et al.*, 2020; Altayar, 2018; Piña & Avellaneda, 2018). Intensitas rapat DPRD berpotensi meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Smith *et al.*, 2022; Freeman, 2020; Eluyela *et al.*, 2018). Perspektif ini menimbulkan interpretasi bahwa rapat DPRD yang sering dilakukan akan memiliki tekanan yang lebih kuat dibandingkan dengan yang jarang dilakukan. Semakin sering DPRD mengadakan rapat sebagai bentuk pengawasan, semakin kuat mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Argumen – argumen tersebut digunakan untuk membangun hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H₁ : DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.2. Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Teori institusional memandang bahwa organisasi pada akhirnya akan tampak mirip satu sama lain atau homogen (Hay & Cordery, 2021 dan Frumkin & Galaskiewicz, 2004). Homogenitas organisasi tercipta oleh tiga kekuatan, yaitu kekuatan koersif yang berkaitan dengan regulasi, kekuatan mimetik berkaitan

dengan memodelkan dengan organisasi lain, dan kekuatan normatif berkaitan dengan saran dari profesional (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022; Piña & Avellaneda, 2018; dan DiMaggio & Powell, 1983). Menurut Cordery & Hay (2022); Luo *et al.* (2023); dan Abouassi & Bies (2017) homogenitas organisasi cenderung lebih sensitif pada organisasi sektor publik, karena berbagai tuntutan, seperti regulasi, akreditasi, pengawasan, dan hubungan pendanaan. Begitupun pada organisasi pemerintah daerah, homogenitas kinerja pemerintah daerah mengarah serupa antara daerah satu dengan lainnya karena diatur oleh regulasi (PP No. 71 Tahun 2010).

Homogenitas kinerja pemerintah daerah dapat didorong dengan faktor tekanan koersif (DiMaggio & Powell, 1983). Tekanan koersif termanifestasikan dengan regulasi yang dibuat untuk mengontrol pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik sebagai capaian kinerja (Rozario & Issa, 2020). Kontrol terhadap pemerintah daerah dengan regulasi dapat dilakukan melalui audit internal (Appiah *et al.*, 2023 dan Alqudah *et al.*, 2019). *The Chartered Institute of Internal Auditors* (CIIA) mendefinisikan audit internal yaitu aktivitas konsultasi dan asurans (keandalan informasi) yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kinerja organisasi (Rosa *et al.*, 2014). Sementara audit internal pada pemerintah daerah sesuai dengan *Code of Practice* CIPFA didefinisikan sebagai fungsi jaminan yang memberikan pendapat independen dan objektif kepada organisasi tentang lingkungan pengendalian dengan mengevaluasi efektivitasnya dalam mencapai tujuan organisasi (White *et al.*, 2020).

Audit internal merupakan pilar utama tata kelola melalui pemantauan akuntansi dan keuangan, operasional, dan manajemen risiko (Vadasi *et al.*, 2020; Lenz *et al.*, 2018; dan Arena & Jeppesen, 2016). Pada pemerintah daerah, audit internal yaitu sebagai landasan tata kelola dan jantung akuntabilitas administrasi publik (Aikins, 2013). Peran audit internal dalam tata kelola di pemerintah daerah adalah untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya keuangan dengan mengidentifikasi pemborosan, inefisiensi dan penipuan dalam item anggaran (Alqudah *et al.*, 2019 dan Aikins, 2011). Menurut Österberg & Licht, 2023; Postula *et al.* (2020); dan Ferry *et al.* (2017) peran audit internal dalam tata kelola berpotensi untuk memperkuat kontrol, memastikan keandalan informasi, mencegah penipuan, penasehat independen, melindungi aset, akuntabilitas, dan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemangku kepentingan.

Audit internal pada pemerintah daerah di Indonesia menjalankan fungsinya dalam struktur inspektorat daerah kabupaten/kota yang diatur oleh regulasi (UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020). Tugas dan fungsi inspektorat kabupaten dan kota yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan penyusunan laporan hasil pengawasan (PP No. 72 Tahun 2019). Meskipun auditor internal menjadi bagian struktur inspektorat pemerintah daerah, tetapi fungsi pengawasan dilakukan secara independen, karena audit internal berada dalam arahan dan bimbingan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP (Perpres No. 192 tahun 2014).

BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di bawah presiden (Perpres No. 192 tahun 2014). Menurut Arifin (2022) independensi audit internal berpedoman Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Independensi ini dapat dilihat pada PP No. 72 Tahun 2019 bahwa jika ada konflik kepentingan dalam menjalankan fungsinya maka inspektorat dapat melaporkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Adapun pelaksana audit internal pemerintah daerah yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP (Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 35 Tahun 2018). Menurut peraturan BPKP No. 5 Tahun 2023 APIP harus melalui uji sertifikasi untuk berhak menyandang auditor internal pemerintah daerah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa inspektorat daerah memiliki independensi yang memadai karena diposisikan sebagai perpanjangan tangan dari BPKP.

Literatur sebelumnya mendorong untuk menginvestigasi audit internal pada pemerintah daerah (Nerantzidis *et al.*, 2020). Beberapa penelitian memberikan bukti bahwa peranan audit internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, antara lain : Appiah *et al.* (2023); Edmonds *et al.* (2023); Österberg & Licht (2023); dan Rich *et al.* (2021). Penelitian Appiah *et al.* (2023) menginvestigasi audit internal dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah di Ghana. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa audit internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Edmonds *et al.* (2023) melakukan penelitian tentang pengaruh audit internal terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian membuktikan bahwa kelemahan audit internal dapat meningkatkan biaya utang pemerintah daerah. Kemudian Österberg & Licht (2023) menganalisis audit

internal terhadap kinerja layanan lanjut usia di Swedia. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil temuan bahwa para aktor yang terlibat dalam audit (auditor dan auditee) secara bersama-sama mengembangkan objek kinerja layanan lanjut usia menjadi objek yang dapat diaudit. Sementara Rich *et al.* (2021) menganalisis perubahan auditor pemerintah daerah yang tergabung dalam *International City/County Management Association* (ICMA) terhadap kinerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Penjelasan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa fungsi pengawasan audit internal meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan audit internal mengacu pada serangkaian standar, proses, dan struktur yang ditetapkan oleh regulasi (Turetken *et al.*, 2020). Pada pemerintah daerah, regulasi terkait audit internal mengatur juga ketersediaan sumber daya (Abdelrahim & Al-Malkawi, 2022). Menurut Ferry *et al.* (2017) dan Wicaksono & Sutaryo (2017) kecukupan auditor menjadi faktor penting dalam menentukan kinerja pemerintah daerah. Dukungan regulasi terkait fungsi audit internal dan ketersediaan auditor internal mencerminkan teori institusional dari sisi tekanan koersif (George *et al.*, 2020 dan DiMaggio & Powell, 1983). Argumen – argumen tersebut dapat diartikan bahwa semakin banyak auditor internal, semakin kuat daya kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.3. Pengaruh Daya Saing terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Literatur menjelaskan bahwa teori institusional isomorfisme dapat menggambarkan dinamika homogenisasi suatu organisasi (Depoers & Jérôme, 2020). DiMaggio & Powell (1983) berpendapat bahwa proses isomorfisme melalui mekanisme koersif, mimetik, dan normatif. Barnett *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa teori institusional isomorfisme didasarkan pada gagasan tentang upaya organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teori ini memberikan perspektif yang kaya dan kompleks tentang perilaku isomorfisme yang berasal dari beragam tekanan lingkungan eksternalnya (Munir & Baird, 2016). Menurut Thoan & Thuy (2024) berbagai tekanan dari lingkungan eksternal direfleksikan oleh lingkungan yang kompetitif.

Lingkungan kompetitif terbentuk atas dasar keinginan organisasi untuk mencapai kinerja terbaik atau minimal sama dengan organisasi lain yang sejenis (Aghimien *et al.*, 2022 dan Brunjes, 2020). Cifuentes-Faura *et al.* (2024) dan Liu *et al.* (2023) menyatakan bahwa lingkungan kompetitif dapat menciptakan akuntabilitas dan transparansi dengan mengurangi asimetri informasi serta memberikan tekanan pada manajer. Chakraborty (2023) dan Sheikh (2019) berpendapat bahwa industri yang kompetitif bertindak sebagai mekanisme eksternal untuk mendisiplinkan manajemen agar meningkatkan kinerja. Para ahli sektor publik menjelaskan bahwa lingkungan kompetitif sejalan dengan dasar pemikiran tata kelola yaitu dapat memberi tekanan pada organisasi untuk membangun akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dengan tujuan meningkatkan kinerja (Mudzusi *et al.*, 2024; Yang *et al.*, 2024; dan Babar & Habib, 2021).

Pada lingkungan kompetitif, organisasi mengalami tekanan *survival of the fittest* yang lebih kuat (Liu *et al.* (2023). Organisasi melakukan upaya agar bertahan dalam lingkungan kompetitif, diantaranya dengan memiliki daya saing (Thoan & Thuy, 2024). Daya saing diartikan sebagai kemampuan untuk berkompetisi (Rojek, 2023). Adapun Awad & Thwaib (2024) dan Villamejor-mendoza (2020) mendefinisikan daya saing sebagai serangkaian faktor yaitu kebijakan, lembaga, strategi, dan proses yang menentukan tingkat produktivitas organisasi. Menurut Hermundsdottir & Aspelund (2020) dan Aranguren & Magro (2020) organisasi termotivasi membuat kebijakan berbasis daya saing di tingkat regional, nasional, dan global, baik daya saing finansial maupun nonfinansial, seperti reputasi, *image/citra*, kualitas kelembagaan, dan kepuasan pelanggan. Sementara Collazos *et al.* (2023); Thanh *et al.* (2021); Silva *et al.* (2021); dan Sabina *et al.* (2021) menyatakan bahwa pengembangan kebijakan daya saing di sektor publik berfokus pada peningkatan kinerja melalui kebijakan kualitas manajerial, kualitas infrastruktur, kualitas administrasi, efisiensi, dan transparansi.

Para ahli teori institusional mencirikan bahwa lingkungan kompetitif berubah secara dinamis sehingga memicu ketidakpastian (Sharapov & Ross, 2023; Barnett *et al.*, 2021 dan DiMaggio & Powell, 1983). Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai kurang lengkapnya informasi, pengetahuan, dan pengalaman organisasi (Gutierrez *et al.*, 2021; Fourné & Zschoche, 2020; Michel, 2007; Henisz & Delios, 2001; Downey & Slocum, 1975; Duncan, 1972). Secara teoritis pemerintah daerah menghadapi keterlambatan atau kesulitan untuk mengetahui preferensi para pemangku kepentingan terhadap kinerja yang multi-layanan. Hal

ini disebabkan oleh biaya yang mahal untuk mendapatkan informasi, keterbatasan pendapatan daerah, dan keterbatasan waktu yang dimiliki dalam memahami kondisi secara komprehensif (Cordery & Hay, 2022; Gutierrez *et al.*, 2021; Fourné & Zschoche, 2020; Lewis *et al.*, 2020; dan Santolini, 2020).

Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi ketidakpastian di lingkungan yang kompetitif, diantaranya melakukan strategi berbasis peniruan (Li *et al.*, 2023). Menurut Ali (2021) strategi berbasis peniruan dapat berupa meniru ide, produk, proses, layanan, atau cara berbisnis yang serupa dari organisasi lain. Strategi ini berkaitan dengan tingkat di mana organisasi diarahkan untuk meminjam, belajar dengan mengamati, dan belajar mempraktikkannya. Sementara Sharapov & Ross (2023); Yang & Kang (2020) dan Riahi & Khoufi (2019) menyatakan bahwa tindakan meniru sebagai solusi dari ketidakpastian, ambiguitas, dan menghemat biaya uji coba (eksperimen) untuk menyelesaikan aktivitas atau mengurangi risiko. Zhu (2014) memberi contoh bahwa suatu pemerintah daerah melakukan tindak meniru untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengadopsi kebijakan atau program insentif ekonomi dari pemerintah daerah tetangganya. Menurut Falciola *et al.* (2020) pemerintah daerah harus memiliki daya saing dengan cara meniru sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan kompetitif.

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa daya saing meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Nam & Ryu (2023) mengeksplorasi daya saing pemerintah daerah terhadap kinerja di Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing meningkatkan kinerja

pemerintah daerah. Rajnoha & Lesnikova (2022) menginvestigasi daya saing terhadap kinerja di negara yang tergabung dalam group Visegrad (V4) yaitu Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slowakia. Hasil investigasi menunjukkan bahwa daya saing meningkatkan kinerja. Sementara Arrona *et al.* (2020) mengobservasi daya saing terhadap kinerja pemerintah daerah di Spanyol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing mendorong kinerja pemerintah daerah. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Vukovic *et al.* (2020) menyatakan bahwa daya saing terhadap kinerja pemerintah daerah yang terdaftar di *S&P municipal bond*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya saing dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan literatur sebelumnya membuktikan bahwa daya saing meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pada lingkungan kompetitif dan ketidakpastian, pemerintah daerah harus memiliki daya saing agar tetap mampu bertahan dengan cara meniru untuk meningkatkan kinerja. Peniruan dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari indeks daya saing pemerintah daerah lain yang dianggap lebih tinggi, kemudian mempraktikannya (Rajnoha & Lesnikova, 2022 dan Ali, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi indeks daya saing memungkinkan kinerjanya dipandang semakin sukses (Zhou *et al.*, 2022). Argumen yang telah dibangun tersebut menjadi dasar untuk menetapkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

H₃ : Daya saing pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.4. Pengaruh Emulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berbagai fenomena dalam organisasi menarik perhatian para ahli teori organisasi untuk melakukan studi tentang perubahan organisasi (Alvesson & Spicer, 2019). Para ahli teori organisasi menjelaskan bahwa perubahan organisasi, di antaranya terjadi melalui adopsi (Baldwin *et al.*, 2019; Andersen & Jakobsen, 2018; Downe *et al.*, 2016; dan Alonso *et al.*, 2016), difusi (Gilardi & Wasserfallen, 2019 dan Mitchell & Stewart, 2014), konvergensi (Piña & Avellaneda, 2018 dan Zhu & Meng, 2020), transfer (Stone *et al.*, 2020 dan Demirbilek & Benson, 2019), dan adaptasi (Scupola & Zanfei, 2016). Perubahan – perubahan ini mendorong organisasi cenderung mirip satu sama lain atau isomorfisme (Piña & Avellaneda, 2018 dan DiMaggio & Powell, 1983).

Perubahan isomorfisme telah menjadi minat khusus di kalangan ahli teori institusional (Belle *et al.*, 2019). Menurut Alvesson & Spicer (2019) teori institusional menjadi salah satu aliran pemikiran yang paling menonjol dalam studi organisasi saat ini. Teori institusional mampu menjelaskan perilaku dan tindakan suatu organisasi dalam merespons lingkungannya (Latif *et al.*, 2020). Organisasi yang melibatkan lingkungan di sekitarnya sejalan dengan mekanisme tata kelola, seperti partisipasi pemangku kepentingan, penerapan standard dan norma, motivasi untuk setara dengan organisasi lain yang sejenis, dan saling ketergantungan antar organisasi (Krogh & Triantafillou, 2024). Begitu juga Depoers & Jérôme (2020) dan Anafinova (2020) mengungkapkan bahwa konteks tata kelola sering merujuk pada praktik meniru atau mengadopsi model, struktur, standar, atau praktik terbaik dari organisasi lain yang dianggap sukses.

Literatur telah menjelaskan bahwa lingkungan organisasi tidak dapat didefinisikan secara memuaskan, karena memiliki variasi (Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018; Scott, 1987; dan Child, 1972). Pada konteks ini lingkungan didefinisikan sebagai jumlah entitas di luar organisasi yang mencakup aturan, struktur, tindakan, peran, posisi, program, kebijakan, prosedur, teknik, teknologi, strategi, sumber daya, informasi, pelanggan, pemasok, pesaing, badan pengatur, sosial politik, dan organisasi modern lainnya (Alexander, 2015; Tolbert & Zucker, 1996; dan Zucker, 1987). Variasi lingkungan ini menimbulkan ketidakpastian (Enke & Graeber, 2021; Fourné & Zschoche, 2020; Downey & Slocum, 1975).

Ketidakpastian diartikan sebagai pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang kurang lengkap tentang lingkungan organisasi (Henisz & Delios, 2001 dan Duncan, 1972). Kemudian Lant (2017) dan Michel (2007) menjelaskan bahwa ketidakpastian sebagai informasi yang sulit dan mahal, serta ketidakmampuan memprediksi keadaan masa depan. Kondisi ini dialami organisasi sektor publik yang tercermin dari sumber daya yang terbatas, rendahnya kontribusi warga terhadap pendapatan pemerintah, warga menuntut banyak layanan, dan utang pemerintah semakin meningkat (Villadsen *et al.*, 2010 dan Cordery & Hay, 2022). Sementara ketidakpastian lingkungan pada pemerintah daerah muncul dari kompleksitas pemangku kepentingan dan ragam layanan sehingga layanan yang diberikan belum tentu sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan (Caldas *et al.*, 2020). Selain itu, ketidakpastian di pemerintah daerah ditimbulkan dari *output* (produk) yang dihasilkan bersifat non-pasar sehingga sulit diprediksi dan kurang dapat dihargai (Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018).

Suatu organisasi menjalankan tugasnya termasuk mengurangi ketidakpastian lingkungan, diantaranya dengan tindakan emulasi (Piña & Avellaneda, 2018; Mitchell & Stewart, 2014; dan Bhatti *et al.*, 2011). Menurut Labianca *et al.* (2001) dan Teece *et al.* (1997) emulasi merupakan konsep yang sejenis dengan imitasi, tetapi berbeda dalam konteks penerapannya. Emulasi didefinisikan sebagai usaha organisasi untuk menyamai atau mengungguli organisasi lain. Adapun imitasi adalah hanya menyalin rutinitas dan prosedur organisasi lain. Definisi ini menyiratkan bahwa emulasi menekankan pada perilaku dan tindakan mengadaptasi, sementara imitasi cenderung mengadopsi (Andersen & Jakobsen, 2018; Alonso *et al.*, 2016; dan Scupola & Zanfei, 2016). Kemudian Lesch & Millar (2022); Cordery & Hay (2022); dan Ali (2021) menjelaskan bahwa emulasi menjadi solusi ketika organisasi sektor publik menghadapi ketidakpastian lingkungan yang disebabkan oleh tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa emulasi meningkatkan kinerja, antara lain Lesch & Millar (2022); Baldwin *et al.*, (2019); Fusco & Allegrini (2020); Andersen & Jakobsen (2018); dan Piña & Avellaneda (2018). Studi yang dilakukan oleh Lesch & Millar (2022) di Provinsi Ontario dan British Columbia Kanada mengadaptasi kebijakan pada provinsi lain. Hasil studi menunjukkan bahwa emulasi melalui adaptasi kebijakan dari pemerintah daerah lain meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Kemudian Baldwin *et al.* (2019) melakukan studi kinerja pemerintah dengan menganalisis keputusan adaptasi kebijakan di sejumlah negara yang tercatat dalam REN21 Global Status Report. Hasil studi menunjukkan bahwa negara cenderung meniru kebijakan rekan

politiknya dan negara berkembang cenderung meniru kebijakan pemberi bantuan, serta negara-negara meniru pengambilan keputusan dari negara-negara dengan kondisi yang serupa. Sementara Fusco & Allegrini (2020) melakukan penelitian tentang kinerja pemerintah daerah di Italia. Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa terdapat saling ketergantungan berdasarkan kedekatan antara kota tetangga dalam meningkatkan kinerja layanan publik.

Pada konteks penelitian ini pemerintah daerah dianggap sukses dilihat dari indeks layanan yang telah dicapai. Semakin tinggi indeks layanan menggambarkan pelayanan publik semakin baik, hal ini sebagai cerminan peningkatan kinerja. Pemerintah daerah dengan capaian indeks layanan tinggi biasanya menginspirasi pemerintah daerah lain yang capaian indeks layanannya rendah untuk menirunya (Suddaby dan Greenwood, 2006). Upaya menirunya dilakukan melalui tindakan emulasi yaitu memilih dan memilah kinerja pemerintah daerah yang capaian indeks layanannya tinggi kemudian diamati, dipelajari dan mempraktikannya (Ali, 2021). Tindakan emulasi dengan sendirinya mengarah pada kesamaan (isomorfisme) kinerja antar pemerintah daerah (Piña & Avellaneda, 2018 dan DiMaggio dan Powell, 1983). Menurut Piña & Avellaneda (2018) dan Saman (2014) tindakan emulasi merepresentasikan kekuatan mimetik. Argumen – argumen ini menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis penelitian ini, yaitu :

H₄ : Emulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.5. Pengaruh Kualitas Manajerial Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Konsep institusional berawal dari pandangan tentang institusi atau organisasi diterima begitu saja (Gonçalves & Silva, 2021 dan Zucker, 1987). Pandangan ini menimbulkan asumsi bahwa institusi atau organisasi dipersepsikan sebagai elemen yang menjamin stabilitas dan ketertiban (Rigg & O'Mahony, 2013 dan Suddaby & Greenwood, 2006). Asumsi ini dapat dilihat dari definisi institusi yaitu seperangkat aturan sebagai batasan atas perilaku aktor yang dirancang secara manusiawi untuk memandu interaksi manusia (Rigg & O'Mahony, 2013 dan Zheng *et al.*, 2013). Namun secara rasional, organisasi berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam bentuknya maupun praktiknya. Perubahan ini menyebabkan organisasi cenderung mirip satu sama lain atau isomorfisme (Prakash *et al.*, 2020; Belle *et al.*, 2019; Piña & Avellaneda, 2018; dan Arifin *et al.*, 2015). Fenomena isomorfisme juga dialami organisasi sektor publik, termasuk pemerintah daerah yang lebih rentan dengan tekanan institusional (Rana *et al.*, 2022 dan Keerasuntonpong & Cordery, 2018).

Pemerintah daerah dalam sistem demokrasi dijalankan oleh kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi yang dipilih secara langsung (Bastos & Sánchez, 2024; Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021; Avellaneda & Gomes, 2017 dan Zheng *et al.*, 2013). Sesuai sistem demokrasi, kepala daerah menjalankan peran politik (politisi) sebagai pengambil kebijakan, sedangkan peran administrasi dikelola oleh birokrat sebagai aparatur sipil negara (Lameck, 2023 dan Ugyel, 2017). Menurut Nyadera (2020) pemisahan peran antara politisi dan birokrat untuk memastikan

responsibilitas dan akuntabilitas. Meskipun kepala daerah bukan termasuk birokrat, namun kepala daerah berperan sebagai pengendali organisasi pemerintah daerah (Belle *et al.*, 2019; Zheng *et al.*, 2013; dan Frumkin & Galaskiewicz, 2004). Peran ini merefleksikan mekanisme tata kelola yang berkontribusi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pada konteks ini, kepala daerah ditinjau dari sisi kualitas manajerial (Avellaneda & Gomes, 2015). Kepala daerah merupakan manajer dan aktor tunggal dalam mengembangkan pengaturan kota, sehingga dituntut memiliki kualitas manajerial (Avellaneda, 2009b). Gagasan tentang kualitas manajerial sering digunakan dalam pengajaran, penelitian dan praktik, namun jarang diklarifikasi dan didefinisikan dalam penyelidikan secara sistematis (Meier & O'Toole, 2002). Literatur berupaya memberikan definisi kualitas manajerial. Salah satunya Cohen (1995) mendefinisikan kualitas manajerial dengan merujuk pada *oxford english dictionary* sebagai kapasitas yang mencakup kemampuan, bakat, kompetensi, efisiensi dan kualifikasi seseorang. Petrovsky & Avellaneda (2014) dan Avellaneda (2009a) memberikan pengertian kualitas manajerial yaitu kecerdasan, keterampilan dan wawasan, baik pria dan wanita untuk menyaring, menempatkan, memproses dan bertindak berdasarkan informasi yang relevan dalam mengarahkan dan mengawasi organisasi pemerintah.

Peran strategis kepala daerah perlu ditopang dengan kualitas manajerial yang relevan (Avellaneda, 2009a). Kualitas manajerial yang dimiliki kepala daerah menentukan jalannya pemerintah daerah secara keseluruhan (Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021). Kualitas manajerial kepala daerah dapat terlihat

dari kemampuan beradaptasi dengan baik atas saran – saran dari lembaga profesional di sekitarnya (Lu *et al.*, 2020 dan Bolívar *et al.*, 2018). Kemampuan beradaptasi ini merupakan manifestasi dari sikap profesionalisme (Avellaneda & Gomes, 2015 dan Meier & O’Toole, 2002). Literatur sebelumnya menyatakan bahwa kualitas manajerial kepala daerah sebagai sikap profesional dapat meningkat kinerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Ermini *et al.* (2023); Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva (2021); Kim (2021); Lu *et al.* (2020); dan Olvera & Avellaneda (2019).

Ermini *et al.* (2023) menginvestigasi peran kepala daerah terkait kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan gender dengan hasil temuan menunjukkan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah di Italia. Kemudian Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva (2021) melakukan penelitian peran kepala daerah dengan menitikberatkan pada kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan gender dengan hasil temuan terdapat peningkatan kinerja pemerintah daerah di Spanyol. Kim (2021) melakukan analisis kualitas manajerial kepala daerah di Korea Selatan dengan ukuran keahlian dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Lu *et al.* (2020) melakukan penyelidikan terhadap peran kepala daerah dengan ukuran masa jabatan dan pendidikan dengan hasil dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Cina.. Olvera & Avellaneda (2019) mengeksplorasi kepala daerah dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah di Brasil. Hasil temuan menyimpulkan ukuran pengalaman kerja sebagai kualitas manajerial kepala daerah meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Pembahasan dari paragraf sebelumnya mengindikasikan bahwa pengalaman lama menjabat merefleksikan kompetensi sebagai kualitas manajerial kepala daerah yang cenderung membuat kebijakan lebih baik. Kualitas manajerial kepala daerah meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman yang memungkinkan peningkatan kinerja pemerintah daerah (Mani, 2014). Pada konteks pemerintah daerah di Indonesia, kepala daerah yang berpengalaman lebih mudah beradaptasi dengan lembaga profesional. Sebagai contoh kepala daerah yang berpengalaman lebih terbuka dalam menerima saran dari lembaga profesional seperti Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) maupun Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja. Pencapaian kinerja yang didorong oleh saran dari lembaga profesional sejalan dengan perspektif teori institusional (Rana *et al.*, 2022; Rigg & O'Mahony, 2013; dan DiMaggio & Powell, 1983). Pernyataan dari penelitian yang telah ditelaah menjadi pertimbangan untuk membangun hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H₅ : Kualitas manajerial kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.6. Pengaruh Predikat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya (Keerasuntonpong & Cordery, 2018 dan Tolbert & Zucker, 1983). Interaksi di lingkungan menimbulkan dinamika yang dapat

mendorong perubahan organisasi untuk meningkatkan kinerja (Tran & Villano, 2019 dan Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018). Menurut Cordery & Hay (2022); Piña & Avellaneda (2018); dan DiMaggio & Powell (1983) perubahan organisasi dilakukan untuk merespons fenomena eksternal, seperti tekanan profesional yang menuntut penyesuaian dalam layanan. Tekanan profesional menimbulkan efek isomorfisme pada organisasi, baik dalam Hal legitimasi, reputasi, dan kinerja organisasi (Feeney & Langer, 2016 dan Sagie & Elizur, 1999). Isomorfisme sebagai gagasan teori institusional terlihat dari usaha organisasi untuk mendapatkan sertifikasi atau penghargaan dari lembaga profesional atas capaian kinerjanya (Liu *et al.*, 2021 dan Pittaway & Montazemi, 2020).

Pada konteks organisasi sektor publik, partisipasi lembaga profesional merupakan bentuk peran publik terhadap organisasi. Menurut Biljohn & Lues (2020); Bastedo & Bowman (2010); dan Joseph *et al.* (2014) peran publik termanifestasikan dari lembaga profesional yang mengevaluasi dan memberikan penilaian pada organisasi sektor publik. Hasil penilaian lembaga profesional digunakan untuk komunikasi kepada pengguna atas kualitas manajemen sesuai dengan mekanisme tata kelola organisasi (Mathuva, 2018 dan Lindblad & Lindblad, 2009). Shi *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa penilaian lembaga profesional mengekspresikan komitmen terhadap implementasi mekanisme tata kelola berbasis akuntabilitas. Anh Vu *et al.* (2022) menegaskan bahwa organisasi sektor publik memperoleh hasil penilaian baik dari lembaga profesional untuk pengakuan atas capaian kinerjanya. Organisasi sektor publik akan mendapat kritik dari publik apabila penilaian capaian kinerjanya rendah.

Tang *et al.* (2018) menjelaskan bahwa capaian kinerja memiliki peran penting bagi pemerintah daerah untuk umpan balik atas kebijakan. Menurut Liu *et al.* (2021) pemerintah daerah dapat menggunakan capaian kinerja dalam mekanisme persaingan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme reputasi. Sementara Feeney & Langer (2016) menyatakan bahwa capaian kinerja dipandang oleh kepala daerah sebagai apresiasi kemajuan pemerintah daerah. Akbar *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa capaian kinerja diwujudkan dalam bentuk predikat sebagai indikator dalam sistem penilaian kinerja pemerintah daerah. Begitupun Pittaway & Montazemi (2020) menyampaikan bahwa pemerintah daerah berusaha meraih predikat sebagai bentuk pengakuan capaian kinerja layanan.

Literatur telah menjelaskan bahwa predikat telah menjadi fokus dalam penilaian kinerja (Kang & Shen, 2016). Predikat diartikan persepsi atau posisi yang diperoleh dari hasil penilaian (Wang, 2024). Predikat yang diperoleh pemerintah daerah secara luas digunakan untuk evaluator eksternal (Wandercil *et al.*, 2022). Perolehan predikat organisasi dapat melalui pemberian peringkat (*ranking dan rating*), status, kualifikasi, dinilai, atau disertifikasi (Acuto & Leffel, 2021; Adam, 2020; dan Cizek, 1997), diberi indeks (Mehrpuoya & Samiolo, 2016), mendapatkan citra, reputasi dan ketenaran (Meirinhos *et al.*, 2022 dan Castilla-Polo *et al.*, 2018) atau diberi penghargaan (Plaček *et al.*, 2021; Tang *et al.*, 2018; dan Joseph *et al.*, 2014). Menurut Bastedo & Bowman (2010); Anafinova (2020); dan Sagie & Elizur (1999) predikat menjadi bagian penting dari prestise sebagai indikasi mengindikasikan organisasi berkinerja tinggi.

Predikat dari lembaga profesional menciptakan tekanan yang secara langsung dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan organisasi (Kelley & Simmons, 2021 dan Chatterji & Toffel, 2010). Menurut Octavio & Urumsah (2024); Jesuka & Peixoto (2022); Kelley & Simmons (2021); dan Omstedt, (2020) predikat dapat meningkatkan legitimasi organisasi sektor publik. Kemudian Erkkilä & Piironen (2014) dan Sauder & Espeland (2009) memberikan contoh bahwa perolehan predikat pada lembaga pendidikan dapat mendukung aktivitas organisasi dan memiliki daya saing secara ekonomi. Beberapa penelitian menganalisis predikat yang dapat mendorong kinerja organisasi sektor publik, diantaranya : Octavio & Urumsah (2024); Liu *et al.* (2021); Acuto & Leffel (2021); Mehrpouya & Samiolo (2016); dan Joseph *et al.* (2014).

Octavio & Urumsah (2024) mengeksplorasi predikat pemerintah daerah di Indonesia. Hasil eksplorasi mengindikasikan bahwa predikat dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Hasil Liu *et al.* (2021) melakukan investigasi tentang predikat kota dengan ukuran peringkat terhadap kinerja kota di Cina. Hasil investigasi menunjukkan bahwa predikat memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Acuto & Leffel (2021) melakukan studi predikat yang diukur dengan peringkat pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja. Hasil temuan studi menyatakan bahwa predikat pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya Mehrpouya & Samiolo (2016) menganalisis predikat yang diobservasi dengan peringkat secara kualitatif pada perusahaan obat-obatan. Hasil penelitian kualitatif membuktikan bahwa predikat dapat meningkatkan kinerjanya. Sementara Joseph *et al.* (2014)

memverifikasi predikat yang dimanifestasikan dengan penghargaan terhadap kinerja pemerintah daerah di Malaysia. Hasil verifikasi membuktikan bahwa predikat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Merujuk pada penelitian sebelumnya, predikat merupakan bagian dari tata kelola yang dapat meningkatkan kinerja (Mathuva, 2018). Menurut Liu *et al.* (2021) dan Tang *et al.* (2018) predikat sangat penting membentuk persepsi kognitif prestise atas keunggulan tertentu yang dapat mendorong kinerja. Sementara pada konteks pemerintah daerah, perolehan predikat membawa implikasi yang signifikan terhadap kinerja. Pemerintah daerah berpredikat rendah rentan menghadapi tekanan dan kritik dari publik, sedangkan pemerintah daerah berpredikat tinggi dituntut menjaga reputasi dan kinerjanya. Perolehan predikat tinggi suatu pemerintah daerah memotivasi pemerintah daerah lain untuk meraihnya, sehingga dalam jangka panjang terbentuk pola isomorfisme antar pemerintah daerah (Shi *et al.*, 2019 dan Mathuva, 2018). Argumen – argumen ini menjadi dasar untuk mengajukan hipotesis pada penelitian ini, yaitu :

H₆ : Predikat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

3.1.7. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan salah satu karakteristik penting dalam desain penelitian yang baik (Nielsen & Raswant, 2018 dan Kothari, 2004). Variabel kontrol digunakan untuk mengurangi faktor pengganggu agar hasil penelitian tetap konsisten (Feng *et al.*, 2020 dan Carlson & Wu, 2012). Penelitian ini

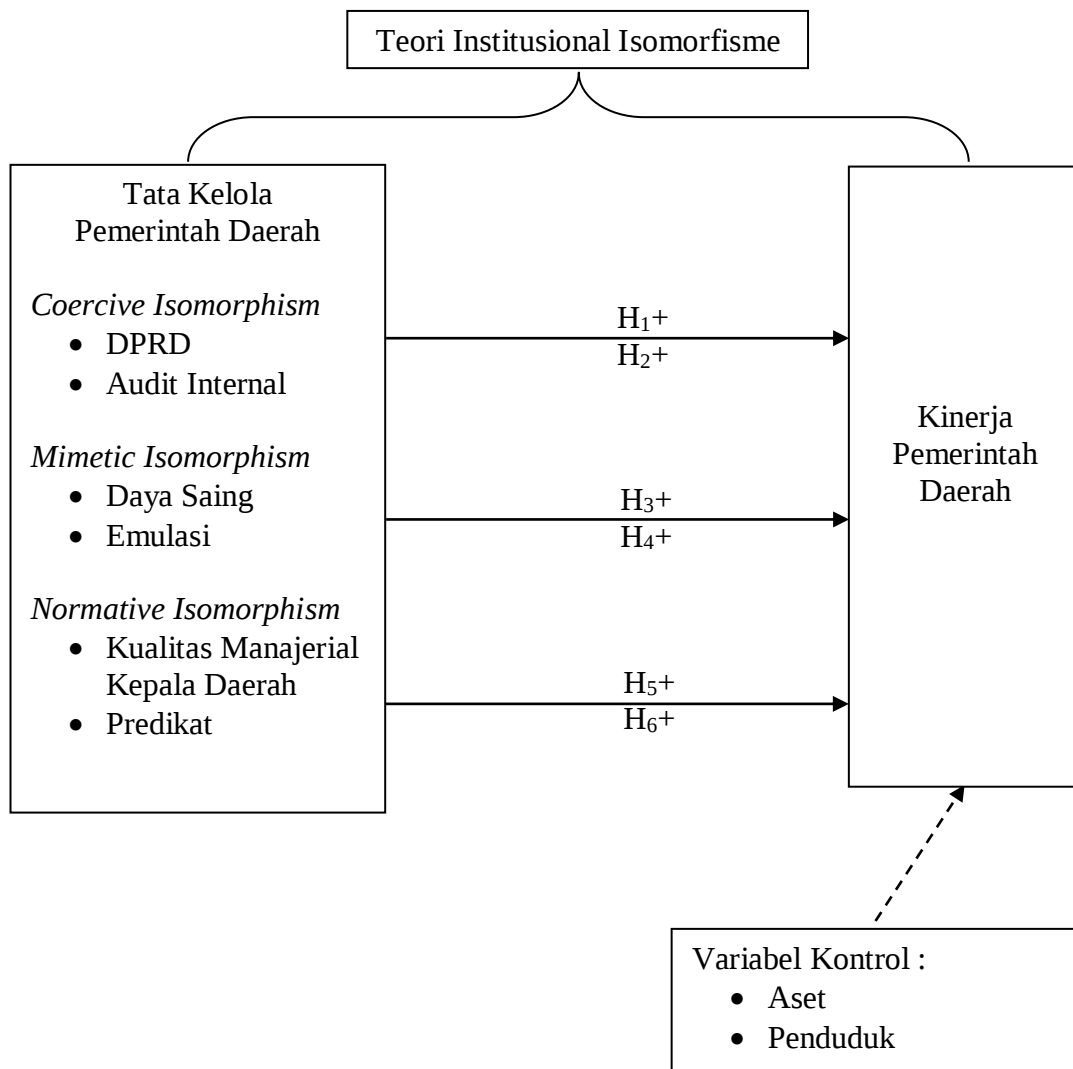
memasukkan dua variabel kontrol yaitu aset dan penduduk pemerintah daerah. Variabel kontrol yang pertama adalah aset pemerintah daerah. Menurut kerangka konseptual FASB (1998) bahwa aset diartikan sebagai segala sesuatu yang berguna untuk kegiatan operasional di masa depan, baik dalam bentuk moneter atau nonmoneter, berwujud atau tidak berwujud, dimiliki atau akan dimiliki. Abdullah & Tursoy (2021); Feng *et al.* (2020); dan Altaf & Ahmad (2019) menyatakan bahwa aset yang besar memiliki peluang dalam menciptakan kinerja yang tinggi dan stabil. Rahman (2022) berpendapat bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah (jumlah aset) cenderung lebih mudah dalam pemenuhan layanan publik.

Variabel kontrol yang kedua yaitu penduduk. Menurut OECD, penduduk adalah sejumlah orang yang tinggal di suatu negara atau daerah. Literatur menjelaskan bahwa penduduk dapat menjadi faktor penting bagi suatu wilayah pemerintah daerah untuk mendorong kinerja (Tran *et al.*, 2019 dan Avellaneda & Gomes, 2015). Foged (2016) memberi pandangan bahwa penduduk suatu kota dianggap sebagai pendorong penting dalam menyediakan layanan publik. Gomes *et al.* (2013) menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik.

3.2. Kerangka Model Penelitian

Langkah penting dalam proses penelitian adalah merumuskan kerangka model penelitian sebagai fondasi suatu penelitian (Sekaran & Bougie, 2010). Pada penelitian ini merumuskan kerangka model penelitian berpedoman pada

pembahasan teori dan *review* penelitian terdahulu yang sudah diuraikan pada paragraf – paragraf sebelumnya. Rumusan kerangka model penelitian tampak pada gambar III.1.



Gambar III.1. : Kerangka Penelitian

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Menurut Saunders *et al.* (2009) data sekunder termasuk data mentah yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian kuantitatif yang mengandalkan data sekunder memiliki arah dapat menggeneralisasikan hasil penelitian, baik generalisasi secara empiris maupun generalisasi secara teoritis (Arifin, 2014 dan Tsang, 2014). Generalisasi secara empiris dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah yang memiliki karakteristik sama yaitu fungsi pelayanan. Hasil dari kinerja layanan pemerintah daerah dimanifestasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM).

Generalisasi secara teoritis dapat diamati dari penggunaan variabel penjelas sebagai faktor yang penting (Sekaran & Bougie, 2010). Generalisasi yang mengandalkan faktor penjelas dikategorikan dalam penelitian eksplanatori korelasional (Cooper & Schindler, 2014 dan Saunders *et al.*, 2009). Jenis penelitian eksplanatori korelasional bertujuan untuk menguji hipotesis dengan analisis regresi (Krichene & Baklouti, 2020 dan Sekaran & Bougie, 2010). Pernyataan tersebut menempatkan penelitian ini dalam kerangka eksplanatori korelasional sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Berdasarkan kerangka ini, penelitian dilakukan untuk menguji kekuatan faktor penjelas tata kelola dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Adapun tata kelola pemerintah daerah diidentifikasi dengan dewan perwakilan rakyat (DPRD), audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat.

4.2. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi merupakan kumpulan dari keseluruhan elemen di mana peneliti akan menarik beberapa kesimpulan (Cooper & Schindler, 2014). Menurut Sekaran & Bougie (2010) dan Saunders *et al.* (2009) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau Hal minat yang ingin peneliti investigasi. Peneliti hanya mengambil beberapa elemen atau kejadian sebagai objek penelitian yang dinamakan sampel (Cooper & Schindler, 2014; Sekaran & Bougie, 2010; dan Saunders *et al.*, 2009). Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi yang diminati untuk dijadikan dasar menarik kesimpulan dan dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (Sekaran & Bougie, 2010 dan Lind *et al.*, 2012). Cohen *et al.* (2007) mendokumentasikan bahwa ukuran sampel yang benar belum ada jawaban yang jelas, karena Hal tersebut tergantung pada tujuan penelitian dan sifat populasi yang diteliti. Kusuma *et al.* (2020) dan Cohen *et al.* (2007) memberi catatan bahwa ukuran sampel tiga puluh sudah dianggap memenuhi oleh banyak peneliti sebagai jumlah kasus minimum dalam analisis statistik, meskipun ini adalah jumlah yang sangat kecil.

Pengambilan sampel merupakan proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi (Casteel & Bridier, 2021 dan Sekaran & Bougie, 2010). Penelitian yang belum memiliki kerangka *sampling* dapat menggunakan teknik pengambilan sampel *nonprobability sampling*. Teknik *nonprobability sampling* menyediakan berbagai teknik alternatif untuk memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif peneliti (Saunders *et al.*, 2009). Teknik pengambilan sampel *nonprobability* dalam penelitian terdiri dari beberapa jenis, di antaranya

pengambilan sampel bertujuan atau *purposive sampling* (Saunders *et al.*, 2009). Bentuk pengambilan sampel *purposive sampling* sering digunakan pada penelitian dengan sampel relatif kecil (Saunders *et al.*, 2009). Metode *purposive sampling* menyatakan bahwa pengambilan sampel harus memiliki kriteria tertentu dan berdasarkan pertimbangan tertentu (*Judgment sampling*) dari peneliti (Cooper & Schindler, 2014; Sekaran & Bougie, 2010; dan Saunders *et al.*, 2009). Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Penelitian ini menetapkan kriteria populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut :

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah 2017 sampai dengan tahun 2023
- 2) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP – OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan tahun 2023.
- 3) Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 4) Data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (*Judgment sampling*) harus memperhatikan tingkat validitas data yang disajikan (Sekaran & Bougie, 2010). Beberapa uji validitas data mencakup validitas berdasarkan kriteria (*criterion-related validity*) yang merujuk pada metode pengukuran untuk membedakan sesuatu (individu) menurut kriteria tertentu yang dapat diprediksi.

Berdasarkan argumen tersebut, peneliti memiliki keyakinan bahwa pelaporan yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sudah memenuhi validitas data, karena berpedoman pada peraturan dan standar yang berlaku. Keyakinan ini tercermin dari Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pemerintah daerah dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses, baik secara *online* maupun secara *offline*.

4.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran & Bougie (2010) definisi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu definisi kamus dan definisi operasional. Definisi kamus adalah definisi dengan sinonim yang mungkin digunakan untuk komunikasi umum tetapi tidak untuk penelitian. Definisi operasional diartikan sebagai proses untuk mengubah suatu konsep, konstruk, dan variabel yang abstrak supaya dapat diukur secara nyata dengan melihat dimensi perilaku, segi, atau sifat yang ditunjukkan oleh konsep tersebut. Variabel diartikan sebagai simbol dari suatu peristiwa, tindakan, karakteristik, sifat, atau atribut yang dapat diukur dan diberi nilai. Dybkaer (2011); Sekaran & Bougie (2010); dan Kothari (2004) menyatakan bahwa pengukuran dan pemberian nilai variabel termasuk bagian integral dalam penelitian. Pengukuran ini berkaitan dengan proses menetapkan angka-angka untuk peristiwa empiris, objek atau sifat, atau kegiatan sesuai dengan seperangkat aturan. Pernyataan tersebut dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk menetapkan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun pengukuran variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel IV.1

Tabel IV.1.
Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu
1	Variabel Dependen			
	Kinerja pemerintah daerah	Tindakan dan hasil (<i>outcome</i>) dari program yang telah dicapai pemerintah daerah kabupaten dan kota	Proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten dan kota	Tripathi (2021); Sarpong & Bein (2021); dan Sarkodie & Adams (2020).
2	Variabel Independen			
	<i>Coercive Isomorphism</i> DPRD	DPRD yaitu dewan perwakilan rakyat daerah sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang diatur dengan regulasi	Proksi jumlah rapat DPRD kabupaten dan kota	Farrell <i>et al.</i> (2022), Smith <i>et al.</i> (2022), Freeman (2020), Larhsoukanh & Wang (2019)
	Audit internal	Fungsi pengendalian dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan objektif atas efektivitas kinerja organisasi yang diatur dengan regulasi	Proksi jumlah auditor internal pemerintah daerah dan kota	Appiah <i>et al.</i> (2023), Edmonds <i>et al.</i> (2023), Österberg & Licht (2023), Rich <i>et al.</i> (2021)

Lanjutan Tabel IV.1.

No.	Variabel	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu
Variabel Independen				
<i>Mimetic Isomorphism</i>	Daya saing	Kemampuan berkompetisi (serangkaian faktor yang meliputi kebijakan, strategi, dan proses yang menentukan tingkat produktivitas organisasi)	Proksi indeks daya saing pemerintah daerah (pemda yang memiliki indeks daya saing tinggi dianggap pemda sukses)	Nam & Ryu (2023), Rajnoha & Lesnikova (2022), Arrona <i>et al.</i> (2020), Vukovic <i>et al.</i> (2020)
	Emulasi	Usaha organisasi untuk menyamai atau mengungguli organisasi	Proksi indeks layanan pemerintah daerah (pemda yang memiliki indeks layanan tinggi dianggap pemda sukses)	Lesch & Millar (2022), Fusco & Allegrini (2020), Baldwin <i>et al.</i> (2019)
<i>Normative Isomorphism</i>	Kualitas manajerial kepala Daerah	Kemampuan, bakat, kompetensi, efisiensi dan kualifikasi kepala daerah	Proksi pengalaman : lama menjabat sebagai kepala daerah	Kim (2021), Lu <i>et al.</i> (2020), Olvera & Avellaneda (2019)
	Predikat	Posisi atau tingkatan atau label yang diperoleh pemerintah daerah	Proksi predikat dengan kategori : 4 = informatif, 3 = menuju informatif, 3 = cukup informatif, 2 = 1 = kurang dan tidak informatif	Liu <i>et al.</i> (2021), Acuto & Leffel (2021), Mehrpouya & Samiolo (2016)

Lanjutan Tabel IV.1.

No.	Variabel	Deskripsi	Operasional	Peneliti Terdahulu
Variabel Kontrol				
a.	Aset	Aset yang dimiliki pemerintah daerah	Jumlah aset pemerintah daerah	Gao <i>et al.</i> (2021); Oates (2016); Rahman (2022) dan Laswad <i>et al.</i> (2005)
b.	Penduduk	Penduduk yang tercatat pada pemerintah daerah	Kepadatan penduduk pemerintah daerah	Muraoka & Avellaneda (2021); Krah & Mertens (2020); Keerasuntonpong <i>et al.</i> (2017); dan Avellaneda & Gomes, (2015)

4.3.1. Variabel Dependen

4.3.1.1. Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel dependen merupakan variabel hasil yang disebabkan secara keseluruhan atau sebagian oleh input atau variabel independen (Cohen *et al.*, 2007). Kothari (2004) mendefinisikan bahwa variabel dependen berasal dari pengaruh perilaku yang lain. Variabel dependen menjadi perhatian utama untuk dijelaskan atas sesuatu (variabel independen) yang memungkinkan dapat menemukan jawaban atau solusi atas masalah (Sekaran & Bougie, 2010).

Pada penelitian ini, variabel dependen direpresentasikan dengan kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah termasuk dalam kinerja sektor publik yang dicirikan penyediaan pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009 dan Milán-García *et al.*, 2022). Menurut OECD (1994) kinerja sektor publik mencakup penerapan terminologi dan pemahaman dari ekonomi, efisiensi,

efektivitas, kualitas layanan dan kinerja keuangan. Namun, literatur sektor publik tampaknya belum ada kesepakatan secara umum untuk ukuran kinerja sektor publik, termasuk ukuran kinerja pemerintah daerah (Avellaneda & Gomes, 2017).

Beberapa literatur terdahulu memberikan masukan untuk menggunakan ukuran kinerja sektor publik berupa ukuran ekonomis, efisien, dan efektif (3E) dan *input*, *output*, dan *outcome* (IOO) dalam mengukur kinerja sektor publik (Hansen, 2023; Vignieri, 2018; Walker & Andrews, 2015; dan Summermatter & Siegel, 2009). Menurut Hansen (2023); Fasiello *et al.* (2022); Korac *et al.* (2020); dan Mas *et al.* (2019) penelitian terkini di sektor publik bergeser ke arah kinerja yang berorientasi pada *outcome*. Ukuran kinerja *outcome* selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Berdasarkan literatur tersebut, kinerja *outcome* dipandang sebagai ukuran yang substansial atas capaian kinerja organisasi, sehingga penelitian ini fokus mengeksplorasi kinerja *outcome*.

Di sisi lain, kinerja *outcome* bersifat non keuangan, sehingga diperlukan instrumen yang tepat untuk mengukur kinerja tersebut (Libman, 2012). Menurut Avellaneda & Gomes (2017) belum ada indikator yang sempurna untuk mengukur kinerja *outcome* di sektor publik. Beberapa penelitian menggunakan proksi untuk mengoperasionalkan kinerja *outcome*. Penelitian ini menganggap proksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih relevan dijadikan indikator kinerja berbasis *outcome* (Tripathi, 2021; Sarpong & Bein, 2021; dan Sarkodie & Adams, 2020). IPM dipandang sebagai proksi yang memiliki perspektif yang lebih komprehensif

dan telah diadopsi secara luas, karena terdiri dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan (Miranda-Lescano *et al.*, 2023; Shi & Tang, 2020; dan Anderson & Gerber, 2017). Menurut Miranda-Lescano *et al.* (2023) dan Yumashev *et al.* (2020) IPM menempati peran penting untuk pertimbangan pengambilan kebijakan penting suatu pemerintah dan untuk mengukur kemampuan berkompetisi antar daerah, nasional maupun global. Adapun data pengujian diambil dari data Indeks pembangunan manusia (IPM) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dipertanggungjawabkan karena lembaga ini diatur dengan peraturan yang berlaku (UU No. 16 Tahun 1997 dan PP No. 51 Tahun 1999).

4.3.2. Variabel Independen

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi variabel terikat (dependen), baik secara positif atau negatif (Sekaran & Bougie, 2010). Variabel bebas pada penelitian ini diinvestigasi dengan tata kelola pemerintah daerah. Peneliti sebelumnya telah memperluas konsep tata kelola dengan memeriksa berbagai model tata kelola di sektor publik (Clatworthy *et al.*, 2000). Melalui *literature review*, penelitian ini mengadaptasi dan mereplikasi tata kelola dengan menggunakan proksi yang dianggap secara luas sebagai indikator paling akurat dan dapat diandalkan, yaitu DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat.

4.3.2.1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Banyak studi sektor publik memfokuskan pada cara-cara pemerintah daerah dalam menjalankan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya (Walker & Andrews, 2015). Praktik tata kelola menjadi pilihan bagi organisasi sektor publik untuk meningkatkan kinerja dengan melibatkan distribusi kekuasaan antara pemangku kepentingan yang berbeda (Lacalle *et al.*, 2021). Pada konteks pemerintah daerah, praktik tata kelola dapat dilihat melalui distribusi kekuasaan dengan dewan perwakilan rakyat daerah (UU. No. 17 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014). Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menjalankan aktivitasnya dalam bentuk pengambil kebijakan dan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Smith *et al.*, 2022 dan Loh *et al.*, 2021).

Beberapa studi tersebut memberi pandangan dalam mengoperasionalkan DPRD dengan menggunakan proksi untuk pengukuran. Proksi yang digunakan antara lain : proksi gender DPRD (Stanić, 2022 dan Araujo & Tejedro-Romero, 2018), Proksi bentuk rapat DPRD (Farrell *et al.*, 2022), proksi jumlah rapat DPRD (Smith *et al.*, 2022; Lacalle *et al.*, 2021; Freeman, 2020; dan Larhsoukanh & Wang, 2019), proksi jumlah DPRD (Avellaneda & Gomes, 2017; Arifin *et al.*, 2015; dan Mir *et al.*, 2015). Pandangan dari penelitian sebelumnya dijadikan dasar untuk menentukan penggunaan DPRD sebagai variabel independen.

Penelitian ini mengadaptasi dan mengembangkan variabel DPRD dari penelitian Smith *et al.* (2022); Farrell *et al.* (2022); Lacalle *et al.* (2021); Freeman (2020); dan Larhsoukanh & Wang (2019), yaitu DPRD dimanifestasikan dengan proksi jumlah rapat DPRD dalam satu tahun. Penelitian ini hanya memasukan

rapat yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah, seperti rapat paripurna, rapat anggaran, rapat badan pembentukan perda, dan rapat komisi. Adapun rapat pimpinan, rapat badan musyawarah, rapat badan kehormatan, dan rapat panitia khusus tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Menurut Lacalle *et al.* (2021) jumlah rapat DPRD sebagai proksi yang dapat diterima secara umum. Literatur menyatakan bahwa jumlah rapat DPRD sebagai satu – satunya aktivitas yang dapat diamati secara publik (Carcello *et al.*, 2002). Jumlah rapat yang optimal meningkatkan pengawasan, kinerja, koordinasi antar lembaga, dan menyelesaikan masalah (Larhsoukanh & Wang, 2019 dan Eluyela *et al.*, 2018). Sementara Freeman (2020) berpendapat bahwa rapat sebagai inti dari pekerjaan DPRD.

4.3.2.2. Audit Internal

Audit internal merupakan komponen penting dari tata kelola yang baik pada pemerintah daerah (Rensburg & Coetzee, 2016 dan Coetzee & Erasmus, 2017). Audit internal diartikan sebagai aktivitas konsultasi dan asurans yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi (Lelly & Afiah (2017). White *et al.* (2020) mengatakan bahwa audit internal dapat memiliki peran untuk menegur (*challenge*) dan menawarkan kritik konstruktif dalam peningkatan kinerja organisasi. Audit internal dipandang penting untuk mengendalikan manajemen dan kinerja organisasi (Appiah *et al.*, 2023). Hal serupa diungkapkan oleh Funk & Owen (2020) bahwa peran audit dirasakan penting sebagai alat untuk meningkatkan hasil (*outcome*) di semua tingkat pemerintahan.

Beberapa literatur terdahulu telah menginvestigasi audit internal dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penggunaan indikator audit internal telah diuraikan oleh penelitian sebelumnya, antara lain : Appiah *et al.* (2023); Postula *et al.* (2020); Edmonds *et al.* (2023); Österberg & Licht (2023); Rich *et al.* (2021); Asiedu & Deffor (2017); Rosa *et al.* (2014); dan Aikins (2012). Kajian penelitian terdahulu digunakan dalam menetapkan indikator auditor internal yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini mengadaptasi penelitian Abdelrahim & Al-Malkawi (2022) dan Aikins (2012) dengan mengeksplor ukuran auditor internal yang diprosikan dengan indikator jumlah auditor internal yang ada di inspektorat daerah. Menurut Ferry *et al.* (2017) dan Wicaksono & Sutaryo (2017) kecukupan jumlah auditor internal menentukan ketepatanwaktuan penerbitan laporan keuangan (LKPD) pada Pemerintah Daerah. Disamping itu sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 60 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2018 bahwa pengawasan dan audit internal pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat daerah (Mahmudah & Riyanto, 2017). Meskipun auditor internal dibawah inspektorat pemerintah daerah, namun pengawasannya independen karena di bawah binaan BPKP (Perpres No. 192 tahun 2014).

4.3.2.3. Daya Saing

Daya saing merupakan suatu strategi yang berperan untuk meningkatkan kinerja (Thanh *et al.*, 2021 dan Silva *et al.*, 2021). Daya saing harus dimiliki oleh organisasi dalam lingkungan kompetitif untuk mempertahankan kinerja (Thoan &

Thuy, 2024 dan Liu *et al.*, 2023). Namun, lingkungan kompetitif terkonfirmasi identik dengan ketidakpastian, seperti informasi yang dinamis dan pengetahuan yang kurang lengkap (Sharapov & Ross, 2023; Barnett *et al.*, 2021; dan DiMaggio & Powell, 1983). Begitupun Pemerintah daerah menghadapi ketidakpastian, antara lain keterbatasan sumber daya, keterbatasan pendapatan daerah, keterbatasan informasi, dan keterbatasan waktu dalam menyelaraskan preferensi pemangku kepentingan atas layanan yang disediakan (Cordery & Hay, 2022; Lewis *et al.*, 2020; Santolini, 2020; Caldas *et al.*, 2020; dan Growe & Jemming, 2019). Pada kondisi ketidakpastian lingkungan, kebijakan pemerintah daerah adalah meniru organisasi lain untuk merespons kondisi tersebut. Menurut Li *et al.* (2021); Brunjes (2020); dan Lu & Wang (2020) kebijakan atau keputusan suatu pemerintah daerah akan diamati dan direspons oleh pemerintah daerah tetangganya, Hal ini selaras dengan mekanisme tata kelola dan teori institusional

Daya saing telah dieksplorasi oleh sejumlah penelitian sebagai indikator yang dapat memengaruhi pemerintah daerah. Beberapa penelitian menggunakan proksi dalam mengukur daya saing, seperti indeks daya saing (Rajnoha & Lesnikova, 2022), kebijakan kolaboratif (Arrona *et al.*, 2020), wilayah/geografi (D'Urso *et al.*, 2024; Ferrarini *et al.*, 2024; dan Nasi *et al.*, 2023), sumber daya ekonomi dan keuangan (Krstić & Gawel, 2023; Rojek, 2023; Yılmaz & Özgener, 2022; dan Neverauskienė & Danilevičienė, 2020), sumber daya manusia (Bilderback, 2024; Indrawati & Kuncoro, 2021; dan Sabina *et al.*, 2021); pangsa pasar (Wanyonyi *et al.*, 2023), dan produktivitas (Bontempo, 2022). Sesuai dengan konteks teori institusional, maka daya saing dikembangkan dengan

strategi meniru organisasi lain yang dipandang sukses. Proses peniruan dapat dilakukan, antara lain : kolaboratif (Arrona *et al.*, 2020), pendidikan dan pelatihan (Yılmaz & Özgener, 2022; Indrawati & Kuncoro, 2021; dan Sabina *et al.*, 2021), studi banding (Andersen & Jakobsen, 2018; Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018; dan Still & Strang, 2009), meminjam, belajar dengan mengamati, dan belajar dengan melakukannya (Ali, 2021).

Pada penelitian ini daya saing pemerintah daerah diobservasi dengan proksi indeks daya saing, seperti yang dikembangkan Rajnoha & Lesnikova (2022). Menurut Kajian Indeks Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Jawa Tengah 2017 – 2021 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022) peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu instrumen untuk capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Proses peniruan indeks daya saing merujuk pada pendapat Ali (2021) yaitu pemerintah daerah yang indeks daya saingnya rendah akan mengamati, mempelajari, dan mencoba mengimplementasikannya dari pemerintah daerah yang indeks daya saingnya lebih tinggi. Pendapat Zhou *et al.* (2022) dan Silva *et al.* (2021) dijadikan referensi untuk menetapkan indeks daya saing sebagai ukuran karena indeks daya saing mencerminkan kemampuan atas capaian kinerja pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai indeks daya saing pemerintah daerah, cenderung semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Data indeks daya saing pemerintah daerah diperoleh dari laporan kajian indeks pembangunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. BPS merilis data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No. 16 Tahun 1997 dan PP No. 51 Tahun 1999).

4.3.2.4. Emulasi

Emulasi merupakan tindakan rasional dengan usaha memilih dan memilah belajar dari organisasi lain yang dianggap sukses untuk meningkatkan kinerja (Yun & Opheim, 2010; Karch, 2007 dan Strang & Still, 2004). Emulasi muncul dari upaya adaptif organisasi terhadap kondisi lingkungan eksternal yang lekat dengan ketidakpastian (Fourné & Zschoche, 2020). Ketidakpastian lingkungan memicu pencarian solusi yang cepat dengan cara meniru organisasi lain yang dinilai sukses (Li *et al.*, 2023 dan Sharapov & Ross, 2023). Tindakan meniru yang disebabkan oleh faktor eksternal mengisyaratkan mekanisme tata kelola berjalan dengan baik (Depoers & Jérôme, 2020 dan Anafinova, 2020). Penjelasan terkait emulasi ini relevan dengan gagasan teori institusional (Andersen & Jakobsen, 2018; Mitchell & Stewart, 2014; dan Bhatti *et al.*, 2011).

Beberapa studi sebelumnya telah mengeksplorasi emulasi dalam memengaruhi kinerja organisasi. Emulasi dieksplorasi dengan menggunakan proksi dalam mengukurnya, antara lain proksi perubahan kebijakan (Lesch & Millar, 2022), proksi berbagi informasi, belajar dari pengalaman organisasi lain, dan mengamati pesaingnya (Baldwin *et al.*, 2019), proksi tekanan institusional (Andersen & Jakobsen, 2018), proksi ketergantungan pada kedekatan (Fusco & Allegrini, 2020), proksi perjanjian kerjasama (Narbón-Perpiñá & De Witte, 2018), proksi Struktural organisasi dan atribut identitas organisasi (Labianca *et al.*, 2001). Ulasan ini menjadi rujukan untuk operasionalisasi emulasi dengan mengadaptasi proksi dari Baldwin *et al.* (2019) yaitu indeks layanan pemerintah daerah. Menurut Kajian Indeks Kinerja Pembangunan Kabupaten/Kota Jawa

Tengah 2017 – 2021 peningkatan layanan merupakan salah satu instrumen untuk capaian indeks pembangunan manusia (IPM)

Indeks layanan berperan penting untuk pertimbangan dalam meningkatkan kinerja (Oña *et al.*, 2016 dan Yang & Chen, 2000). Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa semakin tinggi indeks layanan pemerintah daerah, semakin meningkat kinerja pemerintah daerah. Ukuran ini digunakan dengan landasan argumen bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah saling mengamati dan belajar satu sama lain (Ammons & Roenigk, 2015 dan Shipan & Volden, 2008). Menurut Strang dan Still (2004) pemerintah daerah berkinerja buruk mendorong pencarian eksternal dengan melakukan emulasi pada pemerintah daerah yang dianggap sukses. Pemerintah daerah dengan indeks layanan rendah kemungkinan akan melakukan emulasi pada pemerintah daerah yang indeks layanannya tinggi dengan proses mengamati, mempelajari, dan mengimplementasikannya (Ali, 2021). Data indeks layanan pemerintah daerah diperoleh dari laporan kajian indeks pembangunan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga resmi negara (UU No. 16 Tahun 1997 dan PP No. 51 Tahun 1999).

4.3.2.5. Kualitas Manajerial Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan pimpinan tertinggi dalam struktur organisasi pemerintah daerah (Ugyel, 2017). Meskipun pimpinan tertinggi, kepala daerah adalah pihak eksternal yang tidak termasuk dalam jajaran manajemen, karena dipilih langsung oleh masyarakat (Bastos & Sánchez, 2024). Menurut Lameck

(2023) dan Nyadera (2020) organisasi pemerintah daerah telah menerapkan mekanisme tata kelola, di mana kepala daerah berperan dalam pengambilan kebijakan dan pengendalian organisasi pemerintah daerah. Sedangkan Aparat Sipil Negara (ASN) bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional organisasi pemerintah daerah. Kepala daerah dengan kewenangannya dapat mencontohkan praktik, peraturan, norma, nilai, atau budaya dari pengalaman sebelumnya atau pengalaman organisasi lain yang dianggap lebih baik (Fuenfschilling & Truffer, 2014; Suddaby & Greenwood, 2006; dan Scott, 1987). Bentuk kewenangan ini berpotensi menyebabkan isomorfisme pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam teori institusional (Belle *et al.*, 2019 dan DiMaggio & Powell (1983).

Beberapa penelitian sebelumnya memberikan gambaran dalam mengobservasi kepala daerah. Pengamatan terhadap kepala daerah diobservasi dengan berbagai proksi yang berfungsi sebagai alat ukur. Berbagai Proksi telah digunakan untuk mengukur kepala daerah, antara lain : proksi karakteristik, seperti gender, usia, ras (Avellaneda *et al.*, 2022 dan Bordignon *et al.*, 2020), proksi kualitas manajerial, seperti pendidikan, pengalaman, dan kompetensi (Muringa & Shava, 2024; Bastos & Sánchez, 2024; Bukalova, 2024; Ermini *et al.*, 2023; Briano-Turrent, 2023; Balaguer-Coll & Ivanova-Toneva, 2021); Lu *et al.* (2020); dan Broekema *et al.* (2019), proksi pemerintahan terbuka (Schmidhuber & Hilgers, 2021), dan gaji (Pique, 2019). Proksi – proksi ini dijadikan inspirasi untuk menggunakan proksi dalam mengukur kepala daerah. Penelitian ini mengadaptasi proksi dari Olvera & Avellaneda (2019); Broekema *et al.* (2019); dan Avellaneda dan Gomes (2017) yaitu kualitas manajerial yang diobservasi

dengan pengalaman. Indikator pengalaman merujuk pada operasionalisasi dari Broekema *et al.* (2019) yaitu lama menjabat sebagai kepala daerah.

Indikator pengalaman menggunakan basis lamanya waktu atau kuantitatif dikenal luas dalam penelitian (Kim, 2021; Lu *et al.*, 2020; Olvera & Avellaneda, 2019; dan Le & Kroll, 2017). Dasar argumen mengoperasionalkan pengalaman dengan lama menjabat bahwa kemampuan manajerial kepala daerah tergantung pada masa jabatan yang pernah dijalani (Podgorniak-Krzykacz, 2021). Literatur menjelaskan bahwa pengalaman lama menjabat mencerminkan kompetensi sebagai kualitas manajerial pejabat terpilih yang cenderung menghasilkan kebijakan lebih baik (Bolívar *et al.*, 2018 dan Mani, 2014). Menurut Lu *et al.* (2020) kepala daerah yang baru belum terbiasa menyesuaikan dengan lingkungan organisasi, sementara kepala daerah yang lebih lama lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan organisasi.

4.3.2.6. Predikat

Predikat merupakan posisi atau tingkatan atau label untuk merepresentasikan kesuksesan suatu organisasi (Knauer *et al.*, 2021 dan Rindova *et al.*, 2018). Menurut Carmeli *et al.* (2007) predikat meneguhkan status dan prestise atas pencapaian kinerja. Pemberian predikat atau sertifikasi oleh pihak eksternal kepada organisasi sektor publik wujud kontribusi dari peran publik (Joseph *et al.*, 2014 dan Bastedo & Bowman, 2010). Peran publik ini termasuk instrumen tata kelola organisasi (Mathuva, 2018 dan Lindblad & Lindblad, 2009) Raihan predikat dapat meningkatkan legitimasi dan kinerja bagi organisasi sektor

publik (Anh Vu *et al.*, 2022 dan Feeney & Langer, 2016). Hal inilah memosisikan predikat sebagai orientasi dari suatu organisasi sehingga memperkuat organisasi cenderung serupa (Pintrich *et al.*, 2003; dan DiMaggio & Powell, 1983).

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa belum ada alat yang sempurna atau bahkan memadai untuk menilai secara akurat predikat organisasi (Huque & Jongruck, 2018). Akibatnya predikat sebagai ukuran memiliki variasi, termasuk pada sektor publik (Kwon, 2020). Beberapa penelitian telah memanifestasikan ukuran predikat dengan proksi untuk mengukurnya, seperti proksi *rating*, *ranking*, nilai, atau sertifikasi (Octavio & Urumsah, 2024; Acuto & Leffel, 2021; Liu *et al.*, 2021; dan Cizek, 1997), proksi citra, reputasi, label, dan ketenaran (Meirinhos *et al.*, 2022 dan Castilla-Polo *et al.*, 2018) atau proksi penghargaan atau *award* (Plaček *et al.*, 2021; Tang *et al.*, 2018; dan Joseph *et al.*, 2014).

Berdasarkan investigasi penelitian terdahulu penelitian ini mengadaptasi ukuran predikat dari Octavio & Urumsah (2024); Acuto & Leffel (2021); Liu *et al.* (2021); dan Shi *et al.* (2019) yaitu pemeringkatan. Data peringkat diambil dari komisi informasi Provinsi Jawa Tengah. Komisi informasi merupakan lembaga independen dalam mendorong keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya untuk kepentingan publik (UU No. 14 Tahun 2008). Adapun data peringkat berbentuk kategori sebagai berikut : informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Penelitian ini melakukan penyesuaian dengan memberikan skor, yaitu kategori informatif diberi skor 4, kategori menuju informatif diberi skor 3, kategori cukup informatif diberi skor 2, dan kategori

kurang dan tidak informatif diberi skor 1. Namun raihan nilai untuk kategori kurang informatif dan tidak informatif tidak dirilis, oleh karena itu dilakukan penyesuaian dengan digabung dengan skor 1.

4.3.3. Variabel Kontrol

Seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini juga memasukkan variabel kontrol. Adapun variabel kontrol yang dimasukkan yaitu proksi aset pemerintah daerah dan proksi penduduk. Variabel-variabel ini lazim digunakan dalam penelitian karena memberikan hasil yang persisten. Proksi aset pemerintah daerah merujuk pada penelitian Rahman (2022); Gao *et al.* (2021); Oates (2016) dan Laswad *et al.* (2005) yang dimanifestasikan dengan jumlah aset pemerintah daerah. Ukuran ini dapat diartikan bahwa aset yang besar memiliki peluang dalam menciptakan kinerja yang tinggi karena cenderung terhindar dari Kendala keuangan (Altaf & Ahmad, 2019). Nada yang sama dijelaskan Feng *et al.* (2020); Abdullah & Tursoy (2021); dan Oates (2016) yaitu aset memiliki potensi dalam meningkatkan kinerja. Data aset pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah dari tahun 2017 sampai tahun 2023.

Variabel kontrol berikutnya menggunakan proksi penduduk. Variabel kontrol ini mengacu pada penelitian Rahman (2022); Muraoka & Avellaneda (2021); dan Krah & Mertens (2020) yang mengobservasi penduduk pemerintah daerah. Dasar argumen menggunakan proksi penduduk, meskipun diakui bahwa ukuran penduduk mungkin proksi yang kurang ideal, tetapi ukuran ini dapat

dipertimbangkan sebagai proksi untuk *output*, karena memberikan : 1) sebagai proksi yang jelas dan transparan; 2) sering digunakan oleh pembuat kebijakan dalam diskusi mengenai konsolidasi pemerintah daerah; dan 3) meskipun tidak sempurna, pendekatan ini konsisten dengan literatur yang ada dan lebih memungkinkan untuk membandingkan hasil temuan dengan studi lain (Tran *et al.*, 2019). Sementara data kepadatan penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah diakses melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2017 sampai tahun 2023.

4.4. Metode Analisis

4.4.1. Model Regresi Data Panel

Data panel atau istilah lainnya data *pooled* merupakan kombinasi data runtun-waktu dan individual, data *micropanel*, data *longitudinal* dan analisis *cohort* (Gujarati & Porter, 2009). Baltagi (2005) dan Sulyanto (2011) mengartikan data panel sebagai data dari hasil pengamatan beberapa individu atau (unit *cross-sectional*) dalam beberapa periode waktu yang berurutan (*time series*). Menurut Sriyana (2014), ada tiga pendekatan dalam mengestimasi model data panel, antara lain model *common effects*, model *fixed effects* dan model *random effects*. Model *common effects* yaitu estimasi model tanpa pengaruh individu, sementara model *fixed effects* dan *random effects* yaitu estimasi model data panel dengan pengaruh individu. Sriyana (2014), Sulyanto (2011), Gujarati & Porter (2009), dan Baltagi (2005) menyatakan bahwa dibutuhkan ketepatan

mengestimasi intersep dan koefisien/slope dalam model data panel. Estimasi ini memiliki lima model dalam regresi data panel yang dapat dilihat pada Tabel IV.2.

Tabel IV.2.
Asumsi Intersep dan Koefien Persamaan Regresi Data Panel

No	Intersep	Slope	Keterangan
1.	Tetap	Tetap	Asumsi intersep dan slope tetap baik antar individu dan antar waktu
2.	Berbeda	Tetap	Asumsi slope tetap dan intersep berbeda antar individu
3.	Tetap	Berbeda	Asumsi slope tetap dan intersep berbeda baik antar individu dan antar waktu
4.	Berbeda	Berbeda	Asumsi intersep dan slope berbeda antar individu
5.	Berbeda	Berbeda	Asumsi intersep dan slope berbeda antar individu dan antar waktu

Sumber : Sriyana, 2014 dan Suliyanto, 2011

Berikutnya, pembentukan estimasi model data dilakukan untuk pengujian. Pembentukan estimasi model data panel mengikuti asumsi yang dibentuk sesuai dengan Tabel IV.2. Rancangan estimasi model regresi data panel mengikuti model yang dibangun oleh Sriyana (2014) dan Gujarati & Porter (2009), yaitu :

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \beta_{1it}X_{1it} + \beta_{2it}X_{2it} + \beta_{3it}X_{3it} + \beta_{4it}X_{4it} + \beta_{5it}X_{5it} + \beta_{6it}X_{6it} + \beta_{it}Z_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana :

i = 1,2,3,....., banyaknya unit *cross section*

t = 1,2,3,....., banyaknya data *time series*

Y_{it} = Kinerja pemerintah daerah ke-it

X_{1it} = DPRD ke-it

X_{2it} = Audit internal ke-it

X_{3it} = Daya saing ke-it

X_{4it} = Emulasi ke-it

X_{5it} = Kualitas manajerial kepala daerah ke-it

X_{6it} = Predikat ke-it

Z_{it} = Variabel kontrol ke-it

β = Parameter yang diestimasi

ϵ_{it} = Unsur gangguan populasi

4.4.2. Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel

Menurut Sriyana (2014), sebelum melakukan pengujian regresi data panel, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan estimasi model data panel. Pemilihan estimasi model data panel memiliki beberapa tahap pengujian. Pengujian dilakukan untuk menentukan atau memilih salah satu estimasi model terbaik, diantara tiga estimasi model yaitu *common effects model*, *fixed effects model* dan *random effects model*. Penelitian ini menggunakan alat bantu Eviews v.13 untuk memilih atau menentukan salah satu dari tiga model tersebut. Pemilihan estimasi model data panel dilakukan secara bertahap, antara lain :

4.4.2.1. Uji Chow

Tahap awal pemilihan estimasi model regresi data panel adalah memilih estimasi model regresi data panel antara *common effects model* dengan *fixed effects model* (Schwarz & Dalmácio, 2021 dan Sriyana, 2014). Pada tahap ini, pengujian lebih tepat menggunakan uji Chow (Baltagi, 2005). Uji Chow dilakukan menggunakan uji F dengan tujuan menguji perbedaan antar kelompok (Haddad *et al.*, 2021 dan Greene, 2003). Menurut Bullock *et al.* (2020) dan Gujarati & Porter (2009) uji F dilakukan untuk mengetahui perubahan intersep atau slope dalam estimasi model. Hasil uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan estimasi model regresi. Penelitian ini mengikuti model estimasi yang dikembangkan oleh Bullock *et al.* (2020) dan Sriyana (2014) dengan membangun hipotesis untuk memilih *common effects model* atau *fixed effects model* yaitu:

H_a : intersep berubah-ubah dan slope tetap, maka estimasi *fixed effects model* dipilih

Keputusan menerima atau menolak hipotesis ini mengandalkan hasil uji statistik F. Hasil uji F untuk memberikan informasi estimasi model yang terbaik dari dua estimasi model tersebut (Sriyana, 2014). Hipotesis nol ditolak apabila nilai probabilitas < 0,05, begitupun sebaliknya. Adapun notasi uji F mengikuti notasi yang digunakan oleh Sriyana (2014), yaitu :

$$F_{hitung} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / i - 1}{(RSS_2) / (it - i - k)}$$

Dimana :

RSS_1 : *Residual sum square* dari *common effects model* tanpa variabel *dummy*

RSS_2 : *Residual sum square* dari *fixed effects model* dengan variabel *dummy*

i : Jumlah individu

t : Jumlah periode waktu

k : Banyaknya parameter dalam *fixed effects model*

4.4.2.2. Uji *Lagrange Multiplier* (Uji LM – Uji Breusch–Pagan)

Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk memilih estimasi model regresi data panel antara *common effects model* dengan *random effects model* (Schwarz & Dalmácio, 2021; Sriyana, 2014; Baltagi, 2005; dan Greene, 2003). Pengujian ini menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Breusch & Pagan (1980) dengan menyusun uji *lagrange multiplier* atau uji LM (Baltagi, 2005 dan Greene, 2003). Uji LM memerlukan hipotesis untuk memilih estimasi model yang terbaik. Hipotesis yang dibentuk mengikuti estimasi model yang dikembangkan oleh Sriyana (2014); Baltagi (2005); dan Greene (2003), yaitu :

$H_a = \sigma \frac{2}{\mu} \neq 0$: maka estimasi *random effects model* dipilih

Keputusan yang diambil mempertimbangkan hasil uji *lagrange multiplier* atau Uji LM untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Hasil uji *Lagrange multiplier* atau uji LM digunakan untuk menentukan pilihan estimasi model regresi data panel yang terbaik antara *common effects model* dengan *random effects model* (Sriyana, 2014 dan Greene, 2003). Adapun notasi uji LM mengikuti notasi yang digunakan oleh Sriyana (2014) dan Greene (2003), yaitu:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left[\sum_{t=1}^t eit \right]}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t eit^2} - 1 \right]^2 = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T - \bar{ei})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^t eit^2} - 1 \right]^2$$

Dimana :

- n = Jumlah individu
- t = Jumlah periode waktu
- e = Residual yang diperoleh dengan metode OLS *common effects model* tanpa variabel *dummy*

Hasil uji LM_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai χ^2_{tabel} yang digunakan untuk mengambil keputusan. Hipotesis nol ditolak pada taraf α 5 %, jika hasil LM_{hitung} lebih besar dari χ^2_{tabel} dan nilai probabilitas $< 0,05$, begitupun sebaliknya (Sriyana, 2014 dan Greene, 2003).

4.4.2.3. Uji Hausman

Tahap selanjutnya yaitu menentukan estimasi model mana yang lebih baik, antara *fixed effects model* dengan *random effects model* (Schwarz & Dalmácio, 2021 dan Greene, 2003). Pemilihan ini dilakukan karena ada asumsi bahwa kedua

estimasi model tersebut lebih baik dibandingkan dengan OLS (Sriyana, 2014). Pemilihan *fixed effects model* dan *random effects model* telah lama diperdebatkan dalam literatur ekonometrik data panel (Gujarati & Porter, 2009 dan Baltagi, 2005). Hal ini dapat diselesaikan dengan bantuan uji formal yang dikembangkan oleh Hausman pada tahun 1978 untuk memilih *fixed effects model* atau *random effects model* (Majeed & Ozturk, 2020 dan Sriyana, 2014).

Uji Hausman merupakan uji spesifikasi yang disusun oleh Hausman pada tahun 1978. Uji ini digunakan untuk menguji ortogonalitas dari *random effects* dan variabel-variabel bebas (Greene, 2003). Menurut Awan *et al.* (2020) dan Sriyana (2014) uji Hausman digunakan untuk mengetahui pilihan estimasi model regresi data panel yang lebih tepat diantara model LSDV pada pendekatan *fixed effects model* dan GLS pada pendekatan *random effects model*. Penggunaan uji Hausman menghasilkan dua pilihan jawaban, untuk itu perlu dibangun hipotesis, yaitu :

H_a : *Fixed effects model* lebih baik

Keputusan yang diambil berpedoman pada hasil uji Hausman dengan melihat kriteria nilai *wald*. Hasil uji Hausman menjadi dasar untuk menentukan pilihan estimasi model regresi data panel yang terbaik antara *fixed effects model* dengan *random effects model* (Sriyana, 2014 dan Greene, 2003). Adapun notasi uji Hausman mengikuti notasi yang digunakan oleh Sriyana (2014), yaitu :

$$W = \chi^2[K] = [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]' \sum^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}]$$

Hasil uji Hausman akan dibandingkan dengan nilai χ^2_{tabel} yang digunakan untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan menolak hipotesis nol pada taraf α 5 %, jika hasil uji Hausman lebih besar dari χ^2_{tabel} atau nilai probabilitas < 0,05, berarti model LSDV dengan pendekatan *fixed effects model* lebih tepat digunakan. Jika hasil uji Hausman lebih kecil dari χ^2_{tabel} atau nilai probabilitas > 0,05, maka keputusannya menerima hipotesis nol pada taraf α 5 %, yang berarti model GLS dengan pendekatan *random effects model* lebih tepat digunakan.

4.4.3. Pengujian *Goodness of Fit* Suatu Model Regresi

Gujarati & Porter (2009) menjelaskan bahwa estimasi koefisien regresi perlu mendapat perhatian dalam regresi. Ketepatan estimasi model regresi sampel dapat diukur dari *goodness of fit* untuk menaksir nilai aktual. Menurut Ghazali & Ratmono (2017) dan Gujarati & Porter (2009) pengukuran *goodness of fit* secara statistik dapat menggunakan nilai statistik t dan koefisien determinasi. Mereka menambahkan bahwa nilai statistik dikatakan signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Begitu sebaliknya, nilai statistiknya dikatakan tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

4.4.3.1. Uji Signifikansi Individual atau Uji Statistik t

Sriyana (2014) menyatakan bahwa uji hipotesis terhadap masing-masing koefisien regresi merupakan langkah penting dalam ekonometrika. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik t (Ghozali & Ratmono, 2017;

Sriyana, 2014; Lind *et al.*, 2012; dan Gujarati & Porter, 2009). Pada dasarnya uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali & Ratmono, 2017 dan Gujarati & Porter, 2009). Selanjutnya Gujarati & Porter (2009) memberikan catatan bahwa uji statistik t dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi dari koefisien regresi. Apabila koefisien regresi pada variabel independen bernilai nol, maka variabel independen ini tidak memiliki manfaat dalam menjelaskan nilai dari variabel dependen (Lind *et al.*, 2012). Selain itu, uji statistik t digunakan untuk membuktikan kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol (Gujarati & Porter, 2009). Pembuktian tingkat signifikansi koefisien regresi dilakukan dengan membangun hipotesis. Rancangan hipotesis dibangun dengan mengikuti Ghozali & Ratmono (2017); Lind *et al.* (2012); dan Gujarati & Porter (2009), yaitu :

$H_a : \beta_1 \neq 0$, artinya variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen

Keputusan yang diambil mengacu pada hasil uji t secara statistik. Hasil uji ini menjadi dasar untuk menerima dan menolak hipotesis yang telah dibangun. Adapun notasi uji statistik t mengikuti notasi yang dinyatakan oleh Ghozali & Ratmono (2017), yaitu :

$$t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)}$$

Dimana :

β_1 = Koefisien parameter

$se\beta_1$ = *Standard error* koefisien parameter

Hasil uji statistik t akan dibandingkan dengan t tabel. Jika nilai $t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$ dengan nilai $\rho > \alpha$ (5%), maka H_0 diterima, yang berarti variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun, jika $t\text{-statistik} > t\text{-tabel}$ dengan nilai $\rho < \alpha$ (5%), maka H_a yang diterima, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017 dan Sriyana, 2014).

4.4.3.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan kemampuan model regresi untuk mengukur seberapa baik variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017; Lind *et al.*, 2012; dan Gujarati & Porter, 2009). Nilai koefisien determinasi dinotasikan dengan R^2 dengan nilai diantara nol sampai satu (Sriyana, 2014). Semakin kecil nilai R^2 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat terbatas (Ghozali & Ratmono, 2017). Semakin tinggi nilai R^2 atau mendekati nilai satu berarti menunjukkan semakin erat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (Sriyana, 2014). Adapun data silang (*cross-section*), secara umum koefisien determinasi rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali & Ratmono, 2017). Sementara notasi koefisien determinasi mengikuti notasi yang dinyatakan oleh Sriyana (2014), yaitu :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} \quad \text{atau} \quad R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi
 ESS = *Explained Sum of Squares*
 RSS = *Residual Sum of Squares*
 TSS = *Total Sum of Squares*

Selain melihat hasil R^2 , melihat koefisien determinasi dapat menggunakan nilai koefisien determinasi adjusted R-squared. Namun demikian, nilai adjusted R^2 dapat bernilai negatif. Apabila perhitungan statistik menghasilkan nilai negatif, maka nilai tersebut diasumsikan bernilai nol (Ghozali & Ratmono, 2017). Notasi koefisien determinasi adjusted R^2 mengikuti model dari Sriyana (2014), yaitu :

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{(\sum \hat{e}_i^2)/(n-k)}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2/(n-1)}$$

Dimana :

k = Jumlah koefisien regresi, termasuk intersep
 n = Jumlah observasi

4.4.4. Uji Asumsi

Uji asumsi klasik digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS). Uji asumsi klasik meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Menurut Prawoto & Basuki (2016) uji asumsi pada regresi data panel cukup menggunakan multikolinieritas dan heteroskedastisitas untuk mendapat *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE). Beberapa alasannya adalah :

- Uji linieritas tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Hal ini diasumsikan karena model sudah bersifat linier. Walaupun uji asumsi klasik diujikan, tujuannya hanya untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya.
- Uji normalitas bukan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan

beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi.

- Autokorelasi hanya terjadi pada data time series. Pengujian autokorelasi tidaklah berarti pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau *panel*).
- Multikolinieritas diujikan jika variabel bebas lebih dari satu pada regresi linier.
- Heteroskedastisitas terjadi biasanya pada data cross section, dimana data panel lebih dekat ke data cross section dibandingkan time series.

4.4.4.1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu kondisi dimana variable-variabel independen (variabel penjelas) saling berkorelasi satu sama lain (Hair *et al.*, 2019 dan Brooks, 2008). Uji multikolinieritas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi (Ekananda, 2019 dan Suliyanto, 2011). Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas yang tinggi, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi tak terhingga (Ghozali & Ratmono, 2017). Ini prasyarat yang harus dipenuhi dalam estimasi model regresi (Ekananda, 2019 dan Gujarati & Porter, 2009).

Kondisi multikolinieritas dapat dideteksi dengan beberapa cara. Pertama, multikolinieritas dilihat dengan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Multikolinieritas tidak terjadi, jika nilai $VIF < 10$, sedangkan nilai $tolerance > 0,10$. Kedua, multikolinieritas dilihat dari hubungan antar variabel independen. Nilai ambang batas korelasi yang diperbolehkan kurang dari 0,80 secara statistik (Hair *et al.*, 2019; Ghozali & Ratmono, 2017; Cooper & Schindler, 2014; dan Suliyanto, 2011).

4.4.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan suatu gejala dimana residu dari suatu persamaan regresi berubah-ubah pada suatu rentang data tertentu (Ekananda, 2019). Heteroskedastisitas lebih sering ditemukan pada data *cross section* dibandingkan data *time series* (Ekananda, 2019; Ghozali & Ratmono, 2017; dan Suliyanto, 2011). Identifikasi dan penanganan heteroskedastisitas adalah langkah penting untuk memastikan keandalan estimasi model regresi. Kondisi heteroskedastisitas menyebabkan estimasi model regresi yang dibangun tidak tepat. sehingga interpretasi hasil uji estimasi model regresi menjadi kurang akurat.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan dua cara, yaitu metode grafik dan metode uji statistik (Ghozali & Ratmono, 2017). Uji statistik digunakan dalam penelitian ini untuk menghindari variasi interpretasi dalam mendeteksi kondisi heteroskedastisitas. Metode uji statistik heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Breusch–Pagan–Godfrey dan uji uji Glejser. Menurut uji Breusch–Pagan–Godfrey dan uji Glejser heteroskedastisitas terdeteksi dalam estimasi model regresi apabila nilai probabilitas $Obs \cdot R\text{-Squared} < 0,05$, begitu sebaliknya.

4.5. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

4.5.1. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Pertama

Kriteria penerimaan dan penolakan digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Kreteria ini diterapkan untuk membandingkan hasil pengujian dengan hipotesis pertama. Sementara hipotesis statistik yang dibentuk :

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ yaitu DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya DPRD tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya DPRD memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.5.2. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kedua

Kriteria pengujian ini digunakan untuk menjawab hipotesis kedua yang diajukan. Hasil pengujian ini dibandingkan dengan hipotesis kedua. Sementara hipotesis statistik yang diajukan :

$H_2 : \beta_2 \neq 0$ yaitu auditor internal berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya audit internal tidak memengaruhi kinerja pemerintah daerah secara positif. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya audit internal memengaruhi kinerja pemerintah daerah secara positif.

4.5.3. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ketiga

Kriteria berikutnya membandingkan hasil pengujian dengan hipotesis ketiga untuk menerima atau menolaknya. Adapun hipotesis statistik dirumuskan :

$H_3 : \beta_3 \neq 0$ yaitu daya saing berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya daya saing tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya daya saing memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.5.4. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Ke-empat

Kriteria selanjutnya didasarkan pada hasil pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis ke-empat yang diajukan. Sementara hipotesis statistik, yaitu :

$H_4 : \beta_4 \neq 0$ yaitu emulasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya emulasi tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya emulasi memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.5.5. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Kelima

Kriteria ini diterapkan untuk menerima atau menolak hipotesis kelima. Hasil pengujian dijadikan dasar untuk penentuan keputusan hipotesis kelima. Sementara hipotesis statistik yang disusun :

$H_5 : \beta_5 \neq 0$ yaitu kualitas manajerial kepala daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya kualitas manajerial kepala daerah tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya kualitas manajerial kepala daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.5.6. Kriteria Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Keenam

Kriteria ini menjadi dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak hipotesis ke-enam. Hasil pengujian dibandingkan dengan hipotesis ini. Sementara hipotesis statistik yang diusulkan :

$H_6 : \beta_6 \neq 0$ yaitu predikat berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria,, jika nilai $p\text{-value} \geq \alpha 0,05$ maka H_0 diterima. Ini artinya predikat tidak memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Jika nilai $p\text{-value} < \alpha 0,05$ maka H_a diterima. Ini artinya predikat memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.6. Uji Tambahan

Uji tambahan dilakukan untuk memperdalam dan memperluas hasil penelitian. Uji tambahan merupakan upaya untuk meningkatkan keyakinan terhadap hasil empiris dari estimasi model regresi utama. Penelitian ini melakukan uji tambahan dengan memverifikasi kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui elemen – elemen indeks pembangunan manusia (IPM), yaitu kesehatan,

pendidikan (lama sekolah dan rata – rata lama sekolah), dan pengeluaran perkapita. Uji tambahan ini untuk mengidentifikasi perbedaan efek mekanisme tata kelola terhadap elemen IPM sehingga mengetahui mana yang berpengaruh kuat, lemah, bahkan tidak signifikan. Uji tambahan dapat memberikan implikasi kebijakan dengan mengintervensi variabel yang lemah atau belum signifikan untuk perbaikan kinerja.

BAB V

HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa tata kelola memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di seluruh kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian menggunakan populasi sebagai data sampel penelitian. Data yang diambil dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 29 kabupaten dan 6 kota. Pemilihan data sampel menggunakan *purposive sampling* (kriteria tertentu) dengan periode penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023. Kriteria data sampel dalam penelitian ini antara lain : 1) laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah; 2) laporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LKjIP – OPD) pemerintah daerah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah; 3) data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS); 4) data yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

Kriteria penentuan data sampel tersebut menjadi dasar dalam proses pemilihan data sampel. Adapun data sampel yang memenuhi kriteria disajikan pada Tabel V.1.

Tabel V.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Tahun							Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Data jumlah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah	35	35	35	35	35	35	35	245

Lanjutan Tabel V.1.

No.	Keterangan	Tahun							Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2	Data yang tidak sesuai kriteria sampel	23	20	11	6	2	3	4	69
3	Jumlah sampel	12	15	24	29	33	32	31	176

Sumber: Data diolah oleh peneliti Tahun 2025

Tabel V.1. menggambarkan bahwa hasil pengamatan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017 – 2023. Jumlah pengamatan selama 7 tahun mencapai 245 observasi (35 kabupaten dan kota X 7 tahun). Namun demikian, tidak semua populasi memiliki kelengkapan data untuk seluruh variabel yang diperlukan. Proses pengumpulan data dan verifikasi data ditemukan data yang tidak lengkap. Jumlah observasi yang tidak lengkap bervariasi untuk setiap tahunnya. Sejumlah 69 observasi atau 18,16% observasi tidak lengkap selama periode pengamatan.

Tabel V.1. menjelaskan bahwa data sampel yang layak untuk dianalisis sejumlah 176 observasi atau 71,84% observasi. Data sampel yang digunakan ini sudah memenuhi standar kualitas data penelitian dan validitas internal data berdasarkan teknik *purposive sampling*. Namun, data sampel tersebut memiliki variasi jumlah setiap tahunnya. Misalnya jumlah data sampel tahun 2017 tercatat 11 observasi, tahun 2018 terdokumentasi 15 observasi, tahun 2019 terdata 24 observasi, tahun 2020 terarsip 29 observasi, tahun 2021 teradministrasi 33 observasi, tahun 2022 terekam 32 observasi, dan tahun 2023 terinventaris 31 observasi. Adanya perbedaan jumlah data sampel setiap tahun menimbulkan struktur data penelitian ini berbentuk *unbalanced panel*.

Unbalance panel merupakan sejumlah unit dalam populasi yang diteliti tidak tersedia datanya untuk periode waktu penelitian (Wooldridge, 2002). Menurut Baltagi & Liu (2020) dan Wooldridge (2002) data *unbalance panel* dapat diterima secara metodologis dan mampu menghasilkan estimasi yang valid. *Unbalance panel* tetap menjamin dalam mempertahankan keragaman dan merepresentasikan data penelitian. Penggunaan data *unbalance panel* memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk memanfaatkan seluruh data tanpa harus mengeliminasi unit *cross-section*. Hal ini memungkinkan untuk memberikan ketepatan interpretasi dalam konteks tata kelola dan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota yang menjadi objek penelitian.

5.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah teknik analisis dasar untuk membantu mendeskripsikan dan meringkas data suatu variabel secara bermakna (Starbuck, 2023). Analisis statistik deskriptif mencakup nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi variabel independen dan dependen (Sekaran & Bougie, 2010). Menurut Arifin (2014) dan Starbuck (2023) analisis statistik deskriptif bermanfaat sebagai alat awal untuk membantu dalam menginterpretasikan data yang ada.

Penelitian ini memanfaatkan alat bantu *evIEWS v. 13* untuk analisis statistik deskriptif. Proses pengujian dilakukan dengan pendekatan *common sample*. Pendekatan ini mengolah data dari sampel dengan jumlah yang sama untuk setiap periodenya. Hasil pengujian statistik deskriptif dengan *common sample* disajikan dalam Tabel V.2.

Tabel V.2.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif *Common sample*

	KINERJA (IPM)	DPRD	AUDIT INTERNAL	DAYA SAING	EMULASI	KUALITAS MANAJERIAL KEPALA DAERAH	PREDIKAT	ASET	PENDUDUK
Mean	72,40	140,73	17,91	0,93	0,98	4,38	2,70	4,72	1941,88
Maximum	84,43	472,00	44,00	2,47	2,19	10,00	4,00	24,10	11878,00
Minimum	64,86	11,00	5,00	0,57	0,71	1,00	1,00	1,10	450,00
Std. Dev.	4,26	85,29	7,84	0,32	0,23	2,75	0,98	3,39	2283,94
Observ.	176	176	176	176	176	176	176	176	176

Selain pendekatan *common sample*, evIEWS v.13 menyediakan pengujian analisis deskriptif dengan pendekatan *individual samples*. Pendekatan ini dapat memproses data dengan jumlah yang berbeda setiap periodenya. Hasil analisis statistik deskriptif *individual samples* dijelaskan pada Tabel V.3.

Tabel V.3.
Hasil Analisis Statistik Deskriptif *Individual Samples*

	KINERJA (IPM)	DPRD	AUDIT INTERNAL	DAYA SAING	EMULASI	KUALITAS MANAJERIAL KEPALA DAERAH	PREDIKAT	ASET	PENDUDUK
Mean	72,66	141,43	17,88	0,98	0,99	4,40	2,53	4,79	2067,00
Maximum	87,68	472,00	44,00	2,74	2,19	10,00	4,00	31,00	11878,00
Minimum	64,86	11,00	5,00	0,57	0,71	1,00	1,00	1,10	450,00
Std. Dev.	4,55	84,71	7,71	0,38	0,25	2,75	1,03	3,82	2399,96
Observ.	245	198	197	245	245	245	245	245	245

5.2.1. Statistik Deskriptif Kinerja Pemerintah Daerah (IPM)

Pengujian statistik deskriptif memberikan ringkasan numerik yang secara umum mencakup nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Tabel V.2. memaparkan hasil analisis statistik deskriptif secara *common sample*. Tabel ini menjelaskan bahwa data sampel kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2023 sejumlah 176 data sampel atau

71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya tersedia. Capaian kinerja tertinggi 84,43 diraih oleh Kota Semarang pada tahun 2023, sementara capaian kinerja terendah 64,86 dipegang oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2017. Capaian kinerja pemerintah daerah menunjukkan rata – rata 72,40 dengan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 4,26. Penjelasan terkait kategori simpangan baku rendah, sedang, dan besar secara eksplisit belum ada, untuk itu penelitian ini menginterpretasikan studi Tulsyan *et al.* (2025). Studi tersebut mengklasifikasikan standar deviasi menjadi tiga, yaitu $0 - \leq 25\%$ kategori rendah, $> 25\% - < 50\%$ kategori sedang, dan $\geq 50\%$ kategori besar. Berdasarkan studi Tulsyan *et al.* (2025), maka nilai standar deviasi 4,26 sebesar 5,88% dikategorikan rendah.

Pengujian statistik dekriptif dapat juga dilakukan secara *individual samples*, seperti yang terlihat pada Tabel V.3. Data sampel kinerja pemerintah daerah dari tahun 2017 – 2023 sejumlah 245. Capaian kinerja pemerintah daerah dengan uji ini memperlihatkan rata – rata 72,66 dan standar deviasi 4,55 atau 6,26%. Hasil analisis standar deviasi tersebut dikategorikan rendah dengan mengacu pada studi Tulsyan *et al.* (2025). Capaian kinerja tertinggi 87,68 diperoleh Kota Salatiga pada tahun 2017. Capaian kinerja pemerintah daerah dengan raihan terendah Kabupaten Brebes sebesar 64,86.

5.2.2. Statistik Deskriptif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Variabel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara ringkas dijabarkan dengan uji statistik deskriptif. Tabel V.2. menyajikan hasil uji statistik deskriptif DPRD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan ukuran

jumlah rapat DPRD. Uji statistik deskriptif dengan *common sample* sejumlah 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya tersedia. Tabel V.2. menggambarkan ringkasan rapat DPRD kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah rata – rata 140,73 dengan simpangan baku (standar deviasi) sebesar 85,29 atau 60,61%. Standar deviasi tersebut menunjukkan bahwa sebaran data sampel kategori besar dengan berpegang pada penelitian Tulsyan *et al.* (2025), sehingga data sampel cenderung tidak homogen. Jumlah rapat DPRD tercatat paling banyak 472 kali dalam setahun Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Jumlah rapat DPRD terdata paling sedikit 11 kali dalam satu tahun Kabupaten Blora pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023.

Jumlah rapat DPRD juga dianalisis dengan statistik dekriptif *individual samples*. Hasil analisis statistik dekriptif secara *individual samples* dapat dilihat pada Tabel V.3. Data sampel jumlah rapat DPRD dari tahun 2017 – 2023 terdokumentasi 198. Uji ini memperlihatkan jumlah rapat DPRD rata – rata 141,43 kali dalam satu tahun dan standar deviasi 84,71 atau 59,90%. Hasil analisis ini menunjukkan sebaran data sampel kategori besar dengan acuan penelitian Tulsyan *et al.* (2025), sehingga data sampel dikategorikan tidak homogen. Jumlah rapat DPRD tercatat paling banyak 472 kali dalam setahun Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Jumlah rapat DPRD terdata paling sedikit 11 kali dalam satu tahun Kabupaten Blora pada tahun 2017 dan tahun 2018 untuk periode waktu penelitian yang sama.

5.2.3. Statistik Deskriptif Audit Internal Pemerintah Daerah

Tabel V.2. menyajikan gambaran ringkas statistik deskriptif terkait jumlah audit internal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Uji statistik deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan *common sample*. Sejumlah 176 data sampel atau 71,84% terverifikasi dari 245 data sampel yang seharusnya ada untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan standar deviasi 7,84 atau 44,07%. Ini diartikan bahwa sebaran data sampel dikategori sedang dengan merujuk pada studi Tulsyan *et al.* (2025). Tabel V.2. memberikan informasi bahwa jumlah auditor internal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan rata – rata 17,79 orang. Jumlah auditor internal pemerintah daerah terbanyak 44 orang, yaitu Kabupaten Klaten dan Kota Semarang untuk tahun 2022. Jumlah auditor internal pemerintah daerah paling sedikit 5 orang untuk Kabupaten Jepara tahun 2018.

Jumlah auditor internal pemerintah daerah juga dianalisis dengan *individual samples*. Hasil analisis statistik deskriptik dapat dilihat pada Tabel V.3. yang menunjukkan jumlah auditor internal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 – 2023 sejumlah 197 data sampel. Rata – rata jumlah auditor internal tercatat sebesar 17,88 orang dengan standar deviasi 7,71 atau 43,12%. Interpretasi standar deviasi sebesar 7,71 yang dikategorikan sedang untuk sebaran data sampel dengan acuan pada studi Tulsyan *et al.* (2025). Jumlah auditor internal pemerintah daerah terbanyak 44 orang untuk Kabupaten Klaten pada tahun 2022 dan Kota Semarang tahun 2022. Jumlah auditor internal pemerintah daerah paling sedikit 5 orang untuk Kabupaten Jepara tahun 2018.

5.2.4. Statistik Deskriptif Daya Saing Pemerintah Daerah

Analisis statistik deskriptif daya saing diuraikan dalam Tabel V.2 dengan ukuran indeks daya saing pemerintah daerah. Uji statistik deskriptif dilakukan dengan pendekatan *common sample*. Pengamatan terhadap daya saing pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dilakukan untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023. Jumlah data sampel terverifikasi 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya terdokumentasi. Sementara standar deviasi daya saing dalam Tabel V.2. disajikan sebesar 0,32 atau 34,41%. Hasil analisis standar deviasi 0,32 mengindikasikan sebaran data sampel dalam kategori sedang menurut studi Tulsyan *et al.* (2025).

Tabel V.2. menginformasikan bahwa daya saing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai indeks 0,93. Nilai indeks daya saing pemerintah daerah tertinggi 2,47 dicapai oleh Kota Surakarta pada tahun 2020. Nilai daya saing tertinggi mengindikasikan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk bersaingnya tinggi. Nilai indeks daya saing pemerintah daerah terendah 0,57 tercatat Kabupaten Pemalang pada tahun 2023. Kabupaten ini mengisyaratkan kemampuan bersaingnya masih rendah.

Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan dengan pendekatan *individual samples*. Hasil uji ini dapat dilihat pada Table V.3. Tabel tersebut menjelaskan bahwa jumlah data sampel yang diobservasi 245 data sampel dengan standar deviasi 0,38 atau 38,78%. Hasil analisis standar deviasi 38,78% menandakan sebaran data sampel penelitian termasuk sedang dengan menginterpretasikan penelitian Tulsyan *et al.* (2025). Kemudian rata – rata indeks daya saing sebesar

0,98 untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Indeks daya saing tertinggi 2,74 dicapai oleh Kota Surakarta pada tahun 2020 dan indeks daya saing terendah terendah 0,57 tercatat Kabupaten Pemalang pada tahun 2023. Indeks daya saing yang tinggi menggambarkan kemampuan bersaing pemerintah daerah terhadap pemerintah daerah lainnya lebih kompetitif, begitupun sebaliknya.

5.2.5. Statistik Deskriptif Emulasi Pemerintah Daerah

Pengujian variabel emulasi dengan uji statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel V.2 dengan ukuran indeks layanan pemerintah daerah. Pengujian statistik deskriptif menggunakan pendekatan *common sample*. Emulasi pemerintah daerah diamati untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sampel tercatat sejumlah 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya terdata. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa standar deviasi emulasi sebesar 0,23 atau 23,46%. Menurut Tulsyan *et al.* (2025), standar deviasi 0,23 dikategorikan rendah.

Tabel V.2. memberikan informasi bahwa emulasi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai indeks 0,98. Nilai indeks emulasi pemerintah daerah tertinggi 2,19 dicapai oleh Kota Magelang pada tahun 2021. Nilai indeks emulasi tertinggi menyiratkan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah lainnya. Nilai indeks emulasi pemerintah daerah terendah 0,71 tercatat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017. Nilai minimum ini dimaknai sebagai sinyal bahwa Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan layanan masih rendah.

Analisis statistik deskriptif dapat dilakukan juga dengan *individual samples*. Hasil analisis *individual samples* statistik deskriptif disajikan pada Tabel V.3. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah data sampel yang diobservasi 245 data sampel dengan standar deviasi 0,25 atau 25,25%. Interpretasi hasil analisis standar deviasi 0,25 mengikuti studi Tulsyan *et al.* (2025) yaitu kategori sedang. Rata – rata indeks emulasi sebesar 0,99 untuk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Sementara indeks emulasi tertinggi 2,19 dicapai oleh Kota Magelang pada tahun 2021 dan indeks terendah terendah terendah 0,71 tercatat Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017. Indeks emulasi yang tinggi menggambarkan pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah lainnya, begitupun sebaliknya.

5.2.6. Statistik Deskriptif Kualitas Manajerial Kepala Daerah

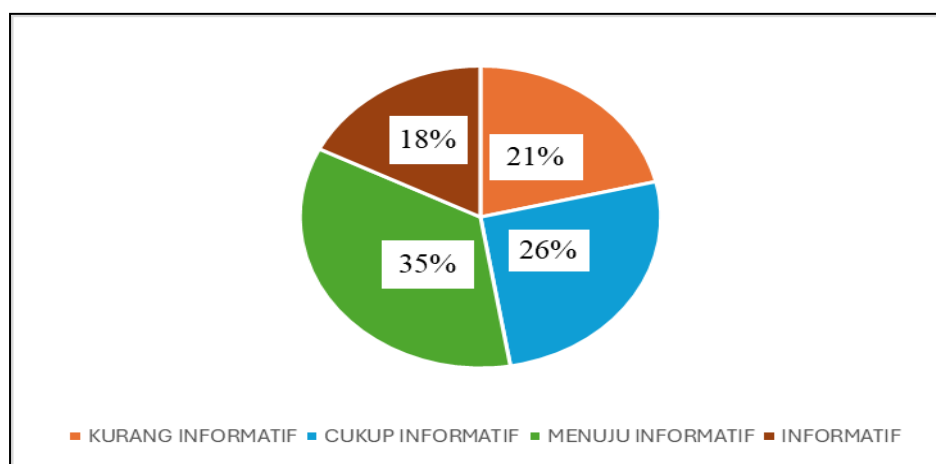
Uji statistik deskriptif kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan pengalaman menjabat sebagai kepala daerah dapat dilihat dalam Tabel V.2. Pendekatan *common sample* digunakan untuk analisis statistik deskriptif. Kualitas manajerial kepala daerah dicermati untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sampel tercatat sejumlah 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang seharusnya terarsip. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi kualitas manajerial kepala daerah 2,75 atau 62,79%. Nilai standar deviasi 2,75 memiliki sebaran data sampel dikategorikan besar dengan acuan studi Tulsyan *et al.* (2025)

Tabel V.2. menguraikan bahwa kualitas manajerial kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai 4,38. Nilai kualitas manajerial kepala daerah tertinggi 10 dicapai oleh 6 kabupaten dan 2 kota. Nilai kualitas manajerial tertinggi mengandung makna bahwa kepala daerah sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 10 tahun sehingga kepala daerah dianggap sangat berpengalaman. Nilai kualitas manajerial kepala daerah terendah 1 diketahui ada 38 kabupaten dan 8 kota. Nilai kualitas manajerial terendah mengandung makna bahwa kepala daerah baru menjabat 1 tahun sebagai kepala daerah sehingga kepala daerah dianggap belum berpengalaman

Tabel V.3. kualitas manajerial kepala daerah dianalisis dengan pendekatan *individual samples* untuk statistik deskriptif. Data sampel tercatat sejumlah 245 data sampel untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa standar deviasi kualitas manajerial kepala daerah sebesar 2,75 atau 62,79% dengan rata – rata nilai 4,40. Nilai standar deviasi 2,75 memiliki sebaran data sampel kategori besar (Tulsyan *et al.*, 2025). Nilai kualitas manajerial kepala daerah tertinggi 10 dicapai oleh 6 kabupaten dan 2 kota. Nilai kualitas manajerial terendah mengandung makna bahwa kepala daerah sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 10 tahun sehingga dianggap sangat berpengalaman. Nilai kualitas manajerial kepala daerah terendah 1 diketahui dari 38 kabupaten dan 8 kota. Nilai kualitas manajerial terendah diartikan bahwa kepala daerah baru menjabat 1 tahun sebagai kepala daerah dipandang belum berpengalaman.

5.2.7. Statistik Deskriptif Predikat Pemerintah Daerah

Statistik deskriptif variabel predikat dengan ukuran kriteria diuraikan pada grafik V.1. Pemerintah daerah meraih predikat informatif sebagai implementasi transparansi. Predikat pemerintah daerah diobservasi untuk 35 kabupaten dan kota dari tahun 2017 – 2023 atau sejumlah 245 pengamatan. Pemerintah daerah dengan predikat informatif menunjukkan 52 observasi untuk periode pengamatan 2017 – 2023, sehingga rata – rata raihan predikat informatif sejumlah 7,43 pertahun dari 35 kabupaten dan kota atau sebesar 21% pertahun. Sementara pemerintah daerah yang meraih predikat menuju informatif sejumlah 64 observasi selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata raihan predikat menuju informatif sejumlah 9,14 pertahun dari 35 kabupaten dan kota atau sebesar 26% pertahun.



Grafik V.1. Statistik Deskriptif Predikat Pemerintah Daerah

Grafik V.1. juga menguraikan bahwa pemerintah daerah dengan predikat yang cukup informatif dan kurang informatif. Jumlah raihan predikat cukup informatif sejumlah 86 observasi untuk periode pengamatan 2017 – 2023, sehingga termasuk masih tinggi rata – rata 12,29 pertahun dari 35 kabupaten dan

kota atau sebesar 35%. Hal ini menandakan bahwa masih banyak pemerintah daerah belum sepenuhnya menerapkan transparansi. Sementara pemerintah daerah yang kurang informatif sejumlah 43 observasi atau rata – rata 6,14 pertahun dari 35 kabupaten dan kota. Penilaian predikat yang kurang informatif memberikan gambaran bahwa rata – rata sejumlah 18% pertahun pemerintah daerah belum mengimplementasikan transparansi.

5.2.8. Statistik Deskriptif Variabel Kontrol

Variabel kontrol dianalisis dengan statistik deskriptif yang diukur menggunakan jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kontrol dapat dilihat pada Tabel V.2. Pendekatan *common sample* digunakan untuk analisis statistik deskriptif. Jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk diamati untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Data sampel tercatat sejumlah 176 data sampel atau 71,84% dari 245 data sampel yang teridentifikasi. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa standar deviasi jumlah aset pemerintah daerah sebesar 3,39 dan jumlah kepadatan penduduk sebesar 2.283,94 yang dikategorikan dengan sebaran sangat besar

Tabel V.2. menjelaskan bahwa jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai 4,72 dan 1.941,88. Jumlah aset pemerintah daerah tertinggi 24,1 ditempati Kota Semarang dan jumlah kepadatan penduduk tertinggi 11.879 ditempati oleh Kota Surakarta. Jumlah aset pemerintah daerah terendah diduduki

oleh Kabupaten Rembang sebesar 1,10 dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah terendah diduduki oleh Kabupaten Blora sebesar 450.

Tabel V.3. menyajikan analisis statistik deskriptif jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk dengan pendekatan *individual samples*. Data sampel tercatat sejumlah 245 data sampel untuk periode waktu penelitian tahun 2017 – 2023 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa standar deviasi jumlah aset pemerintah daerah sebesar 3,82 dan standar deviasi jumlah kepadatan penduduk sebesar 2.399,96. Jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki rata – rata nilai 4,79 dan 2.067. Nilai jumlah aset pemerintah daerah tertinggi 3,10 ditempati Kota Semarang dan jumlah kepadatan penduduk tertinggi 11.878 ditempati oleh Kota Surakarta. Nilai jumlah aset pemerintah daerah terendah dipegang oleh Kabupaten Rembang sebesar 1,10 dan Nilai jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah terendah dipegang oleh Kabupaten Blora sebesar 450.

5.3. Analisis Data dan Interpretasi Hasil Analisis

Data panel memerlukan tahapan untuk memilih estimasi model pengujian. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan apakah estimasi model *common effect*, atau model *fixed effect*, atau *random effect* yang dianggap tepat. Tahapan pengujian pemilihan estimasi model meliputi uji chow, uji *lagrange multiplier* atau uji LM, dan Uji Hausman.

5.3.1. Pengujian Pemilihan Estimasi Model Data Panel

5.3.1.1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk pengambilan keputusan untuk menentukan model estimasi *common effects model* (CEM) atau *fixed effects model* (FEM) yang dipilih (Bullock *et al.*, 2020; dan Sriyana, 2014). Uji Chow menguji model regresi panel apakah memiliki perbedaan intercept yang signifikan antar daerah. *Fixed effect model* (FEM) lebih tepat digunakan apabila perbedaannya signifikan. Sebaliknya, jika tidak signifikan, maka *common effect model* (CEM) dianggap lebih sesuai. Keputusan pemilihan model dapat dilihat pada Tabel V.4. dengan melihat tingkat probabilitas.

Tabel V.4.
Keputusan Pemilihan Model CEM dan FEM

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	FEM

Tabel V.5. menyajikan nilai probabilitas (*p-value*) untuk kedua pengujian, baik *Cross-section F-test* maupun *Cross-section Chi-square* adalah 0.00, atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa H_a diterima. Keputusan yang diambil menggunakan *fixed effect model* (FEM) sebagai model yang dianggap pilihan tepat. Penggunaan *fixed effect model* (FEM) diartikan bahwa karakteristik masing-masing daerah dalam data sampel memberikan pengaruh berbeda terhadap model, sehingga pendekatan *fixed effect model* lebih mampu menangkap variasi tersebut.

Tabel V.5.
Hasil Uji Chow

<i>Redundant Fixed Effects Tests</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section fixed effects</i>			
<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	79,87	(33,13)	0,00
<i>Cross-section Chi-square</i>	533,05	33	0,00

5.3.1.2. Uji Lagrange multiplier (Uji LM – Uji Breusch–Pagan)

Uji *Breusch-Pagan Lagrange Multiplier* (LM) dilakukan untuk menentukan pilihan estimasi model regresi panel antara *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM). Hasil uji *lagrange multiplier* digunakan sebagai pertimbangan untuk memilih estimasi model regresi data panel berdasarkan hipotesis yang diajukan. Hipotesis tersebut adalah jika tingkat probabilitas $< 0,05$, maka pilihan yang tepat *random effect model* (REM), begitupun sebaliknya. Tabel V.6. menjadi dasar pertimbangan dalam memilih estimasi model regresi panel antara *common effect model* (CEM) atau *random effect model* (REM).

Tabel. V.6.
Keputusan Pemilihan Model CEM dan REM

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Lagrange	Prob. $> 0,05$	CEM
	Prob. $< 0,05$	REM

Tabel V.7. menyajikan hasil Uji *Breusch–Pagan Lagrange Multiplier* (LM). Hasil pengujian menunjukkan *cross-section* sebesar 0,00, *time* sebesar 0,1713, dan *both* sebesar 0,00. Secara keseluruhan nilai probabilitas tersebut berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Hal uji menunjukkan bahwa estimasi model yang tepat adalah *Random Effect Model* (REM) karena nilai probabilitas $< 0,05$.

Tabel. V.7.
Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

<i>Lagrange Multiplier Tests for Random Effects</i>			
<i>Null hypotheses: No effects</i>			
<i>Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives</i>			
<i>Test Hypothesis</i>	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	166,65 (0,00)	1,87 (0,17)	168,52 (0,00)

5.3.1.3. Uji *Hausman*

Uji Hausman digunakan untuk memilih estimasi model regresi data panel antara *fixed effect model* (FEM) dengan *random effect model* (REM). Uji Hausman dilakukan dengan asumsi bahwa model FEM dan model REM dianggap lebih baik dibandingkan dengan model OLS (Sriyana, 2014). Tabel V.8. menyajikan pilihan model regresi yang seharusnya diambil. Jika probabilitas $> 0,05$ H_0 diterima, artinya *random effects model* lebih tepat, begitu sebaliknya. Jika probabilitas $< 0,05$ H_a diterima, maka *fixed effects model* lebih tepat.

Tabel V.8.
Keputusan Pemilihan Model REM dan FEM

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Hausman	Prob. $> 0,05$	REM
	Prob. $< 0,05$	FEM

Tabel V.9. memberikan hasil uji Hausman dengan tingkat probabilitas $< 0,05$. Hasil ini mengarahkan pada keputusan untuk memilih estimasi model regresi data panel yang dianggap lebih tepat. Berdasarkan Tabel V.9. hasil uji Hausman menunjukkan tingkat probabilitas $0,00 < 0,05$, sehingga estimasi model regresi data panel yang dianggap tepat adalah *fixed effects model* (FEM).

Tabel V.9.
Hasil Uji *Hausman*

<i>Correlated Random Effects - Hausman Test</i>			
<i>Equation: Untitled</i>			
<i>Test cross-section random effects</i>			
<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f.</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	46,44	8	0,00

5.3.1.4. Pengujian Estimasi Model Regresi *Fixed Effects Model* (FEM).

Rangkaian tahapan pemilihan estimasi model regresi data panel telah dilakukan dengan uji *Chow*, uji *Lagrange Multiplier* (LM), dan uji *Hausman*. Berdasarkan tahapan uji tersebut, penelitian ini memilih estimasi model regresi data panel dengan pendekatan *fixed effects model* (FEM). Hasil uji *fixed effects model* (FEM) dapat dilihat pada Tabel V.10.

Tabel V.10.
Uji *Fixed Effects Model* (FEM).

<i>Dependent Variable: IPM (Y)</i>						
<i>Method: Pooled Least Squares</i>						
<i>Date: 12/16/25 Time: 07:15</i>						
<i>Sample: 1 7</i>						
<i>Included observations: 7</i>						
<i>Cross-sections included: 34</i>						
<i>Total pool (unbalanced) observations: 176</i>						
<i>Cross sections without valid observations dropped</i>						
<i>Variable</i>	<i>Jenis variabel</i>	<i>Prediksi</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	
C	Dependen		68,01	86,27	0,00	
DPRD (X1)	Independen	+	-0,00	-0,63	0,53	
Audit Internal (X2)	Independen	+	0,05	4,17	0,00***	
Daya Saing X3)	Independen	+	-0,70	-2,27	0,02**	
Emulasi (X4)	Independen	+	0,79	2,08	0,04**	
Kualitas Manajerial Kepala Daerah (X5)	Independen	+	-0,02	-0,89	0,37	
Predikat X6)	Independen	+	0,55	8,57	0,00***	
Aset (Z1)	Kontrol	+	34,00	3,26	0,00***	
Penduduk (Z2)	kontrol	+	0,00	0,77	0,44	

Lanjutan Tabel V.10.

<i>Fixed Effects (Cross)</i>			
BANJARNEGARA--C	-3,85	PEKALONGAN--C	-1,20
BANYUMAS--C	-1,03	PEKALONGANKOTA--C	2,26
BATANG--C	-3,53	PEMALANG--C	-4,60
BLORA--C	-2,02	PURBALINGGA--C	-3,07
BOYOLALI--C	2,39	PURWOREJO--C	1,41
BREBES--C	-5,19	REMBANG--C	-0,88
DEMAK--C	-0,24	SALATIGAKOTA--C	12,15
GROBOGAN--C	-0,78	SEMARANG--C	2,18
JEPARA--C	-0,65	SEMARANGKOTA--C	3,81
KARANGANYAR--C	3,67	SRAGEN--C	2,08
KEBUMEN--C	-2,04	SUKOHARJO--C	5,42
KENDAL--C	0,98	SURAKARTAKOTA--C	5,65
KLATEN--C	3,47	TEGAL--C	-3,15
KUDUS--C	2,62	TEGALKOTA--C	2,94
MAGELANG--C	-0,50	TEMANGGUNG--C	-1,96
MAGELANGKOTA--C	6,50	WONOGIRI--C	-1,66
PATI--C	0,01	WONOSOBO--C	-3,47
<i>Effects Specification</i>			
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>R-squared</i>	0,99	<i>Mean dependent var</i>	72,40
<i>Adjusted R-squared</i>	0,98	<i>S.D. dependent var</i>	4,26
<i>S.E. of regression</i>	0,54	<i>Akaike info criterion</i>	1,81
<i>Sum squared resid</i>	39,11	<i>Schwarz criterion</i>	2,57
<i>Log likelihood</i>	-117,37	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	2,11
<i>F-statistic</i>	262,69	<i>Durbin-Watson stat</i>	1,27
<i>Prob(F-statistic)</i>	0,00		

Keterangan : Variabel Dependen yaitu IPM; ****highly significant* < 0,01;
 ***significant* < 0,05; * *moderately significant* < 0,10.

Hasil uji *fixed effects model* (FEM) memberi gambaran untuk membentuk estimasi model regresi data panel. Hasil uji *fixed effects model* (FEM) digunakan sebagai dasar untuk membentuk rancangan estimasi model data panel. Rancangan estimasi model data panel secara umum dinotasikan sebagai berikut :

$$Y_{it} = 68,01_{it} - 0,00_{it}X_{1it} + 0,05_{it}X_{2it} - 0,70_{it}X_{3it} + 0,79_{it}X_{4it} - 0,02_{it}X_{5it} + 0,55_{it}X_{6it} \\ + 34,00_{it}Z_{1it} + 0,00_{it}Z_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = 1,2,3,....., banyaknya unit *cross section*

t = 1,2,3,....., banyaknya data *time series*

Y_{it} = Kinerja pemerintah daerah dengan ukuran Indeks pembangunan manusia ke-it

X_{1it} = DPRD dengan ukuran jumlah rapat DPRD ke-it

X_{2it} = Auditor internal dengan ukuran jumlah audit internal ke-it

X_{3it} = Daya saing dengan ukuran indeks daya saing ke-it

X_{4it} = Emulasi dengan ukuran indeks emulasi ke-it

X_{5it} = Kualitas manajerial kepala daerah dengan ukuran pengalaman lama menjabat ke-it
 X_{6it} = Predikat dengan ukuran pemeringkatan (label atau posisi) ke-it
 Z_{1it} = Variabel kontrol aset pemerintah daerah dengan ukuran jumlah aset ke-it
 Z_{2it} = Variabel kontrol penduduk dengan ukuran jumlah kepadatan penduduk ke-it
 β = Parameter yang diestimasi
 ε_{it} = Unsur gangguan populasi

Pendekatan *fixed effects model* (FEM) memungkinkan setiap *cross-section* memiliki intersep yang berbeda. Perbedaan intersep ini membuat estimasi parameter lebih konsisten untuk menjelaskan korelasi antara variabel penjelas dan karakteristik setiap individual. Secara teoritis, asumsi intersep berbeda antar individu dan koefisien bersifat tetap dapat menjelaskan satu persatu untuk setiap individu. Tabel V.10. menguraikan variasi intersep setiap kabupaten dan kota dengan melihat hasil uji *fixed effects (Cross)*. Sebagai contoh, Kabupaten Banjarnegara memiliki intersep sebesar $-3,85$. Nilai intersep ini memiliki arti bahwa intersep dalam estimasi model secara umum sebesar $68,00$, maka intersep secara individu untuk Kabupaten Banjarnegara sebesar $68,00 - 3,85 = 64,15$. Jika dinotasikan dalam estimasi model regresi data panel untuk Kabupaten Banjarnegara terlihat sebagai berikut :

$$Y_{\text{Banjarnegara}_t} = 68,00_{it} - 3,85 - 0,00_{it}X_{1it} + 0,05_{it}X_{2it} - 0,70_{it}X_{3it} + 0,79_{it}X_{4it} - 0,02_{it}X_{5it} + 0,55_{it}X_{6it} + 34,00_{it}Z_{1it} + 0,00_{it}Z_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Estimasi Model tersebut berlaku untuk setiap kabupaten dan kota. Penjelasan secara individu dapat menghasilkan estimasi model yang lebih konsisten berdasarkan hasil uji intersep masing – masing *cross-section*, meskipun koefisien bersifat tetap. Konsistensi ini penting untuk menjaga ketepatan dalam estimasi model regresi (Haddad *et al.*, 2021 dan Bullock *et al.*, 2020).

5.3.2. Pengujian *Goodness of Fit* Estimasi Model Regresi

Estimasi model regresi yang telah ditetapkan tersebut memerlukan uji *goodness of fit* secara statistik. Uji *goodness of fit* penting dilakukan untuk menguji kecocokan estimasi model regresi dengan data observasinya. Estimasi model regresi dikatakan *goodness of fit* apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (H_0 ditolak) pada tingkat signifikansi α 5%. Begitu sebaliknya, nilai statistiknya dikatakan tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima. penelitian ini menguji *goodness of fit* secara statistik menggunakan koefisien nilai statistik t dan koefisien determinasi (Ghozali & Ratmono, 2017 dan Gujarati & Porter, 2009).

5.3.2.1. Uji Signifikansi Individual atau Uji Statistik t

Uji statistik t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen (Lind *et al.*, 2012 dan Gujarati & Porter, 2009). Menurut Ghozali & Ratmono (2017) hasil uji t dapat digunakan untuk membuktikan ketepatan estimasi model regresi atau *goodness of fit*. Estimasi model regresi yang ditunjukkan oleh t-statistik mencerminkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara individual. Hal ini menjadikan uji t dapat bermanfaat untuk penilaian kelayakan (*goodness of fit*) estimasi model regresi.

Tabel V.10. menyajikan intersep (konstanta) dengan nilai positif sebesar 68,00. Nilai intersep IPM sebesar 68,00 diartikan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) akan bernilai sebesar 68,00 pada kondisi *ceteris paribus* (seluruh

variabel independen dan variabel kontrol bernilai nol). Nilai intersep ini merepresentasikan *goodness of fit* bahwa variabel dependen kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan IPM dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel independen yaitu DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, predikat, dan variabel kontrol jumlah aset dan kepadatan.

Penjelasan kelayakan (*goodness of fit*) estimasi model regresi secara individual dapat dilihat dari nilai t -statistik variabel independen. Secara teoritis arah (tanda) nilai t -statistik akan mengikuti arah koefisien estimasi. Koefisien estimasi yang bernilai positif akan menghasilkan t -statistik bernilai positif, sedangkan koefisien estimasi yang bernilai negatif akan menghasilkan t -statistik bernilai negatif. Arah nilai t -statistik dan arah nilai koefisien estimasi variabel independen sangat penting untuk mendukung *goodness of fit* estimasi model regresi yang dibangun.

Berdasarkan Tabel V.10. variabel DPRD, daya saing, dan kualitas manajerial kepala daerah memiliki nilai t -statistik dan nilai koefisien estimasi arah negatif. Koefisien estimasi bernilai negatif diartikan bahwa peningkatan satu satuan variabel DPRD (-0,00), daya saing (-0,70), dan kualitas manajerial kepala daerah (-0,02) akan menurunkan satu satuan kinerja pemerintah daerah. Sementara variabel audit internal, emulasi, predikat, dan variabel kontrol jumlah aset dan jumlah kepadatan penduduk menunjukkan nilai t -statistik dan nilai koefisien estimasi dengan arah positif. Koefisien estimasi bernilai positif dipahami bahwa peningkatan satu satuan variabel audit internal (0,05), emulasi (0,79), predikat (0,55), dan variabel kontrol jumlah aset (34,00) dan jumlah kepadatan penduduk (0,00) akan meningkatkan satu satuan kinerja pemerintah daerah.

Pengamatan selanjutnya difokuskan pada nilai t -statistik individual masing – masing variabel independen untuk menilai kontribusi dalam estimasi model regresi. Nilai kontribusi terhadap estimasi model regresi dianalisis dengan membandingkan dengan nilai t -tabel. Apabila nilai t -statistik $>$ nilai t -tabel berarti variabel independen berkontribusi terhadap estimasi model regresi, begitupun sebaliknya. Tabel V.10. menginformasikan nilai t -statistik variabel audit internal (4,17), daya saing (-2,27), emulasi (2,08), predikat (8,57) dan variabel kontrol jumlah aset pemerintah daerah (3,26) $>$ nilai t -tabel (1,97) pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai t -statistik tersebut menunjukkan bahwa masing – masing variabel independen yang diuji mampu memberikan dukungan yang kuat dalam menjelaskan variasi variabel dependen pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini memperkuat validasi estimasi model regresi yang telah dibangun dalam kerangka *goodness of fit* pada tingkat individual.

Sementara nilai t -statistik variabel DPRD (-0,63), kualitas manajerial kepala daerah (-0,89), dan variabel kontrol jumlah kepadatan penduduk (0,78) $<$ nilai t -tabel (1,97) pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai t -statistik $<$ nilai t -tabel mengindikasikan bahwa kontribusi variabel DPRD, kualitas manajerial kepala daerah, dan variabel kontrol jumlah kepadatan penduduk yang dimasukkan dalam estimasi model regresi untuk menjelaskan kinerja pemerintah daerah dipandang masih lemah secara statistik. Pada konteks kerangka *goodness of fit* perlu diperhatikan secara hati – hati dalam interpretasi dari hasil estimasi model regresi yang dibangun.

Penjelasan hasil uji t -statistik individual tersebut digunakan untuk memeriksa ketepatan estimasi model regresi. Analisis estimasi model regresi memasukan 6 variabel independen dan 2 variabel kontrol. Hasil analisis estimasi model regresi menunjukkan bahwa 4 variabel independen dan satu variabel kontrol terbukti mampu menjelaskan variasi variabel dependen pada tingkat 0,05. Hasil analisis ini membuktikan bahwa estimasi model regresi dipandang sudah tepat dan dapat diterima secara statistik. Hal ini menegaskan bahwa estimasi model regresi telah memenuhi kriteria *goodness of fit*.

5.3.2.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa baik variabel – variabel independen dapat menjelaskan variasi variabel dependen (Lind *et al.*, 2012 dan Gujarati & Porter, 2009). Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 – 1. Variabel independen dipandang mampu menjelaskan dengan baik variasi variabel dependen apabila nilai koefisien determinasi mendekati 1, dan sebaliknya (Ghozali & Ratmono, 2017). Nilai koefisien determinasi pada model regresi dapat diketahui melalui nilai *R-squared*. Menurut Chin (1998) nilai *R-squared* diatas 0,67 dikategorikan kuat, nilai diatas 0,33 sampai dengan dibawah 0,67 dikategorikan moderat, dan nilai *R-squared* diatas 0,19 sampai dengan dibawah 0,33 dikategorikan lemah. Tabel V.10. menyajikan *R-squared* sebagai nilai koefisien determinasi dengan nilai sebesar 0,99. Berdasarkan pendapat Chin (1998) nilai koefisien determinasi *R-squared* sebesar 0,99 termasuk sangat kuat.

Nilai koefisien determinasi *R-squared* sebesar 0,99 mencerminkan kemampuan estimasi model regresi dalam menjelaskan sebagian besar variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi *R-squared* tersebut memenuhi kriteria *goodness of fit*, karena nilainya mendekati 1. Nilai *R-squared* mendekati 1 dapat diartikan bahwa estimasi model regresi dapat merespons data yang diamati dengan sangat baik, sehingga hasil analisis dianggap valid. Estimasi model regresi dengan kriteria *goodness of fit* mengindikasikan bahwa estimasi model regresi memberikan landasan yang kuat untuk interpretasi hasil penelitian.

5.3.3. Uji Asumsi

Uji asumsi klasik merupakan serangkain uji statistik yang digunakan untuk memastikan estimasi model regresi sesuai dengan prinsip *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik meliputi uji Linieritas, Autokorelasi, Heteroskedastisitas, Multikolinieritas dan Normalitas. Menurut Prawoto & Basuki (2016) uji asumsi klasik pada estimasi model regresi OLS tidak semua digunakan dalam estimasi model regresi data panel. Estimasi model regresi data panel cukup menggunakan uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas untuk mendapatkan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

5.3.3.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana korelasi antar variabel independen. Menurut Hair *et al.* (2019) kondisi multikolinieritas menjadi masalah dalam regresi, karena dampak multikolinieritas

dapat mengurangi kekuatan hasil estimasi (Hair *et al.*, 2019). Kondisi multikolinieritas dapat dilihat dari hasil uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. jika nilai $VIF < 10$, sedangkan *nilai tolerance* $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinieritas (Hair *et al.*, 2019 dan Ghazali & Ratmono, 2017).

Tabel V.11.
Hasil Uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Variance Inflation Factors
Date: 12/19/25 Time: 09:41
Sample: 1 245
Included observations: 176

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF	Tolerance
C	1,18	42,89	NA	
DPRD (X1)	4,35	4,27	1,14	0,87
Audit Internal (X2)	0,00	7,50	1,20	0,83
Daya Saing X3)	0,86	30,13	3,26	0,31
Emulasi (X4)	0,79	29,20	1,54	0,65
Kualitas Manajerial Kepala Daerah (X5)	0,00	3,90	1,10	0,91
Predikat X6)	0,04	10,92	1,25	0,80
Aset (Z1)	4,31	5,27	1,79	0,56
Penduduk (Z2)	1,37	4, 47	2,59	0,39

Tabel V.11. menjelaskan uji *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dapat dilihat pada kolom *centered* VIF. Hasil uji *Variance Inflation Factor* menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$. Hasil uji *Tolerance* menggambarkan semua variabel independen bernilai *Tolerance* $> 0,10$. Hasil uji ini mengindikasikan bahwa semua variabel independen terhindar dari kondisi multikolinieritas. Selain itu, multikolinieritas dapat dilihat dari korelasi antar variabel independen. Tabel V.12. memberikan informasi hasil uji korelasi antar variabel independen. Hasil uji korelasi terlihat tidak ada nilai $\geq 0,80$. Hasil ini menunjukkan estimasi model regresi terhindar dari masalah multikolinieritas.

Tabel V.12.
Hasil Uji Korelasi

	X1	X2	X3	X4	X5	X6
X1	1,00	-0,05	-0,03	-0,01	-0,12	-0,04
X2	-0,05	1,00	0,11	-0,04	0,07	0,17
X3	-0,03	0,11	1,00	0,54	0,11	0,20
X4	-0,01	-0,04	0,55	1,00	0,01	0,25
X5	-0,13	0,07	0,11	0,01	1,00	-0,00
X6	-0,05	0,18	0,20	0,25	-0,00	1,00

Keterangan : X1 = DPRD; X2 = Audit Internal Pemda; X3 = Daya Saing ; X4 = Emulasi; X5 = Kualitas Manajerial Kepala Daerah; X6 = Predikat;

5.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan varian residual estimasi model regresi bersifat konstan di seluruh pengamatan. Kesalahan dalam mendeteksi kondisi heteroskedastisitas menyebabkan ketidakakuratan estimasi model regresi. Hal ini dapat menimbulkan interpretasi hasil estimasi model regresi kurang valid. Uji *Breusch–Pagan–Godfrey* dan uji *Glejser* digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas. Uji ini menyatakan bahwa apabila nilai probabilitas *Obs*R-Squared* > 0,05 terhindar gejala heteroskedastisitas, begitu sebaliknya. (Ekananda, 2019 dan Suliyanto, 2011).

Tabel V.13.
Hasil Uji *Breusch–Pagan–Godfrey*

<i>Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey</i>			
<i>Null hypothesis: Homoskedasticity</i>			
<i>F-statistic</i>	1,55	<i>Prob. F(8,167)</i>	0,15
<i>Obs*R-squared</i>	12,13	<i>Prob. Chi-Square(8)</i>	0,15
<i>Scaled explained SS</i>	10,63	<i>Prob. Chi-Square(8)</i>	0,22

Tabel V.13. menyajikan hasil uji *Breusch–Pagan–Godfrey* dengan nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar sebesar 0,15 > 0,05. Berdasarkan hasil uji *Breusch–Pagan–Godfrey* estimasi model regresi tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya kondisi heteroskedastisitas diuji dengan uji

Glejser yang disajikan pada Tabel V.14. Tabel ini memberikan informasi nilai probabilitas *Obs*R-squared* sebesar $0,24 > 0,05$. Merujuk pada hasil uji *Glejser* dapat diartikan bahwa estimasi model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Tabel V.14.
Hasil Uji *Glejser*

<i>Heteroskedasticity Test: Glejser</i>			
<i>Null hypothesis: Homoskedasticity</i>			
<i>F-statistic</i>	1,30	<i>Prob. F(8,167)</i>	0,25
<i>Obs*R-squared</i>	10,33	<i>Prob. Chi-Square(8)</i>	0,24
<i>Scaled explained SS</i>	9,47	<i>Prob. Chi-Square(8)</i>	0,30

5.4. Uji Kekokohan Estimasi Model Regresi (*Robustness Check*)

Uji kekokohan merupakan salah satu praktik umum dalam penelitian. Pemeriksaan kekokohan dilakukan untuk mendeteksi kesalahan spesifikasi yang dilihat melalui sensitivitas estimasi koefisien regresi variabel utama (Lu & White, 2014). Lebih lanjut Lu & White (2014) dan Zaman *et al.* (2001) menyatakan uji kekokohan dapat dilakukan dengan memodifikasi model regresi (menambah atau mengurangi variabel penjelas) yang hasilnya tidak menyebabkan perubahan berarti pada koefisien variabel utama. Wang & Chen (2022) memodifikasi estimasi model regresi dengan menambah variabel kontrol yang hasilnya tidak ada perubahan signifikan pada variabel utama. Penelitian ini merujuk pendapat Wang & Chen (2022) untuk menguji kekokohan dengan memodifikasi estimasi model regresi melalui pengurangan dan penambahan variabel kontrol.

Tabel V.15.
Hasil Uji Kekokohan Estimasi Model Regresi

Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia
Method: Panel Least Squares
Sample: 2017 2023
Periods included: 7
Cross-sections included: 34
Total panel (unbalanced) observations: 176

Variabel	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Model 5		Model 6	
	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.	Coeff.	Prob.
C	68,36	0,00	69,59	0,00	67,76	0,00	69,40	0,00	67,99	0,00	69,14	0,00
X1	-0,00	0,52	-0,00	0,38	-0,00	0,53	-0,00	0,38	-0,00	0,52	-0,00	0,38
X2	0,05	0,00***	0,07	0,00***	0,05	0,00***	0,07	0,00***	0,05	0,00***	0,07	0,00***
X3	-0,69	0,03**	-0,74	0,02**	-0,67	0,03**	-0,73	0,02**	-0,67	0,03**	-0,73	0,02**
X4	0,88	0,02**	0,90	0,01**	0,75	0,05**	0,84	0,02**	0,80	0,03**	0,78	0,05**
X5	-0,02	0,42	-0,03	0,17	-0,02	0,40	-0,03	0,16	-0,02	0,43	-0,03	0,14
X6	0,56	0,00***	0,62	0,00***	0,52	0,00***	0,60	0,00***	0,52	0,00***	0,60	0,00***
Z1	34,00	0,00***			37,40	0,00***			37,50	0,00***		
Z2					0,00	0,60					0,00	0,57
Z3					0,35	0,03***	0,27	0,09	0,35	0,02***	0,26	0,10

Keterangan : Taraf signifikan *** $\leq 0,01$; ** $\leq 0,05$, X1 : DPRD; X2 : Audit Internal ; X3 : Daya Saing ; X4 : Emulasi ; X5 : Kualitas Manajerial Kepala Daerah; X6 : Predikat ; Z1 : Variabel Kontrol Jumlah Aset ; Z2 : Variabel Kontrol Jumlah Kepadatan Penduduk ; Z3 : Variabel Kontrol Laju Pertumbuhan Penduduk.

Tabel V.15. menunjukkan hasil uji kekokohan dengan memodifikasi estimasi model regresi. Model 1 dihasilkan dari modifikasi estimasi model regresi dengan mengeluarkan variabel kontrol kepadatan penduduk. Hasil modifikasi model 1 tidak mengalami perubahan yang bermakna secara statistik pada koefisien maupun signifikansi (probabilitas) untuk seluruh variabel utama. Begitupun model 2 menghasilkan temuan yang sama, seluruh variabel utama tidak berbeda secara nyata secara statistik, meskipun seluruh variabel kontrol dikeluarkan dari estimasi model.

Model 3 dalam Tabel V.15. memeriksa kekokohan estimasi model regresi melalui modifikasi penambahan variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk. Penelitian ini memasukan variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung diikuti oleh meningkatnya tuntutan terhadap penyediaan layanan publik (Drew *et al.*, 2023;

Balaguer-Coll *et al.*, 2021; dan Ladd, 1992). Argumen teoritis ini sesuai dengan hasil modifikasi model 3 dengan bukti variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil modifikasi model 3 menginformasikan bahwa seluruh variabel utama dapat mempertahankan konsistensinya, baik koefisien maupun signifikansinya yang relatif stabil sehingga perubahannya tidak dapat dibedakan secara statistik.

Model 4, model 5, dan model 6 dalam Tabel V.15. merupakan upaya tambahan untuk menilai kekokohan estimasi model regresi dengan memasukan kombinasi variabel control. Model 4 hanya memasukan variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk dengan hasil estimasi model regresi variabel utama terlihat tetap stabil, meskipun variabel kontrol tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Model 5 memasukan kombinasi variabel kontrol jumlah aset dan variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk dengan hasil estimasi model regresi variabel utama masih tetap konsisten secara statistik. Padahal kedua variabel kontrol tersebut berpengaruh positif signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Terakhir, model 6 mengombinasikan variabel kontrol kepadatan penduduk dan variabel kontrol laju pertumbuhan penduduk dengan hasil estimasi model regresi variabel utama masih terlihat stabil, walaupun kedua variabel kontrol tersebut tidak signifikan secara statistik.

Berdasarkan Tabel V.15. hasil modifikasi estimasi model regresi dapat dinyatakan sudah kokoh secara statistik. Hasil modifikasi estimasi model regresi memberikan pengaruh yang tidak dapat dibedakan secara statistik, baik melalui pengurangan, penambahan maupun kombinasi variabel kontrol terhadap variabel utama. Koefisien dan signifikansi tetap terjaga kestabilannya, tidak berubah arah dan kekuatan pengaruhnya dari gangguan luar atau yang tidak teramati. Hasil modifikasi model ini memperkuat validasi estimasi dan memberi bukti empiris bahwa estimasi model regresi sudah *robust* untuk menjelaskan pengaruh variabel tata kelola (DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat pemerintah daerah) terhadap kinerja pemerintah daerah (IPM) kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadikan interpretasi hasil penelitian dapat diandalkan, karena estimasi model regresi yang dibangun tidak sensitif terhadap variasi spesifikasi model.

5.5. Pengujian Hipotesis

Tahapan uji pemilihan dan uji *Goodness of Fit* estimasi model regresi telah dilakukan untuk menentukan estimasi model regresi yang dianggap paling tepat. Pendekatan estimasi *fixed effects model* (FEM) menjadi pilihan dan memenuhi standar *Goodness of Fit* dalam penelitian ini. Begitupun uji kekokohan (*Robustness Check*) menunjukkan estimasi model regresi yang sudah kokoh (*robust*) melalui modifikasi variabel kontrol karena konsisten dengan hasil uji utama. Hasil penelitian estimasi *fixed effects model* (FEM) dapat dilihat pada Tabel V.16. Hasil uji estimasi *fixed effects model* (FEM) tersebut digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Selain itu, hasil uji estimasi *fixed effects model* (FEM) memberikan informasi konseptual mengenai dinamika arah hubungan yang terbangun dalam kerangka estimasi model regresi. Informasi arah (tanda) koefisien sebagai elemen penting membantu dalam menilai konsistensi hasil estimasi dengan ekspektasi teoritis yang telah dirumuskan sebelumnya dan pengambilan keputusan menerima atau menolak hipotesis yang diajukan.

Tabel V.16.
Hasil Uji Estimasi Model Regresi (*Fixed Effects Model*).

<i>Dependent Variable: IPM (Y)</i>						
<i>Method: Pooled Least Squares</i>						
<i>Date: 12/16/25 Time: 07:15</i>						
<i>Sample: 1 7</i>						
<i>Included observations: 7</i>						
<i>Cross-sections included: 34</i>						
<i>Total pool (unbalanced) observations: 176</i>						
<i>Cross sections without valid observations dropped</i>						
<i>Variable</i>	<i>Jenis variabel</i>	<i>Prediksi</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>	<i>Keputusan</i>	
C	Dependen		68,00	0,00		
DPRD (X1)	Independen	+	-0,00	0,53	Tidak didukung	
Audit Internal (X2)	Independen	+	0,05	0,00***	Didukung	
Daya Saing X3)	Independen	+	-0,70	0,02**	Tidak didukung	
Emulasi (X4)	Independen	+	0,79	0,04**	Didukung	
Kualitas Manajerial Kepala Daerah (X5)	Independen	+	-0,02	0,37	Tidak didukung	
Predikat X6)	Independen	+	0,55	0,00***	Didukung	
Aset (Z1)	Kontrol	+	34,00	0,00***	Didukung	
Penduduk (Z2)	kontrol	+	0,00	0,44	Tidak didukung	

Keterangan : Variabel Dependen yaitu IPM; ***highly significant < 0,01;
**significant < 0,05; * moderately significant < 0,10.

5.5.1. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang diajukan (H_1) yaitu DPRD yang diukur dengan jumlah rapat DPRD memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis pertama akan diterima pada tingkat signifikansi < 0,05. Tabel V.16. menyajikan nilai probabilitas (*p-value*) untuk DPRD sebesar 0,53. Hasil

pengujian ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima karena $p\text{-value}$ ($0,53$) $> 0,05$. Hasil pengujian ini memutuskan untuk menolak hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti H_1 yaitu DPRD yang diukur dengan jumlah rapat DPRD tidak dapat diterima, karena tidak berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.5.2. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang diajukan (H_2) yaitu audit internal yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis kedua akan diterima pada tingkat signifikansi $< 0,05$. Tabel V.16. menyajikan nilai probabilitas ($p\text{-value}$) untuk audit internal sebesar $0,00$. Hasil pengujian menandakan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena $p\text{-value}$ ($0,00$) $< 0,05$. Berdasarkan Tabel V.16. keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti H_2 yaitu audit internal yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah dapat berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.5.3. Pengujian Hipotesis Ketiga`

Hipotesis ketiga yang diajukan (H_3) yaitu daya saing pemerintah daerah yang diukur dengan indeks daya saing pemerintah daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat dari nilai $p\text{-value}$. Jika nilai $p\text{-value} < 0,05$, maka H_a diterima. Tabel V.16. menyajikan nilai $p\text{-value}$ ($0,02$) $< 0,05$ dengan nilai

koefisien -0,70. Hal ini berarti H_3 yaitu daya saing pemerintah daerah yang diukur dengan indeks daya saing berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Meskipun berpengaruh signifikan, tetapi berlawanan dengan hipotesis yang diajukan, oleh karena itu H_3 tidak didukung secara empiris. Keputusan yang diambil adalah belum dapat menerima H_3 .

5.5.4. Pengujian Hipotesis Ke-empat`

Hipotesis ke-empat yang diajukan (H_4) yaitu emulasi pemerintah daerah yang diukur dengan indeks layanan pemerintah daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis ke-empat akan diterima pada tingkat signifikansi $< 0,05$. Tabel V.16. menyajikan nilai probabilitas (*p-value*) untuk emulasi sebesar 0,04. Hasil pengujian menandakan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena *p-value* (0,04) $< 0,05$. Berdasarkan Tabel V.30. keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti H_4 yaitu emulasi pemerintah daerah yang diukur dengan indeks layanan pemerintah dapat berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.5.5. Pengujian Hipotesis Kelima

Hipotesis kelima yang diajukan (H_5) yaitu kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan pengalaman selama menjabat menjadi kepala daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis kelima akan diterima pada tingkat signifikansi $< 0,05$. Tabel V.16. menyajikan nilai probabilitas (*p-value*) untuk kualitas manajerial kepala daerah sebesar 0,37. Hasil

pengujian menandakan bahwa hipotesis yang diajukan tidak dapat diterima karena $p\text{-value}$ $(0,37) > 0,05$. Berdasarkan Tabel V.16. keputusan yang diambil adalah tidak menerima hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti H_5 yaitu kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan pengalaman selama menjabat menjadi kepala daerah tidak berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.5.6. Pengujian Hipotesis Ke-enam

Hipotesis ke-enam yang diajukan (H_6) yaitu predikat yang diukur dengan pemeringkatan pemerintah daerah memengaruhi secara positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hipotesis ke-enam akan diterima pada tingkat signifikansi $< 0,05$. Tabel V.16. menyajikan nilai probabilitas ($p\text{-value}$) untuk kualitas manajerial kepala daerah sebesar 0,00. Hasil pengujian menandakan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima karena $p\text{-value}$ $(0,00) < 0,05$. Berdasarkan Tabel V.30. keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis yang diajukan. Hal ini berarti H_6 yaitu predikat yang diukur dengan pemeringkatan pemerintah daerah berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah.

5.5.7. Pengujian Variabel Kontrol

Pengujian variabel kontrol dalam estimasi model regresi untuk mempertahankan konsistensi hasil penelitian (Feng *et al.*, 2020 dan Carlson & Wu, 2012). Estimasi model regresi memasukan variabel kontrol sebagai langkah penting dalam mengendalikan variabel pengganggu untuk mengurangi varian

kesalahan (Schjoedt & Bird, 2014). Tabel V.16. menjelaskan hasil uji variabel kontrol. Ada dua variabel kontrol dimasukkan dalam analisis estimasi model regresi, yaitu jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah. Hasil pengujian variabel kontrol jumlah aset pemerintah daerah menunjukkan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,00. Nilai probabilitas $(0,00) < 0,05$ menggambarkan bahwa variabel kontrol jumlah aset pemerintah daerah berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah pada tingkat 0,05. Adapun Hasil pengujian variabel kontrol jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah memberi bukti nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,44. Nilai probabilitas $(0,44) > 0,05$ mengindikasikan bahwa variabel kontrol jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah tidak berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah pada tingkat 0,05.

5.6. Pembahasan Hasil Pengujian

Tabel V.16. merupakan hasil pengujian estimasi regresi *fixed effects model* (FEM) yang terdiri dari prediksi hipotesis, koefisien regresi, nilai signifikansi, dan keputusan. Tabel ini menjadi landasan pembahasan dan interpretasi temuan penelitian.

5.6.1. Pengaruh DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengujian telah dilakukan terhadap variabel dengan proksi DPRD yang diukur dengan jumlah rapat sebagai mekanisme tata kelola dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tabel V.16. menginformasikan bahwa hasil pengujian

atas proksi DPRD tidak didukung secara statistik karena nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,53 > 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa DPRD berpengaruh negatif tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini diartikan bahwa DPRD yang diukur dengan jumlah rapat DPRD tidak memengaruhi kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah.

Secara empiris, hasil pengujian tersebut tidak sejalan dengan hasil temuan penelitian sebelumnya. Penelitian Farrell *et al.* (2022) menyatakan bahwa proksi DPRD yang diukur dengan desain tempat rapat berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas tata kelola pada pemerintah daerah di Inggris. Smith *et al.* (2022) menunjukkan temuan bahwa proksi DPRD yang diobservasi dengan perilaku dewan dalam rapat sebagai fungsi pengawasan meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Swedia. Begitupun secara teoritis, fungsi pengawasan DPRD sebagai mekanisme tata kelola seharusnya berjalan efektif untuk mendorong kinerja *outcome* pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh regulasi sebagai tekanan koersif dalam kerangka teori institusional (UU. No. 17 tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2015; Suzuki *et al.*, 2022; George *et al.*, 2020; Belle *et al.*, 2019; Lohrey *et al.*, 2019; Zamboni, 2018; dan DiMaggio & Powell, 1983).

Hasil temuan yang tidak sejalan ini dapat dipahami bahwa pemilihan dan penetapan indikator jumlah rapat DPRD bukan sebagai faktor penentu untuk mendorong kinerja *outcome* pemerintah daerah. Namun indikator jumlah rapat DPRD masih dapat dipertahankan sebagai ukuran dalam penelitian. Menurut

Garcia & Wihlborg (2025) rapat DPRD merupakan aktivitas pengawasan lembaga yang kuat dan stabil. Sementara Freeman (2020) menyatakan bahwa fungsi pengawasan melalui rapat sebagai inti dari pekerjaan anggota DPRD. Argumen ini mengisyaratkan bahwa jumlah rapat DPRD masih layak dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari keterukuran data yang memenuhi aspek metodologis, seperti ketersediaan data (tercatat dalam dokumen resmi Sekretariat DPRD), validitas (sumber resmi), reliabilitas (data kuantitatif yang minim subjektivitas), dan definisi operasional yang jelas.

Meskipun tidak didukung, hasil temuan ini masih dapat dimanfaatkan oleh DPRD. Hasil temuan ini dapat dijadikan sinyal bagi DPRD untuk merubah paradigma dari aspek rutinitas berbasis formal prosedural ke efektivitas rapat (Garcia & Wihlborg, 2025). Efektivitas rapat DPRD terlihat dari kesesuaian antara pembahasan dalam rapat dengan tujuan program atau kebijakan yang dapat mendorong kinerja (Zamboni, 2018). Hasil temuan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai alarm bagi DPRD bahwa intensitas rapat perlu dievaluasi menuju kualitas rapat. Hal ini ditinjau dari pembahasan dalam rapat harus berbasis isu informasi kinerja (Azam & Bouckaert, 2025). Begitupun, kehadiran DPRD dan partisipasi berpendapat dalam rapat perlu dipertimbangkan (Garcia & Wihlborg, 2025).

Inkonsistensi hasil pengujian ini menjadi fenomena yang penting. Hal ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui penyebabnya. Beberapa faktor memungkinkan sebagai penyebab inkonsistensi tersebut. 1). Rekomendasi dari DPRD terkait isu kinerja tidak teralisasi dengan berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah daerah, seperti keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran,

dan keterbatasan regulasi (Stadelmann-Steffen *et al.*, 2021). 2). Rapat DPRD sering menghadapi hambatan terkait mayoritas dan minoritas DPRD dalam membahas isu kinerja pemerintah daerah apabila tidak menguntungkan kepentingan politiknya atau isu – isu yang populer di publik (Mistur *et al.*, 2023; Green & Jennings, 2017; dan Bastida & Benito, 2014). 3). Peran kepala daerah lebih dominan daripada peran DPRD dalam pengambilan keputusan, sehingga isu – isu mengenai kinerja terabaikan (Čopík *et al.*, 2019). 4). Fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah lemah karena anggota DPRD lebih fokus pada pemenuhan janji kampanyenya (Hasibuan & Khomsiyah, 2020).

5.6.2. Pengaruh Audit Internal terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel V.16. menyajikan hasil pengujian proksi audit internal dengan ukuran jumlah auditor internal pemerintah daerah dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian proksi audit internal didukung secara statistik dengan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,00 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Ini berarti audit internal dengan ukuran jumlah auditor internal meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan pengaruh positif signifikan. Hasil pengujian ini diartikan bahwa audit internal yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah semakin meningkat, maka kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) semakin meningkat. Secara empiris, penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa audit internal pemerintah daerah berpengaruh dalam

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian Appiah *et al.* (2023) dan Österberg & Licht (2023) yang menjelaskan bahwa audit internal dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Begitupun Edmonds *et al.* (2023) membuktikan bahwa kelemahan audit internal dapat meningkatkan biaya utang pemerintah daerah. Rich *et al.* (2021) menunjukkan bukti bahwa perubahan auditor dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa audit internal pemerintah daerah sebagai pilar utama mekanisme tata kelola berfungsi efektif. Fungsi audit internal ini yaitu untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan penilaian yang diatur oleh regulasi (UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; dan Permendagri No. 18 Tahun 2020). Secara teoritis, audit internal yang berpengaruh positif terhadap kinerja *outcome* mendapat dukungan dari teori yang digunakan. Secara konseptual, teori institusional meliputi tekanan koersif, sehingga mekanisme tata kelola dengan dukungan regulasi merefleksikan kekuatan koersif bagi audit internal untuk melakukan tekanan pada pemerintah daerah (DiMaggio & Powell, 1983). Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa dukungan regulasi sebagai kekuatan koersif bagi audit internal meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Inspektorat pemerintah daerah dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukan. Faktor teknis jumlah auditor internal terbukti memiliki peranan penting, oleh karena itu hasil penelitian ini layak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengusulkan penambahan auditor internal sampai memenuhi standar minimal rasio jumlah pegawai pemerintah daerah (Liu & Lin, 2012).

Penambahan ini memperluas cakupan pengawasan yang memungkinkan dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga relevan untuk dijadikan referensi bagi inspektorat daerah bahwa audit internal tidak hanya fokus pada kepatuhan pelaporan keuangan saja tetapi harus berorientasi pada peningkatan layanan sebagai representasi capaian kinerja (Mattei *et al.*, 2026 dan Daujotaite, 2017). Hal ini terindikasi dari peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, perlindungan, dan bidang sosial (Furqan *et al.*, 2020).

5.6.3. Pengaruh Daya Saing terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian proksi daya saing pemerintah daerah yang diukur dengan indeks daya saing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel V.16. Hasil pengujian tidak didukung dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan hasil penelitian menunjukkan arah yang berlawanan dengan nilai koefisien negatif (-2,27) dan nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,03 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini diartikan bahwa seiring indeks daya saing pemerintah daerah semakin meningkat, maka kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan IPM semakin menurun.

Secara empiris, hasil pengujian ini belum konsisten dengan penelitian sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan Nam & Ryu (2023) yang menunjukkan bahwa daya saing dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Begitupun hasil temuan Rajnoha & Lesnikova (2022) membuktikan bahwa daya saing dapat meningkatkan kinerja. Arrona *et al.* (2020) memberikan hasil temuan penelitian bahwa daya saing dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Vukovic *et al.* (2020) mendokumentasikan hasil temuan bahwa daya saing dapat

meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Namun, secara teoritis penelitian ini mendapat dukungan dari teori yang digunakan. Teori institusional terbukti mampu menjelaskan tindakan meniru daya saing pemerintah daerah lain yang dipandang sukses (Li *et al.*, 2025; Wang *et al.*, 2024; dan DiMaggio & Powell, 1983).

Meskipun hasil temuan daya saing menurunkan kinerja, hasil temuan ini masih bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai mekanisme peringatan dini. Hasil temuan ini relevan dijadikan referensi bahwa tindakan meniru daya saing pemerintah daerah lain tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi berorientasi pada pemerataan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial (Wang *et al.*, 2024 dan Yi & Li, 2022). Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan yang konstruktif bahwa tindakan meniru daya saing harus mempertimbangkan konteks kelembagaan, potensi lokal, kapasitas pendapatan daerah, dan kebutuhan lokal, bukan hanya mengejar legitimasi (Rochmatullah *et al.*, 2023 dan Villamejor-Mendoza, 2020).

Di sisi lain tindakan meniru tidak selalu berbanding lurus antara hasil kinerja dengan ekspektasi (Narzetti & Marques, 2021). Hal ini menandakan bahwa mekanisme tata kelola melalui tindakan meniru daya saing dari pemerintah daerah lain yang dipandang sukses belum efektif meningkatkan kinerja *outcome* (Campos-alba *et al.*, 2024 dan Li *et al.*, 2023). Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya, antara lain : pertama, pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi untuk meningkatkan daya saing, sehingga pelayanan dasar, seperti pendidikan,

kesehatan, dan jaminan sosial sering kurang diperhatikan (Wang *et al.*, 2024). Kedua, pembatasan masa jabatan publik mendorong pejabat publik dalam meningkatkan daya saing pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan investasi jangka pendek, sehingga investasi pada pelayanan publik terabaikan (Yi & Li, 2022). Ketiga, pemerintah daerah lebih mengejar legitimasi (penilaian) dalam meningkatkan daya saing, sehingga investasi infrastruktur lebih diutamakan untuk menarik investor, sementara mengurangi investasi pada layanan dasar publik (Li *et al.*, 2023).

5.6.4. Pengaruh Emulasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian telah dilakukan untuk menguji proksi emulasi pemerintah daerah yang diukur dengan indeks layanan pemerintah daerah dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian disajikan dalam Tabel V.16 dengan nilai probabilitas (*p-value*) untuk proksi emulasi sebesar $(0,04) < 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini didukung secara statistik. Hal ini diartikan bahwa semakin tinggi indeks layanan pemerintah daerah sebagai ukuran emulasi, maka semakin meningkat kinerja pemerintah daerah dengan ukuran IPM.

Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa emulasi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian Lesch & Millar (2022) yaitu emulasi melalui peniruan kebijakan dari pemerintah daerah lain menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Provinsi Ontario dan British Columbia di Kanada. Kemudian hasil penelitian Baldwin *et al.* (2019) menyatakan bahwa negara

cenderung meniru kebijakan rekan politiknya dan negara berkembang cenderung meniru kebijakan pemberi bantuan, serta negara-negara meniru pengambilan keputusan dari negara-negara dengan kondisi yang serupa. Begitupun hasil penelitian Fusco & Allegrini (2020) mengungkapkan bahwa terdapat saling ketergantungan antar pemerintah daerah berdasarkan kedekatan geografis dalam meningkatkan kinerja layanan publik.

Argumen teoritis menyatakan bahwa mekanisme tata kelola yang efektif tercermin dari lingkungan yang memengaruhi organisasi di sekitarnya. Penelitian ini membuktikan argumen teoritis tersebut melalui tindakan emulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan emulasi tercermin dari upaya pemerintah daerah yang capaian indeks layanannya rendah untuk menyamai pemerintah daerah dengan indeks layanannya tinggi (Cordery & Hay, 2022 dan Andersen & Jakobsen, 2018). Tindakan emulasi dilakukan sebagai usaha mengurangi ketidakpastian dengan cara mengamati, mempelajari, dan mencoba mengimplementasikan praktik – praktik tersebut (Ali, 2021). Tindakan emulasi ini sejalan dengan teori institusional yang relevan dalam menjelaskan konteks penelitian (Li *et al.*, 2025; Li *et al.*, 2023; dan DiMaggio & Powell, 1983).

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang relevan. Hasil temuan ini memberikan justifikasi empiris bahwa emulasi bukan tanda tidak kreatif, melainkan strategi manajemen yang efektif. Pemerintah daerah perlu mengambil tindakan emulasi pada saat dampak kebijakan sulit diprediksi untuk mengurangi risiko atas capaian kinerja yang tidak sesuai tujuan (Baldwin *et al.*, 2019). Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil temuan ini sebagai dasar

strategis dalam mengadaptasi praktik – praktik terbaik dari pemerintah daerah lain untuk mempercepat perbaikan capaian layanan publik tanpa harus melalui proses *trial and error* yang berisiko tinggi (Fusco & Allegrini, 2020).

5.6.5. Pengaruh Kualitas Manajerial Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Tabel V.16. menyajikan hasil pengujian proksi kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan pengalaman selama menjabat menjadi kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian menginformasikan tidak didukung secara statistik karena nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,37 > 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hal ini diartikan bahwa kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan pengalaman selama menjabat menjadi kepala daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan IPM.

Secara empiris, hasil penelitian ini menyanggah hasil penelitian sebelumnya. Penelitian empiris sebelumnya menyatakan kepala daerah yang menjabat lebih lama memiliki pengalaman. Pernyataan ini menjadikan pengalaman dipandang sebagai kualitas manajerial kepala daerah yang dapat meningkatkan kinerja (Podgorniak-Krzykacz, 2021; Lu *et al.*, 2020; dan Bolívar *et al.*, 2018). Ini dapat dilihat pada penelitian Yao *et al.* (2021) yang mengungkapkan bahwa masa jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan kebudayaan. Lu *et al.* (2020) membuktikan bahwa masa jabatan dan pendidikan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Cina. Olvera &

Avellaneda (2019) menjelaskan bahwa pengalaman kerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Brasil.

Argumen penelitian menyatakan bahwa pengalaman dibutuhkan supaya lebih mudah beradaptasi di lingkungan. Adaptasi dilakukan dengan standar yang ada atau dengan lembaga profesional (contoh : KORPRI dan AAIP) untuk meningkatkan kinerja (Bolívar *et al.*, 2018). Pengalaman ini mencerminkan teori institusional dalam elemen tekanan normatif (Rana *et al.*, 2022 dan DiMaggio & Powell, 1983). Namun, fakta penelitian mengungkapkan bahwa ukuran pengalaman lama menjabat sebagai proksi kualitas manajerial kepala daerah tidak berpengaruh secara statistik terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa penentuan ukuran tersebut belum akurat dalam konteks penelitian. Kemungkinan, ukuran pengalaman lama menjabat kepala daerah belum menyentuh kualitas substantif.

Hasil temuan yang tidak signifikan ini dapat dijadikan koreksi terhadap asumsi yang berkembang selama ini bahwa pengalaman lama menjabat sebagai kepala daerah mendorong capaian kinerja. Hasil ini menggarisbawahi bahwa mekanisme tata kelola melalui kepala daerah yang pengalaman lama menjabat tidak efektif meningkatkan kinerja. Meskipun hasil penelitian tidak signifikan, hasil ini masih relevan dijadikan refleksi bagi kepala daerah untuk tidak hanya bergantung pada pengalaman lama menjabat sebagai proksi kualitas manajerial. Faktor lain perlu dipertimbangkan, seperti pendidikan, keahlian, integritas, dan latar belakang profesional (Gorzela & Bukowska, 2026 dan Avellaneda & Gomes, 2017).

Ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan teori dan studi empiris sebelumnya layak mendapat perhatian lebih lanjut. Hal ini menjadi dinamika yang penting untuk ditelusuri penyebabnya. Beberapa penyebab potensial yang mungkin berkontribusi terhadap ketidaksesuaian hasil penelitian ini. Pertama, pembatasan masa jabatan menimbulkan perilaku oportunistik para kepala daerah untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya (Bracco *et al.*, 2024 dan Muhtar, 2017). Kedua, kepala daerah memandang bahwa saran dari para ahli atau profesional membutuhkan waktu yang lama untuk menyinkronkan dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga menghambat capaian kinerja (Hornung & Trein, 2025). Ketiga, Kepala daerah belum sepenuhnya memanfaatkan hasil penelitian sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, karena dipandang tidak sesuai dengan agenda politiknya (Suazo-galdames *et al.*, 2025).

5.6.6. Pengaruh Predikat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian telah dilakukan untuk proksi predikat yang diukur dengan pemeringkatan dalam memengaruhi kinerja pemerintah daerah. Tabel V.16. memperlihatkan ada dukungan secara statistik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas (*p-value*) sebesar $0,00 < 0,05$ pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa raihan predikat yang semakin meningkat, maka meningkat pula kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan IPM.

Hasil penelitian ini mendapat dukungan dari penelitian empiris sebelumnya. Ini dapat dilihat dari hasil penelitian Octavio & Urumsah (2024) menyatakan bahwa predikat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah

daerah. Liu *et al.* (2021) mengungkapkan bahwa predikat memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Acuto & Leffel (2021) memberikan hasil temuan studi bahwa predikat pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Mehrpouya & Samiolo (2016) mendokumentasikan hasil temuan penelitian bahwa predikat dapat merangsang persaingan dan meningkatkan kinerja.

Pembahasan dalam paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa perolehan predikat sebagai bentuk pengakuan dari lembaga profesional dapat meningkatkan kinerja (Wang, 2024; Octavio & Urumsah, 2024; dan Wandercil *et al.*, 2022). Perolehan predikat ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola telah berjalan dengan efektif (Shi *et al.*, 2019; Mathuva, 2018; dan Lindblad & Lindblad, 2009). Secara teoritis, efektivitas mekanisme tata kelola ini mendapat dukungan dari teori yang digunakan. Hal ini terlihat dari perolehan predikat sebagai manifestasi mekanisme tata kelola yang relevan dengan gagasan teori institusional, khususnya elemen normatif (Liu *et al.*, 2021 dan DiMaggio & Powell, 1983).

Di lihat dari sudut pandang manfaat, hasil penelitian terkait predikat ini representatif sebagai referensi bagi pemerintah daerah. Perolehan predikat dapat dijadikan simbol legitimasi dari pihak eksternal atas capaian kinerja, sehingga pemerintah daerah harus meraihnya (Xu, 2023 dan Pittaway & Montazemi, 2020). Hasil penelitian ini layak digunakan sebagai rujukan bahwa perolehan predikat menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam mencapai kinerja (Andersson, 2019). Hasil penelitian ini juga relevan untuk bahan

pertimbangan dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik melalui raihan predikat sebagai cerminan kinerja (Liu *et al.*, 2021 dan Cruz *et al.*, 2016). Selain itu, hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa perolehan predikat dapat digunakan untuk membedakan capaian kinerja pemerintah daerah sehingga pemangku kepentingan mudah mendeteksinya (Meho, 2020).

5.6.7. Variabel Kontrol

Penelitian ini menyertakan variabel kontrol untuk mempertahankan hasil penelitian. Variabel kontrol dimasukkan dalam penelitian ini untuk menjaga ketelitian dan kehati-hatian atas konsistensi hasil penelitian. Dua variabel kontrol yang dimasukkan dalam penelitian ini yaitu jumlah aset pemerintah daerah dan jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah. Pandangan menggunakan jumlah aset sebagai variabel kontrol bahwa aset yang besar berpeluang dalam menciptakan kinerja yang tinggi (Altaf & Ahmad, 2019). Jumlah aset memungkinkan dapat mengendalikan efek eksternal yang tidak diteliti (Cohen & Malkogianni, 2021).

Tabel V.16. mencatat bahwa variabel kontrol jumlah aset positif signifikan pada tingkat 0,05 secara statistik. Pengujian variabel kontrol jumlah aset memberikan hasil sesuai yang diharapkan bahwa jumlah aset dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian ini mendapat dukungan dari Ferreira (2020) yaitu variabel kontrol dengan ukuran jumlah aset dapat memengaruhi peningkatan kinerja pemerintah daerah di Portugal. Begitupun variabel kontrol jumlah aset pemerintah daerah yang diobservasi Suprianto & Salim (2024)

mencatat bahwa jumlah aset meningkatkan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini mengindikasikan bahwa jumlah aset pemerintah daerah dapat melindungi variabel utama dari pengaruh luar dengan efektif, sehingga hasil pengujian relatif konsisten validitasnya. Selain itu, hasil pengujian ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah telah memanfaatkan dengan baik jumlah aset yang besar untuk meningkatkan kinerjanya (Laswad *et al.*, 2005).

Variabel kontrol berikutnya yaitu jumlah kepadatan penduduk pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Literatur mencatat bahwa penduduk pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendorong kinerja (Wang & Chen, 2022; Tran *et al.*, 2019; Avellaneda & Gomes, 2015; dan Drew *et al.*, 2014). Menurut Jiang *et al.* (2025) seiring meningkatnya kepadatan penduduk, kebutuhan akan layanan juga meningkat. Namun demikian, hasil pengujian variabel kontrol kepadatan penduduk belum sesuai yang diharapkan. Hasil pengujian yang ditunjukkan dalam Tabel 4.22. menginformasikan variabel kontrol kepadatan penduduk positif tidak signifikan secara statistik. Meskipun, hasil pengujian tidak sesuai ekspektasi teoritis, tidak mengurangi validitas hasil estimasi model regresi, karena fokusnya pada variabel utama (Hünermund & Louw, 2025). Hasil pengujian variabel kontrol ini tetap bermanfaat sebagai informasi. Hasil ini diartikan bahwa kepadatan penduduk belum dikelola dengan baik, sehingga tidak berimplikasi pada kinerja pemerintah daerah.

5.7. Uji Tambahan

Penelitian kuantitatif sering menyertakan uji tambahan untuk mendukung intepretasi hasil dari estimasi regresi utama. Uji tambahan bermanfaat sebagai sarana untuk memperdalam dan memperluas hasil penelitian. Uji tambahan dalam penelitian ini memiliki tujuan, antara lain : pertama, memeriksa konsistensi hasil estimasi model regresi utama. Kedua, memperoleh pemahaman yang lebih besar terkait kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh tata kelola. Ketiga, menilai pengaruh variabel utama terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan kinerja. Adapun estimasi model regresi linear dinotasikan sebagai berikut:

$$\text{Elemen IPM}_{it} = \beta_{0it} + \beta_{1it}X_{1it} + \beta_{2it}X_{2it} + \beta_{3it}X_{3it} + \beta_{4it}X_{4it} + \beta_{5it}X_{5it} + \beta_{6it}X_{6it} + \beta_{it}Z_{1it} + \beta_{it}Z_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

i = 1,2,3,....., banyaknya unit *cross section*

t = 1,2,3,....., banyaknya data *time series*

Elemen IPM_{it} = Harapan hidup sehat, pendidikan, dan pengeluaran perkapita ke-it

X_{1it} = DPRD ke-it

X_{2it} = Audit internal ke-it

X_{3it} = Daya saing ke-it

X_{4it} = Emulasi ke-it

X_{5it} = Kualitas manajerial kepala daerah ke-it

X_{6it} = Predikat ke-it

Z_{1it} = Variabel kontrol aset ke-it

Z_{2it} = Variabel kontrol penduduk ke-it

β = Parameter yang diestimasi

ε_{it} = Unsur gangguan populasi

Uji tambahan dilakukan dengan mengeksplorasi lebih dalam variabel dependen kinerja pemerintah daerah yang dipengaruhi variabel penjelas dan kontrol. Eksplorasi difokuskan pada variabel dependen kinerja pemerintah daerah

yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), yang mencakup harapan hidup sehat, pendidikan (harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah), dan pengeluaran perkapita. Variabel dependen diregresikan dengan variabel independen tata kelola (DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial kepala daerah, dan predikat). Hasil uji tambahan dapat dilihat pada Tabel V.17.

Tabel V.17.
Hasil Uji Tambahan Estimasi Model Regresi

Variabel	Tipe Variabel	Prediksi	Y1			Y2			Y3			Y4		
			Coefficient	t-Statistic	Prob.	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Coefficient	t-Statistic	Prob.	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	Konstanta	+	73,65	374,58	0,00	12,35	82,45	0,00	6,73	27,48	0,00	9170,23	21,30	0,00
X1	Koersif	+	0,00	0,64	0,52	0,00	0,84	0,40	-0,00	-1,58	0,11	-0,30	-0,67	0,50
X2	Koersif	+	0,01	2,29	0,02**	0,00	0,72	0,47	0,01	3,93	0,00***	26,57	4,16	0,00***
X3	Mimetik	+	-0,09	-1,11	0,26	-0,04	-0,75	0,45	-0,13	-1,41	0,16	-602,13	-3,58	0,00***
X4	Mimetik	+	0,25	2,65	0,01***	0,14	1,94	0,05	-0,07	-0,57	0,57	500,02	2,39	0,01***
X5	Normatif	+	-0,01	-1,31	0,19	-0,01	-2,98	0,00***	-0,00	-0,74	0,46	-0,27	-0,02	0,98
X6	Normatif	+	0,10	6,02	0,00***	0,09	7,22	0,00***	0,14	6,86	0,00***	232,26	6,62	0,00***
Z1	Kontrol	+	12,00	4,63	0,00***	40,80	2,06	0,04**	77,50	2,39	0,01***	1,91	3,35	0,00***
Z2	Kontrol	+	5,97	0,79	0,42	-3,91	-0,68	0,50	0,00	1,95	0,05**	0,05	0,30	0,76
Keterangan :			Taraf signifikan *** $\leq 0,01$; ** $\leq 0,05$, Y : IPM; Y1 : Harapah Hidup; Y2 dan Y3 : Pendidikan; Y4 : Pengeluaran per Kapita; X1 : DPRD ukuran jumlah; X2 : Audit Internal Pemda ukuran jumlah; X3 : Daya Saing Pemda ukuran indeks; X4 : Emulasi ukuran indeks Pemda; X5 : Kualitas Manajerial Kepala Daerah ukuran lama menjabat; X6 : Predikat ukuran pemeringkatan; Z1 : Variabel Kontrol Aset Pemda ukuran jumlah; dan Z2 : Variabel Kontrol Penduduk ukuran kepadatan.											

5.7.1. Uji Tambahan Pengaruh Tata Telola Terhadap Elemen IPM Harapan

Hidup Sehat

Tabel V.17. menyajikan pengaruh tata kelola yaitu DPRD (X1), audit internal (X2), daya saing (X3), emulasi (X4), kualitas manajerial kepala daerah (X5), predikat (X6), variabel kontrol aset Pemda (Z1), dan variabel kontrol penduduk terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). DPRD (X1) terlihat positif (0,00) tidak signifikan (p value = 0,52) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil uji tambahan DPRD konsiten dengan hasil estimasi model regresi utama. Variabel DPRD bukan sebagai faktor yang dapat mendorong kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sementara audit internal (X2) mendukung hasil pengujian estimasi model regresi utama. Audit internal (X2) berpengaruh positif (0,01) signifikan ($p\text{ value} = 0,02$) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil ini membuktikan bahwa audit internal sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah

Hasil uji tambahan daya saing (X3) berpengaruh negatif (-0,09) tidak signifikan ($p\text{ value} = 0,27$) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil uji tambahan ini tidak konsisten dengan hasil uji estimasi model regresi utama yang berpengaruh negatif signifikan. Variabel ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk memastikan sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah. Sementara hasil uji tambahan emulasi (X4) memberikan dukungan terhadap hasil uji estimasi model regresi utama. Hasil uji tambahan emulasi berpengaruh positif (0,25) signifikan ($p\text{ value} = 0,00$) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil uji ini menguatkan hasil uji estimasi model regresi utama bahwa emulasi sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah. Kemudian hasil uji kualitas manajerial kepala daerah (X5) menunjukkan kesesuaian dengan hasil uji estimasi model regresi utama. Hasil uji tambahan kualitas manajerial kepala daerah (X5) berpengaruh negatif (-0,01) tidak signifikan ($p\text{ value} = 0,19$) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil ini menandakan bahwa kualitas manajerial kepala daerah bukan sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji tambahan predikat (X6) memperlihatkan hasil yang sama dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Hasil uji tambahan predikat (X6) berpengaruh positif (0,10) signifikan ($p\text{ value} = 0,00$) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil ini menegaskan bahwa predikat pemerintah

daerah sebagai faktor yang dapat mendorong kinerja pemerintah daerah. Hasil uji tambahan variabel kontrol jumlah aset (Z1) dan kepadatan penduduk (Z2) memberikan hasil tidak berbeda dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Variabel kontrol jumlah aset (Z1) berpengaruh positif (1,20) signifikan (p value = 0,00) dan kepadatan penduduk (Z2) berpengaruh positif (5,97) tidak signifikan (p value = 0,43) terhadap elemen IPM harapan hidup sehat (Y1). Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel kontrol ini mampu menjaga kestabilan hasil estimasi regresi utama dari potensi gangguan eksternal.

5.7.2. Uji Tambahan Pengaruh Tata Kelola Terhadap Elemen IPM Pendidikan

Tabel V.17. menyajikan elemen IPM pendidikan (Y2 dan Y3) yang diregresikan dengan tata kelola yaitu DPRD (X1), audi internal (X2), daya saing (X3), emulasi (X4), kualitas manajerial kepala daerah (X5), predikat (X6), variabel kontrol aset Pemda (Z1), dan variabel kontrol penduduk. Elemen IPM pendidikan diobservasi dengan harapan lama sekolah dan rata – rata lama sekolah. Hasil uji tambahan menunjukkan adanya sensitivitas estimasi yang dapat dilihat dari variasi hasil pengujian. Hasil uji tambahan DPRD (X1) terhadap elemen harapan lama sekolah (Y2) berpengaruh positif (0,00) tidak signifikan (p value = 0,40), sedangkan elemen rata – rata lama sekolah berpengaruh negatif (-0,00) tidak signifikan (p value = 0,11). Hasil uji tambahan ini memperkuat hasil pengujian estimasi model regresi utama bahwa DPRD belum berperan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil uji tambahan audit internal (X2) memberikan variasi hasil terhadap elemen IPM pendidikan. Hasil uji tambahan audit internal (X2) berpengaruh positif (0,00) tidak signifikan ($p\ value = 0,47$) terhadap elemen harapan lama sekolah (Y2), tetapi positif (0,01) signifikan ($p\ value = 0,00$) terhadap elemen rata – rata lama sekolah (Y3). Inkonsisten hasil ini perlu mendapat perhatian bagi pemangku kepentingan terhadap audit internal sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah. Uji tambahan daya saing (X3) memperlihatkan hasil uji tambahan berpengaruh negatif (-0,04 dan -0,13) tidak signifikan ($p\ value = 0,45$ dan 0,16), baik terhadap elemen harapan lama sekolah (Y2) maupun elemen rata – rata lama sekolah (Y3). Hasil uji tambahan ini tidak mendukung hasil pengujian estimasi model regresi utama, sehingga variabel daya saing perlu mendapat respons yang mendalam bagi pemangku kepentingan.

Variabel emulasi (X4) yang dimasukkan dalam uji tambahan dengan memberikan hasil yang tidak sama, tetapi secara moderat masih mendukung hasil pengujian estimasi model regresi utama. Hasil uji tambahan emulasi (X4) berpengaruh positif (0,14) signifikan secara moderat ($p\ value = 0,05$) terhadap elemen IPM pendidikan harapan lama sekolah (Y2). Sedangkan terhadap elemen IPM rata – rata lama sekolah (Y3) berpengaruh negatif (-0,07) tidak signifikan ($p\ value = 0,57$). Dukungan yang moderat dari hasil uji tambahan ini memerlukan evaluasi yang lebih dalam terhadap variabel emulasi dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya variasi hasil uji tambahan juga diperlihatkan oleh kualitas manajerial kepala daerah (X5). Hasil uji tambahan memberikan hasil negatif (-0,01) signifikan ($p\ value = 0,00$) terhadap elemen IPM

pendidikan harapan lama sekolah (Y2), tetapi negatif (-0,00) tidak signifikan (p value = 0,46) terhadap elemen IPM pendidikan harapan lama sekolah (Y3). Hasil pengujian yang tidak sama dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama memerlukan evaluasi lebih lanjut bagi pemangku kepentingan.

Selanjutnya predikat (X6) dimasukan dalam uji tambahan dengan hasil menunjukkan kesesuaian terhadap hasil pengujian estimasi model regresi utama. Variabel predikat (X6) berpengaruh positif (0,09 dan 0,14) signifikan (p value = 0,00; 0,00) terhadap elemen IPM pendidikan harapan lama sekolah (Y2) dan rata – rata lama sekolah (Y3). Hasil uji ini menguatkan bahwa variabel predikat sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah. Hasil uji tambahan variabel kontrol aset (Z1) sejalan dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Sedangkan penduduk (Z2) memberikan variasi hasil dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Variabel kontrol jumlah aset (Z1) berpengaruh positif (4,08E-14 dan 77,50) signifikan (p value = 0,04 dan 0,02) terhadap elemen IPM pendidikan harapan lama sekolah (Y2) dan elemen IPM pendidikan rata – rata lama sekolah (Y3). Hasil uji tambahan ini mengindikasikan bahwa variabel kontrol aset sebagai faktor dapat melindungi hasil estimasi model regresi utama dari gangguan yang tidak diinginkan. Sementara penduduk (Z2) memberikan hasil inkonsisten, yaitu berpengaruh negatif (-3,91) tidak signifikan (p value = 0,50) terhadap elemen IPM pendidikan harapan lama sekolah (Y2), tetapi berpengaruh positif (0,00) signifikan secara moderat (p value = 0,05) terhadap elemen IPM pendidikan rata – rata lama sekolah (Y3). Hasil ini uji tambahan variabel kontrol kepadatan penduduk perlu dicermati lebih dalam bagi pemangku kepentingan.

5.7.3. Uji Tambahan Pengaruh Tata Kelola Terhadap Elemen IPM Pengeluaran perkapita

Uji tambahan terkait kinerja pemerintah daerah yang diobservasi dengan elemen IPM pengeluaran perkapita (Y4) disajikan oleh Tabel V.31. Hasil uji tambahan secara keseluruhan mendukung hasil pengujian estimasi model regresi utama. Tabel V.31. memberi informasi bahwa variabel audit internal (X2), daya saing (X3), emulasi (X4), dan predikat (X6) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah yang diobservasi dengan elemen IPM pengeluaran perkapita (Y4). Variabel – variabel ini memiliki koefisien dan signifikansi, yaitu : koefisien audit internal 26,57 dengan $p\ value = 0,00$, koefisien daya saing -602,14 dengan $p\ value = 0,00$, koefisien emulasi 500,02 dengan $p\ value = 0,02$, dan koefisien predikat 232,26; $p\ value = 0,00$. Hasil uji tambahan variabel audit internal, emulasi, daya saing, dan predikat menunjukkan kesesuaian dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Hasil uji tambahan ini menegaskan bahwa variabel – variabel tersebut secara empiris diakui keberadaanya sebagai faktor pendorong kinerja pemerintah daerah.

Tabel V.17. menyampaikan bahwa uji tambahan variabel DPRD (X1) dan variabel kualitas manajerial kepala daerah (X5) tidak mengubah hasil estimasi model regresi utama. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil uji tambahan variabel DPRD (X1) dan variabel kualitas manajerial kepala daerah (X5) mendukung hasil pengujian estimasi model regresi utama. Sejalan dengan hasil pengujian estimasi model regersi utama, kedua variabel ini menunjukkan pengaruh negatif tidak

signifikan terhadap elemen IPM pengeluaran perkapita (Y4). Koefisien variabel DPRD tercatat -0,30 dengan $p\text{ value} = 0,50$, sedangkan variabel kualitas manajerial kepala daerah memiliki koefisien -0,27 dengan $p\text{ value} = 0,98$. Hasil uji tambahan ini dipahami bahwa kedua variabel tersebut belum dapat diposisikan sebagai faktor determinan yang dapat mendorong kinerja pemerintah daerah.

Uji tambahan selanjutnya memasukan variabel kontrol aset pemerintah (Z1) dan penduduk (Z2) untuk mengendalikan potensi pengaruh eksternal terhadap elemen IPM pengeluaran perkapita (Y4). Tabel 4.27. menginformasikan bahwa hasil uji tambahan variabel kontrol aset (X1) dan penduduk (X2) tidak menghasilkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif, untuk variabel aset signifikan (1,91, $p\text{ value} = 0,00$), sedangkan variabel penduduk tidak signifikan (0,05, $p\text{ value} = 0,76$). Hasil uji tambahan ini memperkuat keandalan hasil pengujian estimasi model regresi utama. Hal ini dapat artikan bahwa variabel kontrol yang dimasukan dalam uji tambahan memiliki kemampuan untuk menjaga pengaruh eksternal sehingga memperkuat validitas dan interpretasi hasil estimasi model regresi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini membuktikan bahwa teori institusional isomorfisme mampu menjelaskan peranan mekanisme tata kelola dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kinerja pemerintah daerah diinvestigasi dengan kinerja *outcome* yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep kinerja *outcome* yang dibangun Dooren *et al.* (2015). Konsep kinerja *outcome* tersebut dipengaruhi oleh konteks, yaitu lingkungan eksternal. Sementara lingkungan eksternal dalam penelitian ini dimanifestasikan dengan mekanisme tata kelola yang diobservasi melalui proksi DPRD, audit internal, daya saing, emulasi, kualitas manajerial, dan predikat. Proksi DPRD dan audit internal sebagai cerminan isomorfisme koersif memberikan fakta empiris bahwa hanya audit internal yang mampu memprediksi hasil estimasi. Kemudian isomorfisme mimetik yang dimanifestasikan dengan proksi daya saing dan emulasi terbukti valid menjadi faktor penjelas kinerja pemerintah daerah. Adapun isomorfisme normatif diinvestigasi dengan proksi kualitas manajerial kepala daerah dan predikat, namun dari kedua variabel tersebut, hanya variabel predikat yang dapat diandalkan sebagai prediktor bagi kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini menjelaskan bahwa peran DPRD yang diatur dalam regulasi sebagai fungsi pengawasan merefleksikan mekanisme tata kelola. Peran DPRD yang dieksplor dengan jumlah rapat sebagai kekuatan koersif belum berkontribusi

dalam mendorong capaian kinerja pemerintah daerah. Hipotesis 1 tidak didukung secara empiris sesuai konteks penelitian. Ini artinya, peran DPRD melalui rapat dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak tidak memberikan efek terhadap capaian kinerja IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Inkonsistensi hasil penelitian ini kemungkinan rekomendasi hasil rapat DPRD dan isu – isu terkait capaian kinerja IPM terabaikan.

Selanjutnya audit internal yang dilengkapi dengan peraturan sebagai implementasi mekanisme tata kelola berperan mengawasi jalannya pemerintah daerah. Peran audit internal sebagai kekuatan koersif yang diukur dengan jumlah auditor pemerintah daerah mampu mendorong kesetaraan capaian kinerja IPM pemerintah daerah. Hipotesis 2 memperoleh dukungan empiris. Ini artinya, peningkatan jumlah auditor pemerintah daerah berkontribusi terhadap kemiripan capaian kinerja IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah dapat menggunakan strategi optimalisasi jumlah auditor internal untuk meningkatkan kinerja sehingga capaian kinerjanya akan serupa antar pemerintah daerah.

Proposisi ilmiah menyatakan bahwa kesetaraan capaian kinerja antar organisasi atau lembaga disebabkan oleh tuntutan dari lingkungan. Tuntutan dari lingkungan ini merepresentasikan mekanisme tata kelola. Namun lingkungan menyimpan ketidakpastian dengan indikasi adanya keterbatasan pengetahuan, biaya yang tinggi, dan kesulitan akses untuk memperoleh informasi yang lengkap. Organisasi mengatasi ketidakpastian dengan tindakan mimetik (imitasi dan emulasi) seperti yang dijelaskan dalam teori institusional. Tindakan imitasi atau

emulasi merupakan respons cepat dalam meningkatkan capaian kinerja. Tindakan imitasi (meniru) yang bertujuan untuk meningkatkan capaian kinerja belum mendukung hipotesis 3. Tindakan ini dilakukan dengan mengamati dan mempelajari indeks daya saing pemerintah daerah lain yang dipandang sukses, dan mencoba mempraktikannya. Namun hasil pengujian tindakan meniru indeks daya saing berimplikasi pada penurunan capaian kinerja IPM pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini tidak sesuai dengan ekspektasi, kemungkinan fokus yang berlebihan pada indeks daya saing, sehingga pelayanan dasar kurang diperhatikan, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.

Proposisi teoritis menyatakan bahwa organisasi yang berada di lingkungan yang sejenis cenderung akan membandingkan kinerjanya satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pandangan teori institusional yaitu organisasi yang kinerjanya dipersepsikan rendah akan meniru organisasi lain yang capaian kinerjanya dipandang sukses. Organisasi melakukan tindakan meniru dalam menyikapi ketidakpastian lingkungan yang disebabkan oleh keterbatasan biaya untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang lengkap. Pernyataan ini mendukung hipotesis 4, yang mana tindakan meniru melalui emulasi mengarah pada kesamaan dalam meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah. Tindakan emulasi dilakukan dengan mengamati dan mempelajari indeks layanan, kemudian dan mencoba mempraktikannya. Penelitian ini memberi bukti bahwa semakin meningkat indeks layanan pemerintah daerah, semakin meningkat kesamaan dalam capaian kinerja IPM.

Pada konteks pemerintah daerah, isomorfisme capaian kinerja dapat diamati melalui peran kepala daerah. Kepala daerah harus memiliki pengalaman sebagai wujud kualitas manajerial, karena kepala daerah harus memahami perannya dalam mekanisme tata kelola, yaitu peran kepala daerah merupakan pengendali (kebijakan), bukan birokrat (administrasi). Kepala daerah yang berpengalaman lebih terbuka dalam menerima saran dari lembaga profesional, seperti KORPRI atau AAIPI. Hal ini mencerminkan mekanisme normatif dalam teori institusional. Seiring pengalaman kepala daerah meningkat, capaian kinerja pemerintah daerah meningkat juga, sehingga akan cenderung isomorfisme. Pernyataan ini tidak mendukung hipotesis 5. Kualitas manajerial kepala daerah yang dimanifestasikan dengan pengalaman tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja IPM pemerintah daerah. Ketidaksesuaian hasil ini mungkin disebabkan oleh lamanya proses penyesuaian antara saran dari para ahli dengan kepentingan politiknya. Selain itu ketidaksesuaian hasil penelitian disebabkan oleh perilaku oportunistik kepala daerah akibat pembatasan masa jabatan.

Mekanisme normatif dalam teori institusional menyatakan bahwa apresiasi dari lembaga profesional dapat menjadi sinyal positif bagi organisasi. Partisipasi lembaga profesional memberi apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk mekanisme tata kelola. Pemerintah daerah menerima apresiasi dapat berupa penghargaan (*award*), predikat (*label*), atau *ranking*. Pada konteks ini, capaian kinerja pemerintah daerah diobservasi dengan predikat. Penerimaan predikat yang baik mengindikasikan capaian kinerja pemerintah

daerah yang tinggi. Hal ini memotivasi pemerintah daerah lain untuk meraihnya sehingga capaian kinerja mengarah pada isomorfisme. Argumen ilmiah ini mendukung hipotesis 6. Raihan predikat mencerminkan kinerja, semakin baik predikat semakin tinggi capaian kinerja pemerintah daerah.

6.2. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi teoritis maupun implikasi praktis.

6.2.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam pemilihan teori penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan tema kinerja dan mekanisme sangat relevan menggunakan teori institusional sebagai landasan teori. Penetapan teori institusional dalam penelitian ini dilakukan dengan cermat melalui kajian literatur. Begitupun pemilihan dan penetapan proksi tata kelola didasarkan pada tinjauan literatur yang seksama. Teori institusional mampu menjelaskan secara valid bagaimana mekanisme tata kelola memengaruhi isomorfisme kinerja pemerintah daerah. Mekanisme tata kelola diobservasi dengan proksi DPRD dan audit internal sebagai faktor koersif, proksi daya saing dan emulasi sebagai faktor mimetik, proksi kualitas manajerial dan predikat sebagai faktor noarmatif. Hasil pengujian dengan teori institusional menunjukkan bahwa elemen mimetik menjadi variabel yang dominan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah masih sebatas pada tindakan meniru.

Mekanisme koersif dengan proksi DPRD yang diukur menggunakan jumlah rapat belum memberikan kontribusi yang berarti dalam capaian kinerja pemerintah daerah. Proksi DPRD dengan ukuran jumlah rapat masih jarang diobservasi sebagai faktor penjelas dalam konteks penelitian di Indonesia. Penelitian ini berusaha mengisi *gap* literatur dengan menawarkan ukuran jumlah rapat DPRD melalui bukti empiris. Fakta pengujian menunjukkan ukuran jumlah rapat DPRD tidak valid sebagai kekuatan koersif. Intensitas rapat DPRD belum mencerminkan efektivitas pengawasan untuk mendorong capaian kinerja pemerintah daerah. Kemudian proksi audit internal sebagai mekanisme koersif yang diukur dengan jumlah auditor internal menjadi faktor yang sangat signifikan berpengaruh dalam mendorong capaian kinerja. Ketersediaan auditor internal menjadi faktor esensial sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja. Ketersediaan auditor internal akan berbanding lurus dengan capaian kinerja pemerintah daerah.

Mekanisme mimetik dengan proksi daya saing yang diukur melalui indeks daya saing berperan sebaliknya terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Tindakan mimetik (meniru) mengatasi ketidakpastian lingkungan yang berorientasi pada daya saing belum tepat bagi pemerintah daerah. Hasil pengujian memberi fakta bahwa meniru daya saing organisasi lain berdampak pada penurunan kinerja. Hal ini dapat diartikan bahwa keberhasilan meniru oleh pemerintah daerah lain belum tentu memberikan hasil yang serupa. Praktik meniru perlu dilakukan secara hati – hati dengan mempertimbangkan kapasitas

pemerintah daerah. Selanjutnya proksi emulasi sebagai mekanisme mimetik yang diukur dengan indeks layanan menjadi faktor yang dapat meningkatkan capaian kinerja pemerintah daerah. Proksi emulasi sebagai variabel prediktor dikategorikan masih langka diinvestigasi dalam konteks penelitian pemerintah daerah, terutama di Indonesia. Tindakan emulasi merupakan mekanisme mimetik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan proses mengamati dan mempelajari indeks layanan dari pemerintah daerah lain yang dipandang sukses. Kemudian praktik tersebut dicoba untuk memperbaiki indeks layanannya.

Mekanisme normatif dimanifestasikan dengan proksi kualitas manajerial kepala daerah melalui ukuran pengalaman. Secara normatif, kepala daerah yang berpengalaman lebih mudah beradaptasi dengan saran atau standar dari lembaga profesional untuk meningkatkan kinerja. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengalaman kepala daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja setara dengan kinerja pemerintah daerah lain yang dipandang sukses, ternyata tidak sesuai ekspektasi. *Tenure* jabatan kepala daerah, baik yang sudah lama menjabat maupun yang baru menjabat, tidak memberikan efek terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Adapun proksi predikat digunakan sebagai cerminan mekanisme normatif dengan ukuran pemeringkatan. Pemerintah daerah dengan predikat tinggi dari lembaga profesional dipandang memiliki capaian kinerja yang tinggi. Hal ini memacu pemerintah daerah lain untuk mendapatkan predikat tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa predikat dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Predikat dengan ukuran pemeringkatan menjadi faktor penjas yang efektif untuk mendorong capaian kinerja pemerintah daerah.

6.2.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini menjadi rujukan para pemangku kepentingan, seperti DPRD, pemerintah daerah, kepala daerah, partai politik, dan masyarakat untuk memperkuat mekanisme tata kelola dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

a. DPRD

DPRD dapat menggunakan penelitian ini sebagai refleksi untuk meninjau kembali intensitas rapat DPRD. Fungsi pengawasan DPRD melalui intensitas rapat perlu dievaluasi untuk bertransformasi ke arah isu – isu yang berimplikasi pada capaian kinerja pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan agar tidak hanya fokus pada kehadiran dalam rapat, tetapi berorientasi pada produktivitas. Hal ini merupakan transformasi dari aspek prosedural dan administrasi yang bersifat rutin menuju produktivitas dengan lebih fokus pada isu – isu layanan masyarakat. Produktivitas DPRD dapat ditekankan melalui pengesahan peraturan daerah dan keputusan DPRD yang berbasis kinerja *outcome*.

b. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah dapat menggunakan penelitian ini sebagai pertimbangan untuk memprioritaskan penambahan auditor internal dalam meningkatkan pengawasan. Penambahan auditor internal sampai memenuhi standar minimal

rasio jumlah pengawai pemerintah daerah. Pada konteks kebijakan untuk meniru pemerintah daerah lain yang dipandang sukses, pemerintah daerah lebih menekankan pada emulasi dibandingkan dengan imitasi. Peniruan daya saing harus dilakukan hati – hati dengan mempertimbangkan kapabilitas pemerintah daerahnya, karena tidak semua keberhasilan daya saing pada pemerintah daerah lain akan sesuai dengan pemerintah daerahnya. Kebijakan meniru dengan emulasi lebih relevan, karena ada pertimbangan untuk memilih dan memilah pemerintah daerah lain yang tepat untuk ditiru. Faktor penting lainnya bagi pemerintah daerah adalah perolehan predikat sebagai pendorong capaian kinerja. Perolehan predikat bagi pemerintah daerah menunjukkan adanya legitimasi dari pihak lain atas capaian kinerjanya.

c. Kepala Daerah

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa pengalaman menjabat kepala daerah sebagai kualitas manajerial belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kinerja. Pengalaman menjabat kepala daerah belum teruji menjadi faktor pendorong kinerja pemerintah daerah. Kepala daerah dapat mempertimbangkan faktor lain sebagai kualitas manajerial, seperti pendidikan, usia, dan gender. Selain itu, kepala daerah juga dapat memperhatikan profesionalisme dengan menerapkan mekanisme tata kelola sebagai kualitas manajerial melalui publikasi APBD, publikasi LKPD, penilaian laporan kinerja, dan penilaian SAKIP.

d. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa mekanisme tata kelola dalam pemerintah daerah mendorong peningkatan kinerjanya untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan kinerja pemerintah daerah mengindikasikan bahwa masyarakat merasakan manfaatnya, berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, peluang kerja, usaha yang luas, dan peningkatan pendapatan. Selain itu, Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bahwa mekanisme tata kelola yang berjalan dengan baik memungkinkan masyarakat di daerah yang sebelumnya tertinggal dapat menikmati standar pelayanan setara dengan daerah maju.

6.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penulis menyakini bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan dalam penelitian ini diharapkan diperbaiki oleh penelitian – penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan penelitian ini yaitu :

- a. Banyak data yang tidak tersedia (*missing link data*) baik *online* maupun *offline*, sehingga jumlah data yang seharusnya 245 observasi, hanya tersedia 176 observasi atau 71,8% selama periode tahun 2017 – 2023 pada 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, terutama untuk data rapat DPRD dan jumlah auditor internal pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya dapat melakukan pendekatan pada pemerintah daerah untuk mendapatkan data sesuai yang direncanakan apabila tidak tersedia secara *online*, terutama untuk penelitian yang menggunakan data

panel lebih dari lima tahun.

- b. Penggunaan indikator jumlah rapat kemungkinan belum tepat untuk mengukur variabel DPRD sebagai kekuatan koersif dalam mekanisme tata kelola, meskipun penelitian sebelumnya masih jarang menggunakan ukuran ini. Begitupun indikator pengalaman sebagai kekuatan normatif belum mencerminkan variabel kualitas manajerial kepala daerah. Kedua indikator tersebut tidak signifikan memengaruhi capaian kinerja pemerintah daerah, Penelitian selanjutnya dapat menggunakan ukuran lain untuk variabel DPRD, seperti produktivitas rapat DPRD dengan ukuran jumlah peraturan daerah yang disahkan atau jumlah keputusan yang telah dibuat DPRD. Adapun pengukuran variabel kualitas manajerial kepala daerah dapat mempertimbangkan ukuran pendidikan dan usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelrahim, A., & Al-Malkawi, H. A. N. (2022). The Influential Factors of Internal Audit Effectiveness: A Conceptual Model. *International Journal of Financial Studies*, 10(3), 1–23. <https://doi.org/10.3390/ijfs10030071>
- Abdullah, H., & Tursoy, T. (2021). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. *Review of Managerial Science*, 15(2), 379–398. <https://doi.org/10.1007/s11846-019-00344-5>
- Abouassi, K., & Bies, A. (2017). Relationships and resources : the isomorphism of nonprofit organizations' (NPO) self-regulation. *Public Management Review*, 00(00), 1–21. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1400583>
- Achim, M. V., Văidean, V. L., Ioana, A., & Popa, S. (2023). The impact of the quality of corporate governance on sustainable development : an analysis based on development level. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(1), 930–959. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2080745>
- Acuto, M., & Leffel, B. (2021). Understanding the global ecosystem of city networks. *Urban Studies*, 58(9), 1758–1774. <https://doi.org/10.1177/0042098020929261>
- Adam, E. (2020). 'Governments base performance-based funding on global rankings indicators': A global trend in higher education finance or a global rankings literature fiction? A comparative analysis of four performance-based funding programs. *International Journal of Educational Development*, 76(April), 102197. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102197>
- Aghimien, D., Aigbavboa, C., Oke, A., & Aghimien, L. (2022). Latent Institutional Environment Factors Influencing Construction Digitalization in South Africa. *International Journal of Construction Education and Research*, 18(2), 142–158. <https://doi.org/10.1080/15578771.2020.1838973>
- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jai.190187>
- Aikins, S. K. (2011). An examination of government internal audits' role in improving financial performance. *Public Finance and Management*, 11(4), 306. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=e dsgcl.303756232&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid>

- Aikins, S. K. (2012). Determinants of auditee adoption of audit recommendations: Local government auditors' perspectives. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 24(2), 195–220. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-24-02-2012-B002>
- Aikins, S. K. (2013). Government Internal Audits: The Determinants of Quality Supervisory Review of Audit Documentation. *International Journal of Public Administration*, 36(10), 673–685. <https://doi.org/10.1080/01900692.2013.791309>
- Akbar, R., Pilcher, R. A., & Perrin, B. (2015). Implementing performance measurement systems Indonesian local government under pressure. In *Qualitative Research in Accounting & Management* (Vol. 12, Issue 1). <https://doi.org/10.1108/QRAM-03-2013-0013>
- Akbar, R., Pilcher, R., & Perrin, B. (2012). Performance measurement in Indonesia: the case of local government. *Pacific Accounting Review*, 24(3), 262–291. <https://doi.org/10.1108/01140581211283878>
- Al-Najjar, B., & Abed, S. (2014). The association between disclosure of forward-looking information and corporate governance mechanisms: Evidence from the UK before the financial crisis period. *Managerial Auditing Journal*, 29(7), 578–595. <https://doi.org/10.1108/MAJ-01-2014-0986>
- Alexander, J. A. (2015). Hospitals and Health: Psychosocial Aspects. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition* (Second Edi, Vol. 11). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.14103-0>
- Ali, M. (2021). Imitation or innovation: To what extent do exploitative learning and exploratory learning foster imitation strategy and innovation strategy for sustained competitive advantage? *Technological Forecasting & Social Change*, 165(December 2020), 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120527>
- Allegrini, V., & Monteduro, F. (2018). The role of uncertainty in performance information disclosure. *International Journal of Public Sector Management*, 31(5), 583–598. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-08-2017-0216>
- Almquist, R., Grossi, G., van Helden, G. J., & Reichard, C. (2013). Public sector governance and accountability. *Critical Perspectives on Accounting*, 24(7–8), 479–487. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2012.11.005>

- Alonso, J. M., Andrews, R., & Hodgkinson, I. R. (2016). Institutional, ideological and political influences on local government contracting: Evidence from england. *Public Administration*, 94(1), 244–262. <https://doi.org/10.1111/padm.12216>
- Alqudah, H. M., Amran, N. A., & Hassan, H. (2019). Factors affecting the internal auditors ' effectiveness in the Jordanian public sector. *EuroMed Journal of Busines*, 14(3), 251–273. <https://doi.org/10.1108/EMJB-03-2019-0049>
- Altaf, N., & Ahmad, F. (2019). Working capital financing, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India. *International Journal of Managerial Finance*, 15(4), 464–477. <https://doi.org/10.1108/IJMF-02-2018-0036>
- Altayar, M. S. (2018). Motivations for open data adoption: An institutional theory perspective. *Government Information Quarterly*, 35(4), 633–643. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.006>
- Alvesson, M., & Spicer, A. (2019). Neo-Institutional Theory and Organization Studies: A Mid-Life Crisis? *Organization Studies*, 40(2), 199–218. <https://doi.org/10.1177/0170840618772610>
- Amaral, E., Inácio, H., Araújo, F. De, Almeida, V. De, Duque, H., Paola, S., Garizado, A., Lilian, R., Carrillo, A., Elizabeth, R., Jaramillo, A., Julieth, L., & Lopez, G. (2021). Dimensions of Local Development in the Colombian Pacific Region. *Regional Science Policy & Practice*, 13(14), 1348–1370. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12453>
- Ammons, D. N., & Roenigk, D. J. (2015). Benchmarking and interorganizational learning in local government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 309–335. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu014>
- Anafinova, S. (2020). The role of rankings in higher education policy: Coercive and normative isomorphism in Kazakhstani higher education. *International Journal of Educational Development*, 78(October 2019), 102246. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102246>
- Andersen, S. C., & Jakobsen, M. L. (2018). Political Pressure, Conformity Pressure, and Performance Information as Drivers of Public Sector Innovation Adoption. *International Public Management Journal*, 21(2), 213–242. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1425227>
- Anderson, J. B., & Gerber, J. (2017). The US-Mexico Border Human Development Index, 1990–2010. *Journal of Borderlands Studies*, 32(3), 275–288. <https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1195707>

- Anderson, J. B., & Gerber, J. (2023). The US-Mexico Border Human Development Index, 1990–2015: Improvements but Still Large Gaps. *Journal of Borderlands Studies*, 38(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855229>
- Andersson, I. (2019). Conferences , award ceremonies and the showcasing of ‘ best practice ’: A case study of the annual European Week of Regions and Cities in Brussels. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(8), 1361–1379. <https://doi.org/10.1177/2399654419825656>
- Andrews, R., Bellò, B., Downe, J., Martin, S., & Walker, R. M. (2021). The Motivations for the Adoption of Management Innovation by Local Governments and its Performance Effects. *Public Administration Review*, 81(4), 625–637. <https://doi.org/10.1111/puar.13375>
- Androniceanu, A. (2021). Transparency in public administration as a challenge for a good democratic governance. *Administratie Si Management Public*, 2021(36), 149–164. <https://doi.org/10.24818/AMP/2021.36-09>
- Anh Vu, T., Plimmer, G., Berman, E., & Ha, P. N. (2022). Performance management in the Vietnam public sector: The role of institution, traditional culture and leadership. *International Journal of Public Administration*, 45(1), 49–63. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1903499>
- Annesi, N., Battaglia, M., Gragnani, P., & Iraldo, F. (2021). Integrating the 2030 Agenda at the municipal level: Multilevel pressures and institutional shift. *Land Use Policy*, 105(March), 105424. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105424>
- Aranguren, M. J., & Magro, E. (2020). How can universities contribute to regional competitiveness. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 30(2), 101–117. <https://doi.org/10.1108/CR-11-2018-0071>
- Araujo, J. F. F. E., & Tejado-Romero, F. (2018). Does Gender Equality Affect Municipal Transparency: The Case of Spain. *Public Performance and Management Review*, 41(1), 69–99. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1362350>
- Arena, M., & Jeppesen, K. K. (2016). Practice Variation in Public Sector Internal Auditing: An Institutional Analysis. *European Accounting Review*, 25(2), 319–345. <https://doi.org/10.1080/09638180.2015.1018917>
- Arifin, J. (2014). *Isomorphic Pressures Influencing the Level of Mandatory Disclosure within Financial Statements of Indonesian Local Governments* (Issue November). <http://espace.library.curtin.edu.au/cgi bin/espace>.

- Arifin, J. (2022). View of Determinants of the effectiveness of audit procedures in revealing fraud: An attribution theory approach. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(6), 378–387.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). Financial reporting compliance in Indonesian local governments: Mimetic pressure dominates. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 68–84. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art6>
- Arimah, B. (2017). *Infrastructure as a Catalyst for the Prosperity of African Cities*. 198(September 2016), 245–266. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.159>
- Arrona, A., Franco, S., & Wilson, J. R. (2020). Public innovation through governance in place-based competitiveness policymaking. *Competitiveness Review*, 30(2), 119–136. <https://doi.org/10.1108/CR-03-2018-0023>
- Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 19(1), 165–187. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum038>
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. (2017). Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*, 21(1), 82–99. <https://doi.org/10.1111/ijau.12082>
- Avellaneda, C. N. (2009). Mayoral quality and local public finance. *Public Administration Review*, 69(3), 469–486. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.01993.x>
- Avellaneda, C. N., Bello-Gomez, R. A., & Gomes, R. C. (2022). Municipal Fiscal Performance: Mayors' Gender and Organizational Human Resources. *Journal of Policy Studies*, 37(3), 1–25. <https://doi.org/10.52372/jps37303>
- Avellaneda, C. N., & Gomes, R. C. (2015). Is small beautiful? Testing the direct and nonlinear effects of size on municipal performance. *Public Administration Review*, 75(1), 137–149. <https://doi.org/10.1111/puar.12307>
- Avellaneda, C. N., & Gomes, R. C. (2017). Mayoral quality and municipal performance in Brazilian local governments. *Organizações & Sociedade*, 24(83), 555–579. <https://doi.org/10.1590/1984-9240831>

- Awad, I. M., & Thwaib, S. M. (2024). Creating shared value to enhance the competitiveness of the agricultural cluster in Qalqilya governorate. *Journal of Enterprising Communities*, 18(5), 1045–1077. <https://doi.org/10.1108/JEC-07-2023-0137>
- Awan, A. M., Azam, M., Saeed, I. U., & Bakhtyar, B. (2020). Does globalization and financial sector development affect environmental quality? A panel data investigation for the Middle East and North African countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(36), 45405–45418. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10445-4>
- Azam, M. (2022). Governance and Economic Growth: Evidence from 14 Latin America and Caribbean Countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 13(2), 1470–1495. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00781-2>
- Azam, M., & Bouckaert, G. (2025). Performance-based budgeting reform and evolution of performance information quality: empirical analysis of Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 37(1), 25–47. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2023-0223>
- Babar, M., & Habib, A. (2021). Product market competition in accounting, finance, and corporate governance: A review of the literature. *International Review of Financial Analysis*, 73(July 2020), 101607. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020.101607>
- Balaguer-Coll, M. T., & Ivanova-Toneva, M. (2021). The impact of women's leadership in local governments: the case of Spain. *International Public Management Journal*, 24(4), 455–475. <https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1897718>
- Balaguer-Coll, M. T., Narbón-Perpiñá, I., Peiró-Palomino, J., & Tortosa-Ausina, E. (2021). Balaguer-Col2021 robustness dan variabel kontrol.pdf. *Journal of Regional Science*, 62(1), 96–124.
- Baldwin, E., Carley, S., & Nicholson-crotty, S. (2019). Why do countries emulate each others ' policies ? A global study of renewable energy policy diffusion. *World Development*, 120, 29–45. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.03.012>
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric analysis of panel data — 3rd ed* (Third edit). John Wiley & Sons Ltd.
- Baltagi, B., & Liu, L. (2020). *Forecasting with Unbalanced Panel Data* (Issue 221).

- Barnett, W. P., Xiao, X., & Zhou, Y. (2021). Competitive Exclusion versus Mimetic Isomorphism: An Identified Empirical Test. *Sociological Science*, 8, 211–229. <https://doi.org/10.15195/V8.A11>
- Barrett, P. (2002). Achieving better practice corporate governance in the public sector. *Australian National Audit Office*, June. http://www.anao.gov.au/uploads/documents/Achieving_Better_Practice_Corporate_Governance_in_the_Public_Sector1.pdf
- Bastedo, M. N., & Bowman, N. A. (2010). U.S. News and world report college rankings: Modeling institutional effects on organizational reputation. *American Journal of Education*, 116(2), 163–183. <https://doi.org/10.1086/649437>
- Bastida, F., & Benito, B. (2014). Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International Approach. *American Review of Public Administration*, 46(5), 1–23. <https://doi.org/10.1177/0275074014565020>
- Bastos, P., & Sánchez, C. (2024). The Effects of Educated Leaders on Policy and Politics: Quasi-Experimental Evidence from Brazil. *Latin American Economic Review*, 33. <https://doi.org/10.47872/laer.v33i.198>
- Becker, T. E. (2005). Potential problems in the statistical control of variables in organizational research: A qualitative analysis with recommendations. *Organizational Research Methods*, 8(3), 274–289. <https://doi.org/10.1177/1094428105278021>
- Belle, N., Belardinelli, P., Cantarelli, P., & Mele, V. (2019). on Iron Cages and Suboptimal Choices: an Experimental Test of the Micro-Foundations of Isomorphism in the Public Sector. *International Public Management Journal*, 22(2), 373–414. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1494066>
- Bencsik, A., & Juhasz, T. (2023). The soft criteria of competitiveness: A symbiosis of trust and knowledge. *Cogent Business and Management*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2176976>
- Benito, B., Guillamón, M. D., & Ríos, A. M. (2021). Transparency and efficient management in local governments. *Cities*, 115(March), 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103234>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining the Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Bessire, D. (1999). Dértair la perftrmance. *Comptabilité Contrôle Audit*, 127–150. <https://doi.org/10.3917/cca.052.0127>

- Beycioglu, K., & Kondakci, Y. (2021). Organizational Change in Schools. *ECNU Review of Education*, 4(4), 788–807.
<https://doi.org/10.1177/2096531120932177>
- Bhatti, Y., Olsen, A. L., & Pedersen, L. H. (2011). Administrative professionals and the diffusion of innovations: The case of citizen service centres. *Public Administration*, 89(2), 577–594.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2010.01882.x>
- Bilderback, S. (2024). Integrating training for organizational sustainability: the application of Sustainable Development Goals globally. *European Journal of Training and Development*, 48(7–8), 730–748.
<https://doi.org/10.1108/EJTD-01-2023-0005>
- Biljohn, M. I. M., & Lues, L. (2020). Citizen Participation, Social Innovation, and the Governance of Local Government Service Delivery: Findings from South Africa. *International Journal of Public Administration*, 43(3), 229–241. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1628052>
- Bjørnå, H., & Weigård, J. (2020). From Public to Private Accountability in Norwegian Local Government. *SAGE Open*, 10(3).
<https://doi.org/10.1177/2158244020957042>
- Blank, J. L. T., & Niaounakis, T. K. (2021). Economies of Scale and Sustainability in Local Government: A Complex Issue. *Sustainability*, 13(23), 1–10.
- Boas, I., Kloppenburg, S., van Leeuwen, J., & Lamers, M. (2018). Studying Global Environmental Meetings. *Global Environmental Politics*, 18(4), 107–126. https://doi.org/10.1162/glep_a_00482
- Bontempo, P. C. (2022). Countries' governance and competitiveness: business environment mediating effect. *RAUSP Management Journal*, 57(1), 49–64.
<https://doi.org/10.1108/RAUSP-11-2020-0253>
- Bordignon, M., Gamalerio, M., & Turati, G. (2020). Manager or professional politician? Local fiscal autonomy and the skills of elected officials. *Regional Science and Urban Economics*, 83(February).
<https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103529>
- Bourguignon, A. (1997). Sous les pavés la plage? ou les multiples fonctions du vocabulaire comptable: l'exemple de la performance. *Comptabilité - Contrôle - Audit*, 3(1), 89. <https://doi.org/10.3917/cca.031.0089>

- Bracco, E., Alberto, M., & Maurizio, D. B. (2024). Manipulating municipal budgets : unveiling opportunistic behavior of Italian mayors. *Public Choice*, 198(3), 317–342. <https://doi.org/10.1007/s11127-023-01131-3>
- Brick, I. E., & Chidambaran, N. K. (2010). Board meetings, committee structure, and firm value. *Journal of Corporate Finance*, 16(4), 533–553. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2010.06.003>
- Broekema, W., Porth, J., Steen, T., & Torenvlied, R. (2019). Public leaders' organizational learning orientations in the wake of a crisis and the role of public service motivation. *Safety Science*, 113(December 2018), 200–209. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2018.11.002>
- Brooks, C. (2008). *Introductory Econometrics for Finance - Second Edition* (Second Edi). Cambridge University Press.
- Brumback, G. B. (1988). Some Ideas, Issues and Predictions about Performance Management. *Public Personnel Management*, 17(4), 387–402. <https://doi.org/10.1177/009102608801700404>
- Brunjes, B. M. (2020). Competition and Federal Contractor Performance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(2), 202–219. <https://doi.org/10.1093/jopart/muz027>
- Bukalova, D. (2024). Recognizing the importance of collaborative competencies and facilitative leadership in local government in the United States. *International Journal of Public Leadership*, 20(3/4), 204–217. <https://doi.org/10.1108/IJPL-11-2023-0093>
- Bullock, E. L., Woodcock, C. E., & Holden, C. E. (2020). Improved change monitoring using an ensemble of time series algorithms. *Remote Sensing of Environment*, 238(April 2019), 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.04.018>
- Burdon, W. M., & Sorour, M. K. (2020). Institutional Theory and Evolution of 'A Legitimate' Compliance Culture: The Case of the UK Financial Service Sector. In *Journal of Business Ethics* (Vol. 162, Issue 1). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10551-018-3981-4>
- Caldas, P., Dollery, B., & Marques, R. C. (2020). Measuring what matters in local government: a Municipality Sustainability Index. *Policy Studies*, 0(0), 1–21. <https://doi.org/10.1080/01442872.2020.1726311>

- Campbell, J. P., & Wiernik, B. M. (2015). The Modeling and Assessment of Work Performance. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 2, 47–74. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032414-111427>
- Campo, C., Hermosa del Vasto, P., Urquía-Grande, E., & Jorge, S. (2021). Country Performance in the South American Region: A Multivariate Analysis. *International Journal of Public Administration*, 44(5), 390–408. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728314>
- Campos-alba, C. M., Pérez-López, G., Chica-Olmo, J., & Zafra-Gómez, J. L. (2024). Modeling political mimetic isomorphism versus economic and quality factors in local government privatizations. *Public Administration*, 102(3), 1178–1209. <https://doi.org/10.1111/padm.12971>
- Cárcaba, A., Arrondo, R., & González, E. (2022). Does good local governance improve subjective well-being? *European Research on Management and Business Economics*, 28(2), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100192>
- Carcello, J. V., Hermanson, D. R., Neal, T. L., & Riley, R. A. (2002). Board Characteristics and Audit Fees. *Contemporary Accounting Research*, 19(3), 365–384. <https://doi.org/10.1506/CHWK-GMQ0-MLKE-K03V>
- Carlson, K. D., & Wu, J. (2012). The Illusion of Statistical Control: Control Variable Practice in Management Research. *Organizational Research Methods*, 15(3), 413–435. <https://doi.org/10.1177/1094428111428817>
- Carmeli, A., Gilat, G., & Waldman, D. A. (2007). The role of perceived organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance. *Journal of Management Studies*, 44(6), 972–992. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2007.00691.x>
- Carmen Briano-Turrent, G. (2023). Political empowerment of women and Human Development Index in the States of Mexico. *Problemas Del Desarrollo*, 54(213), 131–160. <https://doi.org/10.22201/ieec.20078951e.2023.213.69965>
- Casteel, A., & Bridier, N. L. (2021). Describing Populations and Samples in Doctoral. *International Journal of Doctoral Studies*, 16, 339–362. <https://doi.org/10.28945/4766>
- Castilla-Polo, F., Gallardo-Vázquez, D., Sánchez-Hernández, M. I., & Ruiz-Rodríguez, M. C. (2018). An empirical approach to analyse the reputation-performance linkage in agrifood cooperatives. *Journal of Cleaner Production*, 195, 163–175. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.210>

- Chakraborty, I. (2023). Uncovering heterogeneity in the relationship between competition, corporate governance and firm performance using quantile regression on Indian data. *Asia and the Global Economy*, 3(2), 100066. <https://doi.org/10.1016/j.aglobe.2023.100066>
- Chatterji, A. K., & Toffel, M. W. (2010). How firms respond to being rated. *Strategic Management Journal*, 31(9), 917–945. <https://doi.org/10.1002/smj>
- Chiappetta Jabbour, C. J., Seuring, S., Lopes de Sousa Jabbour, A. B., Jugend, D., De Camargo Fiorini, P., Latan, H., & Izeppi, W. C. (2020). Stakeholders, innovative business models for the circular economy and sustainable performance of firms in an emerging economy facing institutional voids. *Journal of Environmental Management*, 264(1), 1–12. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110416>
- Child, J. (1972). Organizational Structure, Environment and Performance: The Role Strategic Choice. *Sociology*, 6(1), 1–22.
- Chin, W. W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In *Modern Methods For Business Research* (Issue JANUARY 1998, pp. 295–336).
- Choi, Y., & Woo, H. (2022). Understanding diverse types of performance information use: evidence from an institutional isomorphism perspective. *Public Management Review*, 24(12), 2033–2052. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1955953>
- Cifuentes-Faura, J., Simionescu, M., & Hudakova, M. (2024). Exploring the causality between transparency and public finance indicators among Spanish local governments to improve competitiveness. *Journal of Competitiveness*, 16(2), 240–261. <https://doi.org/10.7441/joc.2024.02.12>
- Çilingirtürk, A. M., & Koçak, H. (2018). Human Development Index (HDI) Rank-Order Variability. *Social Indicators Research*, 137(2), 481–504. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1605-5>
- Cizek, G. J. (1997). Learning, Achievement, and Assessment: Constructs at a Crossroads. *Handbook of Classroom Assessment*, 1–32. <https://doi.org/10.1016/B978-012554155-8/50003-X>
- Clatworthy, M. A., Mellett, H. J., & Peel, M. J. (2000). Corporate governance under “New Public Management”: An exemplification. *Corporate Governance: An International Review*, 8(2), 166–176. <https://doi.org/10.1111/1467-8683.00193>

- Coetzee, P., & Erasmus, L. J. (2017). What drives and measures public sector internal audit effectiveness? Dependent and independent variables. *International Journal of Auditing*, 21(3), 237–248. <https://doi.org/10.1111/ijau.12097>
- Cohen, J. M. (1995). Capacity building in the public sector: A focused framework for analysis and action. *International Review of Administrative Sciences*, 61(3), 407–422. <https://doi.org/10.1177/002085239506100307>
- Cohen, L., Manion, L., & Keith, M. (2007). *Research Methods in Education - Sixth edition* (Sixth edit). Routledge.
- Cohen, S., & Malkogianni, I. (2021). Sustainability measures and earnings management: evidence from Greek municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(4), 365–386. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2020-0171>
- Collazos, A. Z., Fabian, J., Obando, R., Gómez, J. M., Marcela, L., & García, V. (2023). Public policy and its impact on innovation , competitiveness , and performance in the tourism sector. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 1–21. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2249692>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods - Twelfth edition* (Twelfth ed). McGraw-Hill/Irwin.
- Čopík, J., Kopřiva, R., & Čmejrek, J. (2019). Mayors as a variable in typologies of local governments: a case study of the Czech Republic. *Local Government Studies*, 47(2), 167–185. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1699069>
- Cordery, C. J., & Hay, D. C. (2022a). Public sector audit in uncertain times. *Financial Accountability and Management*, 38(3), 426–446. <https://doi.org/10.1111/faam.12299>
- Cordery, C. J., & Hay, D. C. (2022b). Public sector audit in uncertain times. *Financial Accountability and Management*, 38(3), 426–446. <https://doi.org/10.1111/faam.12299>
- Coroado, S. (2020). Does formal independence of regulators change? Evidence from Portuguese agencies. *Governance*, 33(1), 61–77. <https://doi.org/10.1111/gove.12413>
- Coste, A.-I., & Tudor, A. T. (2013). Service Performance - Between Measurement and Information in the Public Sector. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 92, 215–219. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.662>

- D'Urso, P., Giovanni, L. De, Sica, F. G. M., & Vitale, V. (2024). Measuring Competitiveness at NUTS3 Level and Territorial Partitioning of the Italian Provinces. In *Social Indicators Research* (Vol. 173, Issue 1). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02836-y>
- Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & De Sousa, L. (2016). Measuring Local Government Transparency. *Public Management Review*, 18(6), 866–893. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051572>
- Dacin, M. . T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *Academy of Management Journal*, 45(1), 45–57.
- Dal Mas, F., Massaro, M., Lombardi, R., & Garlatti, A. (2019). From output to outcome measures in the public sector: a structured literature review. In *International Journal of Organizational Analysis* (Vol. 27, Issue 5, pp. 1631–1656). <https://doi.org/10.1108/IJOA-09-2018-1523>
- Dasic, B., Devic, Z., Denic, N., Zlatkovic, D., Ilic, I. D., Cao, Y., Jermisittiparsert, K., & Le, H. Van. (2020). Human development index in a context of human development: Review on the western Balkans countries. *Brain and Behavior*, 10(9), 1–12. <https://doi.org/10.1002/brb3.1755>
- Daujotaite, D. (2017). The Role and Impact of Performance Audit in Public Governance. *Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management*, 29–44. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-50164-2>
- Davis, G. F. (2006). Mechanisms and the theory of organizations. *Journal of Management Inquiry*, 15(2), 114–118. <https://doi.org/10.1177/1056492605280238>
- De Benedictis-Kessner, J. (2022). Strategic government communication about performance. *Political Science Research and Methods*, 10(3), 601–616. <https://doi.org/10.1017/psrm.2021.7>
- de Oña, J., de Oña, R., Eboli, L., & Mazzulla, G. (2016). Index numbers for monitoring transit service quality. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 84, 18–30. <https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.05.018>
- de Widt, D. (2021). The impact of demographic trends on local government financial reserves: evidence from England. *Local Government Studies*, 47(3), 405–428. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1877665>

- De Widt, D., Llewelyn, I., & Thorogood, T. (2020). Stakeholder attitudes towards audit credibility in English local government: A post-Audit Commission analysis. *Financial Accountability and Management*, July 2019, 1–27. <https://doi.org/10.1111/faam.12267>
- Deephouse, D. L. (1996). Does isomorphism legitimate? *Academy of Management Journal*, 39(4), 1024–1039. <https://doi.org/10.2307/256722>
- Demirbilek, B., & Benson, D. (2019). Between emulation and assemblage: Analysing WFD policy transfer outcomes in Turkey. *Water (Switzerland)*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/w11020324>
- Depoers, F., & Jérôme, T. (2020). Coercive, normative, and mimetic isomorphisms as drivers of corporate tax disclosure: The case of the tax reconciliation. *Journal of Applied Accounting Research*, 21(1), 90–105. <https://doi.org/10.1108/JAAR-04-2018-0048>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism in Organizational Fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160. <http://www.jstor.org/stable/2095101>
- Dooren, W. Van, Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance Management in the Public Sector* (Second Edi). Routledge.
- Dos Reis Fonseca, A., Jorge, S., & Nascimento, C. (2020). The role of internal auditing in promoting accountability in higher education institutions. *Revista de Administracao Publica*, 54(2), 243–265. <https://doi.org/10.1590/0034-761220190267x>
- Downe, J., Cowell, R., & Morgan, K. (2016). What Determines Ethical Behavior in Public Organizations: Is It Rules or Leadership? *Public Administration Review*, 76(6), 898–909. <https://doi.org/10.1111/puar.12562>
- Downey, H. K., & Slocum, J. W. (1975). Uncertainty : and Measures , of Sources. *The Academy of Management Journal*, 18(3), 562–578.
- Drew, J., Kortt, M. A., & Dollery, B. (2014). Economies of Scale and Local Government Expenditure: Evidence From Australia. *Administration and Society*, 46(6), 632–653. <https://doi.org/10.1177/0095399712469191>
- Drew, J., Miyazak, M., & Kortt, M. A. (2023). The other side of the local government ledger — The association between revenue growth and population growth. *Australian Journal of Public Administration*, 82(4), 424–439. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12583>

- Duan, H. K., Vasarhelyi, M. A., Codesso, M., & Alzamil, Z. (2023). Enhancing the government accounting information systems using social media information: An application of text mining and machine learning. *International Journal of Accounting Information Systems*, 48(November 2022), 100600. <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100600>
- Dubnick, M. (2005). *Accountability and the Promise of Performance : In Search of the Mechanisms*. 28(3), 376–417. www.jstor.org/stable/3381159
- Duncan, R. B. (1972). Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty. *Administrative Science Quarterly*, 17(3), 313. <https://doi.org/10.2307/2392145>
- Dybkaer, R. (2011). Definitions of “measurement.” *Accreditation and Quality Assurance*, 16(10), 479–482. <https://doi.org/10.1007/s00769-011-0808-8>
- Dzomira, S. (2020). Corporate Governance and Performance of Audit Committee and Internal Audit Functions in an Emerging Economy’s Public Sector. *Indian Journal of Corporate Governance*, 13(1), 85–98. <https://doi.org/10.1177/0974686220923789>
- Edmonds, C. T., Leece, R. D., Vermeer, B. Y., & Vermeer, T. E. (2023). The role of adverse outcomes in municipal debt costs. *Advances in Accounting*, 63(February), 100671. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2023.100671>
- Ek Österberg, E., & de Fine Licht, J. (2023). Beyond auditor and auditee: exploring the governance of performance in eldercare. *Public Management Review*, 25(1), 84–103. <https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1937686>
- Ekananda, M. (2019). *Ekonometrika Dasar : Untuk Penelitian Bidang Ekonomi, Sosial dan Bisnis Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Elena-Iuliana, I., & Maria, C. (2016). Organizational Performance – a Concept That Self-Seeks To Find Itself. *Analele Universității Constantin Brâncuși Din Târgu Jiu : Seria Economie*, 4, 179–183.
- Elmasry, M. O., & Bakri, N. (2019). Behaviors of Transformational Leadership in Promoting Good Governance at the Palestinian Public Sector. *International Journal of Organizational Leadership*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.33844/ijol.2019.60265>
- Eluyela, D. F., Akintimehin, O. O., Okere, W., Ozordi, E., Osuma, G. O., Ilogho, S. O., & Oladipo, O. A. (2018). Board meeting frequency and firm performance: examining the nexus in Nigerian deposit money banks. *Heliyon*, 4(10), e00850. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00850>
- Enke, B., & Graeber, T. (2021). Cognitive Uncertainty In Intertemporal Choice. NBER Working Paper Series. <https://doi.org/10.3386/w29577>

- Erkkilä, T. (2020). Transparency in Public Administration. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*, May, 1–21.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1404>
- Erkkilä, T., & Piironen, O. (2014). Shifting fundamentals of European higher education governance: competition, ranking, autonomy and accountability. *Comparative Education*, 50(2), 177–191.
<https://doi.org/10.1080/03050068.2013.807643>
- Ermini, B., Santolini, R., & Ciommi, M. (2023). Equitable and sustainable well-being in Italian municipalities: Do women in politics make the difference? *Socio-Economic Planning Sciences*, 90(September), 101741.
<https://doi.org/10.1016/j.seps.2023.101741>
- Falciola, J., Jansen, M., & Rollo, V. (2020). Defining firm competitiveness : A multidimensional framework q. *World Development*, 129, 104857.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104857>
- Farrell, C., McKenna, D., & Wall, M. (2022). Setting the stage: scenic design and observers' perceptions of the quality of public governance meetings. *Public Management Review*, 24(11), 1663–1681.
<https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1909347>
- Fasiello, R., Rivenbark, W. C., & Bianchi, C. (2022). Exploring the Shift from Output Measures to Outcome Measures of Service Delivery: Insights from Municipal Research. *Public Performance and Management Review*, 45(2), 428–447. <https://doi.org/10.1080/15309576.2021.1988648>
- Fayissa, B., & Nsiah, C. (2013). The Impact Of Governance On Economic Growth In Africa. *The Journal of Developing Areas*, 47(1), 91–108.
- Febriyanti, D., Widianingsih, I., Sumaryana, A., & Buchari, R. A. (2024). The typology and determinant of performance measurement for public sector organizations—a literature review. *Cogent Business and Management*, 11(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2315681>
- Feeney, M. K., & Langer, J. (2016). Getting Ahead in the Public Sector: Perceptions of Managers in U.S. Municipalities. *American Review of Public Administration*, 46(6), 683–699. <https://doi.org/10.1177/0275074015570037>
- Feng, Y., Hassan, A., & Elamer, A. A. (2020). Corporate governance, ownership structure and capital structure: evidence from Chinese real estate listed companies. *International Journal of Accounting and Information Management*, 28(4), 759–783. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-04-2020-0042>

- Ferrarini, F., Muzzioli, S., & Baets, B. De. (2024). *A TOPSIS analysis of regional competitiveness at European level*. 34(7), 52–72.
<https://doi.org/10.1108/CR-01-2024-0005>
- Ferreira, A. (2020). Political competition as a motivation for earnings management close to zero : the case of Portuguese municipalities. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 32(3), 461–485.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-10-2018-0109>
- Ferry, L., Zakaria, Z., Zakaria, Z., & Slack, R. (2017). Watchdogs, helpers or protectors? – Internal auditing in Malaysian Local Government. *Accounting Forum*, 41(4), 375–389. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.10.001>
- Foged, S. K. (2016). The Relationship Between Population Size and Contracting Out Public Services: Evidence from a Quasi-experiment in Danish Municipalities. In *Urban Affairs Review* (Vol. 52, Issue 3).
<https://doi.org/10.1177/1078087415591288>
- Fourné, S. P. L., & Zschoche, M. (2020). Reducing uncertainty in follow-up foreign direct investment: Imitation by family firms. *Global Strategy Journal*, 10(4), 839–860. <https://doi.org/10.1002/gsj.1331>
- Freeman, R. (2020). The role of the councillor and the work of meeting. *Local Government Studies*, 46(4), 564–582.
<https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1673740>
- Frölich, M. (2008). Parametric and nonparametric regression in the presence of endogenous control variables. *International Statistical Review*, 76(2), 214–227. <https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2008.00045.x>
- Frumkin, P., & Galaskiewicz, J. (2004). Institutional isomorphism and public sector organizations. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 14(3), 283–307. <https://doi.org/10.1093/jopart/muh028>
- Fuenfschilling, L., & Truffer, B. (2014). The structuration of socio-technical regimes - Conceptual foundations from institutional theory. *Research Policy*, 43(4), 772–791. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2013.10.010>
- Funk, K. D., & Owen, E. (2020). Consequences of an Anti-Corruption Experiment for Local Government Performance in Brazil. *Journal of Policy Analysis and Management*, 39(2), 444–468.
<https://doi.org/10.1002/pam.22200>

- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>
- Fusco, E., & Allegrini, V. (2020). The role of spatial interdependence in local government cost efficiency: An application to waste Italian sector. *Socio-Economic Planning Sciences*, 69(January), 100681. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.01.003>
- Gao, H., Ru, H., & Yongjun, D. (2021). Subnational debt of China: The politics-finance nexus. *Journal of Financial Economics*, xxxx. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.05.028>
- Garcia-Lacalle, J., Royo, S., & Yetano, A. (2021). Boards of directors and performance in autonomous public sector entities. *Public Money and Management*, 0(0), 1–10. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1896131>
- Garcia, F., & Wihlborg, E. (2025). Making local democracy work during the pandemic—analyses of online and onsite city council meetings in Sweden. *Local Government Studies*, 51(5), 1065–1086. <https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2453219>
- George, B., Baekgaard, M., Decramer, A., Audenaert, M., & Goeminne, S. (2020). Institutional isomorphism, negativity bias and performance information use by politicians: A survey experiment. *Public Administration*, 98(1), 14–28. <https://doi.org/10.1111/padm.12390>
- George, B., Van de Walle, S., & Hammerschmid, G. (2019). Institutions or Contingencies? A Cross-Country Analysis of Management Tool Use by Public Sector Executives. *Public Administration Review*, 79(3), 330–342.
- George, D. E. R. (1996). Performance epistemology. *Performance Research*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.1080/13528165.1996.10871466>
- Ghalem, Â., Okar, C., Chroqui, R., & Semma, E. (2016). *Performance : A concept to define ! La performance : Un concept à définir !* May, 1–12. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24800.28165>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EvIEWS 10 Edisi 2*. Badan Penerbit Undip.

- Gilardi, F., & Wasserfallen, F. (2019). The politics of policy diffusion. *European Journal of Political Research*, 58(4), 1245–1256.
<https://doi.org/10.1111/1475-6765.12326>
- Glass, L.-M., & Newig, J. (2019). Governance for achieving the Sustainable Development Goals: How important are participation, policy coherence, reflexivity, adaptation and democratic institutions? *Earth System Governance*, 2, 100031. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2019.100031>
- Goddard, A. (2005). Reform as regulation – accounting, governance and accountability in UK local government. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 1(1), 27–44.
<https://doi.org/10.1108/18325910510635272>
- Gomes, D., & Sargiacomo, M. (2013). Accounting and accountability in local government: An introduction. *Accounting History*, 18(4), 439–446.
<https://doi.org/10.1177/1032373213510074>
- Gomes, R. C., Alfinito, S., & Albuquerque, P. H. M. (2013). Analyzing local government financial performance: evidence from Brazilian municipalities 2005-2008. *Revista de Administração Contemporânea*, 17(6), 704–719.
<https://doi.org/10.1590/s1415-65552013000600005>
- Gomes, R. C., Lisboa, E., & Osborne, S. (2021). Local government decisions in resource allocation: what is stakeholders' role in the process. *Academy of Management Proceedings*, 2021(1), 10324.
<https://doi.org/10.5465/ambpp.2021.10324abstract>
- Gomes, R. C., Osborne, S. P., & Lisboa, R. (2022). The Myth of Mayoral Leadership in Local Government Resource Allocation: A Multilevel Analysis with Brazilian Municipalities. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3), 561–575.
- Gonçalves, S. M., & Silva, R. V. (2021). Discussing the potential of the institutional theory to leverage service-dominant logic advancements. *European Journal of Management Studies*, 26(1), 3–16.
<https://doi.org/10.1108/ejms-01-2021-0004>
- González-Val, R., & Pueyo, F. (2019). Natural resources, economic growth and geography. *Economic Modelling*, 83(July 2018), 150–159.
<https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.02.007>
- Green, J., & Jennings, W. (2017). Party Reputations and Policy Priorities : How Issue Ownership Shapes Executive and Legislative Agendas. *British Journal of Political Science*, 49(2), 443–466.
<https://doi.org/10.1017/S0007123416000636>

- Greene, W. H. (2003). *Econometric Analysis - Fifth Edition* (Fifth Edit). Pearson Education, Inc.
- Growe, A., & Jemming, M. (2019). Regional Councils in a Global Context: Council Types and Council Elements. *Urban Science*, 3(1), 22. <https://doi.org/10.3390/urbansci3010022>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics - 5th ed* (Fifth Edit). McGraw-Hill/Irwin.
- Guluma, T. F. (2021). The impact of corporate governance measures on firm performance: the influences of managerial overconfidence. *Future Business Journal*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00093-6>
- Gutierrez, L. G., Cormier, D., & Magnan, M. (2021). General propensity for inter-organizational environmental disclosure imitation: an international perspective. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 28(4), 360–375. <https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1833257>
- Haddad, A., El Ammari, A., & Bouri, A. (2021). Impact of Audit Committee Quality on the Financial Performance of Conventional and Islamic Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(4), 1–24. <https://doi.org/10.3390/jrfm14040176>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., Black, W. C., & Anderson, R. E. (2019). *MULTIVARIATE DATA ANALYSIS Multivariate Data Analysis* (Eighth Edi). Annabel Ainscow.
- Halme, M., & Huse, M. (1997). The influence of corporate governance, industry and country factors on environmental reporting. *Scandinavian Journal of Management*, 13(2), 137–157. [https://doi.org/10.1016/S0956-5221\(97\)00002-X](https://doi.org/10.1016/S0956-5221(97)00002-X)
- Hansen, J. A. (2023). Does performance information receive political attention? *Public Administration Review*, 83(4), 763–774. <https://doi.org/10.1111/puar.13646>
- Hart, P. F., & Rodgers, W. (2023). Competition, competitiveness, and competitive advantage in higher education institutions: a systematic literature review. *Studies in Higher Education*, 49(11), 2153–2177. <https://doi.org/10.1080/03075079.2023.2293926>

- Hasibuan, D. H., & Khomsiyah. (2020). The effect of legislative oversight , budget transparency , and internal auditor quality on local government performance with total asset moderation: a case study in indonesia. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 24(6), 1–13.
- Hassan, A. F., & Basiruddin, R. (2023). The moderating effect of environmental uncertainty on the relationship between budgetary participation and budget quality. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2023-0162>
- Hay, D. C., & Cordery, C. J. (2021). The future of auditing research in the public sector. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(2), 234–242. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2020-0164>
- Heinelt, H., Hlepas, N., Kuhlmann, S., & Swianiewicz, P. (2018). Local Government Systems: Grasping the Institutional Environment of Mayors. In *Governance and Public Management*. https://doi.org/10.1007/978-3-319-67410-0_2
- Henisz, W. J., & Delios, A. (2001). Uncertainty, imitation, and plant location: Japanese multinational corporations, 1990-1996. *Administrative Science Quarterly*, 46(3), 443–475. <https://doi.org/10.2307/3094871>
- Hermundsdottir, F., & Aspelund, A. (2020). Sustainability innovations and firm competitiveness: A review. *Journal of Cleaner Production*, xxxx, 124715. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124715>
- Hermuningsih, S., Kusuma, H., & Cahyarifida, R. A. (2020). Corporate Governance and Firm Performance: An Empirical Study from Indonesian Manufacturing Firms. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(11), 827–834. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.827>
- Hornung, J., & Trein, P. (2025). Policy advisory system quality under multilevel governance: the German COVID-19 experience. *Policy and Society*, 44(3), 335–349.
- Hue, T. H. H., & Tung-Wen Sun, M. (2022). Democratic Governance: Examining the Influence of Citizen Participation on Local Government Performance in Vietnam. *International Journal of Public Administration*, 45(1), 4–22. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1939713>
- Hünermund, P., & Louw, B. (2025). On the Nuisance of Control Variables in Causal Regression Analysis. *Organizational Research Methods*, 28(1), 138–151. <https://doi.org/10.1177/10944281231219274>

- Huque, A. S., & Jongruck, P. (2018). The challenge of assessing governance in Asian states: Hong Kong in the Worldwide Governance Indicators ranking. *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 276–291. <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1485587>
- Hyndman, N., & McKillop, D. (2019). Accounting for the Public Sector at a Time of Crisis. *Abacus*, 55(3), 437–451. <https://doi.org/10.1111/abac.12170>
- Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29–59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Janse van Rensburg, J. O., & Coetzee, P. (2016). Internal audit public sector capability: A case study. *Journal of Public Affairs*, 16(2), 181–191. <https://doi.org/10.1002/pa.1574>
- Jesuka, D., & Peixoto, F. M. (2022). Corporate governance and firm performance: does sovereign rating matter? *Corporate Governance (Bingley)*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.1108/CG-08-2020-0369>
- Ji, X. D., Ahmed, K., & Lu, W. (2015). The impact of corporate governance and ownership structure reforms on earnings quality in China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 23(2), 169–198. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-05-2014-0035>
- Jiang, J. (2018). Making Bureaucracy Work: Patronage Networks, Performance Incentives, and Economic Development in China. *American Journal of Political Science*, 62(4), 982–999. <https://doi.org/10.1111/ajps.12394>
- Jiang, X., Xu, J., Cheng, F., Zuo, X., Wang, D., Yin, W., Cui, L., Xie, F., Wang, L., Artem, B., Tian, G., & Kang, Z. (2025). Does population density impact maternal and child health? Mediating effects of the Universal Health Coverage Service Coverage Index. *BMC Public Health*, 25(2002), 1–13.
- Jones, M. J., & Mellett, H. J. (2007). Determinants of changes in accounting practices: Accounting and the UK Health Service. *Critical Perspectives on Accounting*, 18(1), 91–121. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2005.05.003>
- Joseph, C., Pilcher, R., & Taplin, R. (2014). Malaysian local government internet sustainability reporting. *Pacific Accounting Review*, 26(1–2), 75–93. <https://doi.org/10.1108/PAR-07-2013-0071>

- Kang, H., & Shen, J. (2016). International performance appraisal practices and approaches of South Korean MNEs in China. *International Journal of Human Resource Management*, 27(3), 291–310.
<https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1039562>
- Karch, A. (2007). Emerging Issues and Future Directions in State Policy Diffusion Research. *State Politics and Policy Quarterly*, 7(1), 54–80.
<https://doi.org/10.1215/00166928-9263118>
- Karikari Appiah, M., Amaning, N., Tettevi, P. K., Frimpong Owusu, D., & Opoku Ware, E. (2023). Internal audit effectiveness as a boon to public procurement performance: a multi mediation model. *Cogent Economics and Finance*, 11(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2164968>
- Karo, E. (2010). Improving governance of science and innovation policies, or just bad policy emulation; the case of the estonian R&D system. *Halduskultuur*, 11(2), 174–201.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The worldwide governance indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kaye-Essien, C. W. (2020). Performance reporting delay in local government: a global south view. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 477–496. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0177>
- Keerasuntonpong, P., & Cordery, C. (2018). How might normative and mimetic pressures improve local government service performance reporting? *Accounting and Finance*, 58(4), 1169–1200.
<https://doi.org/10.1111/acfi.12252>
- Keerasuntonpong, P., Dunstan, K., & Khanna, B. (2017). Factors influencing disclosures of statements of service performance of New Zealand local authorities. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 304–328.
<https://doi.org/10.1108/PAR-02-2014-0005>
- Kelley, J. G., & Simmons, B. A. (2021). Governance by other Means: Rankings as regulatory systems. *International Theory*, 13(1), 169–178.
<https://doi.org/10.1017/S1752971920000457>
- Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1). <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>

- Khalid, A. M., Sharma, S., & Dubey, A. K. (2021). Concerns of developing countries and the sustainable development goals: case for India. *International Journal of Sustainable Development and World Ecology*, 28(4), 303–315. <https://doi.org/10.1080/13504509.2020.1795744>
- Kim, J. (2021). Extending upper echelon theory to top managers' characteristics, management practice, and quality of public service in local government. *Local Government Studies*, 00(00), 1–22. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1882427>
- Kılıç, A., Akdamar, E., Göğebakan, M., & Bastug, S. (2023). Effect of Logistics Performance Index on Human Development Index: An Application to Logistics Sector. *Transactions on Maritime Science*, 12(1), 1–21. <https://doi.org/10.7225/TOMS.V12.N01.W06>
- Klein, N., Ramos, T. B., & Deutz, P. (2022). Factors and strategies for circularity implementation in the public sector: An organisational change management approach for sustainability. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(3), 509–523. <https://doi.org/10.1002/csr.2215>
- Kmak, M. (2020). The Municipal Council in the Polish Local Government Structure: Selected Aspects. *Rocznik Administracji Publicznej*, 6(6), 128–143. <https://doi.org/10.4467/24497800rap.20.007.12901>
- Knauer, T., Sommer, F., & Wöhrmann, A. (2021). What Is a Good Rank? The Effort and Performance Effects of Adding Performance Category Labels to Relative Performance Information*. *Contemporary Accounting Research*, 38(2), 839–866. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12657>
- Koh, J., Huh, T., & Ye, M. (2021). Developing an index of sustainable development goals for local governments: the case of Gyeonggi province in Korea. *Ecosystem Health and Sustainability*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/20964129.2021.1980437>
- Kondra, A. Z., & Hinings, C. R. (1998). Organizational diversity and change in institutional theory. *Organization Studies*, 19(5), 743–767. <https://doi.org/10.1177/017084069801900502>
- Korac, S., Saliterer, I., Sicilia, M., & Steccolini, I. (2020). Contrasting and explaining purposeful and legitimizing uses of performance information: a mayor's perspective. *Public Management Review*, 22(4), 553–577. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1599059>

- Kotb, A., Elbardan, H., & Halabi, H. (2020). Mapping of internal audit research: a post-Enron structured literature review. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 33(8), 1969–1996. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-07-2018-3581>
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology : Methods & Techniques*. New Age International Limited.
- Krah, R., & Mertens, G. (2020). Democracy and financial transparency of local governments in Sub-Saharan Africa. *Meditari Accountancy Research*, 28(4), 681–699. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-08-2019-0539>
- Krichene, A., & Baklouti, E. (2020). Internal audit quality: perceptions of Tunisian internal auditors an explanatory research. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(1), 28–54. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0010>
- Krogh, A. H., & Triantafillou, P. (2024). Developing New Public Governance as a public management reform model. *Public Management Review*, 26(10), 3040–3056. <https://doi.org/10.1080/14719037.2024.2313539>
- Krstić, M., & Gawel, A. (2023). Improving the Competitiveness – Determinants and Solutions for Quality of Local Business Conditions. *International Journal for Quality Research*, 17(2), 529–554. <https://doi.org/10.24874/IJQR17.02-15>
- Kurunmaki, L., Lapsley, I., & Melia, K. (2003). Accountingization v. legitimation: A comparative study of the use of accounting information in intensive care. *Management Accounting Research*, 14(2), 112–139. [https://doi.org/10.1016/S1044-5005\(03\)00019-2](https://doi.org/10.1016/S1044-5005(03)00019-2)
- Kusuma, H., Muafi, M., Aji, H. M., & Pamungkas, S. (2020). Information and Communication Technology Adoption in Small- and Medium-Sized Enterprises: Demographic Characteristics. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 969–980. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.969>
- Kuznetsova, M. V., & Ivashina, N. S. (2020). Methodological approaches to the inclusion of environmental factors in human development index. In *Smart Innovation, Systems and Technologies* (Vol. 138, pp. 232–242). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15577-3_23
- Kwon, H. W. (2020). Performance Appraisal Politics in the Public Sector: The Effects of Political Skill and Social Similarity on Performance Rating. *Public Personnel Management*, 49(2), 239–261. <https://doi.org/10.1177/0091026019859906>

- Labianca, G., Fairbank, J. F., Erie, P. S., Gioia, D. A., & Umphress, E. E. (2001). Emulation in Academia Emulation in academia: Balancing structure and identity. *Organization Science*, 12(3), 312–330.
- Ladd, H. F. (1992). Population Growth, Density and the Costs of Providing Public Services. *Urban Studies*, 29(2), 273–295.
- Lameck, W. U. (2023). Political decentralisation and political-administrative relation in the local councils in Tanzania. *Public Administration and Policy*, 26(3), 335–344. <https://doi.org/10.1108/PAP-07-2022-0077>
- Lant, T. K. (2017). Organizational Cognition and Interpretation. In *The Blackwell Companion to Organizations* (pp. 344–362). <https://doi.org/10.1111/b.9780631216940.2005.00044.x>
- Larcker, D. F., Richardson, S. A., & Tuna, I. (2007). Corporate Governance, Accounting Outcomes, and Organizational Performance. *The Accounting Review*, 82(4), 963–1008.
- Larhsoukanh, S., & Wang, C. (2019). Determining optimal meeting frequency: a bargaining solution to improve a poorly functioning PPP industry under budget constraints. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 32(1), 2568–2583. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1651666>
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Latif, B., Mahmood, Z., San, O. T., Said, R. M., & Bakhsh, A. (2020). Coercive, normative and mimetic pressures as drivers of environmental management accounting adoption. *Sustainability (Switzerland)*, 12(11). <https://doi.org/10.3390/su12114506>
- Le, S., & Kroll, M. (2017). CEO international experience: Effects on strategic change and firm performance. *Journal of International Business Studies*, 48(5), 573–595. <https://doi.org/10.1057/s41267-017-0080-1>
- Lee, H., Park, J., & Butler, J. S. (2023). Forms of government and municipal financial performance. *Public Money and Management*, 43(4), 311–320. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1923168>
- Leiser, S., & Mills, S. (2019). Local Government Fiscal Health: Comparing Self-Assessments to Conventional Measures. *Public Budgeting and Finance*, 39(3), 75–96. <https://doi.org/10.1111/pbaf.12226>

- Lele, G. (2019). Asymmetric Decentralization and the Problem of Governance: The Case of Indonesia. *Asian Politics and Policy*, 11(4), 544–565. <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>
- Lelly, K. C., & Afiah, N. N. (2017). Does quality of financial statement affected by internal control system and internal audit? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(2), 568–573.
- Lenz, R., Sarens, G., & Jeppesen, K. K. (2018). in Search of a Measure of Effectiveness for Internal Audit Functions: an Institutional Perspective. *Edpacs*, 58(2), 1–36. <https://doi.org/10.1080/07366981.2018.1511324>
- Lesch, M., & Millar, H. (2022). Crisis, uncertainty and urgency: processes of learning and emulation in tax policy making. *West European Politics*, 45(4), 930–952. <https://doi.org/10.1080/01402382.2021.1949681>
- Lewis, B. D., Nguyen, H. T. M., & Hendrawan, A. (2020). Political accountability and public service delivery in decentralized Indonesia: Incumbency advantage and the performance of second term mayors. *European Journal of Political Economy*, 64. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101910>
- Li, G., Guo, F., & Di, D. (2021). Regional competition, environmental decentralization, and target selection of local governments. *Science of the Total Environment*, 755. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142536>
- Li, G., Zhou, P., & Wu, R. (2025). Local government competition , fiscal decentralization , and environmental governance efficiency. *Finance Research Letters*, 86(PC), 108537. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108537>
- Li, S., Lv, Y., Fan, T., Zhang, Z., Feng, G., & Jing, C. (2023). Multidimensional performance assessment, government competition and ecological welfare performance. *PLoS ONE*, 18(8), 1–23. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0289837>
- Libman, A. (2012). Democracy, size of bureaucracy, and economic growth: Evidence from Russian regions. *Empirical Economics*, 43(3), 1321–1352. <https://doi.org/10.1007/s00181-011-0525-5>
- Lind, D. A., Marchal, W. G., & Wathen, S. A. (2012). *Statistical techniques in business & economics -15th ed.* (Fifteenth). McGraw-Hill/Irwin.
- Lindblad, S., & Lindblad, R. F. (2009). Transnational governance of higher education: On globalization and international university ranking lists. *Teachers College Record*, 111(14), 180–202. <https://doi.org/10.1177/016146810911101411>

- Liu, C., Li, Q., & Lin, Y. E. (2023). Corporate transparency and firm value: Does market competition play an external governance role? *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 19(1), 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2022.100334>
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control : Evidence from China ' s provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Liu, L., Yang, Z., & Song, S. (2021). Does ranking stimulate government performance? Evidence from China's key environmental protection cities. *Social Indicators Research*, 158(2), 699–725. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02722-7>
- Loh, C. M., Unda, L., Gong, Z., & Benati, K. (2021). Board effectiveness and school performance: a study of Australian independent schools. *School Effectiveness and School Improvement*, 32(4), 650–673. <https://doi.org/10.1080/09243453.2021.1939734>
- Lohrey, R. C., Horner, C. A., Williams, B. R., & Wilmshurst, T. D. (2019). Coming to grips with corporate governance in local government. *Australian Journal of Public Administration*, 78(4), 596–612. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12395>
- Lowe, A., & Doolin, B. (1999). *Lowe and Doolin(1999)MAR casemix accounting in NZ.pdf*. May, 181–201.
- Lu, J., Li, B., Li, H., & Zhang, X. (2020). Characteristics, exchange experience, and environmental efficiency of mayors: Evidence from 273 prefecture-level cities in China. *Journal of Environmental Management*, 255(November 2019). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109916>
- Lu, S., & Wang, H. (2020). Local economic structure, regional competition and the formation of industrial land price in China: Combining evidence from process tracing with quantitative results. *Land Use Policy*, 97(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104704>
- Lu, X., & White, H. (2014). Robustness checks and robustness tests in applied economics ☆. *Journal of Econometrics*, 178, 194–206. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2013.08.016>
- Luo, W., Zheng, W., & Long, Y. (2023). Relational Work and its Pitfalls: Nonprofits' Participation in Government-Sponsored Voluntary Accreditation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 3(1), 63–79. <https://doi.org/10.1093/jopart/muac010>

- Lyytikäinen, T. (2012). Tax competition among local governments : Evidence from a property tax reform in Finland. *Journal of Public Economics*, 96(7–8), 584–595. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.03.002>
- Madanoglu, M., & Karadag, E. (2016). International Journal of Contemporary Hospitality Management Corporate governance provisions and firm financial performance: the moderating effect of deviation from optimal franchising. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 28(8), 1–36. <https://doi.org/doi.org/10.1108/IJCHM-09-2014-0470>
- Mahmudah, H., & Riyanto, B. L. (2017). Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 33. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i1.74>
- Majeed, M. T., & Ozturk, I. (2020). Environmental degradation and population health outcomes: a global panel data analysis. *Environmental Science and Pollution Research*, 27(13), 15901–15911. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-08167-8>
- Maksimovska, A., & Stojkov, A. (2019). Composite Indicator of Social Responsiveness of Local Governments: An Empirical Mapping of the Networked Community Governance Paradigm. *Social Indicators Research*, 144(2), 669–706. <https://doi.org/10.1007/s11205-019-02063-6>
- Mallick, H. (2021). Do governance quality and ICT infrastructure influence the tax revenue mobilisation ? An empirical analysis for India. *Economic Change and Restructuring*, 54, 371–415. <https://doi.org/10.1007/s10644-020-09282-9>
- Mani, B. G. (2014). Determinants of a City Manager ' s Tenure in Office : The Person , Job , Municipality , and Election System. *SAGE Open*, 4(1–16). <https://doi.org/10.1177/2158244014522069>
- Mathuva, D. M. (2018). An empirical analysis of the characteristics of savings and credit cooperatives participating in the reporting excellence awards in Kenya. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 8(2), 223–243. <https://doi.org/10.1108/JAEE-03-2016-0023>
- Mattei, G., Grossi, G., & M, J. G. A. (2026). *Exploring past , present and future trends in public sector auditing research : a literature review* (Vol. 29, Issue 7). <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2020-1008>
- Maurel, C., Carassus, D., Favoreu, C., & Gardey, D. (2014). Characterization and definition of public performance: an application to local government authorities. *Gestion et Management Public*, 2/n°3(1), 23. <https://doi.org/10.3917/gmp.023.0023>

- Meho, L. I. (2020). Highly prestigious international academic awards and their impact on university rankings. *Quantitative Science Studies*, 1(2), 824–848. <https://doi.org/10.1162/qss>
- Mehrpouya, A., & Samiolo, R. (2016). Performance measurement in global governance: Ranking and the politics of variability. *Accounting, Organizations and Society*, 55, 12–31. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2016.09.001>
- Meier, K. J., & O'Toole, L. J. (2002). Public Management and Organizational Performance: The Effect of Managerial Quality. *Journal of Policy Analysis and Management*, 21(4), 629–643. <https://doi.org/10.1002/pam.10078>
- Meirinhos, G., Bessa, M., Leal, C., & Silva, R. (2022). Municipal Rating System—A Municipality Compliance Index. *Administrative Sciences*, 12(2), 1–13. <https://doi.org/10.3390/admsci12020046>
- Meyer, D. F. (2018). Predictors of good governance and effective government management: The case of poland. *Polish Journal of Management Studies*, 18(1), 206–217. <https://doi.org/10.17512/pjms.2018.18.1.16>
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>
- Michel, A. A. (2007). Perspective on Newcomers ' Change Processes : The Management of Two Investment Banks. *Administrative Science Quarterly*, 52, 507–557.
- Milán-García, J., Rueda-López, N., & De Pablo-Valenciano, J. (2022). Local government efficiency: reviewing determinants and setting new trends. *International Transactions in Operational Research*, 29(5), 2871–2898. <https://doi.org/10.1111/itor.13032>
- Miller, P., Kurunmäki, L., & O'Leary, T. (2008). Accounting, hybrids and the management of risk. *Accounting, Organizations and Society*, 33(7–8), 942–967. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2007.02.005>
- Mir, M. Z., Chatterjee, B., & Taplin, R. (2015). Political competition and environmental reporting Evidence from New Zealand local governments. *Asian Review of Accounting*, 23(3), 232–255. <https://doi.org/doi.org/10.1108/ARA-02-2014-0027>

- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2023). Human development and decentralization The importance of public health expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 94(1), 191–219. <https://doi.org/10.1111/apce.12373>
- Mishra, J., & Attri, V. (2020). Governance, Public Service Delivery and Trust in Government. *Studies in Indian Politics*, 8(2), 186–202. <https://doi.org/10.1177/2321023020963518>
- Mistur, E., Reyes, A., Soni, A., Boukhaima, H., Newton, J., Mistur, E., Reyes, A., Soni, A., Boukhaima, H., & Mistur, E. (2023). Deciding on justice : environmental justice in city. *Local Environment*, 28(9), 1063–1081. <https://doi.org/10.1080/13549839.2023.2184783>
- Mitchell, J. L., & Stewart, L. S. M. (2014). Emulation, learning, or competition? Examining inter-county anti-smoking laws in the state of missouri. *Public Administration Quarterly*, 38(3), 317–346. https://proxy.bc.edu/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.proquest.com%2Fdocview%2F1556053257%3Faccountid%3D9673%0Ahttp://bc-primo.hosted.exlibrisgroup.com/openurl/BCL/services_page?url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&genre=article&sid
- Moldogaziev, T. T., & Liu, C. (2021). Public sector corruption and perceived government performance in transition. *Governance*, 34(2), 475–504. <https://doi.org/10.1111/gove.12519>
- Moreno-Enguix, M. R., Gras-Gil, E., & Henández-Fernández, J. (2019). Relation between internet financial information disclosure and internal control in Spanish local governments. *Aslib Journal of Information Management*, 71(2), 176–194. <https://doi.org/10.1108/AJIM-06-2018-0150>
- Mudzusi, T. N., Munzhedzi, P. H., & Mahole, E. (2024). Governance challenges in the provision of municipal services: in the Vhembe District Municipality. *Africa's Public Service Delivery and Performance Review*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v12i1.749>
- Muhtar, M. (2017). The impact of financial accountability , public monitoring , and local head tenure on local government performance. *Sebelas Maret Business Review*, 7(1), 1–9.
- Munir, R., & Baird, K. (2016). Influence of institutional pressures on performance measurement systems. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 12(2), 106–128. <https://doi.org/10.1108/JAOC-09-2014-0051>

- Munzhedzi, P. H. (2021). An evaluation of the application of the new public management principles in the South African municipalities. *Journal of Public Affairs*, 21(1). <https://doi.org/10.1002/pa.2132>
- Muraoka, T., & Avellaneda, C. N. (2021). Do the networks of inter-municipal cooperation enhance local government performance? *Local Government Studies*, 47(4), 616–636. <https://doi.org/10.1080/03003930.2020.1869545>
- Muringa, T., & Shava, E. (2024). Examining the efficacy of core competencies of municipal leaders in transforming local government in South Africa. *International Journal of Public Leadership*, 20(3/4), 330–334. <https://doi.org/10.1108/IJPL-04-2024-0032>
- Nam, H. J., & Ryu, D. (2023). FDI and human development: The role of governance, ODA, and national competitiveness. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 85(March), 101769. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2023.101769>
- Narbón-Perpiñá, I., & De Witte, K. (2018). Local governments' efficiency: a systematic literature review—part II. *International Transactions in Operational Research*, 25(4), 1107–1136. <https://doi.org/10.1111/itor.12389>
- Narzetti, D. A., & Marques, R. C. (2021). Isomorphic mimicry and the effectiveness of water-sector reforms in Brazil. *Utilities Policy*, 70(April), 101217. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2021.101217>
- Nasi, G., Choi, H., Cucciniello, M., & Christensen, R. K. (2023). A systematic literature review of city competitiveness: A 30-year assessment and future agenda for public administration. *Public Management Review*, 25(8), 1562–1586. <https://doi.org/10.1080/14719037.2022.2029550>
- Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). *The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success*. Prentice-Hall Financial Times.
- Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G., & Galanis, S. (2022a). Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(2), 189–209. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0015>
- Nerantzidis, M., Pazarskis, M., Drogalas, G., & Galanis, S. (2022b). Internal auditing in the public sector: a systematic literature review and future research agenda. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 34(2), 189–209. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-02-2020-0015>

- Neverauskienė, L. O., & Danilevičienė, I. (2020). Assessment of the factors influencing competitiveness fostering the country ' s sustainability. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 1909–1924. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1763821>
- Nielsen, B. B., & Raswant, A. (2018). The selection, use, and reporting of control variables in international business research: A review and recommendations. *Journal of World Business*, 53(6), 958–968. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2018.05.003>
- Nugrahani, T. S., Kusuma, H., Arifin, J., & Muhammad, R. (2023). International Journal of Sustainable Development and Planning Determinants of Sustainability Report Quality in Indonesian Public Companies : An Isomorphism Theory Approach. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(12), 3909–3921.
- Nyadera, I. N. (2020). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (Issue February). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5>
- Nzama, L., & Sebola, M. P. (2021). The Effect of Mayor's Quality and Municipal Size on Financial Condition in Metropolitan Municipalities: A Case of South Africa. *The 6th Annual International Conference on Public Administration and Development Alternatives, October*, 334–353.
- Oates, G. (2016). *Is voluntary disclosure of environmental performance associated with actual environmental performance? Evidence from Victorian local governments , Australia*. 6563(June). <https://doi.org/10.1080/14486563.2015.1082156>
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments : Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 279–296.
- OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) principles of corporate governance. (1999).
- Olvera, J. G., & Avellaneda, C. N. (2019). Subnational Government Performance: Testing Multiple Dimensions of Governors' Experience. *Public Administration Review*, 79(3), 383–398. <https://doi.org/10.1111/puar.13035>
- Omri, A., & Ben Mabrouk, N. (2020). Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of the pack or falling behind? *Environmental Impact Assessment Review*, 83, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106388>

- Omstedt, M. (2020). Reading risk: The practices, limits and politics of municipal bond rating. *Environment and Planning A*, 52(3), 611–631. <https://doi.org/10.1177/0308518X19880903>
- Otjes, S., Nagtzaam, M., & van Well, R. (2022). Scrutiny and policymaking in local councils: how parties use council tools. *Local Government Studies*, 00(00), 1–25. <https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2123799>
- Özdamar, Ö., Yavuzaslan, K., Giovanis, E., & Bahçeci, C. (2022). The effect of the Regional Competitiveness Operational Programme on employment: an empirical assessment for the Central Anatolia region of Turkey. *Eurasian Geography and Economics*, 63(5), 571–598. <https://doi.org/10.1080/15387216.2021.1939085>
- Ozdogan, S., Yildizbasi, A., & Rouyendegh, B. D. (2020). Performance evaluation of municipal services with fuzzy multi-criteria decision making approaches: a case study from Turkey. *SN Applied Sciences*, 2(6). <https://doi.org/10.1007/s42452-020-2843-8>
- Palmer, A. J. (1993). Performance measurement in local government. *Public Money and Management*, 13(4), 31–36. <https://doi.org/10.1080/09540969309387786>
- Panday, P. K., & Chowdhury, S. (2020). Responsiveness of local government officials: insights and lessons from participatory planning and budgeting. *Asian Pacific Journal of Public Administration*, 42(2), 132–151. <https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1742753>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Paula, F. de O., & Silva, J. F. da. (2021). R&D spending and patents: levers of national development. *Innovation and Management Review*, 18(2), 175–191. <https://doi.org/10.1108/INMR-11-2019-0142>
- Peiró-Palomino, J., Picazo-Tadeo, A. J., & Rios, V. (2020). Well-being in European regions: Does government quality matter? *Papers in Regional Science*, 99(3), 555–582. <https://doi.org/10.1111/pirs.12494>
- Petrovsky, N., & Avellaneda, C. N. (2014). Mayoral Public Sector Work Experience and Tax Collection Performance in Colombian Local Governments. *International Public Management Journal*, 17(2), 145–173. <https://doi.org/10.1080/10967494.2014.905406>

- Pilcher, R. (2011). Implementing IFRS in local Government: Institutional Isomorphism as NPM goes mad? *Local Government Studies*, 37(4), 367–389. <https://doi.org/10.1080/03003930.2011.588702>
- Piña, G., & Avellaneda, C. (2019). Central Government Strategies to Promote Local Governments' Transparency: Guidance or Enforcement? *Public Performance and Management Review*, 42(2), 357–382. <https://doi.org/10.1080/15309576.2018.1462215>
- Piña, G., & Avellaneda, C. N. (2018). Municipal isomorphism: testing the effects of vertical and horizontal collaboration. *Public Management Review*, 20(4), 445–468. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1412116>
- Pintea, M.-O., & Achim, M.-V. (2010). Performance - an Evolving Concept. *Annals of University of Craiova - Economic Sciences Series*, 2(38).
- Pintrich, P. R., Conley, A. M. M., & Kempler, T. M. (2003). Current issues in achievement goal theory and research. *International Journal of Educational Research*, 39(4–5), 319–337. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2004.06.002>
- Pique, R. (2019). Higher pay, worse outcomes? The impact of mayoral wages on local government quality in Peru. *Journal of Public Economics*, 173, 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.01.005>
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101474. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474>
- Plaček, M., Nemec, J., Ochraňa, F., Půček, M., Křápek, M., & Špaček, D. (2021). Do performance management schemes deliver results in the public sector? Observations from the Czech Republic. In *Public Money and Management* (Vol. 41, Issue 8, pp. 636–645). <https://doi.org/10.1080/09540962.2020.1732053>
- Podgorniak-Krzykacz, A. (2021). The relationship between the professional, social, and political experience and leadership style of mayors and organisational culture in local government. Empirical evidence from Poland. *PLoS ONE*, 16(12 December), 1–24. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260647>
- Postula, M., Irodenko, O., & Dubel, P. (2020). Internal Audit as a Tool to Improve the Efficiency of Public Service. *European Research Studies Journal*, XXIII(Issue 3), 699–715. <https://doi.org/10.35808/ersj/1663>

- Power, M. (2015). How accounting begins: Object formation and the accretion of infrastructure. *Accounting, Organizations and Society*, 47, 43–55. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.10.005>
- Prakash, C., Besiou, M., Charan, P., & Gupta, S. (2020). Organization theory in humanitarian operations: a review and suggested research agenda. *Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management*, 10(2), 261–284. <https://doi.org/10.1108/JHLSCM-08-2019-0051>
- Prawoto, N., & Basuki, A. T. (2016). Model Analisis Komposisi Pengeluaran Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Mendukung Good Governance : Studi Empiris Kabupaten Kota di Indonesia Tahun 2011-2014. *Buletin Ekonomi*, 14(2), 177–192.
- Purcell, A. J., Francis, R. D., & Clark, C. (2014). Audit committee effectiveness in victorian local government. *Australian Accounting Review*, 24(4), 339–369. <https://doi.org/10.1111/auar.12070>
- Qian, W., Tilt, C., & Belal, A. (2021). Social and environmental accounting in developing countries: contextual challenges and insights. *Accounting, Auditing & Accountability*, 34(5), 1021–1050.
- Rahaman, A., Neu, D., & Everett, J. (2010). Accounting for social-purpose alliances: Confronting the HIV/AIDS pandemic in Africa. *Contemporary Accounting Research*, 27(4), 1093–1129. <https://doi.org/10.1111/j.1911-3846.2010.01040.x>
- Rahman, A. (2022). Do Government Characteristics Affect E-Government Maturity. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 51–60. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i1.20543>
- Rajnoha, R., & Lesnikova, P. (2022). Sustainable Competitiveness: How Does Global Competitiveness Index Relate to Economic Performance Accompanied by the Sustainable Development? *Journal of Competitiveness*, 14(1), 136–154. <https://doi.org/10.7441/joc.2022.01.08>
- Ramasamy, R. (2020). Governance and administration in Sri Lanka: trends, tensions, and prospects. *Public Administration and Policy*, 23(2), 187–198. <https://doi.org/10.1108/PAP-03-2020-0020>
- Ramírez, Y., Tejada, Á., & Sánchez, M. P. (2020). Determinants of online intellectual capital disclosure by Spanish local governments. In *Journal of Intellectual Capital* (Issue 2011). <https://doi.org/10.1108/JIC-03-2020-0086>

- Rana, T., Ahmed, Z. U., Narayan, A., & Zheng, M. (2022). An institutional theory perspective on public sector reform and service performance reporting by New Zealand universities. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(3), 461–484. <https://doi.org/10.1108/JAOC-08-2020-0112>
- Rangoni, B., & Thatcher, M. (2023). National de-delegation in multi-level settings: Independent regulatory agencies in Europe. *Governance*, 36(1), 81–103. <https://doi.org/10.1111/gove.12722>
- Republik Indonesia. 1997. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.
- Republik Indonesia. 2008. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. 2014. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. 2014. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).
- Republik Indonesia. (2015). Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perangkat Daerah.

- Republik Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. (2015.) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Riahi, O., & Khoufi, W. (2019). Understanding IFRS adoption: Consideration of the institutional dimension through a behavioral context. *Journal of Applied Accounting Research*, 20(4), 543–570. <https://doi.org/10.1108/JAAR-02-2017-0034>
- Rich, K. T., Roberts, B. L., Wall, J. M., & Zhang, J. X. (2021). Toward an understanding of year-over-year changes in municipal management discussion and analysis disclosures. *Advances in Accounting*, 54(October 2019), 100548. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100548>
- Rigg, C., & O'Mahony, N. (2013). Frustrations in Collaborative Working: Insights from institutional theory. *Public Management Review*, 15(1), 83–108. <https://doi.org/10.1080/14719037.2012.686231>
- Rindova, V. P., Martins, L. L., Srinivas, S. B., & Chandler, D. (2018). The Good, the Bad, and the Ugly of Organizational Rankings: A Multidisciplinary Review of the Literature and Directions for Future Research. *Journal of Management*, 44(6), 2175–2208. <https://doi.org/10.1177/0149206317741962>
- Rivenbark, W. C., Fasiello, R., & Adamo, S. (2019). Exploring Performance Management in Italian Local Government: The Necessity of Outcome Measures and Citizen Participation. *American Review of Public Administration*, 49(5), 545–553. <https://doi.org/10.1177/0275074018775125>
- Rochmatullah, M. R., Probohudono, A. N., Rahmawati, R., Paramita, R. W. D., & Badriyah, N. (2023). organizational excellence : Evidence from Indonesia ” Local government competitiveness analysis using the perspective of organizational excellence : Evidence from Indonesia. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 356–370. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.35](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.35)

- Rodríguez-pose, A., & Tselios, V. (2019). Well-being , Political Decentralisation and Governance Quality in Europe Well-being , Political Decentralisation and Governance Quality in Europe. *Journal of Human Development and Capabilities*, 20(1), 69–93. <https://doi.org/10.1080/19452829.2018.1563773>
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcaide Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 31(8), 2135–2164. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2016-2754>
- Rojek, K. (2023). *Factors affecting the international competitiveness of polish economy system in 2004-2019*. 33(2), 483–502. <https://doi.org/10.1108/CR-05-2021-0079>
- Rosa, C. P., Morote, R. P., & Prowle, M. J. (2014). Developing performance audit in Spanish local government: an empirical study of a way forward. *Public Money and Management*, 34(3), 189–196. <https://doi.org/10.1080/09540962.2014.908009>
- Rozario, A. M., & Issa, H. (2020). Risk-based data analytics in the government sector: A case study for a U.S. county. *Government Information Quarterly*, 37(2), 101457. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101457>
- Sabina, D., Kamil, F., & Grażyna, W. (2021). Formal And Non-Formal Education And Training As An Instrument Fostering Innovation And Competitiveness In EU. *Journal of Competitiveness*, 12(3), 82–98. <https://doi.org/10.7441/joc.2020.03.05>
- Sagie, A., & Elizur, D. (1999). Achievement motive and entrepreneurial orientation: A structural analysis. *Journal of Organizational Behavior*, 20(3), 375–387. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1379\(199905\)20:3<375](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1379(199905)20:3<375)
- Saman, W. S. W. M. (2014). Legal and organisational issues in courtroom technology implementation and institutionalization. *Business Technologies in Contemporary Organizations: Adoption, Assimilation, and Institutionalization*, April, 155–176. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6623-8.ch007>
- Santolini, R. (2020). Spatial effects on local government efficiency. *Papers in Regional Science*, 99(1), 183–200. <https://doi.org/10.1111/pirs.12475>
- Sarkodie, S. A., & Adams, S. (2020). Electricity access, human development index, governance and income inequality in Sub-Saharan Africa. *Energy Reports*, 6, 455–466. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.02.009>

- Sarpong, S. Y., & Bein, M. A. (2021). Effects of good governance, sustainable development and aid on quality of life: Evidence from sub-saharan Africa. *African Development Review*, 33(1), 25–37. <https://doi.org/10.1111/1467-8268.12488>
- Sauder, M., & Espeland, W. N. (2009). The discipline of rankings: Tight coupling and organizational change. *American Sociological Review*, 74(1), 63–82. <https://doi.org/10.1177/000312240907400104>
- Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). *Research methods for business students - 5th ed.* Pearson Education Limited.
- Schjoedt, L., & Bird, B. (2014). Control variables: Use, misuse and recommended use. In *Handbook of Research Methods and Applications in Entrepreneurship and Small Business* (pp. 136–155). <https://doi.org/10.4337/9780857935052.00013>
- Schmidhuber, L., & Hilgers, D. (2021). Trajectories of local open government: An empirical investigation of managerial and political perceptions. *International Public Management Journal*, 24(4), 537–561. <https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1853291>
- Schwartzman, H. B. (1989). *The Meeting: Gatherings in Organizations and Communities*. Springer Science+Business Media. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Schwarz, L. A. D., & Dalmácio, F. Z. (2021). The relationship between economic policy uncertainty and corporate leverage: Evidence from Brazil. *Finance Research Letters*, 40(June 2020), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101676>
- Scott, W. R. (1987). The Adolescence of Theory Institutional. *Administrative Science Quarterly*, 32(4), 493–511.
- Scupola, A., & Zanfei, A. (2016). Governance and innovation in public sector services: The case of the digital library. *Government Information Quarterly*, 33(2), 237–249. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.04.005>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010a). *Research Methods for Business. A Skill - Building Approach* (Fifth Edit). Jhon Wiley and Sons Ltd.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2010b). *Research Methods for Business. A Skill - Building Approach - Fifth Edition* (Fifth Edit). Jhon Wiley and Sons Ltd.

- Sharapov, D., & Ross, J. M. (2023). Whom should a leader imitate? Using rivalry-based imitation to manage strategic risk in changing environments. *Strategic Management Journal*, 44(1), 311–342. <https://doi.org/10.1002/smj.3120>
- Sharfman, M. P., & Dean, J. W. (1991). Conceptualizing and Measuring the Organizational Environment: A Multidimensional Approach. *Journal of Management*, 17(4), 681–700. <https://doi.org/10.1177/014920639101700403>
- Sheikh, S. (2019). CEO power and corporate risk: The impact of market competition and corporate governance. *Corporate Governance: An International Review*, 27(5), 358–377. <https://doi.org/10.1111/corg.12285>
- Shi, C., Guo, F., & Shi, Q. (2019). Ranking effect in air pollution governance: Evidence from Chinese cities. *Journal of Environmental Management*, 251(September). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109600>
- Shi, Z., & Tang, X. (2020). Exploring the New Era : An Empirical Analysis of China ’ s Regional HDI Development Exploring the New Era: An Empirical Analysis of China ’ s Regional HDI Development. *Emerging Markets Finance and Trade*, 9(00), 1–14. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1684255>
- Shinohara, S. (2023). Bad government performance and citizens’ perceptions: A quasi-experimental study of local fiscal crisis. *International Review of Administrative Sciences*, 89(3), 722–740. <https://doi.org/10.1177/00208523211067085>
- Shipan, C. R., & Volden, C. (2008). The mechanisms of policy diffusion. *American Journal of Political Science*, 52(4), 840–857. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2008.00346.x>
- Sibanda, M. M., Zindi, B., & Maramura, T. C. (2020). Control and accountability in supply chain management: Evidence from a South African metropolitan municipality. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1785105>
- Silva, C., Cadima, C., Castro, N., & Tennøy, A. (2021). Public transport strategy: Minimal service vs. competitor to the car. *Journal of Transport and Land Use*, 14(1), 1275–1294. <https://doi.org/10.5198/JTLU.2021.1982>
- Sinha, A., & Sengupta, T. (2019). Impact of natural resource rents on human development : What is the role of globalization in Asia Paci fi c countries ? *Resources Policy*, 63(May), 101413. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101413>

- Siwińska-Gorzelak, J., & Bukowska, G. (2026). Reelected mayors and local fiscal policy outcomes. Are incumbent mayors more competent compared to newly elected ones? *Local Government Studies*, 52(2), 292–312. <https://doi.org/10.1080/03003930.2025.2518555>
- Smith, E. M., Uman, T., & Collin, S. (2022). Exploring Board Behaviour in a Public Context - Experiences from a Swedish Municipal Corporation. *Academy of Management Proceedings*, 2022(1), 1–32. <https://doi.org/10.5465/ambpp.2022.15645abstract>
- Sofyani, H., Akbar, R., & Ferrer, R. C. (2018). 20 years of performance measurement system (PMS) implementation in Indonesian local governments: Why is their performance still poor? *Asian Journal of Business and Accounting*, 11(1), 151–184. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol11no1.6>
- Sonnentag, S., & Frese, M. (2005). Performance Concepts and Performance Theory. *Psychological Management of Individual Performance*, January, 1–25. <https://doi.org/10.1002/0470013419.ch1>
- Spreen, T. L., Afonso, W., & Gerrish, E. (2020). Can Employee Training Influence Local Fiscal Outcomes? *American Review of Public Administration*, 50(4–5), 401–414. <https://doi.org/10.1177/0275074020911717>
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Ekonisia.
- Stadelmann-Steffen, S., Oehrli, D., & Vatter, A. (2021). Do governments delay the implementation of parliamentary requests? Examining time variation in implementing legislative requests in Switzerland. *Policy Sciences*, 54(3), 663–690. <https://doi.org/10.1007/s11077-021-09432-4>
- Stanić, B. (2022). Gender (dis)balance in local government: how does it affect budget transparency? *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2081232>
- Stanica, C. M., & Aristigueta, M. (2019). Progress toward New Public Governance in Romania. *International Journal of Public Leadership*, 15(3), 189–206. <https://doi.org/10.1108/IJPL-01-2019-0004>
- Starbuck, C. (2023). *The Fundamentals of People Analytics : With Applications in R*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-28674-2>
- Still, M. C., & Strang, D. (2009). Who Does an elite organization emulate? *Administrative Science Quarterly*, 54(1), 58–89. <https://doi.org/10.2189/asqu.2009.54.1.58>

- Stone, D., Porto de Oliveira, O., & Pal, L. A. (2020). Transnational policy transfer: the circulation of ideas, power and development models. *Policy and Society*, 39(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/14494035.2019.1619325>
- Strang, D., & Still, M. C. (2004). In search of the élite: Revising a model of adaptive emulation with evidence from benchmarking teams. *Industrial and Corporate Change*, 13(2), 309–333. <https://doi.org/10.1093/icc/dth013>
- Suazo-galdames, I. C., Saracosti, M., & Chaple-gil, A. M. (2025). Scientific evidence and public policy : a systematic review of barriers and enablers for. *Frontiers in Communication*, July, 1–16. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1632305>
- Suddaby, R., & Greenwood, R. (2006). Institutional Entrepreneurship in Mature Fields: The big five Accounting Firms. *Academy of Management Journal*, 49(1), 27–48.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan : Teori & Aplikasi dengan SPSS*. CV Andi Offset.
- Summermatter, L., & Siegel, J. P. (2009). Defining Performance in Public Management : Variations over time and space. *Defining Performance in Public Management: Variations Over Time and Space*, 34. <https://www.alexandria.unisg.ch/publications/53071>
- Sun, S., & Andrews, R. (2020). The determinants of fiscal transparency in Chinese city-level governments. *Local Government Studies*, 46(1), 44–67. <https://doi.org/10.1080/03003930.2019.1608828>
- Suprianto, E., & Salim, A. (2024). The effect of local government wealth on internet financial reporting (IFR) compliance with local geographic as a moderation variable : a new institutional theory approach. *Cogent Business & Management*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382921>
- Suzuki, K., & Han, Y. (2019). Does citizen participation affect municipal performance? Electoral competition and fiscal performance in Japan. *Public Money and Management*, 39(4), 300–309. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1558554>
- Suzuki, W. Y. N., Laurini, M. P., & Nakabashi, L. (2022). Spatial heterogeneities, institutions, and income: Evidence for Brazil. *Papers in Regional Science*, 101(3), 537–571. <https://doi.org/10.1111/pirs.12666>
- Talbot, C. (1999). Public performance - towards a new model? *Public Policy and Administration*, 14(3), 15–34. <https://doi.org/10.1177/095207679901400302>

- Tang, X., Liu, Z., & Yi, H. (2018). Performance Ranking and Environmental Governance: An Empirical Study of the Mandatory Target System. *Review of Policy Research*, 35(5), 750–772. <https://doi.org/10.1111/ropr.12298>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities An Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. https://doi.org/10.1057/978-1-349-94848-2_689-1
- Thanh, T. Le, Huan, N. Q., Thi, T., & Hong, T. (2021). Cogent Business & Management Determinants for competitiveness in the context of international integration pressure : Case of small and medium enterprises in emerging economy – Vietnam Determinants for competitiveness in the context of international integr. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1893246>
- Thanh, S. D., & Canh, N. P. (2020). Local Governance : Impacts of Fiscal Decentralization on Government Size and Spending Composition in Vietnam *. *Asian Economic Journal*, 33(4), 311–340. <https://doi.org/10.1111/asej.12189>
- Thoan, L. T., & Thuy, V. T. N. (2024). Corporate Governance in Listed Firms: Does Market Competition Make a Difference? *Asian Academy of Management Journal*, 29(1), 173–203. <https://doi.org/10.21315/aamj2024.29.1.7>
- Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1983). Institutional Sources of in the Formal Change Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform. *Administrative Science Quarterly*, 28(1), 22–39.
- Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1996). The Institutionalization of Institutional Theory. *Studying Organization: Theory & Method*, 169–184. <https://doi.org/10.4135/9781446218556.n6>
- Tourinho, M., Santos, P. R., Pinto, F. T., & Camanho, A. S. (2022). Performance assessment of water services in Brazilian municipalities: An integrated view of efficiency and access. *Socio-Economic Planning Sciences*, 79(May), 101139. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101139>
- Tran, C. D. T. T., & Villano, R. A. (2019). Environmentally-adjusted efficiencies of Vietnamese higher education institutions: A multi-stage bootstrap DEA method. *International Journal of Operational Research*, 36(3), 413–439. <https://doi.org/10.1504/IJOR.2019.103126>

- Tran, C., Kortt, M., & Dollery, B. (2019). Population size or population density? An empirical examination of scale economies in South Australian local government, 2015/16. *Local Government Studies*, 45(5), 632–653. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1501364>
- Tripathi, S. (2021). How does urbanization affect the human development index? A cross-country analysis. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5(3), 1053–1080. <https://doi.org/10.1007/s41685-021-00211-w>
- Trojanek, M., Kisiala, W., & Trojanek, R. (2021). Do local governments follow their neighbours' tax strategies? Tax mimicking amongst Polish municipalities. *Land Use Policy*, 108(March), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105576>
- Trommel, W. (2020). Good Governance as Reflexive Governance: In Praise of Good Collegueship. *Public Integrity*, 22(3), 227–235. <https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1723356>
- Tsang, E. W. K. (2014). Generalizing from Research Findings : The Merits of Case Studies. *International Journal of Mangement Reviews*, 16, 369–383. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12024>
- Tulsyan, D. P., Joshipura, M., & Mishra, A. V. (2025). Does profitability explain the low-risk anomaly in India ? *Quarterly Review of Economics and Finance*, 104(May), 1–11.
- Turetken, O., Jethefer, S., & Ozkan, B. (2020). Internal audit effectiveness : operationalization and influencing factors. *Managerial Auditing Journal*, 35(2), 238–271. <https://doi.org/10.1108/MAJ-08-2018-1980>
- Ugyel, L. (2017). Relationship between politics and administration: a comparative analysis of legislation and governance in Pacific Island governmental systems. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 39(3), 153–162. <https://doi.org/10.1080/23276665.2017.1361626>
- Vadasi, C., Bekiaris, M., & Andrikopoulos, A. (2020). Corporate governance and internal audit: an institutional theory perspective. *Corporate Governance (Bingley)*, 20(1), 175–190. <https://doi.org/10.1108/CG-07-2019-0215>
- Valenty, Y. A., & Kusuma, H. (2019). Determinan kepatuhan pajak: perspektif theory of planned behavior dan teori institusional. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 1(2019), 47–56. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art5>

- Van Vree, W. (2011). Meetings: The frontline of civilization. *Sociological Review*, 59(SUPPL. 1), 241–262.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2011.01987.x>
- Vignieri, V. (2018). Performance Management in the Public Sector. *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, 1–8. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3480-1
- Villadsen, A. R., Hansen, J. R., & Mols, N. P. (2010). When do Public Managers Imitate Each Other? Mimetic Decision Making in Contracting Decisions of Danish Municipalities. *Public Organization Review*, 10(4), 357–376.
<https://doi.org/10.1007/s11115-010-0111-x>
- Villamejor-mendoza, M. F. (2020). Competitive cities : implications for better public service Competitive cities: implications for better public service. *Policy Design and Practice*, 3(4), 445–461.
<https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1832741>
- Villamejor-Mendoza, M. F. (2020). Competitive cities: implications for better public service. *Policy Design and Practice*, 3(4), 445–461.
<https://doi.org/10.1080/25741292.2020.1832741>
- Vukovic, D. B., Maiti, M., Kochetkov, D., & Bystryakov, A. (2020). How attractive are municipal bonds for the passive competitiveness: the case of immunization of municipal bonds. *Competitiveness Review*, 31(5), 793–809.
<https://doi.org/10.1108/CR-02-2020-0024>
- Vyasulu, V. (2015). ‘Good’ governance in India: How good or bad? *Millennial Asia*, 6(2), 111–127. <https://doi.org/10.1177/0976399615590512>
- Walker, R. M., & Andrews, R. (2015). Local government management and performance: A review of evidence. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 101–133.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mut038>
- Walton, G. W. (2020). Good Governance, Corruption, and Papua New Guinea’s Public Service. *The Palgrave Handbook of the Public Servant*, 1–19.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03008-7_65-1
- Wandercil, M., Calderón, A. I., & Ganga-Contreras, F. (2022). Academic Rankings: implications for university governance of Brazilian Catholic universities. *Educacao and Realidade*, 47, 1–24.
<https://doi.org/10.1590/2175-6236117631>

- Wang, P. (2024). Employee Status, Role Expectation and Performance Evaluation: Evidence from NBA Players. *British Journal of Management*, 36, 1132–1145. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12890>
- Wang, X., & Chen, C. (2022). An empirical analysis of capital assets condition ratio in local governments : the case of Florida counties. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 34(2), 330–346. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2021-0013>
- Wang, Y., Huang, X., Zhang, T., Jiang, B., & Wang, X. (2024). Heliyon Impact of fiscal decentralization and local government competition on the supply of basic public services : Based on the empirical evidence of prefecture-level cities in China. *Heliyon*, 10(4), e26511. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26511>
- Wanyonyi, E. I., Gathungu, E. W., & Bett, H. K. (2023). Drivers of competitiveness in the agricultural input sector: The case of agro-dealer businesses in Kenya. *Cogent Business and Management*, 10(2), 1–15. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218683>
- Welch, E. W. (2012). The relationship between transparent and participative government: A study of local governments in the United States. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 93–115. <https://doi.org/10.1177/0020852312437982>
- White, S., Bailey, S., & Asenova, D. (2020). Blurred lines: exploring internal auditor involvement in the local authority risk management function. *Public Money and Management*, 40(2), 102–112. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1667682>
- Wicaksono, A. K., & Sutaryo. (2017). Faktor Penentu Audit Report Lag Pemerintah Daerah di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 7(2), 209–228. <https://doi.org/10.15408/ess.v7i2.5199>
- Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*.
- Worthington, A., & Dollery, B. (2000). An Empirical Survey of Frontier Efficiency Measurement Techniques in Local Government. *Local Government Studies*, 26(2), 23–52. <https://doi.org/10.1080/03003930008433988>
- Xu, Z. (2023). Obedience to the symbol of authority: Experimental evidence on the symbolic source of legitimate authority. *European Journal of Political Economy*, 78(February 2022), 102354. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102354>

- Yang, H. H., & Chen, K. S. (2000). A performance index approach to managing service quality. *Managing Service Quality: An International Journal*, 10(5), 273–278. <https://doi.org/10.1108/09604520010345759>
- Yang, L., Dong, J., & Yang, W. (2024). Analysis of Regional Competitiveness of China ' s Cross-Border. *Sustainability*, 16(3), 1–20.
- Yang, M. G., & Kang, M. (2020). An integrated framework of mimetic pressures, quality and environmental management, and firm performances. *Production Planning and Control*, 31(9), 709–722. <https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1681533>
- Yang, Z., & Nowell, B. (2021). Network isomorphism?: A network perspective on the symbolic performance of purpose-oriented networks. *International Public Management Journal*, 24(3), 350–377. <https://doi.org/10.1080/10967494.2020.1824949>
- Yao, D., Zhu, Y., & Yu, K. (2021). Institutional inertia , local leadership turnover , and changes in the structure of fiscal expenditure. *The Journal of Chinese Sociology*, 8(13), 1–25.
- Yi, J., & Li, J. (2022). The influence of local government competition on residents ' perceptions of social fairness — Evidence from China. *Frontiers in Psychology*, 13(November), 1–14. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1066691>
- Yılmaz, C., & Özgener, Ş. (2022). Competitive intelligence and competitiveness in accommodation businesses: the role of employee training effectiveness. *Current Issues in Tourism*, 25(18), 2905–2921. <https://doi.org/10.1080/13683500.2021.2012432>
- Yong, G., & Wenhao, C. (2012). Developing a City Governance Index: Based on Surveys in Five Major Chinese Cities. *Social Indicators Research*, 109(2), 305–316. <https://doi.org/10.1007/s11205-011-9904-8>
- Yumashev, A., Kondrashev, S., Mikhaylov, A., & Slusarczyk, B. (2020). Global Indicators of Sustainable Development: Evaluation of the Influence of the Human. *Energies*, 13.
- Yun, H. J., & Opheim, C. (2010). Building on Success: the Diffusion of e-Government in the American States. *Electronic Journal of E-Government*, 8(1), 71–82.

- Zaman, A., Rousseeuw, P. J., & Orhan, M. (2001). Econometric applications of high-breakdown robust regression techniques. *Economics Letters*, 71(1), 1–8. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(00\)00404-3](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(00)00404-3)
- Zamboni, M. (2018). Legislative policy and effectiveness: A (small) contribution from legal theory. *European Journal of Risk Regulation*, 9(3), 416–430. <https://doi.org/10.1017/err.2018.32>
- Zarychta, A., Grillos, T., & Andersson, K. P. (2020). Public Sector Governance Reform and the Motivation of Street-Level Bureaucrats in Developing Countries. *Public Administration Review*, 80(1), 75–91. <https://doi.org/10.1111/puar.13132>
- Zheng, D., Chen, J., Huang, L., & Zhang, C. (2013). E-government adoption in public administration organizations: Integrating institutional theory perspective and resource-based view. *European Journal of Information Systems*, 22(2), 221–234. <https://doi.org/10.1057/ejis.2012.28>
- Zhou, G., Liu, L., & Luo, S. (2022). Sustainable development, ESG performance and company market value: Mediating effect of financial performance. *Business Strategy and the Environment*, 31(7), 3371–3387. <https://doi.org/10.1002/bse.3089>
- Zhu, X. (2014). Mandate Versus Championship: Vertical government intervention and diffusion of innovation in public services in authoritarian China. *Public Management Review*, 16(1), 117–139. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.798028>
- Zhu, X., & Meng, T. (2020). Geographical Leadership Mobility and Policy Isomorphism: Narrowing the Regional Inequality of Social Spending in China. *Policy Studies Journal*, 48(3), 806–832. <https://doi.org/10.1111/psj.12265>
- Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. *Annual Review of Sociology*. Vol. 13, 13(1987), 443–464. <https://doi.org/10.1146/annurev.so.13.080187.002303>

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Variabel DPRD yang diukur dengan proksi jumlah rapat DPRD kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	178	178	164	166	188	173	176
2	Kab. Banyumas			98		50	65	
3	Kab. Batang	90	83	91	72	69	79	84
4	Kab. Blora	11	11	14	14	33	21	23
5	Kab. Boyolali	146	146	151	72	160	165	167
6	Kab. Brebes	306	268	309	373	178	376	199
7	Kab. Cilacap							
8	Kab. Demak	94	88	105	86	104	100	98
9	Kab. Grobogan	167	124	200	114	123	239	141
10	Kab. Jepara	181	153	144	134	186	184	210
11	Kab. Karanganyar				42	45	66	86
12	Kab. Kebumen		82	99	164	282	249	249
13	Kab. Kendal			273	310	325	167	352
14	Kab. Klaten	68		63	70	91	100	52
15	Kab. Kudus			280	330	121	172	116
16	Kab. Magelang			88	95	151	188	147
17	Kab. Pati	160	184	184	173	164	193	180
18	Kab. Pekalongan	399	370	331	472	60	45	165
19	Kab. Pemalang	148	146	141	134	129	162	100
20	Kab. Purbalingga	68	55	81	78	218	218	276
21	Kab. Purworejo				117	186	130	101
22	Kab. Rembang	151	149	152	130	143	148	146
23	Kab. Semarang	121	122	25	76	111	104	94
24	Kab. Sragen	199	67	40	57	82	98	83
25	Kab. Sukoharjo						72	93
26	Kab. Tegal	75	82	79	83	64	80	73
27	Kab. Temanggung			107	131	126	143	86
28	Kab. Wonogiri	44		40	54	55	40	46
29	Kab. Wonosobo				56	85	90	94
30	Kota Magelang			95	116	153	214	212
31	Kota Pekalongan	180	178	61		110	122	108
32	Kota Salatiga			24	24	24		
33	Kota Semarang			104	154	166	139	116
34	Kota Surakarta	268	219	206	199	301	311	156
35	Kota Tegal			257	311	231	219	217

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten dan kota dan Badan Pusat Statistik

Lampiran 2 : Variabel audit internal yang diukur dengan proksi jumlah auditor internal kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	22	15	14	14	13	15	15
2	Kab. Banyumas	28	28	26	28	27	25	25
3	Kab. Batang	7	7	11	16	17	17	19
4	Kab. Blora	9	10	14	14	16	15	17
5	Kab. Boyolali	24	23	24	23	24	27	26
6	Kab. Brebes	13	13	13	13	11	11	10
7	Kab. Cilacap			17	17	18	23	23
8	Kab. Demak	12	14	10	8	8	10	23
9	Kab. Grobogan		7	7	5	11	14	14
10	Kab. Jepara	6	5	10	10	10	9	20
11	Kab. Karanganyar				17	16	23	23
12	Kab. Kebumen	6	7	7	11	17	23	25
13	Kab. Kendal		11	10	18	20	20	19
14	Kab. Klaten				29	31	44	38
15	Kab. Kudus			23	19	30	29	25
16	Kab. Magelang			7		8	15	15
17	Kab. Pati				20	20	30	30
18	Kab. Pekalongan		11	17	17	16	17	17
19	Kab. Pemalang				15	17	17	17
20	Kab. Purbalingga	20	22	24	25	25	37	34
21	Kab. Purworejo					26		
22	Kab. Rembang	8	6	15	17	19	25	29
23	Kab. Semarang	20	19	31	30	28	27	27
24	Kab. Sragen	11	14	14	14	14	16	16
25	Kab. Sukoharjo						15	22
26	Kab. Tegal				31	26	26	28
27	Kab. Temanggung	10	14	14	15	16	24	29
28	Kab. Wonogiri	20	19	17	14	17	18	17
29	Kab. Wonosobo				18	17	21	20
30	Kota Magelang	9	9	8	7	7	11	11
31	Kota Pekalongan		9	13		11	15	19
32	Kota Salatiga				9	11	16	16
33	Kota Semarang		12	15	31	30	44	43
34	Kota Surakarta				10	10	13	11
35	Kota Tegal	20	21	20	20	19	21	20

Sumber : Sekretariat DPRD

Lampiran 3 : Variabel daya saing yang diukur dengan proksi indeks daya saing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	0.6417	0.7046	0.6976	0.7512	0.7321	0.8107	0.8235
2	Kab. Banyumas	1.0876	1.5994	1.7992	1.7021	1.0968	0.8415	0.9435
3	Kab. Batang	0.6712	0.7326	0.7486	0.8107	0.7811	1.093	1.1253
4	Kab. Blora	0.7574	0.7247	0.7362	0.7708	0.7493	0.7757	0.892
5	Kab. Boyolali	0.7973	0.8773	0.9044	0.9652	1.0116	0.949	0.8514
6	Kab. Brebes	0.6526	0.7011	0.6853	0.6686	0.7172	1.033	1.3021
7	Kab. Cilacap	0.8431	0.885	0.8562	0.8644	0.9601	0.7695	0.8909
8	Kab. Demak	0.7648	0.6356	0.7423	0.7192	0.8294	0.9331	1.0603
9	Kab. Grobogan	0.6182	0.6472	0.6246	0.6854	0.7225	0.8692	0.8395
10	Kab. Jepara	0.8576	0.7781	0.7846	0.8077	0.8258	1.2622	0.9374
11	Kab. Karanganyar	1.2108	1.2764	1.1748	1.174	1.2375	0.9915	0.984
12	Kab. Kebumen	0.7562	0.764	0.7399	0.7167	0.7115	0.8924	0.9867
13	Kab. Kendal	0.8048	0.7859	0.7701	0.8307	0.8935	1.1175	1.2418
14	Kab. Klaten	1.0233	0.9078	0.9859	1.0224	1.0686	1.0507	1.0079
15	Kab. Kudus	0.9104	0.9054	0.824	0.8637	0.865	0.841	0.9962
16	Kab. Magelang	0.7763	0.9037	0.9244	0.9435	1.03	0.9178	0.9364
17	Kab. Pati	0.9609	0.9871	0.9867	1.0938	0.945	0.944	0.9416
18	Kab. Pekalongan	0.7067	0.7268	0.7284	0.7251	0.7406	0.8786	1.0341
19	Kab. Pemalang	0.6865	0.7083	0.7024	0.709	0.7229	0.9039	1.0242
20	Kab. Purbalingga	0.7509	0.7369	0.7112	0.7481	0.7206	0.8982	0.938
21	Kab. Purworejo	0.8199	0.7684	0.7725	0.7958	0.8521	0.9802	1.0157
22	Kab. Rembang	0.8106	0.699	0.6981	0.7134	0.6907	1.0288	0.9743
23	Kab. Semarang	1.3177	1.1783	1.0967	1.1666	1.0903	0.9596	1.0139
24	Kab. Sragen	0.7988	0.9152	0.8483	0.8354	0.8151	0.9634	0.9883
25	Kab. Sukoharjo	0.9705	0.9196	1.0014	0.9708	1.0063	0.8808	0.8578
26	Kab. Tegal	0.6399	0.706	0.7634	0.739	0.7257	0.8502	0.9316
27	Kab. Temanggung	0.8153	0.7437	0.7362	0.751	0.7263	1.0747	0.8931
28	Kab. Wonogiri	0.8238	0.8736	0.8342	0.8055	0.8187	0.8538	0.8429
29	Kab. Wonosobo	0.7744	0.8644	0.8037	0.8146	0.8389	0.8644	1.0678
30	Kota Magelang	1.4294	1.7464	1.8084	1.7919	1.9108	1.7627	1.1769
31	Kota Pekalongan	1.3012	1.2524	1.218	1.2757	1.325	0.8458	0.9273
32	Kota Salatiga	2.309	1.9363	1.7154	1.6437	1.6983	1.4503	0.9963
33	Kota Semarang	1.9766	1.5787	1.7798	1.6172	1.7502	1.534	1.5038
34	Kota Surakarta	2.7433	2.7436	2.6558	2.4667	2.2553	1.3354	1.0855
35	Kota Tegal	1.2564	1.1484	1.1968	1.1121	1.2097	0.9199	0.9729

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 4 : Variabel emulasi yang diukur dengan proksi indeks pelayanan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	0.7054	0.7262	0.7262	0.7442	0.7575	0.8107	0.8235
2	Kab. Banyumas	0.9292	0.9147	0.9147	0.9004	0.9278	0.8415	0.9435
3	Kab. Batang	1.0168	1.3701	1.3701	1.2005	1.0592	1.093	1.1253
4	Kab. Blora	0.7602	0.7729	0.7729	0.7656	0.8068	0.7757	0.892
5	Kab. Boyolali	0.8824	0.8534	0.8534	0.9016	0.9092	0.949	0.8514
6	Kab. Brebes	0.786	0.8646	0.8646	0.8491	0.8068	1.033	1.3021
7	Kab. Cilacap	0.8647	1.0301	1.0301	1.0623	0.8724	0.7695	0.8909
8	Kab. Demak	0.7898	0.8008	0.8008	0.8706	0.8269	0.9331	1.0603
9	Kab. Grobogan	0.8433	0.8664	0.8664	0.9809	0.8578	0.8692	0.8395
10	Kab. Jepara	1.4864	1.3737	1.3737	1.1265	1.5947	1.2622	0.9374
11	Kab. Karanganyar	1.1411	1.1098	1.1098	1.0494	1.0502	0.9915	0.984
12	Kab. Kebumen	0.9149	0.7982	0.7982	0.821	0.8244	0.8924	0.9867
13	Kab. Kendal	0.8349	0.8807	0.8807	0.8937	0.8636	1.1175	1.2418
14	Kab. Klaten	0.9287	0.9673	0.9673	0.8925	1.0965	1.0507	1.0079
15	Kab. Kudus	0.8884	0.8944	0.8944	0.9237	0.9534	0.841	0.9962
16	Kab. Magelang	0.7401	0.7464	0.7464	0.7967	0.7945	0.9178	0.9364
17	Kab. Pati	0.846	0.7917	0.7917	0.7854	0.9124	0.944	0.9416
18	Kab. Pekalongan	1.0033	0.8212	0.8212	0.727	1.0489	0.8786	1.0341
19	Kab. Pemalang	0.8661	0.8881	0.8881	0.7614	0.7987	0.9039	1.0242
20	Kab. Purbalingga	1.0074	0.7199	0.7199	0.7349	0.9603	0.8982	0.938
21	Kab. Purworejo	0.9004	0.8943	0.8943	0.9326	0.9154	0.9802	1.0157
22	Kab. Rembang	0.8208	0.8927	0.8927	0.7896	0.8091	1.0288	0.9743
23	Kab. Semarang	1.0404	1.0849	1.0849	0.9727	1.1036	0.9596	1.0139
24	Kab. Sragen	0.9852	1.0276	1.0276	0.9257	1.0323	0.9634	0.9883
25	Kab. Sukoharjo	0.9506	0.968	0.968	0.9119	1.1319	0.8808	0.8578
26	Kab. Tegal	0.8405	0.767	0.767	1.1067	0.776	0.8502	0.9316
27	Kab. Temanggung	1.1732	0.9239	0.9239	0.8278	0.994	1.0747	0.8931
28	Kab. Wonogiri	0.7688	0.8177	0.8177	0.8577	0.9086	0.8538	0.8429
29	Kab. Wonosobo	0.732	0.7154	0.7154	0.7153	0.7453	0.8644	1.0678
30	Kota Magelang	1.7075	1.6919	1.6919	1.6336	2.1894	1.7627	1.1769
31	Kota Pekalongan	1.1345	1.121	1.121	1.0528	0.9765	0.8458	0.9952
32	Kota Salatiga	1.822	1.8871	1.8871	1.5796	1.1983	1.4503	0.9273
33	Kota Semarang	1.4358	1.6196	1.6196	1.4512	1.6037	1.534	0.9963
34	Kota Surakarta	1.6063	1.5469	1.5469	1.0125	1.0437	1.3354	1.5038
35	Kota Tegal	0.9105	0.8987	0.8987	0.8154	0.8897	0.9199	1.0855

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 5 : Variabel kualitas manajerial kepala daerah yang diukur dengan proksi pengalaman menjadi kepala daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab. / Kota	2012	2013	2014	2015
1	Kab. Banjarnegara	Sutejo Slamet Utomo	Sutejo Slamet Utomo	Sutejo Slamet Utomo	Sutejo Slamet Utomo
2	Kab. Banyumas	Achmad Husen	Achmad Husen	Achmad Husen	Achmad Husen
3	Kab. Batang	Yoyok Riyo Sudibyo	Yoyok Riyo Sudibyo	Yoyok Riyo Sudibyo	Yoyok Riyo Sudibyo
4	Kab. Blora	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho
5	Kab. Boyolali	Seno Samodro	Seno Samodro	Seno Samodro	Seno Samodro
6	Kab. Brebes	Idza Priyanti	Idza Priyanti	Idza Priyanti	Idza Priyanti
7	Kab. Cilacap	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji
8	Kab. Demak	Purwono Sasmito	Dachirin Said	Dachirin Said	Natsir
9	Kab. Grobogan	Bambang Pudjiono	Bambang Pudjiono	Bambang Pudjiono	Sri Sumarni
10	Kab. Jepara	Ahmad Marzuki	Ahmad Marzuki	Ahmad Marzuki	Ahmad Marzuki
11	Kab. Karanganyar	Rina Iriani Sri Ratnaningsih	Juliyatmono	Juliyatmono	Juliyatmono
12	Kab. Kebumen	Buyar Winarso	Buyar Winarso	Buyar Winarso	Mohamad Yahya Fuad
13	Kab. Kendal	Widya Kandi Susanti	Widya Kandi Susanti	Widya Kandi Susanti	Mirna anisa
14	Kab. Klaten	Sunarna	Sunarna	Sunarna	Jaka Sawaldi
15	Kab. Kudus	Musthopa	Musthopa	Musthopa	Musthopa
16	Kab. Magelang	Singgih Sanyoto	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin
17	Kab. Pati	Haryanto	Haryanto	Haryanto	Haryanto
18	Kab. Pekalongan	Amat Antono	Amat Antono	Amat Antono	Amat Antono
19	Kab. Pemalang	Junaedi	Junaedi	Junaedi	Junaedi
20	Kab. Purbalingga	Heru Sudjtmoko	Sukento Rido M	Sukento Rido M	Tasdi
21	Kab. Purworejo	Mahsun Zain	Mahsun Zain	Mahsun Zain	Agus Bastian
22	Kab. Rembang	Moch. SAlim	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz
23	Kab. Semarang	Mundjirin	Mundjirin	Mundjirin	Mundjirin
24	Kab. Sragen	Agus Fatchur Rahman	Agus Fatchur Rahman	Agus Fatchur Rahman	Agus Fatchur Rahman
25	Kab. Sukoharjo	Wardoyo Wijaya	Wardoyo Wijaya	Wardoyo Wijaya	Agus Santosa
26	Kab. Tegal	Haron Bagas Prokosa	Enthus Susmono	Enthus Susmono	Enthus Susmono
27	Kab. Temanggung	Hasyim Afandi	Bambang Sukarno	Bambang Sukarno	Bambang Sukarno
28	Kab. Wonogiri	Danar Rahmanto	Danar Rahmanto	Danar Rahmanto	Joko Sutopo
29	Kab. Wonosobo	Kholiq Arif	Kholiq Arif	Kholiq Arif	Eko Purnomo
30	Kota Magelang	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito
31	Kota Pekalongan	M. Bashir Achmad	M. Bashir Achmad	M. Bashir Achmad	Achmad Alf Arslan Djunaid
32	Kota Salatiga	Yulianto	Yulianto	Yulianto	Yulianto
33	Kota Semarang	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi
34	Kota Surakarta	FX. Hadi Rudyatmo	FX. Hadi Rudyatmo	FX. Hadi Rudyatmo	Budi Yuliistanto
35	Kota Tegal	Ikmal Jaya	Siti Mashita Soeparno	Siti Mashita Soeparno	Siti Mashita Soeparno

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 - 2023

No.	Kab. / Kota	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Banjarnegara	Budhi Sarwono	Budhi Sarwono	Budhi Sarwono	Budhi Sarwono
2	Kab. Banyumas	Achmad Husen	Wahyu Budi Saptono	Achmad Husen	Achmad Husen
3	Kab. Batang	Siswa Laksono	Wihaji	Wihaji	Wihaji
4	Kab. Blora	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho	Djoko Nugroho
5	Kab. Boyolali	Seno Samodro	Seno Samodro	Seno Samodro	Seno Samodro
6	Kab. Brebes	Idza Priyanti	Idza Priyanti	Idza Priyanti	Idza Priyanti
7	Kab. Cilacap	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji
8	Kab. Demak	Natsir	Natsir	Natsir	Natsir
9	Kab. Grobogan	Sri Sumarni	Sri Sumarni	Sri Sumarni	Sri Sumarni
10	Kab. Jepara	Ahmad Marzuki	Ahmad Marzuki	Dian Kristiandi	Dian Kristiandi
11	Kab. Karanganyar	Juliyatmono	Priyo Anggoro Budhi Raharjo	Juliyatmono	Juliyatmono
12	Kab. Kebumen	Mohamad Yahya Fuad	Yazid Mahfudz	Yazid Mahfudz	Yazid Mahfudz
13	Kab. Kendal	Mirna anisa	Mirna anisa	Mirna anisa	Mirna anisa
14	Kab. Klaten	Sri Mulyani	Sri Mulyani	Sri Mulyani	Sri Mulyani
15	Kab. Kudus	Musthopa	Musthopa	Muhamad Tamzil	Hartopo
16	Kab. Magelang	Zaenal Arifin	Tavip Supriyanto	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin
17	Kab. Pati	Haryanto	Haryanto	Haryanto	Haryanto
18	Kab. Pekalongan	Asip Kholbihi	Asip Kholbihi	Asip Kholbihi	Asip Kholbihi
19	Kab. Pemalang	Junaedi	Junaedi	Junaedi	Junaedi
20	Kab. Purbalingga	Tasdi	Tasdi	Dyah Hayuning Pratiwi	Dyah Hayuning Pratiwi
21	Kab. Purworejo	Agus Bastian	Agus Bastian	Agus Bastian	Agus Bastian
22	Kab. Rembang	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz
23	Kab. Semarang	Mundjirin	Mundjirin	Mundjirin	Mundjirin
24	Kab. Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati
25	Kab. Sukoharjo	Wardoyo Wijaya	Wardoyo Wijaya	Wardoyo Wijaya	Wardoyo Wijaya
26	Kab. Tegal	Enthus Susmono	Sinoeng Noegroho Rachmadi	Umi Azizah	Umi Azizah
27	Kab. Temanggung	Bambang Sukarno	Sudaryanto	Al Khadziq	Al Khadziq
28	Kab. Wonogiri	Joko Sutopo	Joko Sutopo	Joko Sutopo	Joko Sutopo
29	Kab. Wonosobo	Eko Purnomo	Eko Purnomo	Eko Purnomo	Eko Purnomo
30	Kota Magelang	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito	Sigit Widyonindito
31	Kota Pekalongan	Achmad A/f Arslan Djunaid	Saelany Mahfudz	Saelany Mahfudz	Saelany Mahfudz
32	Kota Salatiga	Yulianto	Yulianto	Yulianto	Yulianto
33	Kota Semarang	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi
34	Kota Surakarta	FX. Hadi Rudyatmo	FX. Hadi Rudyatmo	FX. Hadi Rudyatmo	FX. Hadi Rudyatmo
35	Kota Tegal	Siti Mashita Soeparno	Achmad Rofai	Dedi Yon Supriyono	Dedi Yon Supriyono

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 - 2023

No.	Kab. / Kota	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	Budhi Sarwono	Syamsudin	Tri Harso Widirahmanto	Tri Harso Widirahmanto
2	Kab. Banyumas	Achmad Husen	Achmad Husen	Achmad Husen	Hanung Cahyo Saputra
3	Kab. Batang	Wihaji	Wihaji	Lani Dwi Rezeki	Lani Dwi Rezeki
4	Kab. Blora	Arief Rohman	Arief Rohman	Arief Rohman	Arief Rohman
5	Kab. Boyolali	M. Said Hidayat	M. Said Hidayat	M. Said Hidayat	M. Said Hidayat
6	Kab. Brebes	Idza Priyanti	Idza Priyanti	Urip Sihabudin	Iwanudin Iskandar
7	Kab. Cilacap	Tato Suwanto Pamuji	Tato Suwanto Pamuji	Yunita Dyah Suminar	Awaludin muuri
8	Kab. Demak	Natsir	Eistianah	Eistianah	Eistianah
9	Kab. Grobogan	Sri Sumarni	Sri Sumarni	Sri Sumarni	Sri Sumarni
10	Kab. Jepara	Dian Kristiandi	Dian Kristiandi	Edy Supriyanta	Edy Supriyanta
11	Kab. Karanganyar	Juliyatmono	Juliyatmono	Juliyatmono	Juliyatmono
12	Kab. Kebumen	Arif Sugiyanto	Arif Sugiyanto	Arif Sugiyanto	Arif Sugiyanto
13	Kab. Kendal	Dico M. Ganinduto	Dico M. Ganinduto	Dico M. Ganinduto	Dico M. Ganinduto
14	Kab. Klaten	Sri Mulyani	Sri Mulyani	Sri Mulyani	Sri Mulyani
15	Kab. Kudus	Hartopo	Hartopo	Hartopo	Hasan Chabibie
16	Kab. Magelang	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin	Zaenal Arifin
17	Kab. Pati	Haryanto	Haryanto	Henggar Budi Anggoro	Henggar Budi Anggoro
18	Kab. Pekalongan	Asip Kholbihi	Fadia Arafiq	Fadia Arafiq	Fadia Arafiq
19	Kab. Pemalang	Mukti Agung Wibowo	Mukti Agung Wibowo	Mansur Hidayat	Mansur Hidayat
20	Kab. Purbalingga	Dyah Hayuning Pratiwi	Dyah Hayuning Pratiwi	Dyah Hayuning Pratiwi	Dyah Hayuning Pratiwi
21	Kab. Purworejo	Agus Bastian	Agus Bastian	Agus Bastian	Yuli Hastuti
22	Kab. Rembang	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz	Abdul Hafidz
23	Kab. Semarang	Mundjirin	Ngestin Nugraha	Ngestin Nugraha	Ngestin Nugraha
24	Kab. Sragen	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Kusdinar Untung Yuni Sukowati
25	Kab. Sukoharjo	Etik Suryani	Etik Suryani	Etik Suryani	Etik Suryani
26	Kab. Tegal	Umi Azizah	Umi Azizah	Umi Azizah	Agustyarsah
27	Kab. Temanggung	Al Khadziq	Al Khadziq	Al Khadziq	Hary Agung Prabowo
28	Kab. Wonogiri	Joko Sutopo	Joko Sutopo	Joko Sutopo	Joko Sutopo
29	Kab. Wonosobo	Afif Nurhidayat	Afif Nurhidayat	Afif Nurhidayat	Afif Nurhidayat
30	Kota Magelang	M. Nur Aziz	M. Nur Aziz	M. Nur Aziz	M. Nur Aziz
31	Kota Pekalongan	Achmad Afzan Arslan Djunaid	Achmad Afzan Arslan Djunaid	Achmad Afzan Arslan Djunaid	Achmad Afzan Arslan Djunaid
32	Kota Salatiga	Yulianto	Yulianto	Sinoeng N. Rachmadi	Yasip Khasani
33	Kota Semarang	Hendrar Prihardi	Hendrar Prihardi	Hevearita Gunaryanti R.	Hevearita Gunaryanti Rahayu
34	Kota Surakarta	Gibran Rakabuming R	Gibran Rakabuming R.	Gibran Rakabuming R.	Gibran Rakabuming Raka
35	Kota Tegal	Dedi Yon Supriyono	Dedi Yon Supriyono	Dedi Yon Supriyono	Dadang Sumantri

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 - 2023

Lampiran 6 : Variabel predikat yang diukur dengan proksi pemeringkatan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF
2	Kab. Banyumas	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
3	Kab. Batang	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
4	Kab. Blora	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
5	Kab. Boyolali	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
6	Kab. Brebes	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
7	Kab. Cilacap	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF
8	Kab. Demak	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
9	Kab. Grobogan	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF
10	Kab. Jepara	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
11	Kab. Karanganyar	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
12	Kab. Kebumen	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
13	Kab. Kendal	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF
14	Kab. Klaten	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
15	Kab. Kudus	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
16	Kab. Magelang	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
17	Kab. Pati	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
18	Kab. Pekalongan	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
19	Kab. Pemalang	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF
20	Kab. Purbalingga	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF
21	Kab. Purworejo	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
22	Kab. Rembang	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
23	Kab. Semarang	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF
24	Kab. Sragen	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF
25	Kab. Sukoharjo	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
26	Kab. Tegal	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF
27	Kab. Temanggung	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
28	Kab. Wonogiri	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
29	Kab. Wonosobo	KURANG INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
30	Kota Magelang	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
31	Kota Pekalongan	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
32	Kota Salatiga	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF
33	Kota Semarang	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
34	Kota Surakarta	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	MENUJU INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF
35	Kota Tegal	KURANG INFORMATIF	KURANG INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	CUKUP INFORMATIF	INFORMATIF	INFORMATIF

Sumber : Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 7 : Variabel kontrol yang diukur dengan proksi jumlah aset kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Banjarnegara	Rp 4.126.775.235.841	Rp 4.355.751.220.426	Rp 4.409.370.847.873	Rp 4.528.919.724.976
2	Kab. Banyumas	Rp 5.463.777.382.017	Rp 6.419.865.052.454	Rp 6.226.652.415.513	Rp 6.540.515.839.033
3	Kab. Batang	Rp 2.403.414.307.811	Rp 2.511.746.350.766	Rp 2.664.373.528.272	Rp 2.909.762.409.945
4	Kab. Blora	Rp 2.546.335.225.938	Rp 2.916.854.233.299	Rp 3.362.562.896.874	Rp 3.382.901.824.153
5	Kab. Boyolali	Rp 2.613.993.025.494	Rp 3.116.090.963.844	Rp 3.770.144.677.202	Rp 4.227.690.989.735
6	Kab. Brebes	Rp 3.469.695.842.864	Rp 3.366.883.430.103	Rp 4.187.462.596.277	Rp 3.740.761.434.712
7	Kab. Cilacap	Rp 3.873.602.950.205	Rp 4.590.474.285.434	Rp 5.735.055.789.651	Rp 6.047.263.120.680
8	Kab. Demak	Rp 4.927.032.170.221	Rp 5.084.647.496.852	Rp 5.450.473.201.190	Rp 5.697.120.718.057
9	Kab. Grobogan	Rp 2.827.558.507.348	Rp 3.504.789.426.747	Rp 3.642.816.444.595	Rp 3.771.022.502.289
10	Kab. Jepara	Rp 5.886.321.483.841	Rp 6.132.256.105.265	Rp 6.496.679.937.377	Rp 6.626.878.048.525
11	Kab. Karanganyar	Rp 2.916.448.445.711	Rp 3.190.931.038.153	Rp 3.476.942.970.375	Rp 4.422.303.404.842
12	Kab. Kebumen	Rp 4.409.902.555.258	Rp 4.548.688.282.913	Rp 4.482.323.838.554	Rp 4.525.738.172.682
13	Kab. Kendal	Rp 3.015.473.983.605	Rp 3.081.268.497.841	Rp 3.026.908.855.357	Rp 3.130.779.619.645
14	Kab. Klaten	Rp 3.726.733.115.067	Rp 4.001.324.130.418	Rp 4.157.398.988.909	Rp 3.566.777.871.038
15	Kab. Kudus	Rp 4.066.126.399.735	Rp 4.159.213.413.942	Rp 4.468.531.280.045	Rp 4.670.496.301.415
16	Kab. Magelang	Rp 3.019.208.420.038	Rp 3.141.760.777.819	Rp 3.270.629.440.572	Rp 3.429.577.837.888
17	Kab. Pati	Rp 6.006.822.341.818	Rp 6.190.923.149.284	Rp 6.439.754.615.980	Rp 6.254.897.635.666
18	Kab. Pekalongan	Rp 2.469.666.568.415	Rp 2.763.481.985.690	Rp 3.202.680.906.818	Rp 3.066.064.901.783
19	Kab. Pemalang	Rp 3.227.551.323.034	Rp 3.512.512.785.582	Rp 3.786.927.056.411	Rp 3.803.001.551.340
20	Kab. Purbalingga	Rp 2.406.468.280.775	Rp 2.621.915.743.968	Rp 2.846.328.687.093	Rp 2.769.994.111.890
21	Kab. Purworejo	Rp 2.588.956.121.375	Rp 2.772.960.299.931	Rp 2.987.231.520.048	Rp 3.108.457.930.733
22	Kab. Rembang	Rp 1.099.744.280.051	Rp 2.083.375.254.652	Rp 2.143.033.080.690	Rp 2.346.462.043.811
23	Kab. Semarang	Rp 3.112.499.506.160	Rp 4.381.254.462.291	Rp 4.689.787.427.166	Rp 4.888.861.215.817
24	Kab. Sragen	Rp 2.906.083.541.961	Rp 3.374.697.292.758	Rp 3.941.848.384.823	Rp 4.087.577.565.236
25	Kab. Sukoharjo	Rp 4.503.212.327.841	Rp 4.738.164.776.817	Rp 5.194.655.435.895	Rp 5.674.969.287.939
26	Kab. Tegal	Rp 2.991.069.237.987	Rp 3.184.190.479.588	Rp 3.377.567.475.085	Rp 3.604.540.958.067
27	Kab. Temanggung	Rp 2.943.103.837.807	Rp 3.104.748.410.143	Rp 3.240.096.678.946	Rp 3.184.697.915.400
28	Kab. Wonogiri	Rp 3.196.412.799.234	Rp 3.441.897.165.792	Rp 3.740.376.254.031	Rp 3.821.069.295.194
29	Kab. Wonosobo	Rp 2.679.420.928.731	Rp 3.070.057.342.570	Rp 3.390.531.356.578	Rp 3.441.342.186.114
30	Kota Magelang	Rp 3.579.209.901.130	Rp 3.865.401.096.564	Rp 4.012.816.686.651	Rp 4.160.262.610.517
31	Kota Pekalongan	Rp 2.311.166.310.884	Rp 2.483.049.418.730	Rp 2.856.674.222.675	Rp 2.921.917.451.388
32	Kota Salatiga	Rp 3.034.424.879.879	Rp 3.112.709.787.206	Rp 3.072.155.684.617	Rp 3.122.697.428.677
33	Kota Semarang	Rp 30.040.633.000.244	Rp 30.970.860.367.210	Rp 18.159.413.566.476	Rp 21.003.912.081.271
34	Kota Surakarta	Rp 7.469.517.044.610	Rp 7.733.569.021.424	Rp 11.719.105.713.695	Rp 12.135.931.598.222
35	Kota Tegal	Rp 2.264.247.290.378	Rp 2.402.980.382.890	Rp 2.417.612.856.683	Rp 2.396.957.279.062

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 - 2023

No.	Kab. / Kota	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	Rp 4.611.184.734.617	Rp 4.620.882.359.127	Rp 4.565.491.995.150
2	Kab. Banyumas	Rp 7.258.283.031.630	Rp 7.380.298.086.900	Rp 7.486.630.610.804
3	Kab. Batang	Rp 3.035.062.150.560	Rp 3.088.215.436.297	Rp 3.105.376.216.713
4	Kab. Blora	Rp 3.536.211.050.649	Rp 3.707.159.076.206	Rp 3.807.298.612.426
5	Kab. Boyolali	Rp 4.658.596.971.086	Rp 4.866.282.153.877	Rp 4.914.610.084.874
6	Kab. Brebes	Rp 3.838.478.619.191	Rp 4.103.220.770.172	Rp 4.230.169.562.390
7	Kab. Cilacap	Rp 6.345.078.297.174	Rp 6.631.042.215.505	Rp 6.813.019.797.508
8	Kab. Demak	Rp 5.914.642.693.556	Rp 5.873.599.121.167	Rp 5.842.155.025.440
9	Kab. Grobogan	Rp 4.133.213.033.679	Rp 4.641.596.081.023	Rp 5.042.914.302.639
10	Kab. Jepara	Rp 6.674.428.413.015	Rp 6.490.924.797.535	Rp 6.438.172.283.420
11	Kab. Karanganyar	Rp 4.882.484.122.308	Rp 5.707.764.134.619	Rp 5.962.010.180.866
12	Kab. Kebumen	Rp 4.678.346.895.121	Rp 4.628.824.366.869	Rp 4.516.881.288.096
13	Kab. Kendal	Rp 3.626.991.028.095	Rp 3.389.246.354.049	Rp 3.675.547.657.965
14	Kab. Klaten	Rp 3.515.210.592.464	Rp 3.535.972.154.908	Rp 3.450.983.954.998
15	Kab. Kudus	Rp 4.850.177.079.998	Rp 5.006.456.634.422	Rp 5.104.859.636.023
16	Kab. Magelang	Rp 3.597.390.329.880	Rp 3.684.855.922.613	Rp 3.653.512.770.490
17	Kab. Pati	Rp 6.356.447.372.037	Rp 6.328.367.775.226	Rp 6.382.834.051.807
18	Kab. Pekalongan	Rp 3.140.697.646.889	Rp 3.212.211.226.631	Rp 3.358.550.119.754
19	Kab. Pemalang	Rp 3.689.677.659.868	Rp 3.832.086.881.377	Rp 3.895.479.003.211
20	Kab. Purbalingga	Rp 2.857.441.202.743	Rp 2.889.081.522.998	Rp 3.020.059.822.070
21	Kab. Purworejo	Rp 3.303.359.268.868	Rp 3.456.215.083.542	Rp 3.511.948.165.003
22	Kab. Rembang	Rp 2.504.076.268.460	Rp 2.539.964.136.746	Rp 2.655.696.326.443
23	Kab. Semarang	Rp 5.297.004.928.246	Rp 5.333.665.669.487	Rp 5.408.709.834.174
24	Kab. Sragen	Rp 4.223.594.001.345	Rp 4.246.346.568.875	Rp 4.295.087.502.679
25	Kab. Sukoharjo	Rp 6.298.329.078.067	Rp 6.484.478.238.480	Rp 6.549.624.502.677
26	Kab. Tegal	Rp 3.840.424.064.103	Rp 3.856.466.506.432	Rp 3.819.874.170.627
27	Kab. Temanggung	Rp 3.420.435.895.675	Rp 3.306.613.896.620	Rp 3.297.393.172.371
28	Kab. Wonogiri	Rp 3.911.948.544.252	Rp 3.963.260.732.900	Rp 4.101.411.948.020
29	Kab. Wonosobo	Rp 3.761.876.565.856	Rp 3.870.278.837.497	Rp 3.990.751.001.423
30	Kota Magelang	Rp 4.337.393.562.511	Rp 4.267.505.926.782	Rp 4.250.624.434.660
31	Kota Pekalongan	Rp 3.048.941.837.081	Rp 3.274.386.243.680	Rp 3.468.968.239.031
32	Kota Salatiga	Rp 3.200.391.773.224	Rp 3.210.215.244.988	Rp 3.214.917.638.599
33	Kota Semarang	Rp 21.533.658.423.315	Rp 22.467.914.755.459	Rp 24.079.680.340.351
34	Kota Surakarta	Rp 12.714.848.249.292	Rp 13.346.911.193.230	Rp 13.753.676.415.834
35	Kota Tegal	Rp 2.453.865.023.297	Rp 2.536.886.700.325	Rp 2.488.786.903.489

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2011 – 2023

Lampiran 8 : Variabel kontrol yang diukur dengan proksi kepadatan penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kab / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	853	858	902	994	1003	971	984
2	Kab. Banyumas	1254	1265	1268	1331	1340	1360	1377
3	Kab. Batang	958	966	975	1017	1023	1031	967
4	Kab. Blora	479	480	479	490	491	495	461
5	Kab. Boyolali	960	965	977	1054	1061	1064	1008
6	Kab. Brebes	1083	1088	951	1040	1047	1213	1154
7	Kab. Cilacap	800	804	813	915	924	930	893
8	Kab. Demak	1271	1283	1292	1338	1347	1363	1382
9	Kab. Grobogan	691	694	684	722	725	744	756
10	Kab. Jepara	1218	1235	1188	1119	1122	1188	1216
11	Kab. Karanganyar	1129	1138	1143	1202	1211	1227	1244
12	Kab. Kebumen	929	932	989	1114	1124	1073	1048
13	Kab. Kendal	955	962	868	911	917	1031	1050
14	Kab. Klaten	1781	1787	1785	1915	1925	1946	1834
15	Kab. Kudus	2003	2026	2049	1997	2005	2014	2057
16	Kab. Magelang	1168	1179	1170	1179	1184	1209	1226
17	Kab. Pati	836	840	846	889	894	898	864
18	Kab. Pekalongan	1060	1067	1073	1157	1167	1180	1205
19	Kab. Pemalang	1281	1284	1165	1316	1328	1483	1366
20	Kab. Purbalingga	1178	1190	1378	1474	1487	1311	1321
21	Kab. Purworejo	691	692	658	705	709	752	762
22	Kab. Rembang	620	625	719	727	730	642	636
23	Kab. Semarang	1085	1099	1109	1108	1115	1128	1137
24	Kab. Sragen	935	938	946	1038	1045	1048	1003
25	Kab. Sukoharjo	1882	1897	1824	1856	1864	1964	1999
26	Kab. Tegal	1630	1634	1644	1823	1836	1846	1682
27	Kab. Temanggung	872	880	922	943	948	919	929
28	Kab. Wonogiri	524	525	535	582	585	580	586
29	Kab. Wonosobo	796	800	805	896	903	910	924
30	Kota Magelang	6704	6726	7603	7567	7572	6715	6585
31	Kota Pekalongan	6714	6772	6787	6788	6813	6889	7017
32	Kota Salatiga	3567	3617	3384	3353	3374	3683	3618
33	Kota Semarang	4704	4780	4853	4424	4432	4442	4534
34	Kota Surakarta	11722	11762	11293	11353	11361	11878	11258
35	Kota Tegal	7193	7220	6298	6901	6950	8069	7123

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 9 : Data pertumbuhan penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah untuk uji kekokoham estimasi model regresi (*Robustness Check*)

No.	Kab. / Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Banjarnegara	0.61	0.58	0.66	1.54	1.19	1.17	1.06
2	Kab. Banyumas	0.89	0.85	0.96	1.3	0.95	0.93	1.07
3	Kab. Batang	0.87	0.83	0.94	1.23	0.88	0.86	1.22
4	Kab. Blora	0.40	0.38	0.44	0.62	0.27	0.25	0.76
5	Kab. Boyolali	0.56	0.54	0.61	1.29	0.95	0.92	0.95
6	Kab. Brebes	0.41	0.38	0.45	1.29	0.94	0.92	1.18
7	Kab. Cilacap	0.50	0.46	0.54	1.65	1.3	1.28	1.04
8	Kab. Demak	1.01	0.97	1.1	1.28	0.93	0.91	1.09
9	Kab. Grobogan	0.51	0.47	0.55	1.02	0.67	0.65	0.98
10	Kab. Jepara	1.46	1.42	1.6	0.75	0.4	0.38	1.04
11	Kab. Karanganyar	0.90	0.86	0.97	1.33	0.98	0.96	0.77
12	Kab. Kebumen	0.30	0.26	0.33	1.48	1.13	1.11	1.28
13	Kab. Kendal	0.78	0.74	0.84	1.2	0.85	0.83	1.22
14	Kab. Klaten	0.37	0.34	0.41	1.06	0.72	0.69	0.71
15	Kab. Kudus	1.21	1.17	1.31	0.86	0.51	0.49	1.08
16	Kab. Magelang	0.92	0.89	0.99	0.93	0.58	0.56	0.87
17	Kab. Pati	0.56	0.53	0.61	1.03	0.68	0.66	0.91
18	Kab. Pekalongan	0.70	0.64	0.75	1.41	1.06	1.04	1.23
19	Kab. Pemasang	0.30	0.27	0.33	1.5	1.15	1.13	1.27
20	Kab. Purbalingga	1.00	0.96	1.08	1.58	1.23	1.21	1.06
21	Kab. Purworejo	0.29	0.27	0.33	0.99	0.64	0.62	0.9
22	Kab. Rembang	0.78	0.74	0.85	0.85	0.5	0.48	0.85
23	Kab. Semarang	1.32	1.28	1.44	1.2	0.86	0.83	0.91
24	Kab. Sragen	0.35	0.31	0.39	1.26	0.91	0.89	0.78
25	Kab. Sukoharjo	0.82	0.78	0.88	0.94	0.59	0.57	1.02
26	Kab. Tegal	0.30	0.26	0.33	1.32	0.97	0.95	1.3
27	Kab. Temanggung	0.89	0.85	0.96	1.06	0.71	0.69	0.86
28	Kab. Wonogiri	0.30	0.25	0.33	1.13	0.78	0.76	0.31
29	Kab. Wonosobo	0.45	0.41	0.49	1.49	1.14	1.11	1.27
30	Kota Magelang	0.28	0.33	0.33	0.27	0.09	0.07	0.25
31	Kota Pekalongan	0.92	0.86	0.98	0.85	0.5	0.48	1.21
32	Kota Salatiga	1.38	1.4	1.52	1.18	0.83	0.81	1.25
33	Kota Semarang	1.65	1.62	1.81	0.59	0.25	0.22	0.9
34	Kota Surakarta	0.38	0.35	0.42	0.44	0.09	0.07	0.28
35	Kota Tegal	0.40	0.37	0.44	1.3	0.95	0.93	1.17

Sumber : Badan Pusat Statistik

Lampiran 10 : Elemen IPM (Data untuk uji tambahan)

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2017	2017	2017	2017
1	Kab. Banjarnegara	74.50	11.87	6.61	Rp 8.805
2	Kab. Banyumas	73.79	11.41	6.27	Rp 8.630
3	Kab. Batang	73.33	12.63	7.40	Rp 10.713
4	Kab. Blora	73.99	12.13	6.45	Rp 9.065
5	Kab. Boyolali	75.72	12.15	7.44	Rp 12.262
6	Kab. Brebes	68.61	11.69	6.18	Rp 9.554
7	Kab. Cilacap	73.24	12.30	6.91	Rp 9.896
8	Kab. Demak	75.27	12.54	7.47	Rp 9.544
9	Kab. Grobogan	74.46	12.27	6.66	Rp 9.716
10	Kab. Jepara	75.68	12.70	7.33	Rp 9.745
11	Kab. Karanganyar	77.31	13.65	8.50	Rp 10.933
12	Kab. Kebumen	72.98	12.90	7.29	Rp 8.446
13	Kab. Kendal	74.24	12.69	6.85	Rp 10.863
14	Kab. Klaten	76.62	12.97	8.23	Rp 11.369
15	Kab. Kudus	76.44	13.20	8.31	Rp 10.639
16	Kab. Magelang	73.39	12.47	7.41	Rp 8.627
17	Kab. Pati	75.80	12.29	7.08	Rp 9.813
18	Kab. Pekalongan	73.46	12.16	6.73	Rp 9.702
19	Kab. Pemalang	72.98	11.88	6.31	Rp 7.785
20	Kab. Purbalingga	72.91	11.94	6.87	Rp 9.340
21	Kab. Purworejo	74.26	13.47	7.69	Rp 9.601
22	Kab. Rembang	74.32	12.04	6.94	Rp 9.736
23	Kab. Semarang	75.57	12.84	7.87	Rp 11.389
24	Kab. Sragen	75.55	12.64	7.04	Rp 12.041
25	Kab. Sukoharjo	77.49	13.80	8.71	Rp 10.765
26	Kab. Tegal	71.14	12.06	6.55	Rp 9.136
27	Kab. Temanggung	75.42	12.07	6.90	Rp 8.794
28	Kab. Wonogiri	76.00	12.44	6.68	Rp 8.765
29	Kab. Wonosobo	71.30	11.68	6.51	Rp 9.969
30	Kota Magelang	76.66	13.79	10.30	Rp 11.525
31	Kota Pekalongan	74.19	12.78	8.56	Rp 11.800
32	Kota Salatiga	76.98	14.99	10.15	Rp 14.921
33	Kota Semarang	77.21	15.20	10.50	Rp 14.334
34	Kota Surakarta	77.06	14.51	10.38	Rp 13.986
35	Kota Tegal	74.23	12.89	8.29	Rp 12.283

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2018	2018	2018	2018
1	Kab. Banjarnegara	73.91	11.42	6.28	Rp 9.160
2	Kab. Banyumas	73.45	12.64	7.41	Rp 11.240
3	Kab. Batang	74.56	11.88	6.62	Rp 9.203
4	Kab. Blora	74.12	12.14	6.46	Rp 9.385
5	Kab. Boyolali	75.79	12.16	7.55	Rp 12.758
6	Kab. Brebes	68.84	12.02	6.19	Rp 9.890
7	Kab. Cilacap	73.39	12.48	6.92	Rp 10.274
8	Kab. Demak	75.29	12.86	7.48	Rp 10.001
9	Kab. Grobogan	74.55	12.28	6.67	Rp 10.097
10	Kab. Jepara	75.71	12.71	7.43	Rp 10.169
11	Kab. Karanganyar	77.36	13.66	8.51	Rp 11.223
12	Kab. Kebumen	73.11	12.91	7.34	Rp 8.757
13	Kab. Kendal	74.3	12.7	7.05	Rp 11.257
14	Kab. Klaten	76.67	13.13	8.24	Rp 11.738
15	Kab. Kudus	76.47	13.21	8.62	Rp 10.979
16	Kab. Magelang	73.47	12.48	7.57	Rp 9.025
17	Kab. Pati	75.93	12.3	7.18	Rp 10.190
18	Kab. Pekalongan	73.53	12.17	6.74	Rp 10.221
19	Kab. Pemasang	73.11	11.91	6.32	Rp 8.186
20	Kab. Purbalingga	72.98	11.95	7.00	Rp 9.786
21	Kab. Purworejo	74.4	13.48	7.70	Rp 10.048
22	Kab. Rembang	74.39	12.05	6.95	Rp 10.191
23	Kab. Semarang	75.62	12.85	7.88	Rp 11.807
24	Kab. Sragen	75.6	12.65	7.22	Rp 12.391
25	Kab. Sukoharjo	77.54	13.81	8.84	Rp 11.100
26	Kab. Tegal	71.28	12.34	6.7	Rp 9.433
27	Kab. Temanggung	75.47	12.08	6.94	Rp 9.142
28	Kab. Wonogiri	76.05	12.45	6.88	Rp 9.117
29	Kab. Wonosobo	71.46	11.69	6.75	Rp 10.503
30	Kota Magelang	76.72	13.8	10.31	Rp 11.994
31	Kota Pekalongan	74.25	12.79	8.57	Rp 12.312
32	Kota Salatiga	77.11	15.00	10.4	Rp 15.464
33	Kota Semarang	77.23	15.5	10.51	Rp 14.895
34	Kota Surakarta	77.11	14.52	10.53	Rp 14.528
35	Kota Tegal	74.3	12.9	8.3	Rp 12.830

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)	
		2019	2019	2019	2019	
1	Kab. Banjarnegara	74.01	11.45	6.50	Rp	9.547
2	Kab. Banyumas	73.55	12.82	7.42	Rp	11.703
3	Kab. Batang	74.59	12.00	6.63	Rp	9.573
4	Kab. Blora	74.23	12.19	6.58	Rp	9.795
5	Kab. Boyolali	75.83	12.43	7.56	Rp	13.079
6	Kab. Brebes	69.04	12.03	6.20	Rp	10.238
7	Kab. Cilacap	73.52	12.49	6.93	Rp	10.639
8	Kab. Demak	75.31	13.01	7.55	Rp	10.344
9	Kab. Grobogan	74.61	12.29	6.86	Rp	10.350
10	Kab. Jepara	75.74	12.74	7.44	Rp	10.609
11	Kab. Karanganyar	77.38	13.67	8.52	Rp	11.569
12	Kab. Kebumen	73.22	13.04	7.53	Rp	9.066
13	Kab. Kendal	74.33	12.80	7.25	Rp	11.597
14	Kab. Klaten	76.68	13.24	8.31	Rp	12.074
15	Kab. Kudus	76.50	13.22	8.63	Rp	11.318
16	Kab. Magelang	73.56	12.53	7.77	Rp	9.387
17	Kab. Pati	76.04	12.41	7.19	Rp	10.660
18	Kab. Pekalongan	73.57	12.40	6.88	Rp	10.508
19	Kab. Pemasang	73.22	11.94	6.41	Rp	8.546
20	Kab. Purbalingga	73.02	11.98	7.14	Rp	10.131
21	Kab. Purworejo	74.52	13.49	7.91	Rp	10.342
22	Kab. Rembang	74.43	12.10	7.15	Rp	10.551
23	Kab. Semarang	75.63	12.94	8.01	Rp	12.116
24	Kab. Sragen	75.62	12.69	7.34	Rp	12.720
25	Kab. Sukoharjo	77.55	13.82	9.10	Rp	11.557
26	Kab. Tegal	71.40	12.58	6.86	Rp	9.798
27	Kab. Temanggung	75.48	12.13	7.15	Rp	9.489
28	Kab. Wonogiri	76.07	12.48	7.04	Rp	9.426
29	Kab. Wonosobo	71.60	11.74	6.76	Rp	10.871
30	Kota Magelang	76.75	13.81	10.33	Rp	12.514
31	Kota Pekalongan	74.28	12.83	8.71	Rp	12.680
32	Kota Salatiga	77.22	15.34	10.41	Rp	15.944
33	Kota Semarang	77.25	15.51	10.52	Rp	15.550
34	Kota Surakarta	77.12	14.55	10.54	Rp	15.049
35	Kota Tegal	74.34	13.04	8.31	Rp	13.250

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2020	2020	2020	2020
1	Kab. Banjarnegara	74.18	11.46	6.74	Rp 9.263
2	Kab. Banyumas	73.72	12.85	7.52	Rp 11.448
3	Kab. Batang	74.69	12.01	6.87	Rp 9.431
4	Kab. Blora	74.41	12.20	6.83	Rp 9.571
5	Kab. Boyolali	75.95	12.56	7.84	Rp 12.910
6	Kab. Brebes	69.33	12.04	6.21	Rp 10.058
7	Kab. Cilacap	73.73	12.50	6.97	Rp 10.440
8	Kab. Demak	75.40	13.31	7.71	Rp 10.128
9	Kab. Grobogan	74.75	12.30	6.91	Rp 10.221
10	Kab. Jepara	75.84	12.75	7.68	Rp 10.343
11	Kab. Karanganyar	77.47	13.68	8.56	Rp 11.428
12	Kab. Kebumen	73.40	13.34	7.54	Rp 8.901
13	Kab. Kendal	74.43	12.95	7.45	Rp 11.425
14	Kab. Klaten	76.78	13.25	8.58	Rp 11.921
15	Kab. Kudus	76.60	13.23	8.75	Rp 11.160
16	Kab. Magelang	73.72	12.54	7.78	Rp 9.301
17	Kab. Pati	76.22	12.65	7.44	Rp 10.390
18	Kab. Pekalongan	73.69	12.41	6.91	Rp 10.312
19	Kab. Pemasang	73.40	11.95	6.42	Rp 8.461
20	Kab. Purbalingga	73.14	11.99	7.24	Rp 9.914
21	Kab. Purworejo	74.72	13.50	8.12	Rp 10.163
22	Kab. Rembang	74.55	12.11	7.16	Rp 10.328
23	Kab. Semarang	75.73	12.97	8.02	Rp 11.966
24	Kab. Sragen	75.71	12.83	7.65	Rp 12.589
25	Kab. Sukoharjo	77.65	13.83	9.34	Rp 11.325
26	Kab. Tegal	71.60	12.67	6.98	Rp 9.612
27	Kab. Temanggung	75.58	12.14	7.24	Rp 9.343
28	Kab. Wonogiri	76.16	12.49	7.33	Rp 9.286
29	Kab. Wonosobo	71.82	11.75	6.81	Rp 10.621
30	Kota Magelang	76.85	14.14	10.39	Rp 12.210
31	Kota Pekalongan	74.38	12.84	8.96	Rp 12.467
32	Kota Salatiga	77.40	15.41	10.42	Rp 15.699
33	Kota Semarang	77.34	15.52	10.53	Rp 15.243
34	Kota Surakarta	77.22	14.87	10.69	Rp 14.761
35	Kota Tegal	74.46	13.05	8.51	Rp 12.999

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2021	2021	2021	2021
1	Kab. Banjarnegara	74.28	11.63	6.75	Rp 9.407
2	Kab. Banyumas	73.80	13.03	7.63	Rp 11.546
3	Kab. Batang	74.74	12.13	6.88	Rp 9.524
4	Kab. Blora	74.51	12.35	6.99	Rp 9.669
5	Kab. Boyolali	76.03	12.57	7.85	Rp 13.031
6	Kab. Brebes	69.54	12.05	6.22	Rp 10.152
7	Kab. Cilacap	73.90	12.63	7.09	Rp 10.534
8	Kab. Demak	75.46	13.32	7.86	Rp 10.248
9	Kab. Grobogan	74.84	12.44	7.11	Rp 10.294
10	Kab. Jepara	75.91	12.76	7.79	Rp 10.536
11	Kab. Karanganyar	77.55	13.69	8.57	Rp 11.509
12	Kab. Kebumen	73.55	13.35	7.55	Rp 9.028
13	Kab. Kendal	74.48	12.96	7.46	Rp 11.608
14	Kab. Klaten	76.86	13.39	8.81	Rp 12.017
15	Kab. Kudus	76.68	13.24	8.76	Rp 11.272
16	Kab. Magelang	73.88	12.55	7.79	Rp 9.440
17	Kab. Pati	76.27	12.94	7.48	Rp 10.506
18	Kab. Pekalongan	73.74	12.42	7.17	Rp 10.409
19	Kab. Pemalang	73.53	11.96	6.45	Rp 8.573
20	Kab. Purbalingga	73.21	12.00	7.25	Rp 10.032
21	Kab. Purworejo	74.87	13.51	8.21	Rp 10.275
22	Kab. Rembang	74.61	12.12	7.30	Rp 10.519
23	Kab. Semarang	75.79	12.98	8.03	Rp 12.070
24	Kab. Sragen	75.79	12.84	7.66	Rp 12.679
25	Kab. Sukoharjo	77.73	13.84	9.35	Rp 11.428
26	Kab. Tegal	71.72	12.89	6.99	Rp 9.700
27	Kab. Temanggung	75.64	12.32	7.25	Rp 9.408
28	Kab. Wonogiri	76.28	12.50	7.34	Rp 9.429
29	Kab. Wonosobo	71.94	11.76	6.82	Rp 10.760
30	Kota Magelang	76.93	14.15	10.62	Rp 12.349
31	Kota Pekalongan	74.44	12.85	9.18	Rp 12.598
32	Kota Salatiga	77.55	15.42	10.66	Rp 15.843
33	Kota Semarang	77.51	15.53	10.78	Rp 15.425
34	Kota Surakarta	77.32	14.88	10.90	Rp 14.911
35	Kota Tegal	74.54	13.07	8.73	Rp 13.143

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2022	2022	2022	2022
1	Kab. Banjarnegara	74.37	11.81	6.84	Rp 9.776
2	Kab. Banyumas	73.88	13.21	7.78	Rp 11.905
3	Kab. Batang	74.79	12.14	6.90	Rp 9.972
4	Kab. Blora	74.60	12.44	7.01	Rp 10.067
5	Kab. Boyolali	76.12	12.62	8.08	Rp 13.250
6	Kab. Brebes	69.74	12.15	6.35	Rp 10.514
7	Kab. Cilacap	74.07	12.66	7.18	Rp 10.904
8	Kab. Demak	75.52	13.33	8.10	Rp 10.698
9	Kab. Grobogan	74.93	12.45	7.26	Rp 10.610
10	Kab. Jepara	75.97	12.77	8.09	Rp 10.913
11	Kab. Karanganyar	77.64	13.70	8.79	Rp 11.798
12	Kab. Kebumen	73.70	13.36	7.85	Rp 9.282
13	Kab. Kendal	74.53	12.97	7.71	Rp 11.999
14	Kab. Klaten	76.95	13.40	9.09	Rp 12.522
15	Kab. Kudus	76.76	13.25	9.06	Rp 11.609
16	Kab. Magelang	74.03	12.58	7.81	Rp 10.011
17	Kab. Pati	76.32	12.95	7.79	Rp 10.948
18	Kab. Pekalongan	73.80	12.43	7.46	Rp 10.707
19	Kab. Pemalang	73.65	11.98	6.50	Rp 8.994
20	Kab. Purbalingga	73.28	12.01	7.33	Rp 10.277
21	Kab. Purworejo	75.03	13.52	8.32	Rp 10.671
22	Kab. Rembang	74.68	12.13	7.41	Rp 10.937
23	Kab. Semarang	75.86	13.04	8.05	Rp 12.448
24	Kab. Sragen	75.87	12.91	7.79	Rp 13.052
25	Kab. Sukoharjo	77.82	13.90	9.62	Rp 11.841
26	Kab. Tegal	71.85	12.91	7.25	Rp 10.020
27	Kab. Temanggung	75.70	12.55	7.41	Rp 9.773
28	Kab. Wonogiri	76.41	12.51	7.42	Rp 9.780
29	Kab. Wonosobo	72.05	11.78	6.88	Rp 11.108
30	Kota Magelang	77.02	14.31	10.94	Rp 12.816
31	Kota Pekalongan	74.51	12.86	9.20	Rp 13.158
32	Kota Salatiga	77.72	15.43	10.95	Rp 16.351
33	Kota Semarang	77.69	15.54	10.80	Rp 16.047
34	Kota Surakarta	77.43	14.89	10.92	Rp 15.463
35	Kota Tegal	74.64	13.08	9.00	Rp 13.455

No.	Kab. / Kota	Usia Harapan Hidup saat Lahir (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
		2023	2023	2023	2023
1	Kab. Banjarnegara	74.47	11.82	6.86	Rp 10.226
2	Kab. Banyumas	73.98	13.26	7.87	Rp 12.492
3	Kab. Batang	74.85	12.15	7.07	Rp 10.470
4	Kab. Blora	74.71	12.51	7.08	Rp 10.541
5	Kab. Boyolali	76.23	12.66	8.09	Rp 13.716
6	Kab. Brebes	69.96	12.44	6.40	Rp 10.993
7	Kab. Cilacap	74.25	12.67	7.39	Rp 11.432
8	Kab. Demak	75.60	13.34	8.27	Rp 11.166
9	Kab. Grobogan	75.04	12.46	7.28	Rp 11.083
10	Kab. Jepara	76.04	12.85	8.26	Rp 11.306
11	Kab. Karanganyar	77.72	13.71	9.02	Rp 12.260
12	Kab. Kebumen	73.83	13.37	7.86	Rp 9.734
13	Kab. Kendal	74.58	12.99	7.73	Rp 12.755
14	Kab. Klaten	77.07	13.41	9.27	Rp 12.968
15	Kab. Kudus	76.86	13.26	9.34	Rp 12.088
16	Kab. Magelang	74.20	12.61	7.82	Rp 10.493
17	Kab. Pati	76.39	12.96	7.80	Rp 11.385
18	Kab. Pekalongan	73.87	12.44	7.47	Rp 11.297
19	Kab. Pemasang	73.85	12.01	6.55	Rp 9.587
20	Kab. Purbalingga	73.37	12.02	7.34	Rp 10.964
21	Kab. Purworejo	75.21	13.53	8.46	Rp 11.110
22	Kab. Rembang	74.77	12.15	7.72	Rp 11.399
23	Kab. Semarang	75.95	13.05	8.07	Rp 12.943
24	Kab. Sragen	75.97	12.92	7.87	Rp 13.439
25	Kab. Sukoharjo	77.86	13.91	9.84	Rp 12.319
26	Kab. Tegal	72.00	12.92	7.34	Rp 10.537
27	Kab. Temanggung	75.77	12.61	7.50	Rp 10.108
28	Kab. Wonogiri	76.56	12.52	7.67	Rp 10.283
29	Kab. Wonosobo	72.17	11.80	6.89	Rp 11.577
30	Kota Magelang	77.22	14.40	11.20	Rp 13.175
31	Kota Pekalongan	74.60	12.87	9.29	Rp 14.056
32	Kota Salatiga	77.93	15.44	11.24	Rp 16.650
33	Kota Semarang	77.90	15.55	10.81	Rp 16.420
34	Kota Surakarta	77.63	14.90	11.00	Rp 15.870
35	Kota Tegal	74.77	13.18	9.24	Rp 14.013